



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 - 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019**



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2023.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan pada RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kerugian terhadap Daerah dan/atau nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2023-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-135/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 - 2023

I. UMUM

Pada hakekatnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan kurun waktu lima tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat beberapa hal yaitu: (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah,

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar. Khusus penyusunan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan pada tahun 2018, dikarenakan belum disusunnya RPJMD tahun 2018 – 2023, maka penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN. Selanjutnya RKPD harus disesuaikan RPJMD apabila RPJMD telah diundangkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada Pasal 268 sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 Pasal 273 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud merugikan kepentingan daerah dan nasional apabila dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 104

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 -2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Peyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN.....	I-5
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	I-6
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025	I-6
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW	I-7
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD	I-7
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).....	I-7
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan RPJM Desa	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	II-1
2.1.2. Topografi	II-2
2.1.3. Hidrologi	II-3
2.1.4. Klimatologi	II-3
2.1.5. Penggunaan Lahan.....	II-5
2.1.6. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah	II-7
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-10
2.1.9. Kondisi Demografi	II-13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-14
2.2.2. PDRB.....	II-15
2.2.3. Inflasi.....	II-18
2.2.4. PDRB Perkapita.....	II-19
2.2.5. Indeks Gini.....	II-19
2.2.6. Penduduk Miskin	II-20
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia	II-22
2.2.8. Angka Kematian Ibu (AKI)	II-26

2.2.9. Angka Kematian Bayi (AKB)	II-26
2.2.10. Angka Kematian Neonatal (AKN).....	II-27
2.2.11. Angka Kematian Balita (AKABA).....	II-27
2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Buruk.....	II-28
2.2.13. Penyakit Menular	II-28
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.3.11. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-29
2.3.12. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-41
2.3.13. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-63
2.3.14. Fokus Layanan Fungsi Penunjang.....	II-68
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-73
2.4.11. Institusi.....	II-73
2.4.12. Kondisi Makroekonomi.....	II-73
2.4.13. Infrastruktur	II-74
2.4.14. Sumber Daya Manusia	II-74
2.4.15. Keamanan dan Kemudahan Berinvestasi.....	II-74

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2. Neraca Daerah	III-19
3.2. Analisis Keuangan Daerah	III-24
3.2.1. Analisis Fiskal.....	III-24
3.2.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas)	III-27
3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu.....	III-29
3.3.1. Proposi Penggunaan Anggaran	III-30
3.3.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-31
3.4. Kerangka Pendanaan.....	III-33
3.4.1. Proyeksi Pendapatan	III-33
3.4.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah	III-35
3.4.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-37
3.4.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-39

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Strategis	IV-1
4.1.1. Tantangan <i>Sustainable Development Goals</i> dan Perubahan Iklim.....	IV-1
4.1.2. Tantangan Kemajuan Teknologi dan Revolusi 4.0	IV-3

4.1.3. Tantangan Globalisasi (Keterbukaan wilayah global)	IV-4
4.1.4. Tantangan Nasional Bonus Demografi.....	IV-5
4.1.5. Mandat Isu Strategis dari RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lingkungan Strategis Nasional	IV-6
4.2. Permasalahan Pembangunan	IV-7
4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-8
4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ..	IV-11
4.2.3. Urusan Pilihan	IV-15
4.2.4. Urusan Penunjang	IV-17
4.3. Isu Strategis Daerah.....	IV-18
4.3.1. Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai.	IV-21
4.3.2. Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran.....	IV-21
4.3.3. Masih Rendahnya Kualitas SDM.....	IV-23
4.3.4. Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa	IV-24
4.3.5. Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi.	IV-24

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... V-1

5.1. Visi.....	V-1
5.1.1. Implikasi visi daerah bagi pembangunan berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	V-3
5.2. Misi	V-4
5.2.1. Penjelasan Misi	V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-5

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH..... VI-1

6.1. Strategi.....	VI-1
6.1.1. Peningkatan konektivitas	VI-2
6.1.2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	VI-2
6.1.3. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana.....	VI-2
6.1.4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	VI-2
6.1.5. Peningkatan produktivitas sektor akomodasi dan makan minum	VI-3
6.1.6. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan.....	VI-3
6.1.7. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan. VI-3	

6.1.8. Peningkatan nilai investasi daerah	VI-3
6.1.9. Pengurangan jumlah pengangguran	VI-3
6.1.10. Peningkatan kualitas pendidikan	VI-4
6.1.11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	VI-4
6.1.12. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa	VI-4
6.1.13. Peningkatan kualitas keagamaan dalam Keberagaman	VI-5
6.1.14. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.....	VI-5
6.1.15. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	VI-5
6.1.16. Peningkatan kesejahteraan sosial.....	VI-5
6.1.17. Peningkatan kualitas pembangunan <i>gender</i> , dan perlindungan anak	VI-5
6.1.18. Peningkatan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.....	VI-5
6.2. Arah Kebijakan.....	VI-5
6.2.1. Tema dan Fokus Tahunan	VI-12
6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-22
6.3.1. Program Daerah	VI-22
6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Spasial)	VI-40
6.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Karanganyar Sesuai dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah.....	VI-40

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH	VII-1
-------------------------------	--------------

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH.....	VIII-1
--------------------	---------------

BAB IX PENUTUP	IX-1
-----------------------------	-------------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Prioritas Pembangunan RPJMN dan RPJMD.....	I-5
Tabel I.2	Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kab. Karanganyar	I-6
Tabel I.3	Prioritas Pembangunan RPJPD Kab. Karanganyar dan RPJMD Kab. Karanganyar	I-6
Tabel II.1.	Pembagian wilayah Adminsitrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	II-1
Tabel II.2.	Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganya	II-2
Tabel II.3.	Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)	II-3
Tabel II.4.	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar	II-4
Tabel II.5.	Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-5
Tabel II.6.	Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Tahun 2017 per Kecamatan	II-6
Tabel II.7.	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar.....	II-11
Tabel II.8.	Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan.....	II-12
Tabel II.9.	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	II-13
Tabel II.10.	Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kelompok Usia Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-14
Tabel II.11.	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2013-2017.....	II-15
Tabel II.12.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-16
Tabel II.13.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar	II-16
Tabel II.14.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar	II-17
Tabel II.15.	Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB.....	II-18
Tabel II.16.	PDRB Perkapita Tahun 2013-2017.....	II-19
Tabel II.17.	Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.....	II-21
Tabel II.18.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.....	II-22
Tabel II.19.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.	II-26

Tabel II.20.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	II-27
Tabel II.21.	AKN per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	II-27
Tabel II.22.	Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.	II-28
Tabel II.23.	Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017	II-28
Tabel II.24.	Kondisi Penyakit Menular Tahun 2013-2017.....	II-28
Tabel II.25.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017	II-30
Tabel II.26.	Angka Partisipasi Murni (APM)	II-30
Tabel II.27.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017.....	II-31
Tabel II.28.	Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-31
Tabel II.29.	Fasilitas Kesehatan Tahun 2014-2017	II-32
Tabel II.30.	Tenaga Medis Tahun 2014-2017	II-32
Tabel II.31.	Kondisi Penyakit Menular Tahun 2014-2017.....	II-33
Tabel II.32.	Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2013-2017	II-34
Tabel II.33.	Cakupan Layanan Irigasi Tahun 2013-2017.....	II-35
Tabel II.34.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2013-2017	II-36
Tabel II.35.	Cakupan Pelayanan Sanitasi Tahun 2013-2017.....	II-36
Tabel II.36.	Cakupan Pelayanan Drainase Tahun 2013-2017.....	II-37
Tabel II.37.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015-2018	II-37
Tabel II.38.	Sumber Dana Rumah Penanganan Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015-2018.....	II-38
Tabel II.39.	Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi	II-38
Tabel II.40.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	II-39
Tabel II.41.	Jumlah Anggota Linmas dan Jumlah Pos Siskamling di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2017.....	II-39
Tabel II.42.	Jumlah lembaga kemasyarakatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-39
Tabel II.43.	Penghuni Panti Asuhan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-40
Tabel II.44.	Penghuni Panti Asuhan 2013-2017	II-40
Tabel II.45.	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-41
Tabel II.46.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-41
Tabel II.47.	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-41

Tabel II.48.	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-42
Tabel II.49.	Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017	II-42
Tabel II.50.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017	II-42
Tabel II.51.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-43
Tabel II.52.	Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-43
Tabel II.53.	Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-44
Tabel II.54.	Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-44
Tabel II.55.	Data Kondisi Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-45
Tabel II.56.	Perhitungan Daya Dukung Pangan Beras Tahun 2013 – 2017	II-46
Tabel II.57.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2017.....	II-46
Tabel II.58.	Pengelolaan Tanah Tahun 2013-2017	II-47
Tabel II.59.	Perkembangan Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2013 – 2017	II-50
Tabel II.60.	Produksi Sampah dan Layanan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-51
Tabel II.61.	Lokasi TPS, Jumlah TPS dan Volume Sampah Tahun 2017	II-51
Tabel II.62.	Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-52
Tabel II.63.	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-52
Tabel II.64.	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-52
Tabel II.65.	Perkembangan Keberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-53
Tabel II.66.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Tahun 2013-2017.....	II-54
Tabel II.67.	Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 ..	II-55
Tabel II.68.	Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-55
Tabel II.69.	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan kecelakaan yang terjadi di Tahun 2013-2017	II-55
Tabel II.70.	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Yang Diuji Tahun 2013-2017.....	II-56

Tabel II.71.	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-56
Tabel II.72.	Data Perlintasan Sebidang Jalan Raya Dengan Rel Kereta Api Di Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017	II-56
Tabel II.73.	Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-57
Tabel II.74.	Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-57
Tabel II.75.	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun 2013-2017.....	II-58
Tabel II.76.	Perkembangan Kepemudaan Tahun 2013-2017	II-59
Tabel II.77.	Perkembangan Olahraga Tahun 2013-2017	II-59
Tabel II.78.	Data berdasarkan urusan pembangunan yang telah tersedia.....	II-60
Tabel II.79.	Data Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	II-60
Tabel II.80.	Organisasi Seni Budaya Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-61
Tabel II.81.	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-62
Tabel II.82.	Jumlah Arsip yang dilestarikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-63
Tabel II.83.	Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-63
Tabel II.84.	Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-63
Tabel II.85.	Data Obyek dan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2013-2017 Yang dikelola Pemerintah.....	II-64
Tabel II.86.	Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-64
Tabel II.87.	Populasi Ternak Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-65
Tabel II.88.	Produksi Daging Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017	II-65
Tabel II.89.	Produksi Telur Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-65
Tabel II.90.	Produksi Susu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-66
Tabel II.91.	Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-66
Tabel II.92.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-67
Tabel II.93.	Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-67
Tabel II.94.	Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-68

Tabel II.95.	Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-68
Tabel II.96.	Perkembangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-68
Tabel II.97.	Nilai Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	II-69
Tabel II.98.	Proposi PAD dan Belanja Pegawai Kabupaten Karanganyar.....	II-71
Tabel II.99.	Perkembangan Jumlah ASN Kabupaten Karanganyar.....	II-72
Tabel II.100.	Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Karanganyar.....	II-72
Tabel II.101.	Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.....	II-74
Tabel II.102.	Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2013-2017.....	II-75
Tabel II.103.	Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.....	II-76
Tabel III.1.	Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 .	III-4
Tabel III.2.	Pertumbuhan rEALISASI Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-6
Tabel III.3.	Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017.....	III-7
Tabel III.4.	Proporsi (BAGIAN) Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017.....	III-10
Tabel III.5.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-12
Tabel III.6.	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-13
Tabel III.7.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-17
Tabel III.8.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-18
Tabel III.9.	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-19
Tabel III.10.	Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-20
Tabel III.11.	Pendapatan Per Kapita Penduduk Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-25
Tabel III.12.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-25
Tabel III.13.	Ruang Fiskal Daerah Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-25
Tabel III.14.	Kemampuan Mendanai Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-26
Tabel III.15.	Rasio Belanja Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017..	III-26

Tabel III.16.	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023	III-27
Tabel III.17.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2017	III-28
Tabel III.18.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023	III-31
Tabel III.19.	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017...	III-31
Tabel III.20.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-32
Tabel III.21.	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023	III-35
Tabel III.22.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.....	III-37
Tabel III.23.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023	III-38
Tabel III.24.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023	III-40
Tabel III.25.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023	III-41
Tabel IV.1.	Mandat Isu Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	IV-6
Tabel V.1.	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.....	V-7
Tabel VI.1.	Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah	VI-6
Tabel VI.2.	Tema, Fokus, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2019-2023.....	VI-12
Tabel VI.3.	Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah Pencapaian Visi dan Misi	VI-27
Tabel VI.4.	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	VI-32
Tabel VI.5.	Penggunaan Lahan pada Kabupaten Karanganyar	VI-38
Tabel VI.6.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan	VI-39
Tabel VI.7.	Indikasi Kewilayahan Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.....	VI-43
Tabel VII.1.	Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023	VII-3
Tabel VII.2.	Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023	VII-4

Tabel VIII.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karanganyar VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	I-2
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar	II-2
Gambar II.2	Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar.....	II-4
Gambar II.3	Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar .	II-5
Gambar II.4	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam	II-11
Gambar II.5	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2017.....	II-17
Gambar II.6	Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2017.....	II-18
Gambar II.7	Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%)...	II-19
Gambar II.8	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015.....	II-20
Gambar II.9	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015.....	II-20
Gambar II.10	Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	II-21
Gambar II.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-22
Gambar II.12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-22
Gambar II.13	Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	II-22
Gambar II.14	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	II-24
Gambar II.15	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	II-24
Gambar II.16	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	II-25
Gambar II.17	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	II-25
Gambar II.18	Grafik Gambaran Balita Stunting Tahun 2016-2018.....	II-34
Gambar II.19	Persebaran Kualitas Air Sungai Kabupaten Karanganyar	II-48
Gambar II.20	Kualitas Air Sungai Ngringo Hulu dan Hilir	II-49
Gambar II.21	Kualitas Air Sungai Pengok Hulu dan Hilir	II-49
Gambar II.22	Kondisi Kualitas Udara Ambien dari Beberapa Titik Sampel.....	II-50
Gambar III.1	Rata-Rata Proporsi Rata – rata Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	III-8
Gambar IV.1	Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023.....	IV-8

Gambar IV.2	Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah	IV-19
Gambar VI.1	Skema Pencapaian Visi.....	VI-1
Gambar VI.2	Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.....	VI-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah (PD), disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (1) pendekatan teknokratik, (2) partisipatif, (3) politik, (4) atas-bawah (*top-down*), dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Berdasar pendekatan tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu **Tahap III** (2015-2019) yang diarahkan pada Pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan **Tahap IV** (2020-2025) yang diarahkan pada Peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut untuk kemajuan Karanganyar selama 5 (lima) tahun ke depan dengan Misi :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
- 2) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
- 3) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;

- 4) Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan;
- 5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.

Dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka menangani isu strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar memuat program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja-PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berdasar pada:

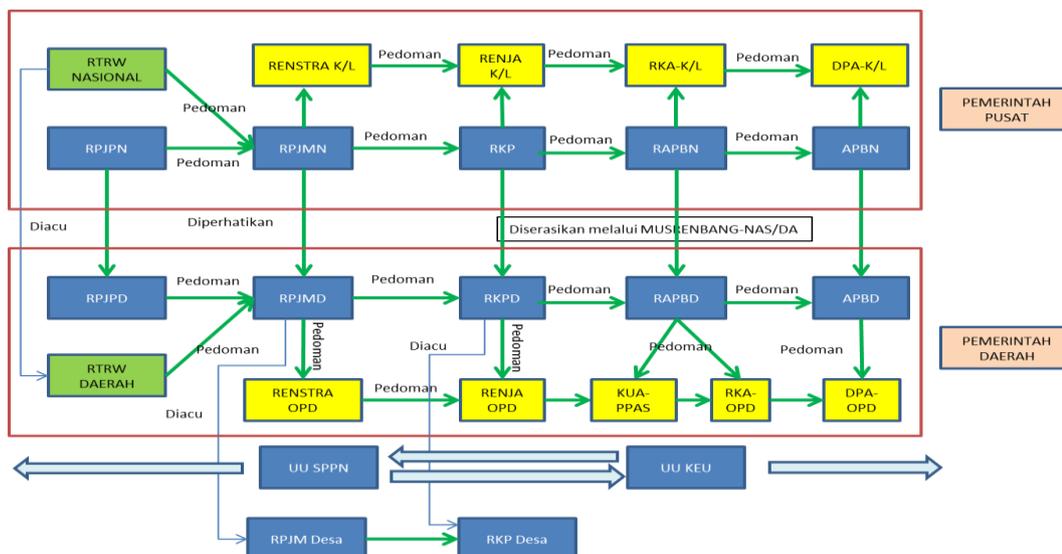
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.



Gambar I.1.

Kerterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Disamping itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2033, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi dan rencana program pembangunan.

Secara singkat hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Visi, Misi dan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2014–2019 menjadi dasar rujukan penyusunan

RPJMD untuk diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel I.1.
Prioritas Pembangunan RPJMD dan RPJMN

RPJMN (Tahun 2014-2019)	RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)
(1)	(2)
Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi kan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 akan diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tabel I.2.

Prioritas Pembangunan RPJMN dan RPJMD

RPJMD Prov. Jawa Tengah (Tahun 2018-2023)	RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)
(1)	(2)
Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat; Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.	Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;

Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap III (Tahun 2015-2019) dan Tahap IV (2020-2025) pada RPJPD Kabupaten Karanganyar.

Tabel I.3.

Prioritas Pembangunan RPJPD dan RPJMD

RPJPD Kab. Karanganyar (Tahun 2005-2025)	RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)
(1)	(2)
Visi Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat	Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar
1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat	Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian, dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.	Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;

RPJPD Kab. Karanganyar (Tahun 2005-2025)	RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)
(1)	(2)
	Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dengan kepastian hukum, penegakan HAM dan kesetaraan gender.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
6. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif	Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;

Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2010–2030.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan pada perencanaan RKPD tahun yang direncanakan. Dengan demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB VIII RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja

Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.7. Hubungan RPJMD dengan RPJM Desa

RPJMD Kabupaten Karanganyar menjadi rujukan penyusunan RPJM Desa supaya program pembangunan desa sinergis dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Karanganyar mewujudkan visi “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 disusun dengan maksud:

- 1) Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra-PD dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- 3) Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 disusun dengan tujuan:

- 1) Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
- 2) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki;
- 3) Mewujudkan pembangunan yang mengedepankan *Triple Track Strategy Plus* (*pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*) dengan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*);
- 4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, dimana masing-masing Bab terbagi kedalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mekanisme penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Diuraikan dalam bentuk sub bab yaitu : 1) Latar Belakang; 2) Dasar Hukum

Penyusunan; 3) Hubungan Antar Dokumen; 4) Maksud dan Tujuan; 5) Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Terbagi dalam sub bab yang meliputi empat aspek, yaitu 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek pelayanan umum serta 4) aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab : 1) Kinerja Keuangan Masa Lalu; yang meliputi : Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, 2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yang meliputi : Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, 3) Kerangka Pendanaan yang meliputi : Proyeksi Pendapatan dan Belanja, Penghitungan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, yang diuraikan dalam sub bab: 1) Permasalahan Pembangunan; 2) Isu Strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu : 1) Visi; 2) Misi;

3) Tujuan dan Sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 1.961 rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.

Pembagian wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Jatipuro	4.036,50	0	10	115	305
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3.	Jumapolo	5.567,02	0	12	114	314
4.	Jumatono	5.355,44	0	11	122	324
5.	Matesih	2.626,63	0	9	124	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	101	347
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	108	297
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	122	300
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	562
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	86	451
11.	Jaten	2.554,81	0	8	114	584
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	119	519
13.	Gondagrejo	5.679,95	0	13	119	507
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	124	391
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	159	467
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	91	279
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
Total		77.378,64	15	162	1.961	6.473

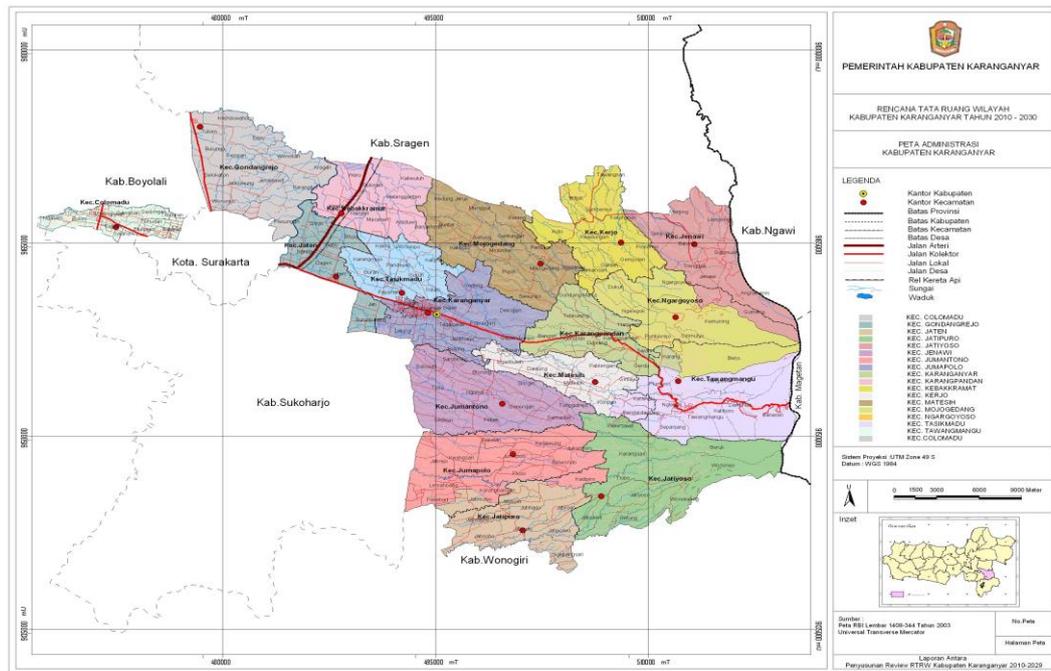
Sumber: SIPD Kabupaten Karanganyar, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar ada di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi,
Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo

4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Gambar II.1.



Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar II.1.
Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Topografi

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl. Ketinggian wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2.
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kabupaten Karanganyar		80	2.000	511

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

2.1.3. Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Kedawang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3.

Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M ³ /detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah - Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

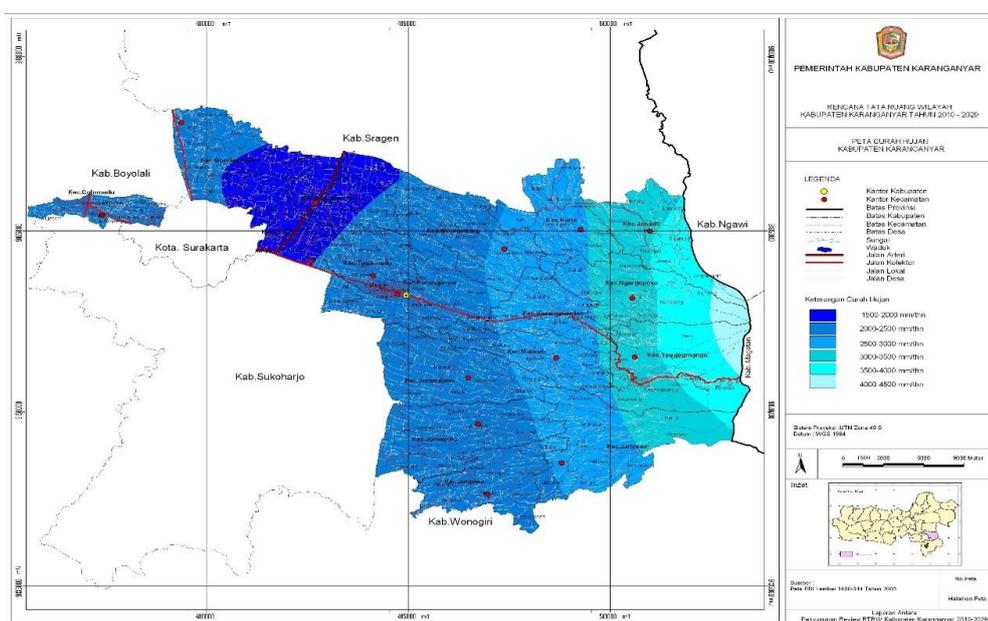
Sumber : DPUPR, 2018

2.1.4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah sebanyak 210 hari dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebanyak 26 hari hujan, sedangkan yang terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7

hari hujan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 8.390 mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 2.062 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu sebesar 162 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar II.2.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.



Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar II.2.
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.4.

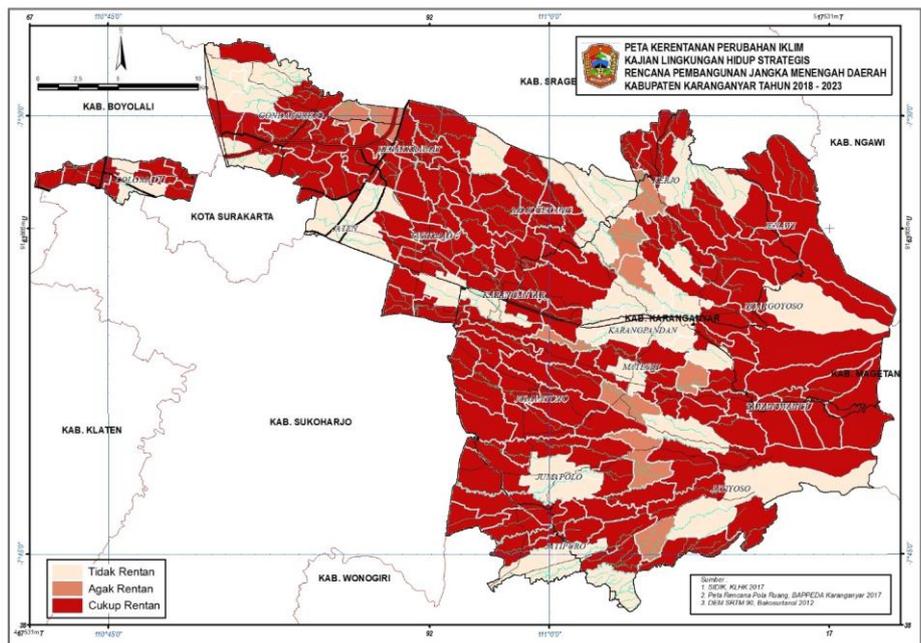
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar

Kategori	Desa	Persentase (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6

Cukup Rentan	124	70
--------------	-----	----

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.



Sumber : KLHS RPJM, 2019

Gambar II.3.

Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar

2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri tanah sawah 23.092 Ha dan tanah kering 54,286,64 berupa pertanian bukan sawah sebesar 29.685,04 Ha dan bukan lahan pertanian 24.601,60 Ha.

Tabel II.5.

Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
1.	Jatipuro	4.036,50	1.468,00	2.568,26
2.	Jatiyoso	6.716,49	1.294,00	5.422,74
3.	Jumapolo	5.567,02	1.834,00	3.733,02
4.	Jumantono	5.355,44	1.595,00	3.766,44
5.	Matesih	2.626,63	1.287,00	1.339,63
6.	Tawangmangu	7.003,16	719,00	6.283,92
7.	Ngargoyoso	6.533,94	752,00	5.781,94
8.	Karangpandan	3.411,08	1.548,00	1.859,08
9.	Karanganyar	4.302,64	1.720,00	2.582,44
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.682,00	1.241,62
11.	Jaten	2.554,81	1.212,00	1.342,69

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
12.	Colomadu	1.564,17	462,00	1.055,17
13.	Gondangrejo	5.679,95	1.755,00	4.593,97
14.	Kebakramat	3.645,63	2.083,00	1.471,63
15.	Mojogedang	5.330,90	2.024,00	3.305,09
16.	Kerjo	4.682,27	1.127,00	3.606,27
17.	Jenawi	5.608,28	524,00	5.084,28
	Total	77.378,64	23.092,00	54.286,64

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 menurut peta mencapai 77.378,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastuktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54). Berikut kondisi daya dukung lahan terbangun di setiap kecamatan.

Tabel II.6.
Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Tahun 2017 per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (LB)	LTP	Luas Lahan Terbangun (LTb)	DDLb	Status DDLb
Jatipuro	4.036,50	1.484,23	296,846	1.781,08	1,59	bersyarat atau sedang
Jatiyoso	6.716,49	1.232,18	246,436	1.478,62	3,18	baik
Jumapolo	5.567,02	2.070,00	414	2.484,00	1,57	bersyarat atau sedang
Jumantono	5.355,44	1.630,00	326	1.956,00	1,92	bersyarat atau sedang
Matesih	2.626,63	874	174,8	1.048,80	1,75	bersyarat atau sedang
Tawangmangu	7.003,16	530	106	636,00	7,71	baik
Ngargoyoso	6.533,94	840,04	168,008	1.008,05	4,54	baik
Karangpandan	3.411,08	1.177,78	235,556	1.413,34	1,69	bersyarat atau sedang
Karanganyar	4.302,64	1.571,80	314,36	1.886,16	1,60	bersyarat atau sedang
Tasikmadu	2.759,73	850,62	170,124	1.020,74	1,89	bersyarat atau sedang
Jaten	2.554,81	1.141,20	228,24	1.369,44	1,31	bersyarat atau sedang
Colomadu	1.564,17	899,9	179,98	1.079,88	1,01	bersyarat atau sedang
Gondangrejo	5.679,95	1.750,80	350,16	2.100,96	1,89	bersyarat atau sedang
Kebakramat	3.645,63	1.031,00	206,2	1.237,20	2,06	bersyarat atau sedang
Mojogedang	5.330,90	2.051,43	410,286	2.461,72	1,52	bersyarat atau sedang
Kerjo	4.682,27	1.210,00	242	1.452,00	2,26	bersyarat atau sedang
Jenawi	5.608,28	765	153	918,00	4,28	baik

2.1.6. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arah pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari program utama penataan ruang yang meliputi:

a. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;

- 1) Perwujudan pusat kegiatan:
 - a). Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo;
 - b). Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
 - c). Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan
 - d). Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih.
- 2) Perwujudan sistem prasarana:
 - a). Transportasi;
 - b). Listrik;
 - c). Telekomunikasi;
 - d). Sumber Daya Air; dan
 - e). Lingkungan.

b. Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten meliputi perwujudan:

- 1) Kawasan lindung:
 - a) Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
 - b) Pembangunan Arboretum di Kecamatan Tawangmangu;
 - c) Pembangunan Hutan Kota di sekitar Waduk Lalung dan Delingan.
- 2) Kawasan budidaya:
 - a). Kawasan hutan produksi;
 - b). Kawasan peruntukan pertanian;
 - c). Kawasan peruntukan perikanan;
 - d). Kawasan peruntukan pertambangan;
 - e). Kawasan peruntukan industri;
 - f). Kawasan peruntukan pariwisata;
 - g). Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h). Kawasan peruntukan lainnya.

c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Arah penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar adalah:

- 1) KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi
 - a) Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi

meliputi:

- Kawasan Strategis Kota Colomadu;
 - Kawasan Strategis Kota Jaten;
 - Kawasan Strategis Kota Karanganyar; dan
 - Kawasan Strategis Kota Tawangmangu.
- b) Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi:
- Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih);
 - Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang; dan
 - Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo.
- 2) KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a) Kawasan Sub DAS Keduwang Hulu;
 - b) Kawasan Sub DAS Jlantah Walikan;
 - c) Kawasan Sub DAS Samin;
 - d) Kawasan Sub DAS Mungkung;
 - e) Kawasan Sub DAS Kenatan; dan
 - f) Kawasan Sub DAS Pepe;
- 3) KSK bidang sosial dan budaya meliputi:
- a) Kawasan Situs Sangiran di Gondangrejo; dan
 - b) Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, maka pengembangan wilayah Karanganyar memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

a. Kawasan Budidaya

Terdiri atas kawasan peruntukan : hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Matesih, Mojogedang, dan Jatipuro.
- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di seluruh kecamatan.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di seluruh kecamatan.
Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas ± 23.618Ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari:
 - a) Pertanian lahan basah seluas ± 19.790 Ha; dan
 - b) Pertanian lahan kering seluas ± 3.828 Ha.
- 4) Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas sayur, buah, tanaman biofarmaka dan tanaman hias, Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili.

- 5) Kawasan peternakan meliputi:
 - a). Peternakan unggas terletak di Kecamatan : Gondangrejo, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kerjo, Kebakkramat, Karanganyar; dan Jenawi.
 - b). Peternakan sapi terletak di Kecamatan : Karanganyar, Jatipuro, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, Matesih; dan Gondangrejo.
 - c). Peternakan domba/kambing terletak di Kecamatan : Jumantono, Jumapolo, Mojogedang, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat; dan Gondangrejo.
 - d). Peternakan babi terletak di Kecamatan Jumantono, Jaten, Gondangrejo; dan Kebakkramat.
- 6) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas;
 - a) Perikanan tangkap sungai, bendungan/danau/embung, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
 - b) Budidaya perikanan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi;
- 7) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan : pertambangan mineral dan pertambangan panas bumi;
- 8) Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a). Industri besar di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu;
 - b). Industri menengah di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro dan
 - c). Industri kecil dan mikro di setiap kecamatan.
- 9) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan/binaan manusia;
- 10) Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan, meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- 11) Kawasan peruntukan budidaya lainnya yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b. Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung arkeologi, dan kawasan lindung lainnya.

- 1) Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi dan Jatiyoso;

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air meliputi Kecamatan Tawangmangu, Matesih, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso dan Jenawi;
- 3) Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar waduk dan embung serta RTH perkotaan;
- 4) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) Kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan puting beliung;
- 6) Kawasan lindung arkeologi meliputi kawasan cagar alam arkeologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- 7) Kawasan lindung lainnya meliputi plasma nutfah terdapat di Kecamatan Tawangmangu dan Karangpandan.

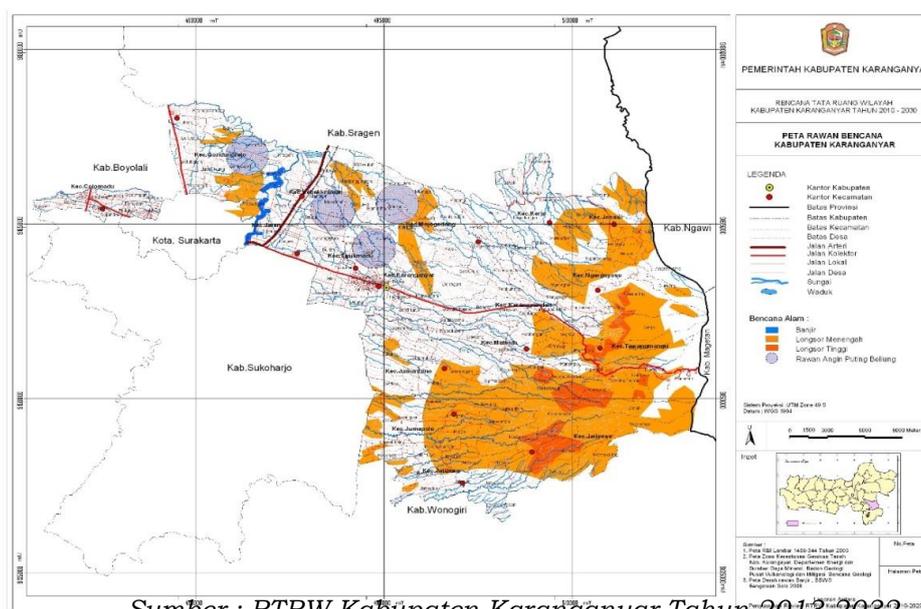
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:

a. Kawasan rawan bencana longsor :

Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 2 kawasan bencana tanah longsor:

- 1) Menengah meliputi Kecamatan Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso; Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Karangpandan, Matesih, Karanganyar, Kerjo, Kebakkramat, Gondangrejo dan Mojogedang.
- 2) Tinggi meliputi Kecamatan Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Matesih, Jenawi dan Kerjo.



Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar II.4.
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam

b. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.

c. Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu.

Sedangkan kejadian bencana alam di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.7.
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar

NO.	LOKASI	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kec. Karanganyar	9	10	7	7	9
2.	Kec. Jaten	13	11	10	5	5
3.	Kec. Kebakkramat	8	8	27	4	7
4.	Kec. Tasikmadu	6	4	5	3	5
5.	Kec. Mojogedang	5	12	203	3	9
6.	Kec. Karangpandan	4	10	36	23	25
7.	Kec. Matesih	6	5	53	8	11
8.	Kec. Tawangmangu	9	5	15	22	13
9.	Kec. Ngargoyoso	12	13	67	29	25
10.	Kec. Kerjo	16	7	77	8	7
11.	Kec. Jenawi	5	14	316	11	12
12.	Kec. Jumantono	3	5	5	2	6
13.	Kec. Jumapolo	2	2	4	5	5
14.	Kec. Jatipuro	7	2	1	3	4
15.	Kec. Jatiyoso	5	11	21	19	19
16.	Kec. Colomadu	6	5	5	3	2
17.	Kec. Gondangrejo	8	8	12	4	11
	Jumlah	124	132	864	159	174

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, 2018.

Prakiraan terkait kinerja layanan atau fungsi ekosistem terkait dengan layanan fungsi penting terkait dengan fungsi penyedia dan pengaturan kehidupan. Gambaran kondisi jasa ekosistem ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya.

Tabel II.8.
Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
Penyediaan	Penyediaan pangan	39.723,96	49,47	13.029,95	16,23	27.541,08	34,30
	Penyediaan air	23.524,90	29,30	26.599,01	33,13	30.171,08	37,58
Pengaturan	Pengaturan Pemurnian air	39.936,23	49,74	2.594,64	3,23	37.7634,13	47,03
	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	24.833,16	30,93	37.960,38	47,28	17.501,45	21,80
	Tata Kelola Air dan Banjir	22.382,96	27,88	52.522,43	65,41	5.389,60	6,71
	Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam	23.619,90	29,42	55.114,72	68,64	1.560,37	1,94
	Pengaturan iklim	22.382,82	27,88	49.121,84	61,18	8.790,33	10,95

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
	Pemeliharaan Kualitas Udara	22.382,82	27,88	15.993,76	19,92	41.918,41	52,21
	Biodiversiti	22.382,82	27,88	15.625,82	19,46	42.286,36	52,66

Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Berdasarkan kondisi di atas maka beberapa fungsi jasa ekosistem perlu mendapat perhatian yaitu :

- Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (kelas tinggi hanya 1,94%);
- Tata kelola air dan banjir (kelas tinggi hanya 6,71%);
- Pengaturan iklim (kelas tinggi 19,95%);
- Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (kelas tinggi 21,80%); dan
- Penyediaan pangan (sebagian besar kelas rendah 49,47%).

Kondisi di atas menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami juga telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi resiko bencana yang mungkin terjadi.

2.1.9. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebanyak 871.596 jiwa, terdiri dari laki-laki 430.975 jiwa dan perempuan 440.621 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten yaitu 84.145 jiwa (9,65%) sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi yaitu 26.234 jiwa (3,01%).

Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 773,7864 km² sedangkan jumlah penduduknya adalah 871.596 jiwa, tingkat kepadatan penduduknya menjadi 1.126,40 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Colomadu dengan 5.166,45 jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Jenawi dengan 467,77 jiwa/km².

Tabel II.9.

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jatipuro	4.036,50	14.319	14.197	28.516	706,45
2	Jatiyoso	6.716,49	18.233	18.231	36.464	542,90

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
3	Jumapolo	5.567,02	18.012	17.728	35.740	642,00
4	Jumantono	5.355,44	20.870	21.349	42.219	788,34
5	Matesih	2.626,63	19.918	20.382	40.300	1.534,29
6	Tawangmangu	7.003,16	22.243	22.591	44.834	640,20
7	Ngargoyoso	6.533,94	16.136	16.520	32.656	499,79
8	Karangpandan	3.411,08	19.609	20.118	39.727	1.164,65
9	Karanganyar	4.302,64	39.530	40.717	80.247	1.865,06
10	Tasikmadu	2.759,73	29.625	30.803	60.428	2.189,63
11	Jaten	2.554,81	41.425	42.720	84.145	3.293,59
12	Colomadu	1.564,17	39.780	41.032	80.812	5.166,45
13	Gondangrejo	5.679,95	39.560	40.185	79.745	1.403,97
14	Kebakkramat	3.645,63	31.027	31.969	62.996	1.727,99
15	Mojogedang	5.330,90	30.846	31.310	62.156	1.165,96
16	Kerjo	4.682,27	16.979	17.398	34.377	734,20
17	Jenawi	5.608,28	12.863	13.371	26.234	467,77
KARANGANYAR		77.378,64	430.975	440.621	871.596	1.126,40

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar , 2018

Menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2017 yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun dan paling sedikit pada usia 70-74 tahun. Penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, dengan nilai rasio jenis kelamin (sex rasio) sebesar 97,81.

Tabel II.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
0-4 tahun	35.078	33.298	68.376	105,35
5-9 tahun	35.533	34.018	69.551	104,45
10-14 tahun	33.532	31.721	65.253	105,71
15-19 tahun	33.151	32.325	65.476	102,55
20-24 tahun	31.898	31.448	63.346	101,43
25-29 tahun	30.684	32.006	62.690	95,87
30-34 tahun	30.935	32.755	63.690	94,44
35-39 tahun	32.029	33.206	65.235	96,46
40-44 tahun	32.049	32.250	64.300	99,38
45-49 tahun	29.541	31.414	60.955	94,04
50-54 tahun	29.197	30.018	59.216	97,26
55-59 tahun	24.934	25.146	50.080	99,16
60-64 tahun	19.012	18.922	37.934	100,48
65-69 tahun	12.755	13.787	26.542	92,52
70-74 tahun	9.044	11.266	20.310	80,27
75 tahun +	11.602	17.042	28.644	68,08
Total	430.975	440.621	871.596	97.81

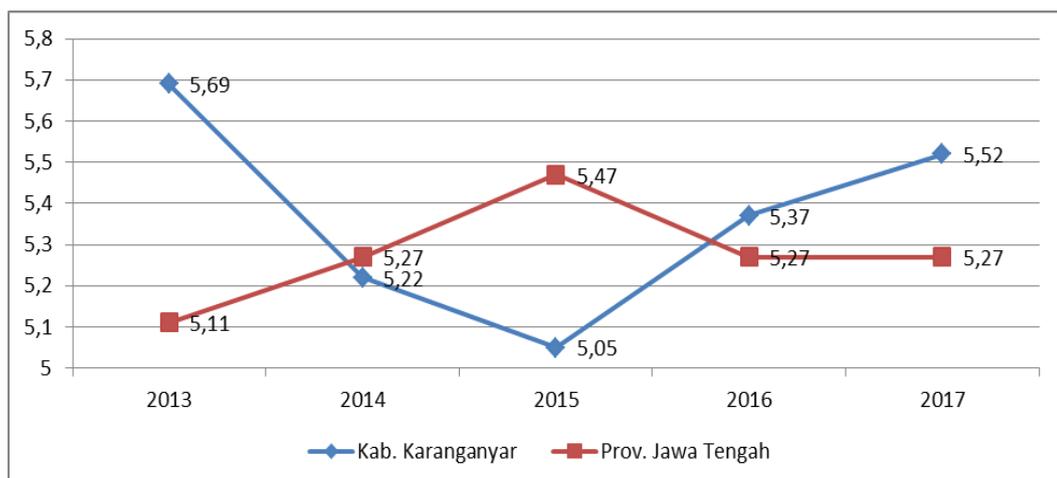
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Dari komposisi penduduk menurut usia produktif/tidak produktif didapatkan angka ketergantungan sebesar 31,91%. Artinya, setiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 32 orang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Secara persentase usia 15-64 tahun mencapai 68,09%, sedangkan usia tidak produktif 0-14 tahun dan diatas 65 tahun masing-masing sebesar 23,08% dan 8,83%. Dari besaran persentase, tersebut Kabupaten Karanganyar telah mendapat bonus demografi, artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi ini akan menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, sebaliknya bila tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi beban daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dari 5,69% pada tahun 2013 menjadi 5,52% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mengindikasikan pembangunan yang dilakukan selama ini di Kabupaten Karanganyar memiliki efek terhadap perkembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Gambar II.5.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2017

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya/Kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2017 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Sragen mencapai 5,81%. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Klaten hanya mencapai 5,07%. Kabupaten Karanganyar berada di peringkat ke-4 (empat) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52%.

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.11.

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Wonogiri	4,78	5,30	5,34	5,23	5,17
2	Klaten	3,96	5,79	5,64	5,14	5,07
3	Sukoharjo	5,78	5,40	5,69	5,71	5,72
4	Surakarta	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33
5	Boyolali	5,83	5,42	6,08	5,30	5,52
6	Sragen	6,70	5,58	6,05	5,74	5,81
7	Karanganyar	5,69	5,22	5,05	5,37	5,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

2.2.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 31.780.396,98 (juta rupiah) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 23.665.952,05 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.12.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2013	22.219.243,68	9,62%	19.256.516,28	5,69%
2014	24.635.058,52	10,88%	20.262.444,42	5,22%
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2013-2017 meningkat dari Rp22.219.243,68 (juta) pada tahun 2013 menjadi Rp 31.780.396,98 (juta) pada tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp 9.561.153,30 (juta Rp), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.13.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.295.63,55	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91
2. Pertambangan dan Penggalan	251.671,01	292.753,83	338.753,25	363.211,52	388.494,01

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
3. Industri Pengolahan	10.011.114,04	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54
4. Listrik, Gas dan Air Minum	33.229,61	35.770,42	38.129,52	43.424,68	49.151,64
5. Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.006,43	17.823,63	18.546,54	19.633,91	21.003,33
6. Konstruksi	1.388.559,53	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.589.387,04	2.743.954,18	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43
8. Transportasi dan Pergudangan	545.051,03	622.539,67	686.830,04	728.575,84	826.247,73
9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	703.123,61	797.260,18	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56
10. Informasi dan Komunikasi	253.315,93	271.522,40	286.415,07	307.229,24	346.611,20
11. Jasa Keuangan	773.870,74	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00
12. Real Estate	374.459,58	424.736,83	467.975,03	502.011,15	544.923,12
13. Jasa Perusahaan	68.889,38	77.648,25	88.676,05	100.323,16	113.897,22
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	507.633,53	529.338,06	566.328,58	609.019,09	643.209,70
15. Jasa Pendidikan	935.665,72	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.138,30	196.681,35	219.392,87	239.132,80	262.337,39
17. Jasa lainnya	302.492,64	352.026,23	378.703,65	416.766,31	448.693,47
PDRB	22.219.243,68	24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 19.256.516,28 (juta Rp) pada tahun 2013 menjadi Rp. 23.665.952,05 (juta Rp) pada tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp. 4.409.435,77 (juta Rp.), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.14.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.730.072,24	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68
2. Pertambangan dan Penggalan	231.903,56	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30
3. Industri Pengolahan	8.697.102,52	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68
4. Listrik, Gas dan Air Minum	34.555,47	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67
5. Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.451,01	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60
6. Konstruksi	1.207.316,75	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.320.458,91	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91
8. Transportasi dan Pergudangan	538.422,99	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85
9.. Penyediaan Akomodasi dan	621.177,86	662.676,82	697.279,26	732.397,77	771.278,70

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
Makan Minum					
10. Informasi dan Komunikasi	267.136,14	294.101,84	315.512,46	338.040,05	365.995,96
11. Jasa Keuangan	640.225,09	661.493,15	705.929,31	760.048,58	819.720,53
12. Real Estate	362.298,14	382.272,84	403.183,16	426.366,19	451.138,07
13. Jasa Perusahaan	60.034,43	65.212,06	70.905,07	77.414,16	84.954,29
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	426.438,92	427.694,44	441.204,73	450.205,31	459.929,74
15. Jasa Pendidikan	688.055,98	757.388,08	803.580,33	854.607,68	908.533,43
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	153.152,58	164.531,82	177.628,55	189.245,46
17. Jasa lainnya	277.098,01	302.290,67	314.442,75	331.233,99	350.478,69
PDRB	19.256.516,28	20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2017, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan penurunan kontribusi pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar.

Kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

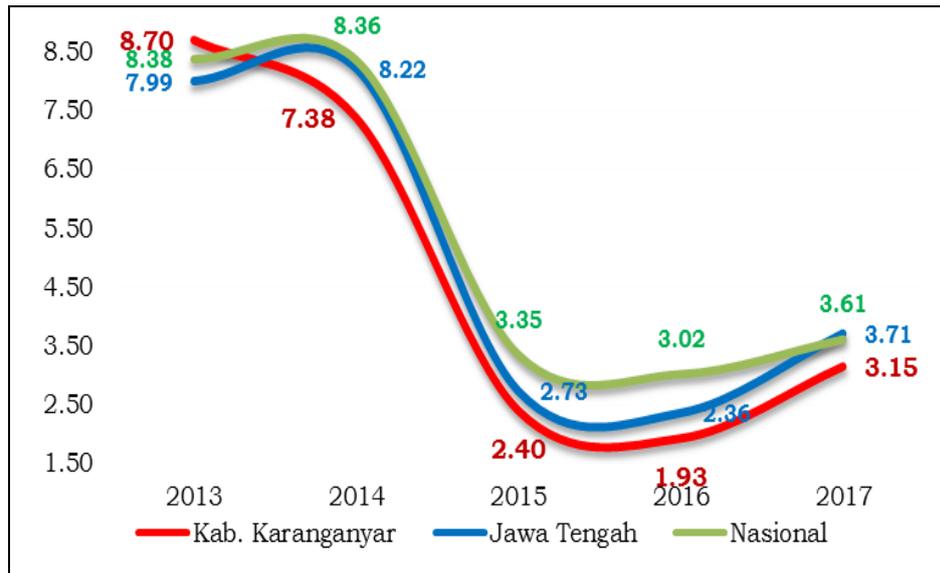
Tabel II.15.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,83	14,45	14,89	14,31	13,51
2. Pertambangan dan Penggalian	1,13	1,19	1,26	1,24	1,22
3. Industri Pengolahan	45,06	45,64	45,21	45,78	45,89
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Konstruksi	6,25	6,34	6,37	6,39	6,58
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,65	11,14	11,10	11,06	11,20
8. Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,53	2,55	2,48	2,60
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,30	3,27	3,33	3,33
10. Informasi dan Komunikasi	1,14	1,10	1,06	1,05	1,09
11. Jasa Keuangan	3,48	3,37	3,41	3,47	3,62
12. Real Estate	1,69	1,72	1,74	1,71	1,71
13. Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,15	2,10	2,08	2,02
15. Jasa Pendidikan	4,21	4,32	4,27	4,30	4,39
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,80	0,82	0,82	0,83
17. Jasa lainnya	1,36	1,43	1,41	1,42	1,41
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2018

2.2.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2013-2017) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,70% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,15% (turun), namun realisasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,93%, Inflasi Kabupaten Karanganyar naik sebesar 1,22 poin.

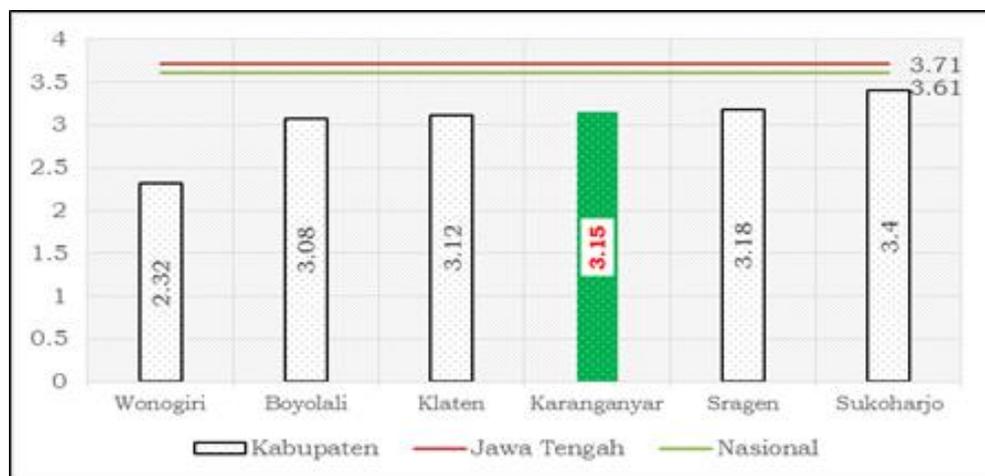


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar II.6.

Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2017

Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 3,15% berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 3,71% dan Nasional 3,61%. Dibandingkan dengan realisasi kabupaten sekitar (wilayah Subosukowono sraten), inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2017 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Sukoharjo.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar II.7.

Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%)

2.2.4. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 36.462,00 (ribu Rp) atau naik sebesar 7,44% dari Tahun 2016. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar PDRB per kapita ADHB.

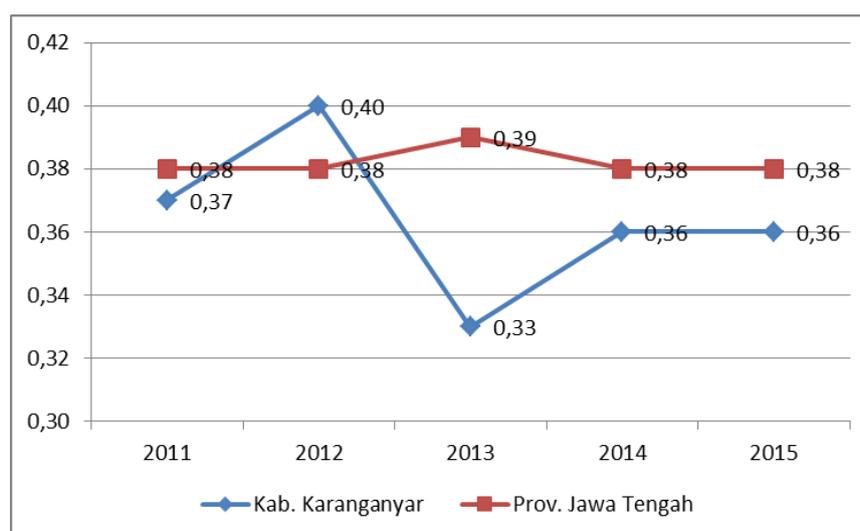
Tabel II.16.
PDRB Perkapita Tahun 2013-2017

Tahun	ADHB (Ribuan Rupiah)	ADHK 2010 (Ribuan Rupiah)
2013	26.455	22.919
2014	29.040	23.885
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

2.2.5. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,40 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,36. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan/pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi ketimpangan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

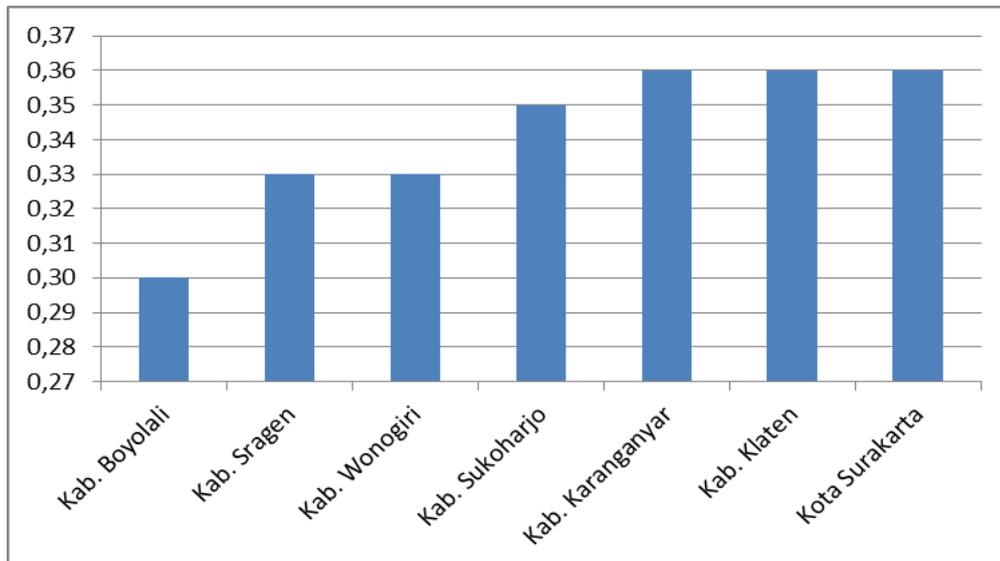


Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar II.8.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 0,36 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi kelima sama dengan Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar II.9.

Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

2.2.6. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sebanyak 114,40 ribu jiwa (13,58%), dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sekitar 106,80 ribu jiwa (12,28%). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

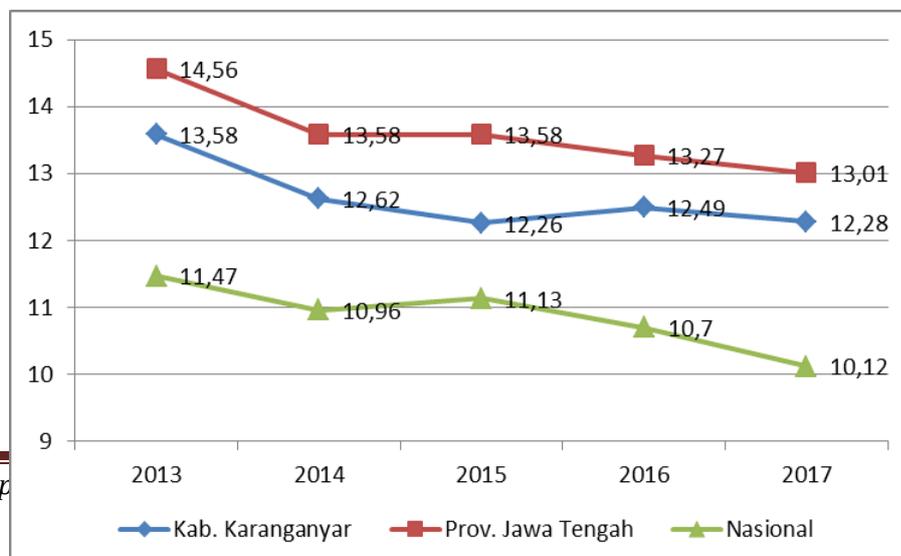
Tabel II.17.

Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Kab. Karanganyar		Provinsi Jawa Tengah	Nasional
	(Ribu Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2013	114,40	13,58	14,44	11,47
2014	107,30	12,62	13,58	10,96
2015	106,40	12,46	13,32	11,13
2016	107,70	12,49	13,19	10,70
2017	106,80	12,28	12,23	10,12

Sumber : BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013-2018

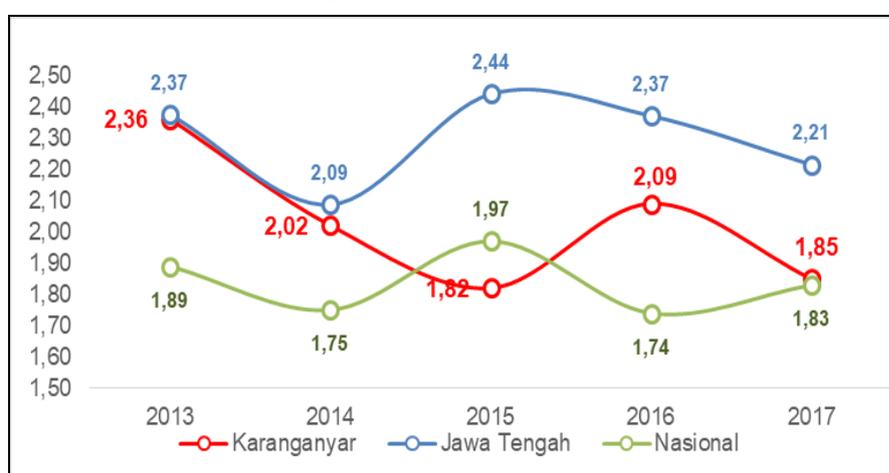
Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah tapi masih di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut.



Gambar II.10.

Persentase Kemiskinan Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional.

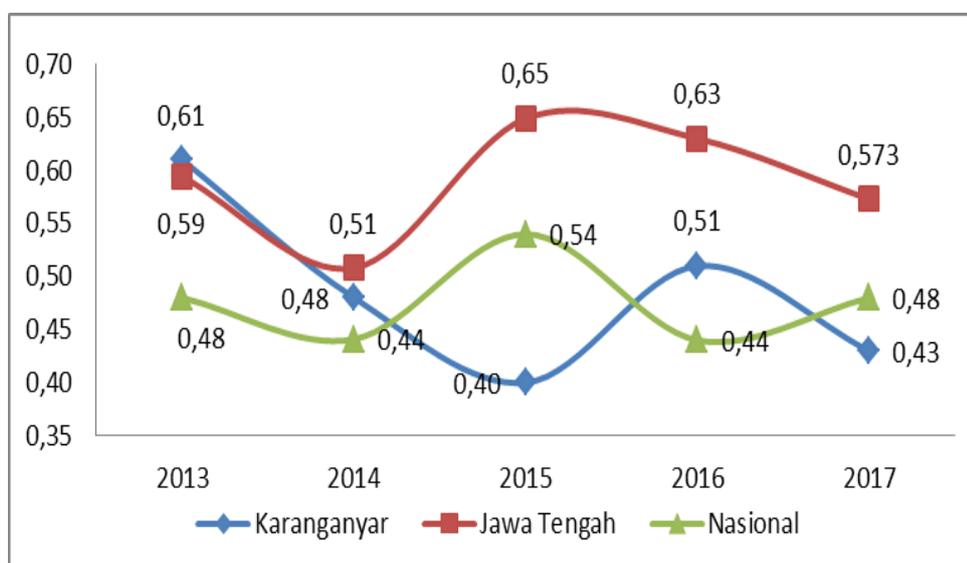
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan 0,51 (21,61%), yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,36 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,85. Selama kurun waktu lima tahun tersebut terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2015 mencapai sebesar 0,54 (22,88%) dibandingkan tahun 2013, namun terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,09 atau naik sebesar 0,27 (14,84%). Kondisi Kedalaman Ekonomi (P1) Kabupaten Karanganyar cenderung fluktuasi berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P1 Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar II.11.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan (29,51%), yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,61 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,43. Selama kurun waktu lima tahun tersebut terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2015 mencapai sebesar 0,40 (34,43%) dibandingkan tahun 2013, namun terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,51 atau naik sebesar 0,11 (27,50%). Kondisi P2 Kabupaten Karanganyar yang cenderung fluktuatif berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P2 Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar II.12.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah dan Nasional

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

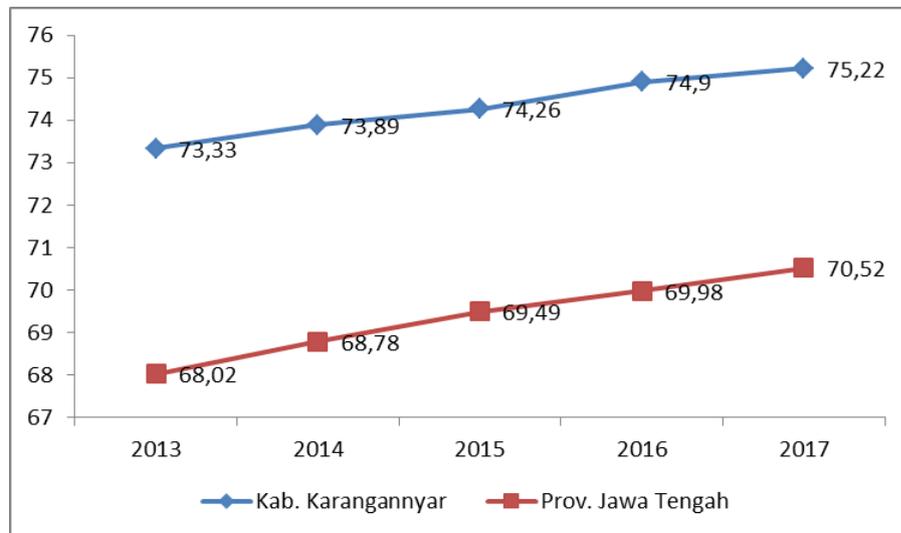
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode pengukuran yang baru dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu dari 73,33 (tahun 2013) menjadi 75,22 (tahun 2017).

Tabel II.18.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar

Komponen	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	76,70	76,71	77,11	77,11	77,31
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,86	13,26	13,27	13,64	13,65
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,38	8,47	8,48	8,49	8,50
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10.285,65	10.313,38	10.486,00	10.722,00	10.933,00
IPM	Angka	73,33	73,89	74,26	74,90	75,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 75,22 di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 70,52. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

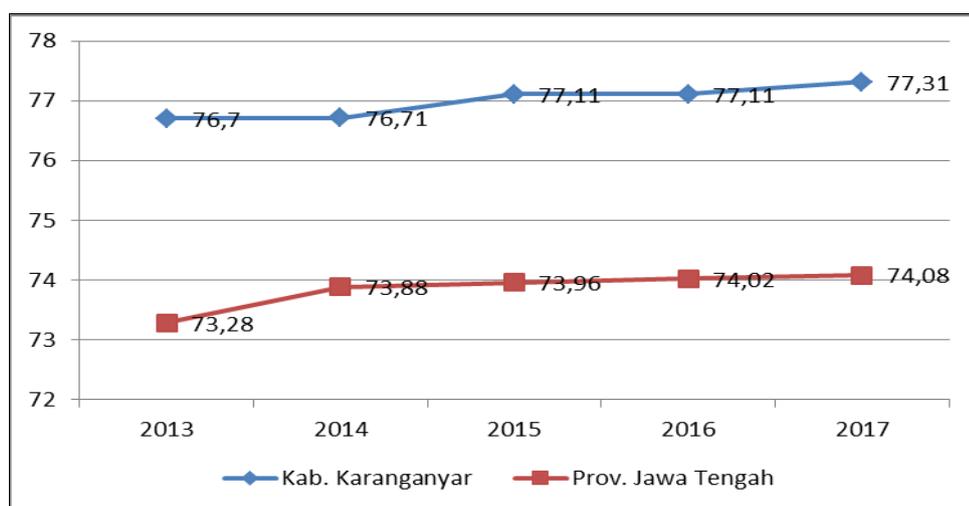
Gambar II.13.

Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dijabarkan berikut ini.

a. Angka Harapan Hidup

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik dari 76,70 pada tahun 2013 menjadi 77,31 pada tahun 2017, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, AHH Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 74,08.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

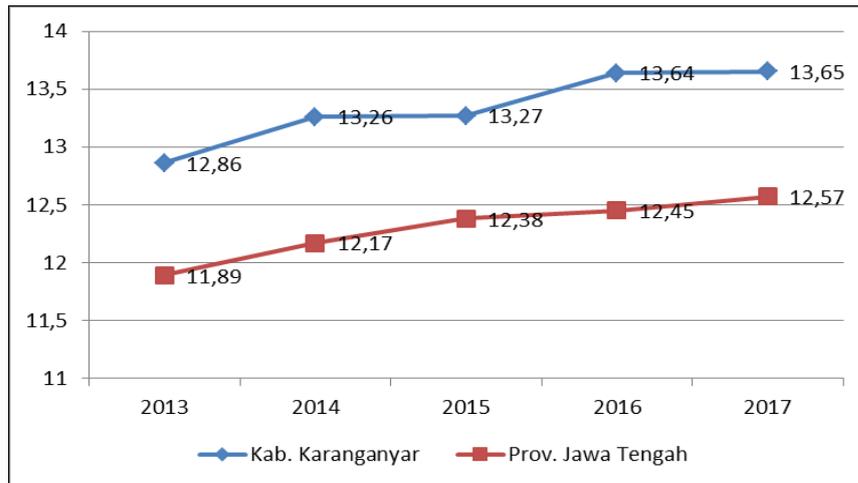
Gambar II.14.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan

dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari 12,86% (tahun 2013) menjadi 13,65% (tahun 2017), dan berada di atas angka Jawa Tengah. Perkembangan HLS selama 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



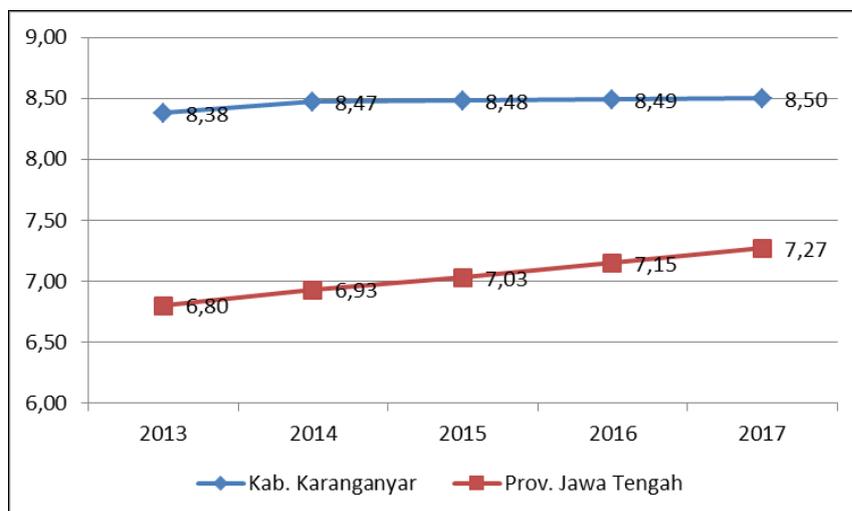
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar II.15.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar meningkat dari 8,38% tahun 2013 menjadi 8,50% tahun 2017, dapat dilihat pada gambar berikut.



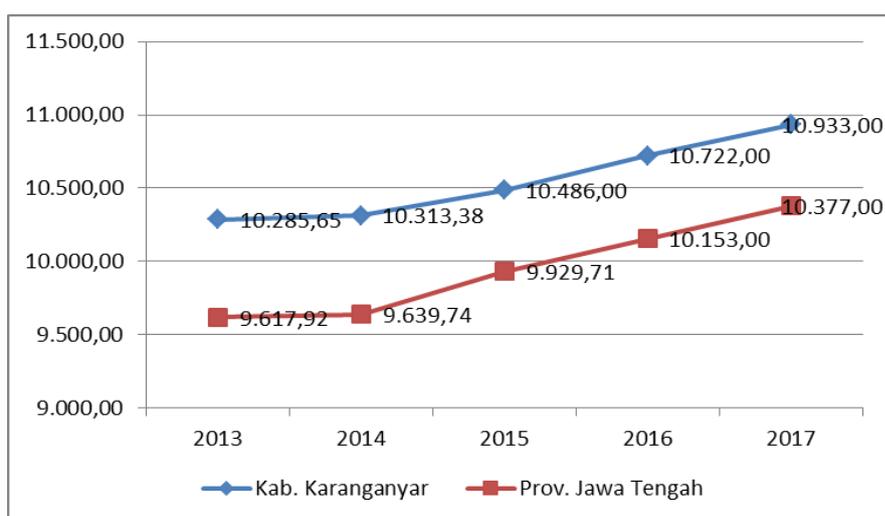
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar II.16.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.285,65 ribu pada tahun 2013 menjadi Rp 10.933,00 ribu pada tahun 2017. Capaiannya menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Karanganyar mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar II.17.

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2.2.8. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 adalah 72,60 per 100.000 KH, angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 109,65 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan pre eklamsi serta infeksi kehamilan/sepsis. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.19.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kabupaten Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2013	68,3	na
2014	138,48	118,62

2015	123,32	126,55
2016	77,58	111,16
2017	72,60	109,65

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

2.2.9. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, dimana AKB pada tahun 2014 sebesar 10,50 per 1.000 KH, dan tahun 2017 sebesar 12,41 per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah yaitu 9,99 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspeksi serta penyakit konginetal. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.20.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	AKB (Kabupaten Karanganyar)	AKB (Prov. Jawa Tengah)
2013	9,9	na
2014	10,50	10,41
2015	12,80	10,08
2016	13,96	10,00
2017	12,41	9,99

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Angka Kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan berobat.

2.2.10. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal adalah angka yang menggambarkan kematian yang terjadi pada bayi berumur 0 (baru lahir) sd 28 hari per 1000 KH. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2 tahun cenderung mengalami penurunan.

Tabel II.21.

AKN per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Prov Jateng

Tahun	AKN (Kabupaten Karanganyar)	AKN (Prov. Jawa Tengah)
2013	na	na
2014	5,23	7,52
2015	na	7,21
2016	na	6,92
2017	6,85	5,07

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Penyebab kematian neonates tertinggi disebabkan oleh BBLR, kelainan congenital dan asfiksia. Untuk menekan penyebab kematian dibutuhkan peningkatan akses neonates terhadap pelayanan dasar, guna mengetahui sedini mungkin komplikasi/ masalah kesehatan pada neonatus. Resiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan 6 bulan pertama kehidupan. Upaya peningkatan Kematian Neonatus secara kuantitas dan kualitas diharapkan mampu meningkatkan kesehatan bayi.

2.2.11. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelainan konginetal. AKABA di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan cenderung meningkat. Walaupun demikian perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sebab sebarangpun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Anak Balita selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.22.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	AKABA (Kabupaten Karanganyar)	AKABA (Prov. Jawa Tengah)
2013	11,5	na
2014	1,31	11,00
2015	1,77	11,54
2016	2,17	11,64
2017	1,84	11,80

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di Kabupaten Karanganyar prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan peningkatan kewaspadaan. Namun demikian, prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang ditetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.23.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Gizi Buruk (%)	0,070	0,042	0,041	0,040	0,025
Gizi Kurang(%)	na	3,01	3,24	3,34	3,29

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

2.2.13. Penyakit Menular

Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.24.
Kondisi Penyakit Menular Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Angka Penemuan kasus TB Paru (%)	84,60	58,1	51,4	63,4	64,7
2. Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	42	68	100	100	113
3. Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	55,3	36,4	57,0	15,2	8,3
4. Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk)	na	0,016	0,012	0,003	0,001

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan, namun demikian masih perlu diwaspasai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan TB dan HIV AIDS merefleksikan kebiasaan perilaku sehat di masyarakat perlu mendapat perhatian lebih.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 adalah 97,75%, angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan APK PAUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yaitu sebesar 79,07%, tetapi capaian ini masih berada dibawah target SPM Pendidikan taitu sebesar 100%. Lembaga PAUD yang sudah terakreditasi sampai dengan tahun 2017 adalah 63,12%.

2) Pendidikan Dasar

a). Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK SD/MI meningkat dari 105,61 (Tahun 2013) menjadi 107,30 (Tahun 2017) dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar 109,47 (Tahun 2017). APK SMP/MTs meningkat dari 100,13 (Tahun 2013) menjadi 104,41 (Tahun 2017) dan lebih tinggi bila dibandingkan APK SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah sebesar 100,73 (Tahun 2017). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.25.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017

Tahun	SD / MI (%)		SMP / MTs (%)	
	Kab.	Prov	Kab.	Prov
2013	105,61	109,08	100,13	100,52
2014	107,33	109,10	100,12	100,54
2015	107,60	109,31	100,30	100,69
2016	107,74	109,46	100,33	100,72
2017	107,30	109,47	104,41	100,73

Sumber : Disdikbud Kabupaten Karanganyar, 2018

b). Angka Partisipasi Murni (APM)

APM SD/MI meningkat dari 95,88 pada tahun 2013 menjadi 98,61 pada tahun 2017, cspsisn ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan APM SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,97. APM SMP/MTs meningkat dari 78,50 pada tahun 2013 menjadi 85,27 pada tahun 2017, cspsisn ini lebih baik dibandingkan capaian APM SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah sebesar 80,11. Capaian APM SD/MI dan APM SMP/MTs Kabupaten Karanganyar masih dibawah Target SPM. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.26.
Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun	SD / MI (%)		SMP / MTs (%)	
	Kab.	Prov	Kab.	Prov
2013	95,88	98,60	78,50	79,00
2014	96,34	98,32	79,24	77,83
2015	96,81	98,43	79,85	79,51
2016	97,32	98,95	80,43	80,09
2017	98,61	98,97	85,27	80,11

Sumber : Disdikbud, 2018

APM SD/MI lebih rendah di Jawa Tengah dapat diduga dari beberapa kemungkinan. Pertama, siswa di Kabupaten Karanganyar lebih banyak tidak sesuai ketepatan usianya, kedua, bisa disebabkan karena terlalu cepat sekolah atau terlalu lambat sekolah/tinggal kelas.

c). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 sebesar 102,63%, naik menjadi 107,34% pada Tahun 2017. Sedang APS penduduk usia 13-15 tahun mengalami fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 79,42%, naik hingga pada tahun 2017 sebesar 93,37%. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Karanganyar tahun 2013–2017 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.27.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI (7-12 Tahun) (%)	102,63	102,72	105,07	107,10	107,34
2	SMP/MTs (13-15 Tahun) (%)	79,42	91,79	92,23	92,75	93,37

Sumber : Disdikbud, 2018

d). Angka Kelulusan

Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2017 sudah mencapai 100% dengan rata-rata nilai ujian nasional sebesar 70,62, sedangkan angka kelulusan SMP/MTs juga sudah mencapai 100% dengan rata-rata nilai ujian nasional sebesar 6,10.

e). Ketersediaan Sarana Sekolah

Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan pada tahun 2017 sudah mencapai 76,66% sedangkan ruang kelas SMPLB/MTs sesuai standar nasional pendidikan mencapai 85,11%. tahun 2017, SD/MI yang memiliki perpustakaan standar sebesar 85,3% sedangkan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar sebesar 87,47 %.

f). Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 0,02 masih lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,06. Sedangkan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 0,08 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,17.

3) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan indikator kualifikasi S1/D4.

Rata-rata persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 pada tahun 2017 Kabupaten Karanganyar masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel II.28.
Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Jenjang	Kab	Prov
1	Pendidik PAUD	73,38	48,69
2	Pendidik SD/MI/SDLB	93,26	84,10
3	Pendidik SMP/MTs/SMPLB	94,21	94,10
4	Pendidik SMA/SMK/MA	98,08	97,69

Sumber: Disdikbud, 2018

b. Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator dan ketersediaan sarana dan prasarana berikut ini :

1) Penyediaan Fasilitas Kesehatan.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar kurun waktu tahun 2013–2017 mengalami peningkatan. Fasilitas pelayanan yang tersedia di Kabupaten Karanganyar terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan jaringannya yang dimiliki oleh pemerintah, balai pengobatan dan rumah bersalin yang dimiliki oleh swasta serta pelayanan tenaga profesi mandiri. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel II.29.
Fasilitas Kesehatan Tahun 2013-2017

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah RS yang sudah terakreditasi	0	0	0	0	2
2	Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi	0	0	0	4	14
3	Jumlah Puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan sesuai standar	0	0	0	4	14
4	Jumlah RS yang mempunyai fasilitas sesuai standar	na	8	8	8	8
5	Jumlah Klinik yang mempunyai fasilitas sesuai standar (buah)	na	13	25	29	31
6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	na	91,9	98,3	98,9	98,3
7	Ratio Rumah Sakit (per jiwa penduduk)	na	1/109.776	1/107.730	1/109.314	1/110.000
8	Ratio Puskesmas (per jiwa penduduk)	na	1/41.819	1/41.040	1/41.643	1/41.143

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

2) Penyediaan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Karanganyar meliputi tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan) dan

tenaga penunjang medis. Rasio tenaga medis terhadap penduduk dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.30.
Tenaga Medis Tahun 2014-2017

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	1/4.287	1/2.780	1/2.867	1/4.507
2	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	1/25.100	1/26.116	1/19.011	1/29.149
3	Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	1/8.445	1/1.596	1/1.162	1/1.379
4	Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	1/3.585	1/1.436	1/1.223	1/1.856

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

3) Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Karanganyar antara tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel II.31.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Tahun 2013-2017

Tahun	Hipertensi	Diabetes Melitus	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pelayanan IVA	Desa dengan Posbindu
2013	na	na	na	na	na
2014	14.739	4.589	na	3.285	20
2015	15.151	5.166	na	9.579	34
2016	10.954	4.404	na	3.571	47
2017	11.763	3.956	144	4.329	57

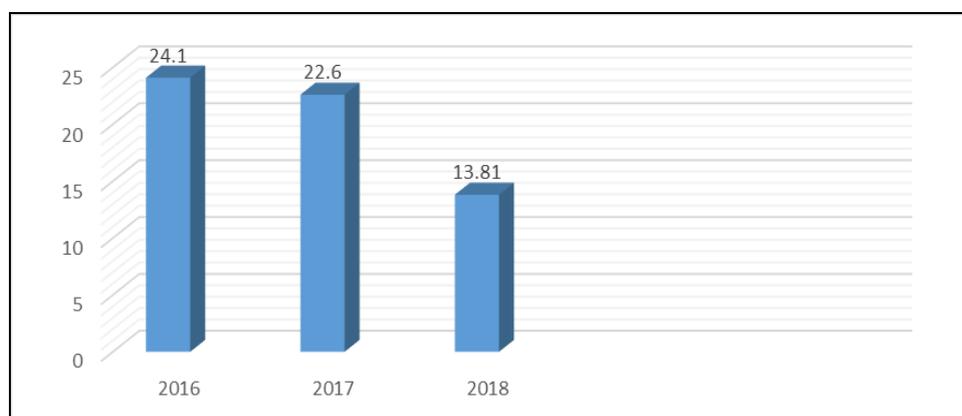
Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

- Pelayanan Hipertensi
Angka sasaran pelayanan Kesehatan Hipertensi adalah 35% dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dari tabel diatas bahwa capaian pelayanan Hipertensi di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun.
- Pelayanan Diabetes Melitus
Angka sasaran pelayanan kesehatan Diabetes Melitus adalah 6,9% dari total jumlah penduduk. Pelayanan Diabetes Melitus meningkat dari tahun ke tahun.
- Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ Berat)
Angka sasaran pelayanan ODGJ Berat adalah semua penderita penderita gangguan jiwa berat yang terdata di Kabupaten Karanganyar. Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa di seksi P2PTM baru dimulai pada tahun 2017. Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan jiwa terhadap orang dengan gangguan jiwa berat baru dilaksanakan mulai tahun 2017 dan menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pelayanan bisa mencapai 100% dan tahun 2018 mencapai 100% dari

target yang ada. Hal ini dapat diartikan bahwa semua Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat ditangani sesuai standar.

4) Stunting

Balita stunting merupakan balita dengan kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari standar tinggi badan menurut usianya. Stunting terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu lama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena berbagai faktor penyebab. Berdasarkan survei PSG Tahun 2016 diketahui prevalensi balita stunting sebesar 24,1%. Sedangkan tahun 2017 prevalensi balita stunting angkanya cenderung menurun yaitu sebesar 22,6%. Untuk tahun 2018 penghitungan prevalensi stunting sebesar 13,81% menurun dibanding 2 tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Gambar II.18.
Grafik Balita Stunting Tahun 2016-2018

Secara metode pengambilan data, ada 2 metode yang digunakan, yaitu pada tahun 2016 dan 2017 menggunakan Survei Pemantauan Status Gizi (PSG), sedangkan data tahun 2018 diperoleh dari hasil *entry* aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi urusan jalan dan jembatan, sumber daya air, air bersih, sanitasi dan jasa konstruksi.

a) Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2017 total panjang jalan kabupaten sepanjang 876,5 km. Jumlah jembatan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 206 unit. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

Tabel II.32.

Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun 2013-2017

No	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kondisi Jalan	Baik	km	437,75	440,13	495,69	537,76	576,36
			%	50	50,3	56,55	61,35	65,76
		Sedang	km	200,13	214,58	229,14	256,31	228,81
			%	22,9	24,5	26,14	29,24	26,1
		Rusak Ringan	km	185,05	177,26	132,98	70,46	60,36
			%	21,1	20,2	15,17	8,04	6,89
		Rusak Berat	km	52,78	43,74	18,69	11,97	10,97
			%	6	5	2,13	1,37	1,25
2	Kondisi Jembatan	Baik	Unit	156	158	159	161	163
			%	75,73	76,7	77,18	78,16	79,13
		Sedang	Unit	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-
		Rusak Ringan	Unit	50	48	47	45	43
			%	24,27	23,3	22,82	21,84	20,87
		Rusak Berat	Unit	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR, 2018

b) Sumber Daya Air

Ketersediaan air dengan metode koefisien limpasan berdasarkan tutupan lahan serta curah hujan tahunan, sedangkan kebutuhan air merupakan kebutuhan hidup layak penduduk, kegiatan industri dan kegiatan pertanian. Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Potensi ketersediaan air Kabupaten Karanganyar tahun 2017 mencapai 1.453.660.518 m³/tahun sedangkan kebutuhannya mencapai 1.035.815.042 m³/tahun. Dengan demikian Daya Dukung Air di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 berdasarkan perhitungan di atas adalah 1,40 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang (*KLHS RPJMD, 2019*).

Proporsi jaringan irigasi dalam di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dalam kondisi sedang. Jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 51,90% sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi sedang mencapai 19,24%. Kondisi jaringan irigasi baik tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi beras. Untuk pengelolaan area irigasi maka dibagi dalam daerah-daerah irigasi. Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Karanganyar sesuai data di Kementerian PUPR adalah sebanyak 308 Daerah Irigasi (DI).

Tabel II.33.

Cakupan Layanan Irigasi Tahun 2013-2017

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

URAIAN		Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kondisi Jaringan Irigasi	Baik	Ha	5.980	6.727	9.607	10.169	9.699
		%	32	36	51,41	54,42	51,9
	Sedang	Ha	3.177	2.990	3.633	3.409	3.595
		%	17	16	19,44	18,24	19,24
	Rusak Ringan	Ha	4.448	4.186	3.177	2.981	3.147
		%	23,8	22,4	17	15,95	16,84
Rusak Berat	Ha	5.083	4.784	2.270	2.128	2.246	
	%	27,2	25,6	12,15	11,39	12,02	

Sumber: DPUPR, 2018

c) Air Bersih

Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2017 untuk kabupaten mencapai 86,98%. Cakupan air bersih belum memenuhi *universal access* karena belum 100%. Tantangannya adalah penyediaan infrastruktur penyalur air bersih.

Tabel II.34.
Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KK	253.851	256.951	261.610	264.373	267.479
2	Akses air bersih pedesaan (KK)	114.116	119.896	126.535	132.385	136.984
3	Akses air bersih perkotaan (KK)	77.675	80.838	85.686	91.148	95.677
4	Belum Akses (KK)	62.060	56.217	49.389	40.840	34.818
5	Total Akses	75,55%	78,12%	81,12%	84,55%	86,98%

Sumber: Baperlitbang, 2018

d) Sanitasi

Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) ada di Kaliboto digunakan untuk seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, namun selama ini wilayah yang memanfaatkan jasa penyedotan tinja untuk diolah di IPLT Kaliboto masih sangat terbatas, yaitu di perkotaan Karanganyar. Pemenuhan kebutuhan sanitasi masih rendah, dimana target *universal access* seharusnya sanitasi 100%. Data Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.35.
Cakupan Pelayanan Sanitasi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KK	226.366	239.088	249.925	257.668	263.463
2	KK Terlayani Sanitasi Dasar	165.897	185.596	205.638	223.604	240.489
3	Persentase KK Terlayani Sanitasi Dasar	73,28%	77,78%	82,28%	86,78%	91,28%
4	KK Terlayani Sanitasi Layak	117.721	143.930	157.452	167.484	188.376

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Persentase KK Terlayani Sanitasi Layak	52%	60,2%	63%	65%	71,5%

Sumber: DPUPR, 2018

e) Drainase

Jaringan drainase Kabupaten Karanganyar banyak memanfaatkan kondisi topografis dengan kelereangan yang memungkinkan pembuangan air kotor mengalir ke sungai yang ada. Sistem drainase pada umumnya menggunakan sistem setempat dengan pelayanan secara individual dan komunal. Limbah rumah tangga menggunakan sistem saluran pembuangan air limbah yang kemudian dialirkan ke saluran drainase.

Tabel II.36.

Cakupan Pelayanan Drainase Tahun 2013-2017

URAIAN	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Drainase (%)	61,33	66,33	71,33	76,33	81,33

Sumber: DPUPR, 2018

2) Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang (RDTR) kecamatan yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pasca ditetapkannya RTRW Kabupaten Karanganyar, telah tersusun 6 (enam) Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan yang selanjutnya nanti harus mendapatkan legalitas dalam bentuk perda.

RDTR kecamatan ini akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, karena rencana detail tata ruang merupakan perangkat atau instrumen untuk pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Berdasarkan RTRW Kabupaten Karanganyar dapat dilihat struktur dan pola ruang dalam rangka pengembangan Kabupaten Karanganyar. Struktur ruang terdiri atas: rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan. Berdasarkan sistem perkotaan, maka kota yang merupakan pusat kegiatan lokal (PKL) adalah Kota Jaten, Karanganyar dan Tawangmangu, sedangkan Colomadu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan tempat tinggal, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan perumahan. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu ditangani di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel II.37.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah RTLH (unit)	na	na	14.935	14.402	13.891
Rasio RTLH	na	na	0,067	0,066	0,064
Jumlah Rumah Yang ditangani (dibangun)	na	na	533	511	1.457
Sisa RTLH	na	na	14.402	13.891	12.434
Kawasan Kumuh (Ha)	na	na	na	100,16	83,72

Sumber : Dishub PKP, 2018

Tabel II.38.
Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jml Awal (unit)	Sumber Dana (unit)					Jml	Sisa
			APBD Kab	APBD Prov	BS PS	Kemensos			
1	2013	Na	na	na	na	na	na	na	
	2014	na	na	na	na	na	na	na	
	2015	14.935	420	na	na	113	533	14.402	
2	2016	14.402	291	220	na	na	511	13.891	
3	2017	13.891	570	220	667	na	1.457	12.434	
4	2018	12.434	210	100	458	na	768	11.666	

Sumber : Dishub PKP, 2018

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Kondusivitas Daerah

Kondusivitas daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun secara umum menunjukkan situasi yang aman dan terkendali, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejadian kejahatan dan pelanggaran yang menonjol di Kabupaten Karanganyar adalah pencurian, penipuan dan penggelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi masih menonjol. Gambaran data secara rinci dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel II.39.
Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perkosaan (Pasal 285)	2	1	0	1	1
2	Perzinahan (Pasal 287)	1	2	1	0	3
3	Pembunuhan (Pasal 340)	0	0	1	0	0
4	Penganiayaan (Paal 351)	20	11	16	5	14
5	Pencurian Biasa (Pasal 362)	33	37	31	21	28

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6	Pencurian Pemberatan (Pasal 363)	62	62	60	50	32
7	Pencurian Kekerasan (Pasal 365)	5	7	6	9	3
8	Penggelapan (Pasal 372)	44	46	33	21	12
9	Penipuan (Pasal 378)	75	72	55	23	23
10	Curanmor	8	18	15	16	15
11	Lain-lain	0	59	98	93	52

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2018

2) Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2013 – 2017, jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar mengalami penambahan pada tahun 2017. Terkait pelanggaran peraturan daerah untuk setiap tahunnya masih belum bisa diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel II.40.
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Personil Satpol PP	54	54	54	53	72
2	Jumlah Pelanggaran Perda	559	460	400	320	230
3	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	70	65	70	80	85
4	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakkan perda	70	70	75	76	78

Sumber: Satpol PP Kabupaten Karanganyar, 2018

3) Penyelenggaraan Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum (kamtramtibum) adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri dan terjadinya kewaspadaan dini masyarakat. Jumlah anggota linmas dan jumlah pos siskamling di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel II.41.
Jumlah Anggota Linmas dan Jumlah Pos Siskamling di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Personil Linmas	6.465	6.415	6.379	6.249	6.204
2	Jumlah Pos Siskamling	6.130	6.130	6.130	6.130	6.132

Sumber: Satpol PP Kabupaten Karanganyar, 2018

Tabel II.42.
Jumlah lembaga kemasyarakatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Lembaga	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Partai Politik (Parpol)	14	14	14	12	12
2.	Organisasi Masyarakat (Ormas)	80	85	91	140	148

No	Lembaga	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)					
	a. Terdaftar	72	72	72	78	78
	b. Tidak Aktif	12	12	12	12	12
	c. Aktif	60	60	60	60	66

Sumber : Bakesbangpol, 2018

4) Penanganan Bencana

Penanganan bencana harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana. Berikut capaian penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.43.

Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Korban Bencana	248	268	1.039	598	511
2	% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	0,03	0,03	0,12	0,07	0,06
3	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	1,69	1,69

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2019.

f. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti teknologi dan sumber daya ekonomi. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial maupun kebijakan daerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar, secara umum mencakup: masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas.

1) Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah anak penghuni panti asuhan yang ada di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013 hingga tahun 2017 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2013 berjumlah 501 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 386 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44.

Penghuni Panti Asuhan Tahun 2013-2017

Tahun	Penghuni		Jumlah Panti Asuhan
	Laki-laki	Perempuan	
2013	264	237	12
2014	260	241	12
2015	233	211	16
2016	243	224	17
2017	165	221	17

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2018

Penyandang disabilitas merupakan Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mereka hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya, namun karena keadaan dan keterbatasan, mereka tersisihkan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang disekitarnya, seringkali mengabaikan hak dan kewajibannya. Pandangan ini perlu diubah karena penyandang disabilitas memiliki potensi, untuk dikembangkan sesuai dengan minat, bakat dan kondisi disabilitasnya.

Tabel II.45.

Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Lembaga	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penyandang Disabilitas	4.236	4.136	4.848	4.937	4.937
2.	Yang diberi Bantuan	232	277	290	377	246

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2018

2) Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial, keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi faktor penting.

Tabel II.46.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017

Tahun	Pekerja Sosial Masyarakat	Wanita Pemimpin Kesos	Karang Taruna	Organisasi sosial
2013	812	354	184	24
2014	842	360	182	24
2015	831	371	170	25
2016	940	394	196	35
2017	940	405	177	35

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2018

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2013–2017 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan jumlah yang berfluktuatif, dimana jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 36 kasus, dan kasus terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 24 kasus. Namun demikian, semua kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel II.47.

Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Kasus	Status
-------	--------------	--------

Tahun	Jumlah Kasus	Status
2013	24	Tertangani 100%
2014	26	Tertangani 100%
2015	26	Tertangani 100%
2016	35	Tertangani 100%
2017	36	Tertangani 100%

Sumber : Dinas Dagnakerkop dan UKM, 2018

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2013–2017 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel II.48.

Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	TPAK
2013	609.453	442.538	72,62
2014	637.549	452.900	71,04
2015	646.348	449.704	69,58
2016	655.346	466.504	71,18
2017	672.333	472.241	70,24

Sumber : Dinas Dagnakerkop dan UKM, 2018

3) Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten di banding KHL

Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Karanganyar selama periode Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 rasio UMK terhadap KHL sebesar 108,22%. Hal ini menunjukkan jika UMK yang ada di Kabupaten Karanganyar telah melebihi dari KHL Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.49.

Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL
Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017

Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
2013	896.500	1.129.322	79,38
2014	1.060.000	1.202.151	88,18
2015	1.226.000	1.397.000	85,05
2016	1.420.000	1.441.472	98,51
2017	1.560.000	1.441.472	108,22

Sumber : Dinas Dagnakerkop dan UKM, 2018

4) Persentase penempatan tenaga kerja

Persentase penempatan tenaga kerja dalam periode 2013-2017 mengalami peningkatan, hal ini sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang diterima kerja. Tabel berikut ini menunjukkan persentase

penempatan tenaga kerja.

Tabel II.50.

Persentase Penempatan Tenaga Kerja tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diterima Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
2013	2.113	8.749	24,15
2014	2.753	4.732	58,18
2015	2.392	4.457	53,67
2016	3.412	3.863	88,33
2017	3.502	4.221	82,97

Sumber : Dinas Dagnakerkop dan UKM, 2018

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Karanganyar

Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di Kabupaten Karanganyar, secara sistematis telah dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD) dan Renja PD. Capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.51.

Indeks Pembangunan Gender Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IPG	95,71	96,08	96,15	96,15	96,50
IDG	71,66	77,00	75,84	75,84	74,27

Sumber : Dinas P3APPKB, 2018

2) Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

Berbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lain perlindungan bagi korban kekerasan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 29 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 20 tahun 2014.

Tabel II.52.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	30	33	34	26	24

Sumber : Dinas P3APPKB, 2018

3) Kebijakan Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamatkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk perlu mendapatkan perlindungan. Selama kurun waktu 2013-2017, jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk bagi anak masih tinggi bekerja di berbagai sektor. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan dan

budaya konsumtif akibat pengaruh globalisasi teknologi.

4) Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Kabupaten

Tahun 2013 telah disusun Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Layak Anak (KLA).

5) Persentase Perempuan Bekerja di Pemerintahan

Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar relatif sudah cukup besar dimana pada tahun 2017 adalah sebesar 52,83%. Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejumlah 9.635 orang, yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 5.130 orang.

Tabel II.53.

Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
PNS Perempuan	na	5.702	5.611	5.082	5.130

Sumber : BKPSDM, 2018

6) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD

Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan dari 12,50% menjadi 15,38%. Meskipun ada peningkatan namun belum memenuhi standar 30% perwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Tabel II.54.

Perempuan sebagai Anggota DPRD Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Perempuan di lembaga legislatif	8	11	11	11	12

Sumber : Dinas P3APPKB, 2018

7) Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak

Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Gugus Tugas dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dan telah terbentuk Forum Anak Kabupaten Karanganyar.

c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup: (a) Sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan, (c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi serta (d) Sub sistem keamanan pangan melalui peningkatan sertifikasi pangan segar dan keamanan pangan. Ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar secara umum, semakin baik dan

kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- 2) Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Kabupaten Karanganyar.
- 3) Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan.
- 4) Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat, peran serta tersebut diwujudkan dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan.
- 5) Keamanan Pangan di Kabupaten Karanganyar cukup mantap hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentra produksi beras dan selama tahun 2013-2017 mengalami surplus.

Gambaran indikator ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar selama beberapa periode waktu, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.55.
Data Kondisi Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Strategis
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Komoditas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi (ton)	281.674	357.978	311.920	337.925	334.394
Jagung (ton)	33.595	28.782	39.410	36.567	27.113
Ubi kayu (ton)	158.048	115.689	131.244	91.478	83.113
Kedelai (ton)	371	234	217	252	419
Kacang tanah (ton)	7.755	9.607	6.680	4.935	2.266
Ubi jalar (ton)	16.849	27.054	31.076	19.916	33.920

Sumber : *Dispertan, 2018*

Distribusi bahan pangan seharusnya tersedia bagi semua konsumen, meskipun wilayah sentra produksi berbeda dengan wilayah pasar dan sentra konsumen. Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sampai dengan tahun 2017 ada 5 (lima) gabungan kelompok tani yang dibina oleh Dinas Pertanian. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita tani, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang sampai tahun 2017 ada 20 Kelompok Wanita Tani binaan dari Dinas Pertanian.

Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras berdasarkan hasil perhitungan di Kabupaten Karanganyar mengalami surplus beras dan meningkat dari 2013 – 2017, hal ini menunjukkan Kabupaten Karanganyar merupakan salah

satu lumbung pangan Jawa Tengah yang memiliki potensi pertanian tinggi. Pada tahun 2013, dengan hasil 176.722 ton beras, dengan kebutuhan konsumsi beras 104.181 ton sehingga menghasilkan daya dukung pangan sebesar 1,70 atau surplus beras sebanyak 72.541 ton. Pada tahun 2017, daya dukung pangan Kabupaten Karanganyar semakin meningkat yaitu 1,86 atau surplus beras sebanyak 100.945 ton. (KLHS RPJMD, 2019). Dengan demikian surplus beras ini menjadi potensi bagi wilayah sekitarnya terutama Kota Surakarta yang defisit produksi pangan sangat tinggi karena karakteristik wilayahnya yang perkotaan. Selain itu juga menjadi penyokong pangan pokok tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II.56.

Perhitungan Daya Dukung Pangan Beras Tahun 2013 dan 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah produksi padi (ton)	281.674	357.978	311.920	337.925	334.394
Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%)	176.722	224.595	195.699	212.014	209.799
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar (jiwa)	840.171	861.845	870.679	894.308	871.596
Angka konsumsi beras (kg/tahun/tahun)	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	104.181	107.636	108.739	111.690	112.535
DDP (Daya Dukung Pangan)	1,70	2,09	1,80	1,90	1,86

Sumber: Dispertan, 2019

Capaian skor pola pangan harapan mengalami fluktuasi pada periode 2013-2017, capaian pada tahun 2013 sebesar 87,00 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 87,10. Ketersediaan Energi pada tahun 2015 sebesar 1.753 kal/kapita meningkat menjadi 2.200 kal/kapita pada tahun 2017, sementara ketersediaan protein pada tahun 2015 sebesar 57 kal/kapita menurun menjadi 50 kal/kapita pada tahun 2017. Jumlah lumbung pangan masyarakat pada tahun 2013-2017 hanya berjumlah 21 unit.

Tabel II.57.

Capain Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,00	92,30	85,90	87,20	87,10
2. Ketersediaan Energi per kapita (kal/kapita)	na	Na	1.753	1.717	2.200
3. Ketersediaan Protein per kapita (kal/kapita)	na	na	57	57	50
4. Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	21	21	21	21	21

Sumber: Dispertan, 2019

d. Pertanian

Urusan pertanahan di Kabupaten Karanganyar sebagian besar ditangani oleh Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Kecamatan. Urusan pertanahan di daerah terkait dengan aset, pensertifikatan, ganti rugi, sewa menyewa dan atau perjanjian kerjasama. Perkembangan pengelolaan tanah di Kabupaten Karanganyar

dari Tahun 2017-2018 berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) dapat dilihat pada tabel berikut. Penambahan jumlah bidang tanah dikarenakan pengalihan aset dari desa/kelurahan kepada pemerintah kabupaten.

Tabel II.58.
Pengelolaan Tanah Tahun 2013-2017

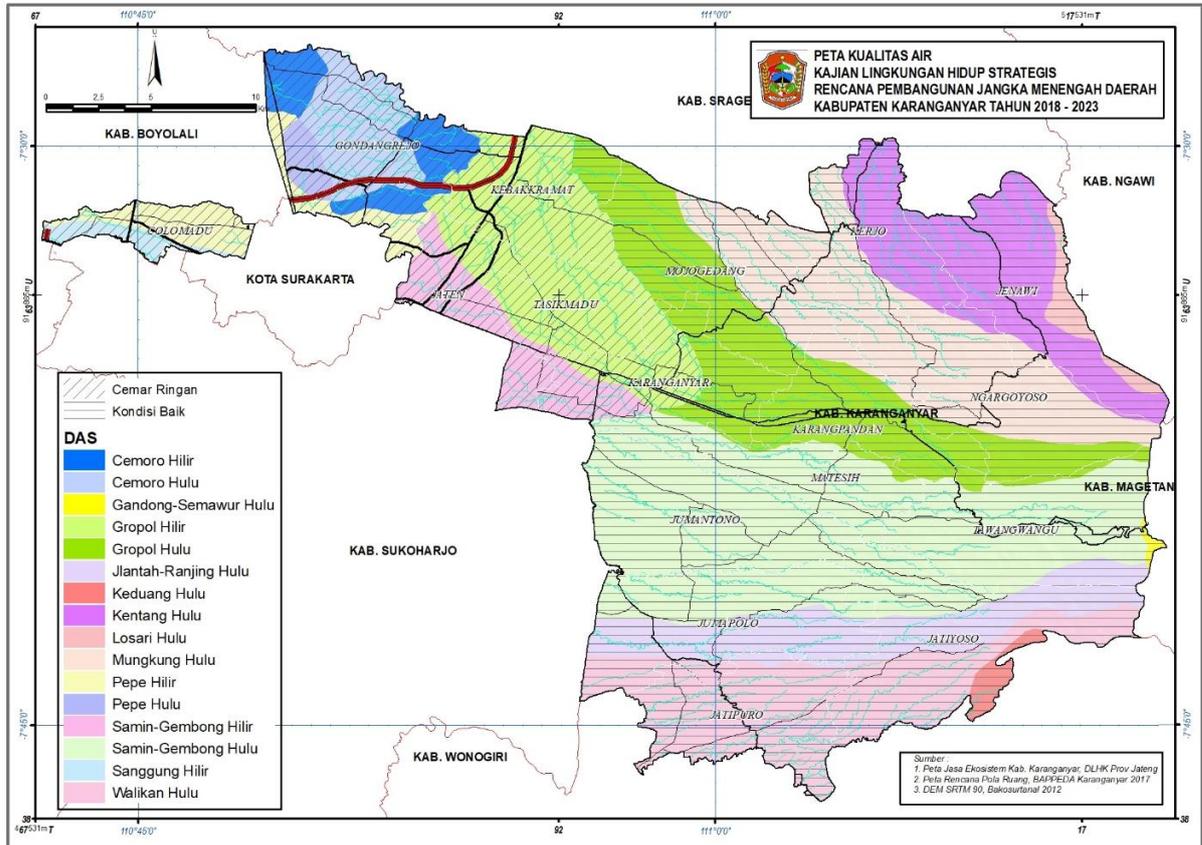
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah Bidang Tanah	Na	Na	Na	1.385	1.435
2. Jumlah Bidang Tanah Yang telah Bersertifikat	Na	Na	Na	596	729
3. Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat	Na	Na	Na	789	706

Sumber : Setda dan BKD, 2018

e. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dapat ditunjukkan melalui penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, tindak lanjut terhadap pengaduan kasus lingkungan hidup dan informasi penetapan kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa.

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan dari tahun 2013-2017 di empat sungai utama yaitu, Sungai Ngringo, Sungai Pengok, Sungai Sroyo dan Sungai Siwaluh meliputi parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, COD dan sebagainya), dan biologi (keberadaan plankton, bakteri dan sebagainya) setelah dibandingkan dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menunjukkan bahwa di bagian hulu Sungai Ngringo untuk parameter TDS, TSS, Phosphat, COD masih memenuhi baku mutu air Kelas IV. Air pada bagian hulu Sungai Ngringo ini masih dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukkan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Sungai Pengok kualitas air di bagian hulu masih memenuhi baku mutu tapi untuk kadar BOD pada tahun 2017 melebihi mutu air kelas III sedangkan untuk bagian hilir kadar BOD dan COD melebihi baku mutu. Untuk sungai Sroyo dibagian hulu masih memnuhi baku mutu air kelas IV dan dibagian hilir terjadi peningkatan pada parameter TDS dan TSS tapi masih memenuhi baku mutu air kelas IV. Sedangkan untuk sungai Siwaluh dibagian hulu masih memnuhi baku mutu air kelas III dan dibagian hilir terjadi peningkatan untuk konsentrasi TDS, COD dan BOD namun masih memenuhi baku mutu air kelas III.

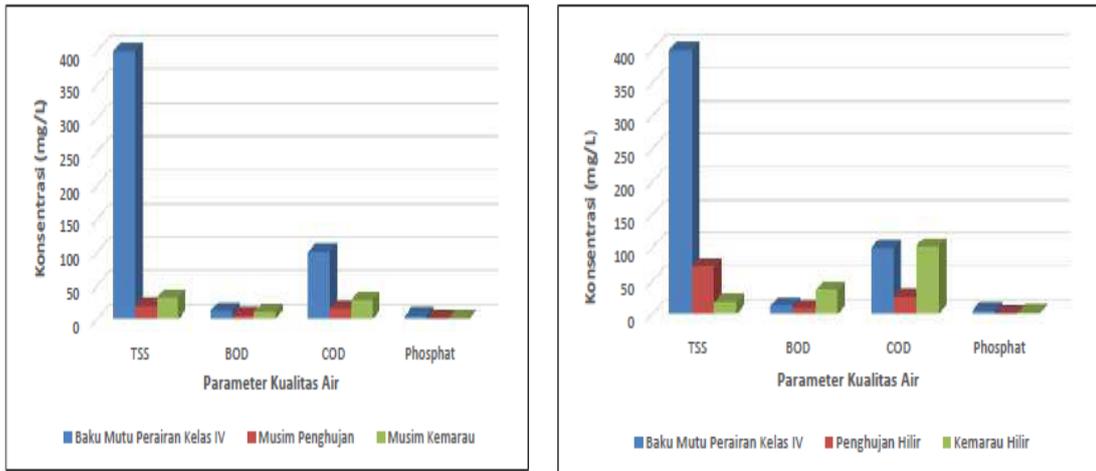


Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Gambar II.19.
Persebaran Kualitas Air Sungai Kabupaten Karanganyar

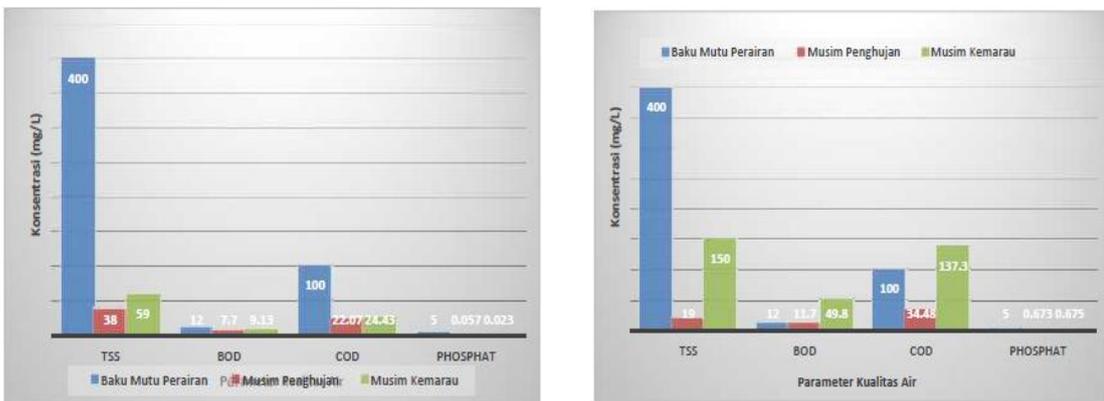
Untuk kualitas Air Waduk Delingan dan Waduk Lalung kadar detergen cukup tinggi dan hasil analisa BOD juga lebih tinggi dari baku mutu, sedangkan COD di bawah baku mutu, sehingga waduk dapat dikatakan telah tercemar jika untuk air minum namun masih dapat digunakan untuk pengairan dan peternakan ikan. Dengan melihat kondisi kualitas air sungai dan waduk di Kabupaten Karanganyar menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pencemaran air yang disebabkan oleh meningkatnya buangan limbah domestik rumah tangga dan kegiatan industri. Kondisi di wilayah hilir relatif lebih buruk dibandingkan dengan wilayah hulu.

Parameter yang diukur meliputi parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, COD dan sebagainya), dan biologi (keberadaan plankton, bakteri dan sebagainya). Parameter-parameter kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan di bagian hulu Sungai Ngringo dari tahun 2013-2017 untuk parameter TDS, TSS, Phosphat, COD masih memenuhi baku mutu air Kelas IV. Air pada bagian hulu Sungai Ngringo ini masih dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukkan lain yang sama dengan kegunaan tersebut.



Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Gambar II.20.
Kualitas Air Sungai Ngringo Hulu dan Hilir



Sumber : KLHS RPJMD, 2019

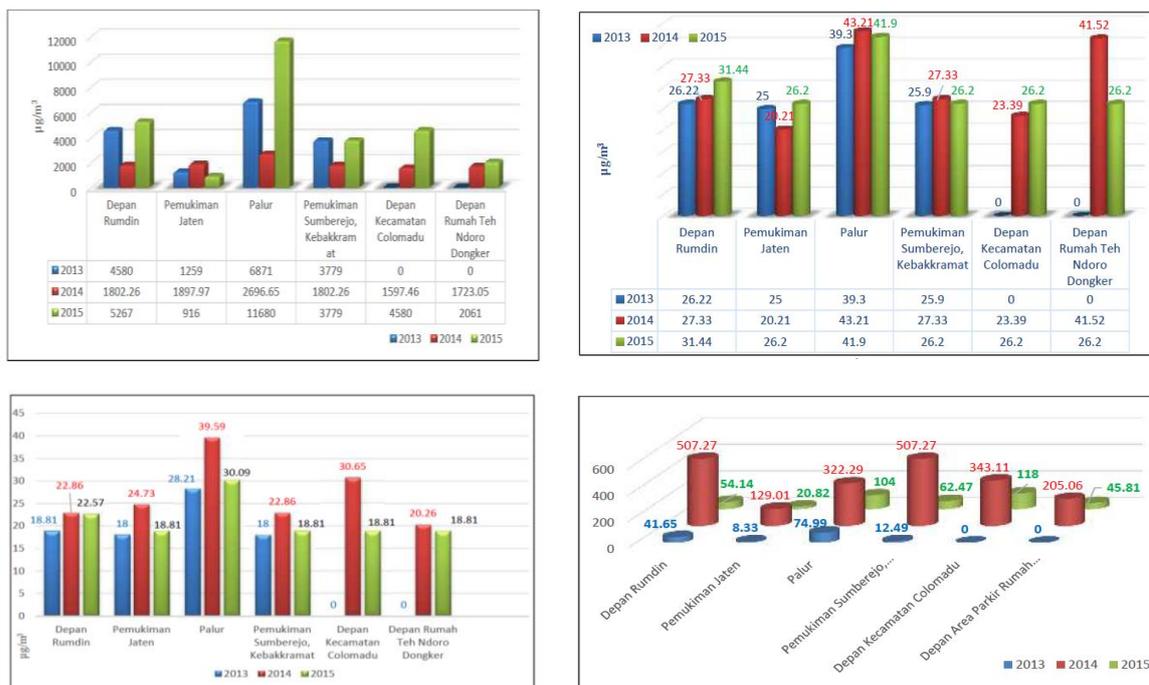
Gambar II.21.
Kualitas Air Sungai Pengok Hulu dan Hilir

Kondisi kualitas udara berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang diambil dari enam titik lokasi menunjukkan bahwa konsentrasi partikular tertinggi dan melebihi baku mutu terdapat di wilayah kawasan dengan kondisi arus lalu lintas yang sangat padat serta kawasan industri. Aktivitas transportasi pada wilayah dengan kemacetan tinggi serta kawasan industry. Parameter CO meskipun masih memenuhi baku mutu, tetapi ada kecenderungan yang meningkat dari tahun 2013 – 2017 terutama yang disebabkan oleh aktivitas transportasi.

Untuk parameter SO₂ dan NO₂ terjadi fluktuatif yaitu naik dari tahun 2013 ke 2014 dan kembali turun pada tahun 2017. Sedangkan untuk kondisi GRK pada tahun 2015 menunjukkan bahwa GRK dari sector energy yang didominasi kegiatan transportasi mencapai 314,6 Gg CO₂e dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 359,6 Gg CO₂e mengalami kenaikan 14,3%. GRK lainnya dihasilkan dari sector industry (limbah) sebesar 12,5 Gg CO₂e pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,7 Gg Co₂e.

Pada parameter CO meskipun masih memenuhi baku mutu, tetapi ada kecenderungan yang meningkat dari tahun 2013 – 2017 terutama yang disebabkan

oleh aktivitas transportasi. Sedangkan untuk parameter SO₂ dan NO₂ terjadi fluktuatif yaitu naik dari tahun 2013 ke 2014 dan kembali turun pada tahun 2017.



Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Gambar II.22.

Kondisi Kualitas Udara Ambien dari Beberapa Titik Sampel

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari 79,43 menjadi 80,11, untuk indeks kualitas air mengalami peningkatan dari 52,3 pada tahun 2013 menjadi 53,15 pada tahun 2017. Tutupan lahan juga mengalami peningkatan dari 54,27 pada tahun 2013 menjadi 55,00 pada tahun 2017, dengan adanya peningkatan untuk masing-masing IKLH dari tahun 2013-2017 dari 61,23 menjadi 61,98.

Tabel II.59.

Perkembangan Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017

Komoditas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,23	61,53	61,65	61,68	61,98
a. Indeks Kualitas Air	52,30	52,60	52,75	52,75	53,15
b. Indeks Kualitas Udara	79,43	79,60	79,84	79,84	80,11
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,27	54,67	54,67	54,76	55,00

Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Kondisi volume sampah di Kabupaten Karanganyar untuk setiap hari atau setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Timbulan sampah pada tahun 2017 sebanyak 304,045 m³ dengan volume pengangkutan sebanyak 200,750 m³ maka untuk penanganan sampah saat ini baru mencapai 66,03 %. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar saat ini telah ada 8 kecamatan yang telah memiliki Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).

Lokasi TPS dan volume sampah dari 8 Kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.60.

Produksi Sampah dan Layanan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Sumber	(%)	Timbulan		Terangkut	
			Per Hari (m ³)	Per Tahun (m ³)	Per Hari (m ³)	%
1	Volume sampah yang dikelola DLH	45	375	136.875	250	66,67
2	Volume sampah dari pabrik, pihak swasta, PD lain/Disdagnaker Koperasi dan UKM (bidang pasar) dan masyarakat	55	458	167.170	300	65,50
	JUMLAH TOTAL	100	833	304.045	550	66,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2018

Saat ini ada 1 (satu) Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang berlokasi di Desa Sukosari Kecamatan Jumapolo dengan luas 3,82 Hektar dengan kapasitas sebesar 725.528,29 m³.

Tabel II.61.

Lokasi TPS, Jumlah TPS dan Volume Sampah Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Volume Sampah (m ³)
1.	Karanganyar	19	188
2.	Jaten	9	320
3.	Tasikmadu	3	28
4.	Colomadu	16	813
5.	Gondangrejo	5	124
6.	Tawangmangu	7	55
7.	Karangpandan	3	18
8.	Kebakramat	2	12
	JUMLAH	64	1.558

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2018

Sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilayani oleh 19 armada truck sampah. Sedangkan untuk sarana prasarana pengelolaan sampah TPA, Kabupaten Karanganyar memiliki 3 alat berat (excavator, bulldozer dan loader).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Persentase penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2013-2017 kondisinya fluktuatif. Pada tahun 2017 prosentase kepemilikan KTP sebesar 97,25%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.62.

Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Data Kependudukan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

No	Data Kependudukan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	861.845	861.845	870.679	894308	901.076
2.	Wajib KTP (jiwa)	593.685	662.755	645.246	679,792	686,469
3.	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP (jiwa)	583.985	603.843	615.006	655.367	667,591
4.	Persentase Kepemilikan KTP (%)	98,36	91,11	95,31	96,40	97,25
5.	Persentase Kepemilikan KIA Usia 0-16 (%)	na	na	na	3,2%	7,5%

Sumber : Disdukcapil, 2018

2) Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Persentase kepemilikan Akte Kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013–2017 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.63.

Jumlah Pemohon Akta Kelahiran dan Akta Kematian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Data Kependudukan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 th. (jiwa)	125.793	137.370	156.269	193.542	213.761
2.	Jumlah Penduduk Usia 0-18 (jiwa)	228.712	227.059	236.772	229.643	237.146
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	55	60,5	65,9	84,2	89,2
4.	Jumlah penduduk meninggal yang diterbitkan Akte Kematian	70	100	183	252	579
5.	Jumlah kematian penduduk	2.828	2.889	2.728	2.763	2.378
6.	Persentase penerbitan akte kematian	2,4	3,3	6,3	8,3	19,6

Sumber : Disdukcapil, 2018

3) Jumlah Kepemilikan Akta Nikah

Persentase kepemilikan Akte Nikah di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013–2017 mengalami peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.64.

Jumlah Pemohon Akta Kelahiran dan Akta Kematian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Data Kependudukan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk berstatus kawin	466.684	457.725	402.292	487.471	487.318
2.	Pasangan berstatus kawin	233.342	228.862	201.146	243.735	243.659
3.	Pasangan berakta nikah	87.736	87.883	80.653	102.856	109.646
4.	Persentase kepemilikan akta nikah	37,6%	38,4%	40,09%	42,2%	45%

Sumber : Disdukcapil, 2018

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan telah dilakukan melalui peningkatan peran masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Persentase Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017. Berikut capaian perkembangan keberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel II.65.

Perkembangan Keberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi baik (%)	25	30	35	40	45
2.	Persentase keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa (%)	20	20	20	20	20
3.	Jumlah desa cepat berkembang	33	37	40	45	58
4.	Persentase Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3,22	3,78	6,13	11,05	13,91

Sumber : Dispermasdes, 2018

Dalam melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kepada desa beberapa permasalahan dalam peningkatan kemandirian desa adalah :

- 1) Bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - a). Kapasitas dan ketrampilan aparatur desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
 - b). Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan desa; dan
 - c). Belum optimalnya penerapan undang-undang tentang desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat guna (TTG) :
 - a) Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik;
 - b) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDesa, UP2-PKK Pengelolaan Pasar Desa);
 - c) Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.
- 3) Bidang pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat :
 - a) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat;

- b) Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan ber KB serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peserta KB aktif di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 140.855 dari 170.726 Pasangan Usia Subur (PUS).

Tabel II.66.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	79,46	79,03	78,64	79,17	82,47
2.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	9,79	8,83	8,12	8,67	7,76
3.	Persentase Metode Kontrasespsi Jangka Panjang (MKJP)	33,40	33,75	33,52	35,31	35,29
4	<i>Drop Out (DO) KB (%)</i>	na	25,21	25,20	21,21	13,76
5	Peserta Baru (PB) KB (org)	24.192	22.604	22.988	19.094	14.697
6	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun / 1000 perempuan	27	28	29	30	31
7	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per wanita usia subur (WUS) (15-49 tahun)	2,23	2,23	2,23	2,23	2,39

Sumber: DP3APPKB, 2018

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2017 untuk *contraceptive prevalence rate (CPR)* yang sebesar 65,8 maka Kabupaten Karanganyar lebih baik (tinggi capaiannya), untuk *unmet need* yang sebesar 10,14%, Kabupaten Karanganyar capaiannya juga lebih baik baik (7,76%). Untuk *Total Fertility Rate (TFR)* yang sebesar 2,31 Kabupaten Karanganyar lebih besar, sedangkan *Age Spesific Fertility Rate (ASFR)* target nasional 42/1000, Kabupaten Karanganyar lebih rendah yaitu 31/1000.

i. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Karanganyar berupa perhubungan darat, yang meliputi angkutan darat dan angkutan kereta api. Untuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 2 buah (Terminal Tawangmangu dan Tegalgede), terminal tipe C ada 10 buah.

Tabel II.67.

Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Terminal	Lokasi	Kondisi
1	Terminal Gondangrejo	Gondangrejo	Kurang Baik
2	Terminal Palur	Palur	Kurang Baik
3	Terminal Jungke	Jungke	Kurang Baik
4	Terminal Matesih	Matesih	Tidak Baik (Bangunan

			Terminal Tidak Ada)
5	Terminal Karangpandan	Karangpandan	Kurang Baik
6	Terminal Ngargoyoso	Ngargoyoso	Kurang baik
7	Terminal Jambangan	Jambangan	Kurang Baik
8	Terminal Jenawi	Jenawi	Kurang Baik
9	Terminal Jumapolo	Jumapolo	Kurang baik
10	Terminal Jatipuro	Jatipuro	Kurang baik

Sumber : Dishubpkp, 2018

Guna mendukung keselamatan lalu lintas, maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karanganyar, yang terdiri antara lain rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), *guardrail* dan marka jalan. Data rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dan kebutuhan rambu lalu-lintas tahun 2013-2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.68.

Data Rambu-rambu Lalu lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Berfungsi Baik (unit)	155	233	443	464	653
2.	Tidak berfungsi (Rusak) unit	55	62	62	81	52
3.	Kebutuhan (unit/ meter)	600	600	600	600	800
4.	Persentase Ketersediaan Rambu	25,83	38,83	73,83	77,83	81,63

Sumber : Dishubpkp, 2018

Data Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji Berdasarkan Ketentuan Wajib Bayar dan Beban Biaya Uji Keadaan Tahun 2013-2017 terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.69.

Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan Kecelakaan yang terjadi di Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	na	14.580	15.142	15.350	17.654
2.	Jumlah Trayek (A-Q dan Perdesaan)	17	17	17	17	17
3.	Jumlah kecelakaan lalulintas (kali)	na	na	907	1.287	1.181

Sumber : Dishubpkp, 2018

Tabel II.70.

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Kendaraan Yang Diuji Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kendaraan Wajib Uji (unit)	Na	855	8885	9085	9091
2.	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	na	14.580	15.142	15.350	17.654

Sumber : Dishubpkp, 2018

Tabel II.71.

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kecelakaan	na	na	699	1014	941
2.	Jumlah Korban Meninggal	na	na	11	28	37
3.	Jumlah Korban Luka Berat	na	na	42	70	60
4.	Jumlah Luka Ringan	na	na	864	1.287	1.181

Sumber : Dishubpkp, 2018

Kabupaten Karanganyar memiliki 3 stasiun kereta api yaitu Stasiun Palur, Kalioso, dan Kemiri. Namun, ketiga stasiun ini belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena masih cenderung bukan sebagai tujuan perjalanan.

Tabel II.72.

Data Perlintasan Sebidang Jalan Raya Dengan Rel Kereta Api Di Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

Keterangan	Lokasi
Perlintasan Sebidang Jalan Raya Dengan Rel Kereta Api Yang Berpalang Pintu	Perlintasan Sebidang Jalan Raya Dengan Rel Kereta Api Yang Berpalang Pintu ada 9 (sembilan) lokasi.
Perlintasan Sebidang Jalan Raya Dengan Rel Kereta Api Yang Tidak Berpalang Pintu	1. Wilayah Kecamatan Jaten Dan Kebakkramat ada 10 lokasi. 2. Wilayah Kecamatan Gondangrejo ada 14 lokasi

Sumber : Dishubpkp, 2018

j. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan perlu dibuka seluas-luasnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Kekinian data yang tersaji dalam *website* milik pemerintah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.73.

Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Warung Internet (Warnet)	141	141	141	141	147
2	Radio Siaran	3	3	3	3	3
3	Hotspot (WIFI)	na	na	na	na	6
4	Aplikasi :					
	a. Aplikasi berbasis Web	na	na	na	na	18
	b. Aplikasi Layanan	na	na	na	na	87
5	Jaringan :					
	a. Bandwidth Internasional (Dedicated) (Mbps)	na	na	na	20	30
	b. Bandwidth IIX (Dedicated)	na	na	na	20	30

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	c. Tower Telekomunikasi	145	145	145	145	145
	d. Data Radio	na	na	na	na	43
	e. Titik Fiber Optik (FO)	na	na	na	na	21
6	layanan publik yang berbasis elektronik	na	na	na	na	11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi (UKMK) serta koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar secara kuantitatif jumlah koperasi terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan koperasi dari tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan kearah yang baik. Khusus tahun 2017 koperasi yang aktif bertambah melebihi penambahan jumlah koperasi, kondisi yang menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah koperasi dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.74.
Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi Aktif	816	824	841	842	847
2	Koperasi Tidak Aktif	279	328	328	328	327
3	Jumlah	1.095	1.152	1.169	1.170	1.174

Sumber : BPS, 2018

1. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui indikator antara lain jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN); persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; dan rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2017 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Perkembangan jumlah investor berskala nasional di Karanganyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Keberadaan perizinan satu pintu diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pada Tahun 2017, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Pariwisata, Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Sarana Kesehatan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin Menara Telekomunikasi.

Tabel II.75.
Jumlah Pelayanan Perijinan dan Nilai Investasi PMA/PMDN
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Perusahaan	Besar Nilai Investasi (Rp)
2013	74	7.730.293.631.733
2014	61	12.599.470.566.890
2015	70	14.264.408.402.120
2016	69	14.561.006.303.973
2017	84	15.627.398.160.968

Sumber : DPMPTSP, 2018

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan pada tahun 2013-2017, telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan. Selain itu guna meningkatkan wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda dilakukan beberapa upaya, salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan generasi muda, dengan capaian kegiatan dari tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 300 pelatihan.

Guna mendorong peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda, telah dilakukan kegiatan kewirausahaan kepemudaan, melalui pembentukan klaster kewirausahaan pemuda yang dilakukan mulai tahun 2014. Sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 10 klaster kewirausahaan pemuda. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 18 organisasi kepemudaan. Selain itu dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan melalui pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) pada tahun 2017 dilatih 3 orang dan dari tahun 2013 - 2017 jumlah Pemuda Pelopor sebanyak 25 orang.

Peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui kader kewirausahaan yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader kewirausahaan, yaitu: (i) pelatihan, (ii) pembimbingan, (iii) pendampingan, dan (iv) akses permodalan. Perkembangan kegiatan kepemudaan selengkapnyanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.76.
Perkembangan Kepemudaan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	na	na	7	7	7
2	Pelatihan dan pengembangan generasi muda	60	60	60	60	60
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2
4	Jumlah Klaster Kewirausahaan Pemuda	na	2	2	3	3
5	Jumlah SP3 yang dibina	0	0	0	0	3
6	Jumlah Pemuda Pelopor	25	25	25	25	25

Sumber : Disparpor, 2018

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga, yang sampai tahun 2017 terdapat 18 organisasi Cabang Olah Raga. Kurun waktu 2013–2017 klub olahraga dan kegiatan olahraga semakin meningkat, sedangkan untuk organisasi olahraga jumlahnya tidak mengalami perubahan. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2017 sebanyak 208, sedang fasilitas olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga) pada tahun 2013 sebanyak 1500 buah, meningkat menjadi 1.517 pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.77.
Perkembangan Olahraga Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	18	18	18
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	40	45	45	50	50
3	Jumlah Klub Olahraga	200	200	200	208	208
4	Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga)	1.500	1.500	1.516	1.516	1.517

Sumber : Disparpor, 2018

n. Statistik

Urusan Statistik, telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan pengembangan data / informasi / statistik daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar bekerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar menyusun buku Karanganyar Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Indikator Ekonomi, dan Buku Inflasi Kabupaten Karanganyar tiap tahun.

Pengembangan data/informasi/statistik daerah tidak hanya menyangkut ketersediaan data, namun yang lebih penting adalah validitas data, kecepatan penyampaian data serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.

Tabel II.78.
Data berdasarkan urusan pembangunan yang telah tersedia

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan dalam statistik daerah (UU 23 tahun 2014)	20 urusan				

Sumber : Diskominfo, 2018

o. Persandian

Persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Persandian di pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara baik. Saat ini mengacu

pada tugas dan fungsi perangkat daerah, urusan persandian diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala/kekurangan, yang paling mencolok dalam pengelolaan persandian adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifikasi. Pengaturan persandian di lingkungan pemda di antaranya adalah mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

Tujuan urusan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Di Kabupaten Karanganyar belum dibangun sistem persandian dan kelengkapan sarana prasana serta staf terlatih dengan keahlian persandian.

Tabel II.79.

Data Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Diskominfo, 2018

p. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu tahun 2013-2017, telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya, antara lain festival Gunung Lawu, Mahesa Lawung, Reog, dsb. Gambaran data secara rinci dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel II.80.

Organisasi Seni Budaya Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis	2013	2014	2015	2016	2017
1	Karawitan	40	46	46	86	106
2	Ludruk	2	2	2	2	2
3	Ketoprak	5	5	5	6	6
4	Srandil	1	1	1	1	1
5	Ureng-ureng Tiyet	1	1	1	1	1
6	Orek-orek	1	1	1	1	1

No	Jenis	2013	2014	2015	2016	2017
7	Orkes Melayu	2	2	2	2	2
8	Samroh	6	6	6	6	6
9	Reyog	4	4	4	4	4
10	Tayuban	3	3	3	3	3
11	Band	6	6	6	6	6
12	Jaran Gedrug	3	3	3	3	3
13	Orkes Keroncong/ Campursari	10	12	12	12	14
14	Macapatan	4	4	4	4	4
15	Kulintang	2	2	2	2	2
16	Klotekan Lesung	2	2	2	2	2
17	Sandhur	1	1	1	1	1
18	Wayang Kulit	1	1	1	1	1
19	Tari	3	3	3	3	3
20	Seni Lukis	13	15	15	15	17

Sumber: Disparpor, 2018

Di Kabupaten Karanganyar terdapat banyak cagar budaya yang tersebar merata di beberapa wilayah, seperti Candi Sukuh dan Candi Palangatan di Kecamatan Ngargoyoso, Candi Cetho di Kecamatan Jenawi, Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo, Situs Walukandang di Kecamatan Matesih, PG. Tasikmadu dan PG. Colomadu.

Selain itu upaya melestarikan budaya daerah juga dilakukan dengan mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani; mendayagunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa.

q. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga berpengaruh pada peningkatan jumlah minat baca masyarakat. Meskipun demikian pada tahun 2017 adanya penurunan jumlah pengunjung dikarenakan perpindahan lokasi gedung perpustakaan lama ke lokasi yang baru. Perkembangan jumlah perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.81.

Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian Data	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan	23	35	45	87	112

No	Uraian Data	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Perpustakaan Desa	1	10	24	29	36
b.	Perpustakaan Rumah Ibadah	0	0	1	2	4
c.	Perpustakaan SD/ MI	11	16	28	38	77
d.	Perpustakaan SMP/MTs	7	10	18	22	48
e.	Perpustakaan SLTA/MA	4	7	12	15	21
f.	Perpustakaan PT	0	1	2	3	4
g.	Perpustakaan Khusus	0	1	2	3	4
2	Jumlah Koleksi Perpustakaan	30.875	31.500	32.125	34.284	35.248
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	34.133	35.989	37.845	39.992	38.248

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2018

r. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum maksimal. karena beberapa kendala yaitu:

- 1) Depo tempat penyimpanan arsip yang berada saat ini sudah penuh dan tidak memenuhi standar.
- 2) PD yang mengirimkan arsip ke lembaga kearsipan daerah/kantor perpustakaan dan arsip masih dalam kondisi acak belum dipilah dan diolah sehingga menyulitkan dalam pelestariannya.

Sementara itu tingkat PD belum semua menerapkan Sistem Kearsipan Secara Baku (SKSB) dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain:

- 1) Tidak semua PD mempunyai tenaga arsiparis/tenaga pengelolaan kearsipan
- 2) Belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip di setiap PD
- 3) Belum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang kearsipan sebagai pedoman pengelolaan arsip bagi PD.

Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusunan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Jumlah arsip yang dilestarikan sampai dengan tahun 2017 mencapai 15.500 berkas arsip, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.82.

Jumlah Arsip yang dilestarikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Arsip yang dilestarikan (berkas)	Keterangan
2013	1.500	Disimpan di Depo Arsip
2014	2.000	Disimpan di Depo Arsip
2015	2.500	Disimpan di Depo Arsip
2016	1.500	Disimpan di Depo Arsip
2017	1.500	Disimpan di Depo Arsip

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2018

Kondisi SDM bidang kearsipan khususnya arsiparis dan petugas pengelola arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih sangat terbatas.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu perikanan tangkap tahun 2013 sebesar 595,815 ton, turun menjadi 543,720 ton pada tahun 2017. Perikanan budidaya dari 1.148,213 ton pada tahun 2013, naik menjadi 1.723,390 ton pada tahun 2017. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.83.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis Perikanan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tangkap (ton)	595,815	518,787	502,510	532,660	543,720
2	Budidaya (ton)	1.148,213	1.303,815	1.614,770	1.616,850	1.723,390

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

Tingkat konsumsi ikan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2013 sebesar 11,75 kg/kapita/tahun menjadi sebesar 18,13 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin meningkat.

Tabel II.84.

Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis Konsumsi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/Thn)	11,75	12,20	12,83	16,23	18,13

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

b. Pariwisata

Kabupaten Karanganyar terkenal akan potensi pariwisatanya. Terdapat objek wisata mulai dari agrowisata, pegunungan, wisata situs sejarah, dan lain-lain. Beberapa objek wisata yang ada antara lain : 1). Hutan Wisata : Puncak Lawu, Sekipan dll; 2) Wisata Alam : Air Terjun, Kebun Teh Kemuning, Telaga Madirdo dll; 3) Sumber Air Panas : Pablengan, Cumpleng dll; 4) Goa : Kendalisodo, Cokrokembang, Tlorong; 5) Ziarah : Astana Mengadeg, Astana Giribangun, dll; 6) Candi : Suku, Cetho dll. 7) Budaya : Mondosiyo, Cembengan, dll. Selama tahun 2017 jumlah pengunjung wisata tercatat sebanyak 8.742 orang pengunjung wisatawan mancanegara dan 746.543 orang pengunjung wisatawan nusantara, di obyek wisata milik pemerintah kabupaten. Data tersebut diperkirakan jauh lebih kecil dari kunjungan wisatawan yang sebenarnya, karena perkembangan obyek wisata yang dikelola swasta/pribadi atau desa sangat besar pertumbuhannya. Memperhatikan hal tersebut perlu adanya pendataan / inventarisasi obyek dan pengunjung karena erat kaitannya dengan pendapatan daerah.

Tabel II.85.
Data Obyek dan Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2017
yang dikelola Pemerintah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Obyek Wisata (buah)	59	59	59	59	59
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara (orang)	8.510	11.090	7.857	6.778	8.742
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	575.121	614.060	580.088	888.566	746.543
4	PAD Sektor Pariwisata (Rp. juta)	717,19	800,66	1.119,13	1.584,89	1.527,93

Sumber : Dinas Parpora, 2018

c. Pertanian

Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah terutama beras, yang dapat dilihat dari produksi padi pada tahun 2017 mencapai 334.394 ton. Secara keseluruhan produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.86.
Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Komoditas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi (ton)	281.674	357.978	311.92	337.925	334.394
Jagung (ton)	33.595	28.782	39.410	36.567	27.113
Ubi kayu (ton)	158.048	115.689	131.244	91.478	83.113
Kedelai (ton)	371	234	217	252	419
Kacang tanah (ton)	7.755	9.607	6.680	4.935	2.266
Ubi jalar (ton)	16.849	27.054	31.076	19.916	33.920

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Jumlah populasi ternak sapi potong, ayam pedaging dan ayam petelur semakin meningkat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.87.
Populasi Ternak Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	60.023	61.612	62.948	63.144	63.716
2	Kambing	23.402	24.451	24.600	25.330	25.581
3	Domba	116.065	116.522	117.606	117.651	118.659
4	Babi	52.794	53.526	51.021	52.145	51.755
5	Ayam Ras Petelur	1.870.600	1.870.718	1.830.060	1.830.430	1.849.548
6	Ayam Buras	900.057	915.771	918.961	919.390	921.824
7	Ayam Ras Pedaging	3.860.405	5.296.550	4.758.900	6.948.766	6.978.175
8	Itik	83.390	85.524	85.694	74.316	75.127
9	Kelinci	12.545	12.801	12.985	12.268	12.465
10	Burung Puyuh	489.750	500.350	511.427	511.485	513.466

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

Jumlah produksi daging di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan kecuali domba. Berikut produksi daging berdasarkan jenis ternak.

Tabel II.88.
Produksi Daging Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi (kg)	1.988.820	1.995.300	2.171.340	2.507.400	2.634.840
2	Kambing (kg)	171.918	169.538	203.728	193.623	279.385
3	Domba (kg)	279.009	270.164	235.205	304.834	252.228
4	Ayam Ras (Pedaging+ Petelur) (kg)	2.963.044	3.042.139	3.050.314	3.052.832	3.284.871
5	Ayam Buras (kg)	912.233	915.908	916.213	916.382	916.458
6	Itik	44.261	41.684	41.691	44.279	48.618

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

Jumlah produksi telur dalam periode 2013-2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 sebanyak 20.815.361 kg menjadi 22.226.701 kg pada tahun 2017. Berikut perkembangan produksi telur berdasarkan jenis ternak pada tahun 2013-2017.

Tabel II.89.
Produksi Telur Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ayam Ras (kg)	19.206.183	19.967.740	20.208.390	19.973.954	20.211.162
2	Ayam Buras (kg)	353.445	450.217	458.815	429.145	430.922
3	Itik (kg)	444.549	549.533	585.976	985.763	994.444
4	Puyuh (kg)	811.184	868.231	902.397	985.763	994.444
	Jumlah	20.815.361	21.835.721	22.155.578	21.993.648	22.226.701

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

Berikut perkembangan produksi susu di Kabupaten Karanganyar

Tabel II.90.
Produksi Susu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Susu (liter)	265.272	297.654	307.524	270.088	287.256

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018

Dalam memajukan sektor pertanian guna meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian perlu adanya peningkatan sumber daya manusia/ petani maupun pengelolaan usaha taninya. Kelembagaan pertanian sangat penting dalam manajemen pertanian dengan tidak terlepas dari peran serta para penyuluh pertanian. Dengan adanya revitalisasi penyuluh pertanian diharapkan sektor pertanian dapat semakin maju dan harapan swasembada pangan dapat tercapai. Perkembangan kelembagaan dan penyuluh pertanian lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.91.

Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2017

No	Kelembagaan Pertanian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelompok Tani	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
2	Kelompok Wanita Tani	1	1	1	2	5
3	Gabungan Kelompok Tani	176	176	176	176	176
4	Kelompok Ternak Sapi Potong	8	18	23	17	32
5	Kelompok Ternak Kambing / Domba	1	1	1	1	4
6	Kelompok Unggas	na	1	1	1	2
7	Kelompok Ternak Kelinci	na	2	na	1	2
8	Balai Penyuluh Pertanian	17	17	17	17	17
9	POSLUHDES	176	176	176	176	176

Sumber : *Dispartan, Disnakan, 2018*

d. Kehutanan

Penggunaan lahan untuk kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar terbesar di 4 kecamatan dan luas lahan hutan terbesar ada di Kecamatan Tawangmangu seluas 4.182 Ha (80,76%) dari luas seluruh hutan yang ada di Kabupaten Karanganyar dan luas hutan terkecil ada di Kecamatan Jatipuro seluas 40 Ha (0,77%). Luas kawasan hutan ada 7.877,40 Ha yang terdiri dari kawasan cagar alam, taman wisata, taman hutan rakyat, hutan lindung dan hutan kota. Hutan lindung merupakan jenis hutan paling luas di Kabupaten Karanganyar dengan luas 7.509,48 Ha (95,33%) kemudian diikuti taman hutan rakyat seluas 231,30 Ha (2,94%) dan hutan wisata seluas 64,12 Ha (1,73%).

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 1,22% pada tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.92.

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2017

Tahun	Nilai total PDRB (juta rupiah)	Nilai Sektor Pertambangan (juta rupiah)	Kontribusi (%)
2013	19.256.516,28	231.903,56	1,13
2014	20.262.444,42	234.794,14	1,19
2015	21.286.287,14	237.259,48	1,26
2016	22.428.803,80	245.350,03	1,24
2017	23.665.952,05	253.250,30	1,22

Sumber : *PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018*

Peningkatan sektor pertambangan memberikan tantangan pada pengendalian izin penambangan alam untuk menjaga pemeliharaan keberlanjutan lingkungan, supaya tidak rusak.

f. Perdagangan

Perdagangan menjadi tumpuan perekonomian rakyat, ketersediaan pasar tradisional dan lokal menjadi kebutuhan utama. Jumlah pasar di Karanganyar

tahun 2017 ada sebanyak 53 unit, terdiri dari 18 pasar tradisional, 35 pasar lokal.

Tabel II.93.

Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Tahun	Pasar Tradisional	Pasar Tradisional dalam keadaan sehat	Pasar Lokal	Swalayan	Hyper market	pasar grosir	mall/plaza
1	2013	18	2	28	16	23	1	2
2	2014	18	2	28	16	23	1	2
3	2015	18	4	29	16	23	1	2
4	2016	18	6	29	16	23	1	2
5	2017	18	7	35	16	23	1	3

Sumber : Disdagnakerkop UKM, 2018

g. Perindustrian

Jumlah industri kecil di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 7.138 unit dengan jumlah tenaga kerja sebesar 36.493 orang. Sedangkan industri besar pada tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 52.143 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.94.

Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian		Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri Kecil	Jumlah Usaha	9.944	10.303	na	na	7.138
		Jumlah Tenaga Kerja	35.301	36.188	na	na	36.493
2	Industri Menengah	Jumlah Usaha	183	186	na	13	45
		Jumlah Tenaga Kerja	31.410	32.850	na	1.371	707
3	Industri Besar	Jumlah Usaha	29	35	na	38	103
		Jumlah Tenaga Kerja	3.775	14.910	na	42.620	52.143

Sumber: DPMPTSP,2018

h. Transmigrasi

Selama lima tahun terakhir pengiriman transmigrasi dari Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.95.

Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Terlaksananya transmigrasi (KK)	10	4	7	15	3

Sumber: Disdagnakerkop UKM, 2018

2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

a. Administrasi Pemerintahan

1) Hukum dan HAM

Upaya pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah melalui penetapan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Tabel II.96.

Perkembangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Peraturan Daerah	19	13	29	18	13
2	Peraturan Bupati	25	60	70	112	101
3	Keputusan Bupati	1.167	1.346	1.042	785	874

Sumber: Setda, 2018

Setiap tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penilaian kepada kabupaten/kota yang peduli terhadap HAM. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 penilaian meliputi Hak hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan dan anak. Tahun 2016 dan tahun 2017 penilaian meliputi Hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak kependudukan, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh perumahan dan hak memperoleh lingkungan yang berkelanjutan. Berikut nilai kabupaten peduli HAM pada Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.97.

Nilai Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Kabupaten Peduli HAM	87,06	95,29	97,50	92,50	94,41

Sumber: Setda, 2018

2) Ketatalaksanaan

Perwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/ Sertifikasi ISO 2013:9001, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan, dibagi kedalam sejumlah PD yaitu :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Kecamatan;

3) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area

perubahan, yaitu: (1) Penguatan Peraturan Kelembagaan (Organisasi) dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional; (2) Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan; (3) Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur; (4) Penguatan Peraturan Pengawasan; (5) Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja; (6) Penguatan Peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum; dan 8) Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur.

Langkah-langkah ke depan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain perlu birokrasi yang baik, bersih dan transparan. Program-program yang dapat dilakukan adalah Optimalisasi kinerja dan tata kelola birokrasi yang produktif, efisien dan efektif, Peningkatan sumber daya manusia, aparatur yang kompeten, profesional dan akuntabel, Pengembangan sistem meritokrasi kelembagaan/organisasi, Peningkatan sistem dan efektivitas pengawasan dalam mencegah dan menanggulangi KKN, serta Pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

b. Perencanaan

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMD) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018. Sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati, yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Secara lebih rinci diuraikan pada Bab III.

1) Administrasi Keuangan Daerah

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2016.

2) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Langkah dan upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindah-tanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Akumulasi kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.

Tabel II.98.
Proporsi PAD dan Belanja Pegawai (Gaji) dalam APBD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi PAD dalam APBD (%)	9,88	11,24	12,51	12,42	18,27
Proporsi Belanja Pegawai (Gaji) dalam APBD (%)	63,31	56,75	54,93	49,39	43,98

Sumber : BKD, 2018

d. Pengawasan

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kualitas (*Quality Insurence*) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), arah kebijakan pengawasan menfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mencakup pengawasan pada program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terkait dengan urusan pemerintahan, dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Dengan melihat arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerin-tahan disusun program sebagai upaya menunjang kegiatan pengawasan antara lain Program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk mensinergiskan seluruh kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan koordinasi pengawasan internal antara APIP Pusat dan Daerah.

e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aspek peningkatan kualitas SDM aparatur sesuai kompetensi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung pelayanan publik. Dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan aparatur sipil negara (ASN) tampak bahwa separuh lebih mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi dengan golongan diantara III-IV. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Kabupaten Karanganyar mempunyai potensi yang cukup untuk dapat dikembangkan secara optimal. Perkembangan ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.99.
Perkembangan Jumlah ASN Kabupaten Karanganyar

No	Golongan (orang)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Golongan I	438	319	319	246	208
2	Golongan II	2.923	2.320	2.320	1.916	1.985
3	Golongan III	4.469	4.331	4.339	3.995	3.941
4	Golongan IV	4.775	4.340	4.321	3.657	3.558
	Jumlah	12.605	11.310	11.299	9.814	9.692

Sumber: BKPSDM, 2018

Tabel II.100.
Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Karanganyar

No	Diklat	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	S-3	3	2	2	4	4
2	S-2	836	980	980	881	894
3	Sarjana (S-1)	6.832	7.000	6.998	6.146	5.988
4	Diploma 3 (D III)	776	717	717	664	775
5	Diploma 2 (D II)	1.156	433	425	295	270
6	Diploma 1 (D I)	144	82	82	64	62
7	SLTA / Sederajat	2.165	1.670	1.668	1.382	1.331
8	SLTP / Sederajat	381	296	296	263	256
9	SD / Sederajat	128	131	131	115	112
	Jumlah	12.421	11.311	11.299	9.814	9.692

Sumber: BKPSDM, 2018

f. Penelitian dan Pengembangan

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 209 dan 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi Penunjang adalah Penelitian dan Pengembangan. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan.

Selain itu, dalam Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) juga berfungsi sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya dalam Pasal 388 juga menyebutkan sebagai penilaian inovasi daerah.

Berkaitan dengan fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam konsep manajemen strategis yaitu peran Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan skanning lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, BPP berperan menghasilkan berbagai proxy, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor *input* (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan *output* (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. Di sinilah peran daya saing sangat dibutuhkan. *European Commission* memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam *Regional Competitiveness Index (RCI)* didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah.

2.4.1 Institusi

Secara institusi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut,

yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017. Hal ini didukung dengan penilaian SAKIP yang semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, menjadi B pada tahun 2017, dan penghargaan juara nasional dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD).

2.4.2 Kondisi Makroekonomi

Perkembangan makroekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 2 tahun terakhir 2016 dan 2017 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (gambar 2.5). Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 3,15% berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 3,71% dan Nasional 3,61% (Gambar 2.6). Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

2.4.3 Infrastruktur

Kondisi jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2017, total panjang jalan Kabupaten Karanganyar sepanjang 876,5 km. Serta, jumlah jembatan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 203 buah dengan total panjang 1.737,10 m.

Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

Tabel II.101.
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2013-2017

No	Jenis/Kualitas Jalan (km)	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Jalan					
	a. Baik	437,75	440,13	495,69	537,76	576,36
	b. Sedang	200,13	214,58	229,14	256,31	228,81
	c. Rusak	185,05	177,26	132,98	70,46	60,36
	d. Rusak Berat	52,78	43,74	18,69	11,97	10,97

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Dari komposisi penduduk menurut usia produktif/tidak produktif didapatkan angka ketergantungan sebesar 31,91%. Artinya, setiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 32 orang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Secara %ase, usia 15-64 tahun mencapai 68,09% sedangkan usia tidak produktif 0-14 tahun dan diatas 65 tahun masing-masing sebesar 23,08 % dan 8,83%. Dari besaran perentase, bisa dilihat bahwa Kabupaten Karanganyar telah mendapat bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

2.4.5 Keamanan dan Kemudahan Berinvestasi

Kemudahan berinvestasi juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah industri kecil dan besar, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II.85 dimana industri besar sejumlah 103 unit usaha baru.

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat seperti pada Tabel II.102.

Tabel II.102.

Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2013-2017

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perkosaan (Pasal 285)	2	1	0	1	1
2	Perzinahan (Pasal 287)	1	2	1	0	3
3	Pembunuhan (Pasal 340)	0	0	1	0	0
4	Penganiayaan (Pasal 351)	20	11	16	5	14
5	Pencurian Biasa (Pasal 362)	33	37	31	21	28
6	Pencurian Pemberatan (Pasal 363)	62	62	60	50	32
7	Pencurian Kekerasan (Pasal 365)	5	7	6	9	3
8	Penggelapan (Pasal 372)	44	46	33	21	12
9	Penipuan (Pasal 378)	75	72	55	23	23
10	Curanmor	8	18	15	16	15
11	Lain-lain	0	59	98	93	52

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2018

Secara ringkas Gambaran Umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2017 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.103.
Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
I.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
I.1.1.1	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi (ADHK) (%)	5,69	5,22	5,05	5,37	5,52	5,52	100,00	Hijau
I.1.1.2	Laju Inflasi	8,7	7,38	2,4	1,93	3,15	3,15	100,00	Hijau
I.1.1.3	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp.)	22.219.243,68	24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	31.780.396,98	100,00	Hijau
I.1.1.4	Indeks Gini	0,33	0,36	0,36	na	na	0,35	97,22	Kuning
I.1.1.5	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,58	12,62	12,46	12,49	12,28	12,28	100,00	Hijau
I.1.1.6	Indeks Pembangunan Manusia	73,33	73,89	74,26	74,9	75,22	75,22	100,00	Hijau
I.1.1.7	Angka Harapan Hidup	76,7	76,71	77,11	77,11	77,31	77,31	100,00	Hijau
I.1.1.8	Indeks Pengangguran Terbuka	3,84	3,54	3,6	na	3,17	3,17	100,00	Hijau
I.2.	Kesejahteraan Sosial								
I.2.1.	Pendidikan								
I.2.1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,38	8,47	8,48	8,49	8,5	8,5	100,00	Hijau
I.2.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,86	13,26	13,27	13,64	13,65	13,65	100,00	Hijau
I.2.2.	Kesehatan dan Keluarga Berencana								
I.2.2.1	AKI (per 100.000 KH)	68,3	138,48	123,32	77,58	72,6	98,76	136,03	Hijau
I.2.2.2	AKB (per 1.000 KH)	9,9	10,5	12,8	13,96	12,41	9,4	132,02	Hijau
I.2.2.3	AKABA (PER 1.000 KH)	11,5	1,31	1,77	2,17	1,84	1,09	168,81	Hijau
I.2.2.4	Persentase balita gizi buruk	0,07	0,042	0,041	0,04	0,025	0,85	100,00	Hijau
I.2.2.5	Prevalensi balita gizi kurang	na	3,01	3,24	3,34	3,29	3	109,67	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
I.2.2.6	Angka Penemuan kasus TB Paru (%)	84,6	58,1	51,4	63,4	64,7	70	92,43	Kuning
I.2.2.7	Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	42	68	100	100	113	5	2260,00	Hijau
I.2.2.8	Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	55,3	36,4	57	15,2	8,3	8,3	100,00	Hijau
I.2.2.9	Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk)	na	0,016	0,012	0,003	0,001	0,05	2,00	Merah
I.2.3.	Ketenagakerjaan								
I.2.3.1	Angka partisipasi angkatan kerja	76,62	71,04	69,58	71,18	70,24	70,24	100,00	Hijau
I.2.3.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,04	69,58	71,18	na	70,24	70,24	100,00	Hijau
I.2.3.3	Tingkat pengangguran terbuka	3,84	3,54	3,6	na	3,17	3,17	100,00	Hijau
I.2.3.4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	68,31	87,11	68,62	na	68,01	68,01	100,00	Hijau
I.2.3.5	UMK rata-rata (Rp/bln/orang)	896.500	1.060.000	1.226.000	1.420.000	1.560.000	1.560.000	100,00	Hijau
I.2.3.6	Kebutuhan Hidup Layak (Rp/bln/orang)	896.500	1.129.322	1.202.151	1.397.000	1.441.472	1.441.472	100,00	Hijau
I.2.3.7	Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL di Kabupaten Karanganyar (%)	79	88	87	99	100	100	100,00	Hijau
I.2.3.8	Penempatan Tenaga Kerja								
	- Angkatan Kerja Lokal (AKL)	1.915	1.963	1.961	2.497	1.357	1.357	100,00	Hijau
	- Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	60	28	16	261	1.287	1.287	100,00	Hijau
	- Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	132	258	349	286	686	686	100,00	Hijau
I.2.4.	Keuangan								
I.2.4.1	Persentase PAD terhadap pendapatan	0,1181	0,1332	0,1393	0,1497	0,2032	0,2032	100,00	Hijau
I.2.4.2	Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Hijau
I.2.5.	Pertanian								
I.2.5.1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	92,3	85,9	87,2	87,1	87,1	100,00	Hijau
I.2.5.2	Penguatan cadangan pangan (kg GKG)	10291	30291	38391	52991	52991	52991	100,00	Hijau
I.2.5.3	Penanganan daerah rawan pangan	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
I.2.5.4	(ketersediaan : kebutuhan beras)	150156	101212	119840	135462	130936	130936	100,00	Hijau
I.2.5.5	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	na	na	na	22,39	18,82	18,82	100,00	Hijau
I.2.5.6	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (tanaman pangan)	na	na	na	15,58	12,29	12,29	100,00	Hijau
I.2.5.7	Produksi sektor pertanian								
	- Padi (ton)	357.978	281.137	311.920	337.925	331.781	280.284	118,37	Hijau
	- Jagung (ton)	28.782	35.007	39.792	36.567	27.118	29.742,00	91,18	Kuning
	- Kedelai (ton)	234	105	217	307	420	308	136,36	Hijau
	- Ubi jalar (ton)	27.054	23.908	31.076	29.916	33.943	26.345,00	128,84	Hijau
	- Ubi kayu (ton)	115.689	127.990	146.409	91.477	83.125	151.709,00	54,79	Merah
	- Kacang tanah (ton)	9.607	8.266	6.680	4.935	2.268	9.811,00	23,12	Merah
	- Bawang merah (kw)	9.685	15.833	2.088	1.987	2.787	1.499	185,92	Hijau
	- Bawang putih (kw)	11.459	9.843	15.188	25.658	8.009	11.527	69,48	Merah
	- Cabe (kw)	9927	14553	23761	22432	26103	22499	116,02	Hijau
I.2.5.8	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	na	na	na	1,66	1,69	1,69	100,00	Hijau
I.2.5.9	Produksi sektor perkebunan								
	- Kelapa (butir)	1693,09	1341,2	1193,45	1067,82	875,69	1200	72,97	Merah
	- Kakao			21,84	20		30	0,00	Merah
	- Cengkeh	97,31	1552,8	326,38	142,37	124,89	3439	3,63	Merah
	- Tembakau	815,79	1646,8	204,42	298,85	298,8	415	72,00	Merah
I.2.5.10	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	na	na	na	0,11	0,09	0,09	100,00	Hijau
I.2.5.11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	na	na	14,83	14,31	13,51	13,51	100,00	Hijau
I.2.6.	Pertambangan dan Energi								
I.2.6.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,13	1,19	1,26	1,24	1,22	1,22	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
I.2.7.	Pariwisata								
I.2.7.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB								
I.2.8.	Perikanan dan Kelautan								
I.2.8.1	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	14,83	14,45	14,89	14,31	13,51	13,51	100,00	Hijau
I.2.9.	Perdagangan								
I.2.9.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,65	11,14	11,1	11,06	11,2	11,2	100,00	Hijau
I.2.10.	Perindustrian								
I.2.10.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	45,06	45,64	45,21	45,78	45,89	45,89	100,00	Hijau
I.2.10.2	Jumlah Kasus Hubungan Insustrial di Kabupaten Karanganyar	24	26	26	35	36	36	100,00	Hijau
2	PELAYANAN UMUM								
2.1	Urusan Wajib								
2.1.1.	Pendidikan								
2.1.1.1	APK SD/SDLB/MI/ Paket A	105,61	107,33	107,6	107,74	107,3	115	93,30	Kuning
2.1.1.2	APM SD/SDLB/MI/ Paket A	95,88	96,36	96,81	97,32	98,61	99,75	98,86	Kuning
2.1.1.3	APK SMP/SPMLB/MI/ Paket B	100,13	100,12	100,3	100,33	104,41	102,25	102,11	Hijau
2.1.1.4	APM SMP/SPMLB/ MTs/ Paket B	78,5	79,24	79,85	80,43	85,27	71,5	119,26	Hijau
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (7-12 tahun) (100%)	102,63	102,72	105,07	107,1	107,34	100	107,34	Hijau
2.1.1.6	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (13-15tahun) (100%)	79,42	91,79	92,23	92,75	93,37	100	93,37	Kuning
2.1.1.7	Ruang Kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan (%)	na	na	na	na	76,66	93,76	81,76	Merah
2.1.1.8	Ruang Kelas SMPLB/ MTs sesuai standar nasional pendidikan (%)	na	na	na	na	85,11	94,5	90,06	Kuning
2.1.1.9	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI (%)	na	na	na	na	0,02	0,01	200,00	Hijau
2.1.1.10	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLEB/MTs (%)	na	na	na	na	0,08	0,05	160,00	Hijau
2.1.1.11	Persentase Pendidik SD/SDLB berkualitas S1/D4 (%)	na	na	na	na	93,26	100	93,26	Kuning

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.1.12	Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualitas S1/D4 (%)	na	na	na	na	94,21	100	94,21	Kuning
2.1.2.	Kesehatan								
2.1.2.1	Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi (buah)	0	0	0	4	14	21	66,67	Merah
2.1.2.2	Jumlah RS yang sudah terakreditasi (buah)	0	0	0	0	2	8	25,00	Merah
2.1.2.3	Jumlah klinik yang sudah terakreditasi (buah)	0	0	0	0	0	25	0,00	Merah
2.1.2.4	Jumlah Puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan sesuai standar (buah)	0	0	0	4	14	21	66,67	Merah
2.1.2.5	Jumlah RS yang mempunyai fasilitas sesuai standar	8	8	8	8	8	7	114,29	Hijau
2.1.2.6	Jumlah Klinik yang mempunyai fasilitas sesuai standar (buah)	11	13	25	29	31	25	124,00	Hijau
2.1.2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	91,19	91,9	98,3	98,9	98,3	100	98,30	Kuning
2.1.2.8	Ratio Rumah Sakit (per jiwa)	na	1/109.776	1/107.730	1/109.314	1/110.000	1/170.000	154,55	Hijau
2.1.2.9	Ratio Puskesmas (per jiwa)	na	1/41.819	1/41.040	1/41.643	1/41.143	1/43.673	106,15	Hijau
2.1.2.10	Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	na	1/4.287	1/2.780	1/2.867	1/4.507	1/3.300	73,22	Merah
2.1.2.11	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	na	1/25.100	1/26.116	1/19.011	1/29.149	1/9.000	30,88	Merah
2.1.2.12	Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	na	1/8.445	1/1.596	1/1.162	1/1.379	1/2.250	163,16	Hijau
2.1.2.13	Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa penduduk)	na	1/3.585	1/1.436	1/1.223	1/1.856	1/3.000	161,64	Hijau
2.1.2.16	Rasio balita per satuan Posyandu	na	22	22	22	22	35	62,86	Merah
2.1.2.17	Rumah tangga sehat (%)	83,06	83,24	83,95	88,35	89,35	60	148,92	Hijau
2.1.2.18	Persentase Unmet Need (%)	na	8,83	7,89	8,68	7,61	<10	100,00	Hijau
2.1.2.19	Rasio posyandu per satuan balita (balita / posyandu)	na	22	22	22	22	35	62,86	Merah
2.1.2.20	Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	55,3	36,4	57	15,2	8,3	8,3	100,00	Hijau
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	437,75	440,13	495,69	537,76	576,36	576,36	100,00	Hijau
2.1.3.2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (km)	200,13	214,58	229,14	256,31	228,81	228,81	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.3.3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak (km)	185,05	177,26	132,98	70,46	60,36	60,36	100,00	Hijau
2.1.3.4	Panjang jalan kabu paten dalam kondisi rusak berat (km)	52,78	43,74	18,69	11,97	10,97	10,97	100,00	Hijau
2.1.3.5	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik (unit)	156	158	159	161	163	169	96,45	Kuning
2.1.3.6	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (unit)	50	48	47	45	43	37	116,22	Hijau
2.1.3.7	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	32	36	51,41	54,42	51,9	69,74	74,42	Merah
2.1.3.8	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi sedang (%)	17	16	19,44	18,24	19,24	14,49	132,78	Hijau
2.1.3.9	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan (%)	23,8	22,4	17	15,95	16,84	8,52	197,65	Hijau
2.1.3.10	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat (%)	27,2	25,6	12,15	11,39	12,02	7,25	165,79	Hijau
2.1.3.11	Akses air bersih pedesaan (KK)	114.116	119.896	126.535	132.385	136.984	136.984	100,00	Hijau
2.1.3.12	Akses air bersih perkotaan (KK)	77.675	80.838	85.686	91.148	95.677	95.677	100,00	Hijau
2.1.3.13	Akses air bersih Se Kabupaten (%)	75,55	78,12	81,12	84,55	86,98	86,98	100,00	Hijau
2.1.3.14	Sanitasi Dasar (%)	73,28	77,78	82,28	86,78	91,28	100	91,28	Kuning
2.1.3.15	Sanitasi Layak (%)	52	60,2	63	65	71,5	100	71,50	Merah
2.1.3.16	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Drainase (%)	61,33	66,33	71,33	76,33	81,33	100	81,33	Merah
2.1.4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman								
2.1.4.1	Jumlah RTLH (unit)	na	na	14.935	14.402	13.891	6.217	223,44	Hijau
2.1.4.2	Rasio RTLH	na	na	0,067	0,066	0,064	0,062	103,23	Hijau
2.1.4.3	Jumlah Rumah Yang ditangani (dibangun)	na	na	533	511	1.457	8.718	16,71	Merah
2.1.4.4	Sisa RTLH (unit)	na	na	14.402	13.891	12.434	6.217	200,00	Hijau
2.1.4.5	Kawasan Kumuh (Ha)	na	na	na	100,16	83,72	80	104,65	Hijau
2.1.5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat								
2.1.5.1	Persentase Golput	-	22,06%	22,06%	22,06%	22,06%	22,06%	100,00	Hijau
2.1.5.2	Persentase Penggunaan Hak Suara	-	77,94%	77,94%	77,94%	77,94%	77,94%	100,00	Hijau
2.1.5.3	Jumlah Pelanggaran Perda	559	460	400	320	230	230	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.5.4	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	70	65	70	80	85	85	100,00	Hijau
2.1.5.5	Jumlah Personil Satpol PP	54	54	53	53	72	72	100,00	Hijau
2.1.5.6	Jumlah Personil Linmas	6465	6415	6379	6249	6204	6204	100,00	Hijau
2.1.5.7	Jumlah Pos Siskamling	6130	6130	6130	6280	6902	6902	100,00	Hijau
2.1.5.8	Organisasi Masyarakat (Ormas)	80	85	91	140	148	148	100,00	Hijau
2.1.5.9	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terdaftar	72	72	72	78	78	78	100,00	Hijau
2.1.5.10	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tidak Aktif	12	12	12	12	12	12	100,00	Hijau
2.1.5.11	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aktif	60	60	60	60	66	66	100,00	Hijau
2.1.6	Sosial.								
2.1.6.1	Jumlah panti asuhan (unit)	12	12	11	16	17	13	130,77	Hijau
2.1.6.2	Jumlah anak penghuni panti asuhan (orang)	501	501	444	467	386	498	77,51	Merah
	- Laki	264	260	233	243	165	263	62,74	Merah
	- Perempuan	237	241	211	224	221	235	94,04	Kuning
2.1.6.3	Jumlah Penyandang Disabilitas	4.236	4.136	4.848	4.937	4.937	4.937	100,00	Hijau
2.1.6.4	Yang diberi Bantuan	232	277	290	377	246	246	100,00	Hijau
2.1.6.5	Potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Karanganyar								
	- Pekerja Sosial Masyarakat	812	842	831	940	940	940	100,00	Hijau
	- Wanita Pemimpin Kesos	354	360	371	394	405	405	100,00	Hijau
	- Karang Taruna	184	182	170	196	177	177	100,00	Hijau
	- Organisasi sosial	24	24	25	35	35	35		
2.1.7	Tenaga kerja;								
2.1.7.1	Penduduk Usia Kerja	609.453	637.549	646.348	655.346	672.333	672.333	100,00	Hijau
2.1.7.2	Angkatan Kerja	442.538	452.900	449.704	466.504	472.241	472.241	100,00	Hijau
2.1.7.3	TPAK	72,62	71,04	69,58	71,18	70,24	70,24	100,00	Hijau
2.1.7.4	UMK (Rp.000/bln/orang)	896,5	1060	1226	1420	1560	1560	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.7.5	KHL (Rp.000/bln/orang)	1.129	1.202	1.397	1.441	1.441	1.441	100,00	Hijau
2.1.7.6	Rasio (%)	79,38	88,18	85,05	98,51	108,22	108,22	100,00	Hijau
2.1.8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;								
2.1.8.1	IPG	95,71	96,08	96,15	96,15	96,5	70	137,86	Hijau
2.1.8.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	30	33	34	26	24	24	100,00	Hijau
2.1.8.3	PNS Perempuan	na	5.702	5.611	5.082	5.130	5.130	100,00	Hijau
2.1.8.4	Perempuan di lembaga legislatif	8	11	11	11	12	12	100,00	Hijau
2.1.9	Pangan;								
2.1.9.1	Padi (ton)	281.674	357.978	311.92	337.925	334.394	334.394	100,00	Hijau
2.1.9.2	Jagung (ton)	33.595	28.782	39.410	36.567	27.113	27.113	100,00	Hijau
2.1.9.3	Ubi kayu (ton)	158.048	115.689	131.244	91.478	83.113	83.113	100,00	Hijau
2.1.9.4	Kedelai (ton)	371	234	217	252	419	419	100,00	Hijau
2.1.9.5	Kacang tanah (ton)	7.755	9.607	6.680	4.935	2.266	2.266	100,00	Hijau
2.1.9.6	Ubi jalar (ton)	16.849	27.054	31.076	19.916	33.920	33.920	100,00	Hijau
2.1.9.7	Jumlah produksi padi (ton)	281.674	357.978	311.920	337.925	334.394	334.394	100,00	Hijau
2.1.9.8	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%)	176.722	224.595	195.699	212.014	209.799	209.799	100,00	Hijau
2.1.9.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar (jiwa)	840.171	861.845	870.679	894.308	871.596	871.596	100,00	Hijau
2.1.9.10	Angka konsumsi beras (kg/tahun/tahun)	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89	124,89	100,00	Hijau
2.1.9.11	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	104.181	107.636	108.739	111.690	112.535	112.535	100,00	Hijau
2.1.9.12	DDP (Daya Dukung Pangan)	1,7	2,09	1,8	1,9	1,86	1,86	100,00	Hijau
2.1.10	Pertanian;								
2.1.10.1	Jumlah Bidang Tanah	na	na	na	na	1.385	1.385	100,00	Hijau
2.1.10.2	Jumlah Bidang Tanah Yang telah Bersertifikat	na	na	na	na	596	1.163	51,25	Merah
2.1.10.3	Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat	na	na	na	na	789	222	355,41	Hijau
2.1.11	Lingkungan hidup;								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,23	61,53	61,65	61,7	61,7	61,7	100,00	Hijau
2.1.11.2	Indeks Kualitas Air	52,3	52,6	52,75	52,75	53,15	53,15	100,00	Hijau
2.1.11.3	Indeks Kualitas Udara	79,43	79,6	79,84	79,9	80,11	80,11	100,00	Hijau
2.1.11.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,27	54,67	54,67	54,76	55	55	100,00	Hijau
2.1.11.5	Persentase penanganan sampah	33	35	39	41	66,03	66,03	100,00	Hijau
2.1.11.6	Jumlah Perda Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
2.1.11.7	Jumlah TPS	na	na	na	na	64	64	100,00	Hijau
2.1.11.8	Volume Sampah (m ³)	na	na	na	na	1.558	1.558	100,00	Hijau
2.1.12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil								
2.1.12.1	Jumlah Penduduk (jiwa)	861.845	861.845	870.679	894308	901.076	901.076	100,00	Hijau
2.1.12.2	Wajib KTP (jiwa)	593.685	662.755	645.246	679,792	686,469	686,469	100,00	Hijau
2.1.12.3	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP (jiwa)	583.985	603.843	615.006	655.367	667,591	667,591	100,00	Hijau
2.1.12.4	Persentase Kepemilikan KTP (%)	98,36	91,11	95,31	96,4	97,25	97,25	100,00	Hijau
2.1.12.5	Persentase Kepemilikan KIA Usia 0-16 (%)	na	na	na	3,20%	7,50%	7,50%	100,00	Hijau
2.1.12.6	Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 th. (jiwa)	125.793	137.370	156.269	193.542	213.761	213.761	100,00	Hijau
2.1.12.7	Jumlah Penduduk Usia 0-18 (jiwa)	228.712	227.059	236.772	229.643	237.146	237.146	100,00	Hijau
2.1.12.8	Persentase Kepemi likan Akta Kelahiran	55	60,5	65,9	84,2	89,2	89,2	100,00	Hijau
2.1.12.9	Jumlah penduduk meninggal yang diterbitkan Akte Kematian	70	100	183	252	579	579	100,00	Hijau
2.1.12.10	Jumlah kematian penduduk	2.828	2.889	2.728	2.763	2.378	2.378	100,00	Hijau
2.1.12.11	Persentase penerbitan akte kematian	2,4	3,3	6,3	8,3	19,6	19,6	100,00	Hijau
2.1.13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa;								
2.1.13.1	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi baik (%)	25	30	35	40	45	45	100,00	Hijau
2.1.13.2	Persentase keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa (%)	20	20	20	20	20	20	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.13.3	Jumlah desa cepat berkembang	33	37	40	45	58	58	100,00	Hijau
2.1.14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
2.1.14.1	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	79,46	79,03	78,64	79,17	82,47	82,47	100,00	Hijau
2.1.14.2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	9,79	8,83	8,12	8,67	7,76	9,02	86,03	Kuning
2.1.14.3	Persentase Metode Kontrasespsi Jangka Panjang (MKJP)	33,4	33,75	33,52	35,31	35,29	35,29	100,00	Hijau
2.1.14.4	<i>Drop Out (DO)</i> KB (%)	na	25,21	25,2	21,21	13,76	13	105,85	Hijau
2.1.14.5	Peserta Baru (PB) KB (org)	24.192	22.604	22.988	19.094	14.697	14.697	100,00	Hijau
2.1.14.6	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun /1000 perempuan	27	28	29	30	31	31	100,00	Hijau
2.1.14.7	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per wanita usia subur (WUS) (15-49 tahun)	2,23	2,23	2,23	2,23	2,39	2,39	100,00	Hijau
2.1.15	Perhubungan;								
2.1.15.1	Jumlah Terminal :								
	- Terminal A	0	0	0	0	0	0		
	- Terminal B	2	2	2	2	0	0		
	- Terminal C	10	10	10	10	10	10	100,00	Hijau
2.1.15.2	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	na	14.580	15.142	15.350	17.654	8.984	196,50	Hijau
2.1.15.3	Jumlah Trayek (A-Q dan Perdesaan)	17	17	17	17	17	17	100,00	Hijau
2.1.15.4	Jumlah kecelakaan lalulintas (kali)	na	na	907	1.287	1.181	1.181	100,00	Hijau
2.1.15.5	Tidak berfungsi (Rusak) unit	55	62	62	81	52	52	100,00	Hijau
2.1.15.6	Kebutuhan (unit/ meter)	600	600	251	325	229	229	100,00	Hijau
2.1.16	Komunikasi dan informatika;								
2.1.16.1	Jumlah warnet / wartel yang dibina dan diberi pengawasan (Buah)	141	141	141	141	147	147	100,00	Hijau
2.1.16.2	Jumlah Radio Siaran	3	3	3	3	3	3	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.16.3	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	na	na	na	na	11	11	100,00	Hijau
2.1.16.4	Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)	na	na	na	na	4	4	100,00	Hijau
2.1.16.5	Hotspot (wifi)	na	na	na	na	10	10	100,00	Hijau
2.1.16.6	Aplikasi :	na	na	na	na				
	- Aplikasi Sistem Operasi Server	na	na	na	na	30	30	100,00	Hijau
	- Aplikasi Sistem Operasi Personal Computer	na	na	na	na	425	425	100,00	Hijau
	- Aplikasi Data Base	na	na	na	na	33	33	100,00	Hijau
	- Aplikasi Perkantoran	na	na	na	na	440	440	100,00	Hijau
	- Aplikasi Khusus	na	na	na	na	16	16	100,00	Hijau
2.1.16.7	Jaringan :	na	na	na	na				
	- Bandwidth Internasional (Dedicated)	na	na	na	na	1.5 Mbps	1.5 Mbps	100,00	Hijau
	- Bandwidth IIX (dedicated)	na	na	na	na	1 Mbps	1 Mbps	100,00	Hijau
	- Tower Telekomunikasi	na	na	na	na	43	43	100,00	Hijau
	- Data Radio	na	na	na	na	43	43	100,00	Hijau
	- Acces Point	na	na	na	na	5	5	100,00	Hijau
2.1.17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah								
2.1.17.1	Jumlah Koperasi Aktif	816	824	841	842	847	885	95,71	Kuning
2.1.17.2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	279	328	328	328	327	325	100,62	Hijau
2.1.17.3	Jumlah Koperasi	1.095	1.152	1.169	1.170	1.174	1.210	97,02	Kuning
2.1.17.4	Koperasi menurut bidang usaha								
	- Produksi	3	4	4	5	8	8	100,00	Hijau
	- Jasa	33	34	44	45	52	52	100,00	Hijau
	- Konsumsi	73	80	80	80	80	80	100,00	Hijau
	- Serba usaha	658	664	664	681	687	687	100,00	Hijau
2.1.18	Penanaman modal;								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.1.18.1	Jumlah Penanaman Modal Asing	1	1	1	2	3	3	100,00	Hijau
2.1.18.2	Jumlah Penanaman Modal dalam Negeri	42	42	43	47	48	48	100,00	Hijau
2.1.19	Kepemudaan dan olah raga								
2.1.19.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	-	-	7	7	7	7	100,00	Hijau
2.1.19.2	Pelatihan dan pengembangan generasi muda	60	60	60	60	60	60	100,00	Hijau
2.1.19.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau
2.1.19.4	Jumlah Klaster Kewirausahaan Pemuda	-	2	2	3	3	3	100,00	Hijau
2.1.19.5	Jumlah SP3 yang dibina	0	0	0	0	3	3	100,00	Hijau
2.1.19.6	Jumlah Pemuda Pelopor	25	25	25	25	25	25	100,00	Hijau
2.1.19.7	Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	18	18	18	18	100,00	Hijau
2.1.19.8	Jumlah Kegiatan Olahraga	40	45	45	50	50	50	100,00	Hijau
2.1.19.9	Jumlah Klub Olahraga	200	200	200	208	208	208	100,00	Hijau
2.1.19.10	Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga)	1.500	1.500	1.516	1.516	1.517	1.517	100,00	Hijau
2.1.20	Statistik;								
2.1.20.1	Ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan dalam statistik daerah (UU 23 tahun 2014)	20 urusan	20 urusan	20 urusan	20 urusan	20 urusan	20 urusan	100,00	Hijau
2.1.21	Persandian;								
2.1.21.1	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
2.1.22	Kebudayaan;								
2.1.22.1	Jumlah organisasi seni budaya Kabupaten Karanganyar								
	Karawitan	40	46	46	86	106	106	100,00	Hijau
	Ludruk	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ketoprak	5	5	5	6	6	6	100,00	Hijau
	Srandil	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
	Ureng-ureng Tiyet	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
	Orek-orek	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
	Orkes Melayu	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau
	Samroh	6	6	6	6	6	6	100,00	Hijau
	Reyog	4	4	4	4	4	4	100,00	Hijau
	Tayuban	3	3	3	3	3	3	100,00	Hijau
	Band	6	6	6	6	6	6	100,00	Hijau
	Jaran Gedrug	3	3	3	3	3	3	100,00	Hijau
	Orkes Keroncong/ Campursari	10	12	12	12	14	14	100,00	Hijau
	Macapatan	4	4	4	4	4	4	100,00	Hijau
	Kulintang	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau
	Klotekan Lesung	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau
	Sandhur	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
	Wayang Kulit	1	1	1	1	1	1	100,00	Hijau
	Tari	3	3	3	3	3	3	100,00	Hijau
	Seni Lukis	13	15	15	15	17	17	100,00	Hijau
2.1.23	Perpustakaan;								
2.1.23.1	Jumlah perpustakaan :	23	35	45	87	112	112	100,00	Hijau
	- Perpustakaan Desa	1	10	24	29	36	36	100,00	Hijau
	- Perpustakaan Rumah Ibadah	0	0	1	2	4	4	100,00	Hijau
	- Perpustakaan SD/MI	11	16	28	38	77	77	100,00	Hijau
	- Perpustakaan SMP/MTs	7	10	18	22	48	48	100,00	Hijau
	- Perpustakaan SLTA/MA	4	7	12	15	21	21	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
	- Perpustakaan PT	0	1	2	3	4	4	100,00	Hijau
	- Perpustakaan Khusus	0	1	2	3	4	4	100,00	Hijau
2.1.23.2	Jumlah Koleksi Perpustakaan	30.875	31.500	32.125	34.284	35.248	35.248	100,00	Hijau
2.1.23.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	34.133	35.989	37.845	39.992	38.248	34.000	112,49	Hijau
2.1.24	Kearsipan.								
2.1.24.1	Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah (kegiatan)	1500	2000	2500	1500	1500	1500	100,00	Hijau
2.2.	Urusan Pilihan								
2.2.1	Kelautan dan perikanan;								
2.2.1.1	Produksi perikanan tangkap (Ton)	595,815	518,787	502,51	532,66	543,72	543,72	100,00	Hijau
2.2.1.3	Produksi perikanan budidaya (Ton)	1.148,21	1.303,82	1.614,77	1.616,85	1.723,39	1.723,39	100,00	Hijau
2.2.1.2	Peningkatan tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	11,75	12,2	12,83	16,23	18,13	18,13	100,00	Hijau
2.2.2	Pariwisata;								
2.2.2.1	Jumlah Obyek Wisata (buah)	59	59	59	59	59	59	100,00	Hijau
2.2.2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	8.510	11.090	7.857	6.778	8.742	8.742	100,00	Hijau
2.2.2.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara (orang)	575.121	614.060	580.088	888.566	746.543	746.543	100,00	Hijau
2.2.2.4	PAD Sektor Pariwisata (Rp. juta)	717,19	800,66	1.119,13	1.584,89	1.527,93	1.527,93	100,00	Hijau
2.2.3	Pertanian;								
2.2.3.1	Produksi Padi (Ton)	281.674	357.978	311.920	337.925	334.394	280.284	119,31	Hijau
2.2.3.2	Produksi Jagung (Ton)	33.595,00	28.782,00	39.410,00	36.567,00	27.113,00	29.742,00	91,16	Kuning
2.2.3.3	Produksi kedele (Ton)	371	234	217	252	419	308	136,04	Hijau
2.2.3.4	Produksi Ubi Jalar (Ton)	16.849,00	27.054,00	31.076,00	19.916,00	33.920,00	26.345,00	128,75	Hijau
2.2.3.5	Produksi Ubi Kayu (Ton)	158.048,00	115.689,00	131.244,00	91.478,00	83.113,00	151.709,00	54,78	Merah
2.2.3.6	Produksi Kacang Tanah (Ton)	7.755,00	9.607,00	6.680,00	4.935,00	2.266,00	9.811,00	23,10	Merah
2.2.3.7	Populasi Ternak di Kabupaten Karanganyar								
	- Sapi potong (ekor)	80.078	60.023	61.612	62.948	63.144	63.144	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
	- Kambing (ekor)	22.506	23.402	24.451	24.600	25.330	25.330	100,00	Hijau
	- Domba (ekor)	115.964	116.065	116.522	117.606	117.651	117.651	100,00	Hijau
	- Babi (ekor)	39.470	52.794	53.526	51.021	52.145	52.145	100,00	Hijau
	- Ayam ras petelur (ekor)	1.862.350	1.870.600	1.870.718	1.630.060	1.830.430	1.830.430	100,00	Hijau
	- Ayam buras (ekor)	878.926	900.057	915.771	918.961	919.390	919.390	100,00	Hijau
	- Ayam ras pedaging (ekor)	3.619.975	3.860.405	5.296.550	4.758.900	6.948.766	6.948.766	100,00	Hijau
	- Itik (ekor)	90.942	83.390	85.524	85.694	74.316	74.316	100,00	Hijau
	- Kelinci (ekor)	12.409	12.545	12.801	12.985	12.268	12.268	100,00	Hijau
	- Burung puyuh (ekor)	487.205	489.750	500.350	511.427	511.485	511.485	100,00	Hijau
2.2.3.8	Jumlah kelembagaan pertanian								
	- Kelompok Tani	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	100,00	Hijau
	- Kelompok Wanita Tani	1	1	1	2	5	5	100,00	Hijau
	- Gabungan Kelompok Tani	176	176	176	176	176	176	100,00	Hijau
	- Kelompok Ternak Sapi Potong	8	18	23	17	32	32	100,00	Hijau
	- Kelompok Ternak Kambing/Domba	1	1	1	1	4	4	100,00	Hijau
	- Kelompok Unggas	-	1	1	1	2	2	100,00	Hijau
	- Kelompok Ternak Kelinci	-	2	-	1	2	2	100,00	Hijau
	- Balai Penyuluh Pertanian	17	17	17	17	17	17	100,00	Hijau
	- POSLUHDES	176	176	176	176	176	176	100,00	Hijau
2.2.4	Kehutanan;								
2.2.4.1	Hutan lindung (Ha)	na	na	na	na	7.509,48	7.509,48	100,00	Hijau
2.2.4.2	Taman hutan rakyat	na	na	na	na	231,3	231,3	100,00	Hijau
	Hutan wisata	na	na	na	na	64,12	64,12	100,00	Hijau
2.2.5	Energi dan sumber daya mineral;								
2.2.5.1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRD (%)	1,13	1,19	1,26	1,24	1,22	1,22	100,00	Hijau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.2.6	Perdagangan;								
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	11,65	11,14	11,1	11,06	11,2	11,2	100,00	Hijau
2.2.6.2	Fasilitas perdagangan								
	- Pasar tradisional	18	18	18	18	18	18	100,00	Hijau
	- Pasar lokal	10	10	10	11	11	11	100,00	Hijau
	- Swalayan	28	28	45	62	28	28	100,00	Hijau
	- Pasar grosir	2	2	2	2	2	2	100,00	Hijau
	- Mall/plaza	3	3	3	3	3	3	100,00	Hijau
2.2.7	Perindustrian;								
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen)	45,06	45,64	45,21	45,78	45,89	45,89	100,00	Hijau
2.2.7.2	Jumlah Usaha Industri Kecil	9.944	10.303	na	na	7.138	7.138	100,00	Hijau
2.2.7.3	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil	35.301	36.188	na	na	36.493	36.493	100,00	Hijau
2.2.7.4	Jumlah Usaha Industri Sedang	183	186	na	13	45	45	100,00	Hijau
2.2.7.5	Jumlah Tenaga Kerja Industri Sedang	31.410	32.850	na	1.371	707	707	100,00	Hijau
2.2.7.6	Jumlah Usaha Industri Besar	29	35	na	38	103	103	100,00	Hijau
2.2.7.7	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar	3.775	14.910	na	42.620	52.143	52.143	100,00	Hijau
2.2.8	Transmigrasi.								
2.2.8.1	Terlaksananya transmigrasi regional (KK)	10	4	7	15	3	3	100,00	Hijau
2.3	Fungsi Penunjang								
2.3.1	Administrasi Pemerintahan								
2.3.1.1	Peraturan Daerah	19	13	29	18	13	13	100,00	Hijau
2.3.1.2	Peraturan Bupati	25	60	70	112	101	101	100,00	Hijau
2.3.1.3	Keputusan Bupati	1.167	1.346	1.042	785	874	874	100,00	Hijau
2.3.2	Perencanaan;								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Target Akhir 2013-2018	Capaian Kinerja terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Hijau = tercapai; Merah = tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017			
2.3.2.1	Tersedianya Dokumen data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (%)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	Hijau
2.3.2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	Hijau
2.3.2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	Hijau
2.3.3	Keuangan;								
2.3.3.1	Proporsi PAD dalam APBD	9,88	11,24	12,51	12,42	18,27	18,27	100,00	Hijau
2.3.3.2	Proporsi Belanja Pegawai (Gaji) dalam APBD	63,31	56,75	54,93	49,39	43,98	43,98	100,00	Hijau
2.3.4	Pengawasan								
2.3.4.1	presentase satuan kerja nilai LAKIP- minimal baik (LHE)	CC	CC	CC	CC	CC	cc	100,00	Hijau
2.3.5	Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan								
2.3.5.1	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim II (orang)	2	2	2	3	0	3	100,00	
2.3.5.2	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim III (orang)	7	5	4	14	4	4	100,00	Hijau
2.3.5.3	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim IV (orang)	12	0	1	15	4	4	100,00	Hijau
2.3.6	Penelitian dan pengembangan								
2.3.6.1	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan (juara lomba krenova)	na	na	6	6	6	6	100,00	Hijau

Sumber : Baperlitbang, 2018

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa: (1) Pemberian sumber penerimaan Daerah berasal / berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Pemberian dana bersumber dari Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER); (3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil Keuangan Daerah, Kerangka Pendanaan dan Pendanaan Indikatif sebagai dasar penentuan Kebijakan Keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan / stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar,

dalam bentuk peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja (pengurangan pengganguran), penurunan dalam ketimpangan pendapatan dan terjadinya peningkatan dalam mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia). Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan prosedural.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup aspek: (1) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (3) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dibagi ke dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu: (1) Kinerja Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan (3) Kerangka Pendanaan. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan diuraikan secara terperinci pada bagian berikut.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2018 hingga tahun 2023.

Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (1) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (2) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapny akan dibahas pada bagian berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD menguraikan perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan Gambaran Realisasi Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama kurun waktu 2013-2017, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar, selengkapny akan dibahas pada bagian berikut ini.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, Ayat (26) telah disebutkan

bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.1. Dapat dilihat bahwa capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pendapatan Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp 1,369 triliun, pada tahun 2017 telah meningkat menjadi sebesar Rp. 2,041 triliun atau mengalami peningkatan / daya tumbuh selama tahun 2013-2017 sebesar 9,16%. Dana Perimbangan sejak tahun 2013-2017 berdasarkan realisasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,83%. Terdiri dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5,65% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 24,23% sedangkan pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar -12,35%. Khusus DAK rata-rata pertumbuhan yang cukup besar disebabkan pergeseran rekening dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (TPG).

Tabel III.1.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.369.051.826.396	1.616.249.807.725	1.834.209.380.841	2.012.347.065.180	2.041.166.220.284
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161.715.929.349	215.298.860.199	255.445.549.750	301.319.800.956	412.848.477.685
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	77.015.249.349	86.152.370.887	106.490.028.050	127.624.564.710	150.746.368.794
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.874.824.214	28.717.727.165	22.136.931.141	25.313.104.168	24.068.314.297
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.603.188.065	7.696.875.835	7.816.593.359	8.554.965.219	11.040.503.610
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.222.667.721	92.731.886.312	119.001.997.200	139.827.166.859	226.993.290.984
1.2	DANA PERIMBANGAN	900.707.521.585	955.829.230.444	1.031.780.509.616	1.390.153.333.367	1.271.470.088.847
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.287.879.585	28.588.768.444	27.243.362.616	41.236.369.287	39.433.492.326
1.2.2	Dana Alokasi Umum	810.216.582.000	870.001.752.000	906.446.527.000	996.164.049.000	978.664.650.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.203.060.000	57.238.710.000	98.090.620.000	352.752.915.080	253.371.946.521
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	306.628.375.462	445.121.717.082	546.983.321.475	320.873.930.857	356.847.653.752
1.3.1	Pendapatan Hibah	309.331.750	731.418.615	6.231.557.955	1.638.105.985	10407571931
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.973.627.130	90.677.243.467	114.267.398.520	114.079.018.872	134.069.516.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	215.823.145.000	273.624.235.000	350.325.837.000	108.686.344.000	187.907.233.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.522.271.582	80.088.820.000	76.158.528.000	96.470.462.000	24.463.332.821
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber BKD, 2018

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Kenaikan ini berasal dari kenaikan Dana Hibah sebesar 53,88%, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 13,81%, namun Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berkurang sebesar -2,53%, Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.2.

Kondisi pencapaian pendapatan tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

- 1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak/Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Pengkajian obyek-obyek baru;
 - f. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
- 2) Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif;
- 3) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
- 4) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Tabel III.2.

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	PERTUMBUHAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	140.376.390.386	247.197.981.329	217.959.573.116	178.137.684.339	28.819.155.104	9,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.009.035.930	53.582.930.850	40.146.689.551	45.874.251.206	111.528.676.729	21,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.357.018.302	9.137.121.538	20.337.657.163	21.134.536.660	23.121.804.084	19,18
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.228.138.603	7.842.902.951	(6.580.796.024)	3.176.173.027	(1.244.789.871)	6,95
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.563.510.652	93.687.770	119.717.524	738.371.860	2.485.538.391	16,39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.860.368.373	36.509.218.591	26.270.110.888	20.825.169.659	87.166.124.125	27,67
1.2	DANA PERIMBANGAN	63.629.381.875	55.121.708.859	75.951.279.172	358.372.823.751	(118.683.244.520)	7,83
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	(25.357.338.125)	(6.699.111.141)	(1.345.405.828)	13.993.006.671	(1.802.876.961)	-12,35
1.2.2	Dana Alokasi Umum	89.298.070.000	59.785.170.000	36.444.775.000	89.717.522.000	(17.499.399.000)	5,65
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	(311.350.000)	2.035.650.000	40.851.910.000	254.662.295.080	(99.380.968.559)	24,23
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.737.972.581	138.493.341.620	101.861.604.393	(226.109.390.618)	35.973.722.895	4,15
1.3.1	Pendapatan Hibah	309.331.750	422.086.865	5.500.139.340	(4.593.451.970)	8.769.465.946	53,88
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.277.500.249	19.703.616.337	23.590.155.053	(188.379.648)	19.990.497.128	13,81
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.589.959.000	57.801.090.000	76.701.602.000	(241.639.493.000)	79.220.889.000	0,59
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(12.438.818.418)	60.566.548.418	(3.930.292.000)	20.311.934.000	(72.007.129.179)	-2,53

Sumber : BKD , 2018

Sementara itu, jika dilihat dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap keseluruhan (Total Pendapatan Daerah /TPD), dapat dilihat bahwa PAD di Kabupaten Karanganyar memberikan sumbangan secara rata-rata selama tahun 2013–2017 adalah sebesar 14,9%. Hal ini menandakan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) atau juga sering disebut sebagai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Karanganyar masih rendah, yaitu kurang dari 15% secara rata-rata selama periode 2013-2017; meskipun sumbangan PAD terhadap TPD tahun 2017 sudah mencapai besaran 21,99%.

Di lain pihak, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat memberikan kontribusi secara rata-rata selama tahun 2013-2017 sebesar 62,50%. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah pusat masih tinggi, yaitu di atas 60%, meskipun jika dilihat trenya cenderung mengalami penurunan. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3.

Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,81	13,32	13,93	14,97	20,23	14,9
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,63	5,33	5,81	6,34	7,39	6,10
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,52	1,78	1,21	1,26	1,18	1,40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,56	0,48	0,43	0,43	0,54	0,50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,11	5,74	6,49	6,95	11,12	6,90
1.2	DANA PERIMBANGAN	65,79	59,14	56,25	69,08	62,29	62,50
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,58	1,77	1,49	2,05	1,93	2,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	59,18	53,83	49,42	49,50	47,95	52,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4,03	3,54	5,35	17,53	12,41	8,60
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22,40	27,54	29,82	15,95	17,48	22,60
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,02	0,05	0,34	0,08	0,51	0,20
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,18	5,61	6,23	5,67	6,57	5,90
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15,76	16,93	19,10	5,40	9,21	13,30
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,43	4,96	4,15	4,79	1,20	3,30
1.3.5	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sumber : BKD, diolah 2018

b. Belanja Daerah

Berdasar Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan bahwa: (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan

Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut kelompok belanja, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Belanja Tidak Langsung (BTL), dan (2) Belanja Langsung (BL). Penjelasan terhadap kedua jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bunga.

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD. Sejak tahun 2013–2017, Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum melakukan pinjaman kembali, sehingga tidak ada pembayaran bunga pinjaman.

c) Belanja Subsidi.

Belanja subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih/sanitasi, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

d) Belanja Hibah.

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak

mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

f) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

g) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan dan desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

h) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2) Belanja Langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, yaitu:

a) Belanja Pegawai

merupakan pengeluaran untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dalam laporan realisasi anggaran (LRA) tergabung dalam belanja pegawai di dalam belanja tidak langsung.

b) Belanja Barang dan Jasa

merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c) Belanja Modal

merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Gambaran proporsi (bagian) Belanja Daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dapat dilihat pada Tabel III.4, sedangkan gambaran tentang perkembangan realisasi selama Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.4.
Proporsi (bagian) Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	77,74	72,05	70,53	65,47	65,90	70,34
2.1.1	Belanja Pegawai	66,62	57,84	55,46	48,57	43,84	54,46
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	6,94	9,55	7,39	3,74	5,44	6,61
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,60	0,58	0,53	0,31	0,43	0,49
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,16	0,12	0,28	0,60	0,73	0,38
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3,43	3,94	6,87	12,24	15,44	8,39
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
2.2	BELANJA LANGSUNG	22,26	27,95	29,47	34,53	34,10	29,66
2.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,72	14,08	15,86	16,21	20,94	15,56
2.2.3	Belanja Modal	11,50	13,40	13,92	18,48	14,07	14,27

Sumber : BKD , 2018

Dilihat dari proporsi belanja terlihat bahwa belanja tidak langsung rata-rata menunjukkan proporsi terbesar yaitu sebesar 70,34%, dimana 54,46% merupakan belanja pegawai. Perkembangan proporsi belanja pegawai yang semakin berkurang menunjukkan tren yang semakin baik (efisien) selama 5 tahun yang lalu, namun tidak disertai dengan kenaikan belanja modal. Diperkirakan karena dana beralih ke belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang menunjukkan tren kenaikan proporsi dari 3,43% di tahun 2013 menjadi 15,44% pada tahun 2017.

Dengan melihat Tabel III.5. dan III.6 diketahui Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja di tahun 2013 sebesar Rp 1,287 triliun, meningkat menjadi Rp 2,066 triliun pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 10,12%. Pos Belanja Tidak Langsung (BTL) pada periode yang sama, meningkat dari sekitar Rp 1,000 triliun pada tahun 2013, menjadi sekitar Rp 1,361 triliun pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 6,83%. Pos Belanja Langsung (BL) juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp. 286,513 milyar pada tahun 2013, meningkat menjadi sekitar Rp. 704,694 milyar pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan/daya tumbuh sebesar 17,65%.

Tabel III.5.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	1.287.163.763.904	1.609.306.822.016	1.775.944.203.663	2.086.307.677.600	2.066.494.748.105
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.000.650.167.693	1.159.444.901.359	1.252.592.165.933	1.365.996.683.167	1.361.799.980.737
2.1.1	Belanja Pegawai	857.463.349.997	930.884.271.707	984.870.265.996	1.013.231.889.532	905.928.746.932
2.1.2	Belanja Bunga	20.165.398	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	89.275.434.563	153.673.631.731	131.180.738.397	78.048.118.666	112.449.403.799
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.755.700.000	9.366.000.000	9.459.237.500	6.568.000.000	8.976.850.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.999.932.000	1.999.822.000	5.000.000.000	12.513.788.000	15.104.954.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	44.130.400.384	63.419.705.921	122.081.924.040	255.436.681.969	319.083.021.156
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.185.351	101.470.000	0	198.205.000	257.004.850
2.2	BELANJA LANGSUNG	286.513.596.211	449.861.920.657	523.352.037.730	720.310.994.433	704.694.767.368
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.034.852.185	226.574.019.757	281.699.236.399	338.240.613.513	432.724.327.567
2.2.3	Belanja Modal	148.478.744.026	223.287.900.900	241.652.801.331	382.070.380.920	271.970.439.801

Sumber : BKD , 2018

Tabel III.6.
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	PERTUMBUHAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	113.958.074.854	322.143.058.112	166.637.381.647	310.363.473.937	(19.812.929.495)	10,12
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58.177.229.436	158.794.733.666	93.147.264.574	113.404.517.234	(4.196.702.430)	6,83
2.1.1	Belanja Pegawai	55.803.834.761	73.420.921.710	53.985.994.289	28.361.623.536	(107.303.142.600)	2,22
2.1.2	Belanja Bunga	(147.878.277)	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	2.029.967.563	64.398.197.168	(22.492.893.334)	(53.132.619.731)	34.401.285.133	4,46
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(1.028.088.000)	1.610.300.000	93.237.500	(2.891.237.500)	2.408.850.000	0,46
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	(57.200)	(110.000)	3.000.178.000	7.513.788.000	2.591.166.000	35,79
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2.283.841.838	19.289.305.537	58.662.218.119	133.354.757.929	63.646.339.187	34,48
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	(764.391.249)	96.284.649	(101.470.000)	198.205.000	58.799.850	-91,23
2.2	BELANJA LANGSUNG	55.780.845.418	163.348.324.446	73.490.117.073	196.958.956.703	(15.616.227.065)	17,65
2.2.1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.063.523.513	88.539.167.572	55.125.216.642	56.541.377.114	94.483.714.054	22,91
2.2.3	Belanja Modal	25.717.321.905	74.809.156.874	18.364.900.431	140.417.579.589	(110.099.941.119)	11,77

Sumber : BKD , 2018

Dengan melihat data daya tumbuh selama tahun 2013-2017 pada tabel III.6, dapat dilihat bahwa pos Belanja Langsung (BL) tumbuh dengan cepat, melebihi pertumbuhan pos Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu sebesar 17,65% dibanding sebesar 6,83%. Pos Belanja dalam kategori Belanja Tidak Langsung (BTL) yang mengalami pertumbuhan tinggi selama tahun 2013-2017 adalah pos Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tumbuh sebesar 35,79% dan pos Belanja Bantuan Keuangan, sebesar 34,48%. Kenaikan ini dikarenakan ada kebijakan ataupun adanya peraturan yang mengatur pembagian bagi hasil pajak dan retribusi serta adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sedangkan pada belanja pegawai lebih kecil yaitu 2,2%. Untuk pos Belanja Langsung (BL) yang mengalami pertumbuhan cepat, yaitu pos Belanja Barang dan Jasa sebesar 22,91%, dan Belanja Modal tumbuh sebesar 11,77%.

Dengan membandingkan antara kenaikan pendapatan yang rata-rata tumbuh 9,16% dengan pertumbuhan belanja maka tren penggunaannya (belanja) sebagian besar digunakan untuk belanja bagi hasil, bantuan keuangan desa, belanja barang jasa dan belanja modal. Dari tabel tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) selama tahun 2013-2017 lebih besar jika dibanding dengan proporsi Belanja Langsung (BL) dengan besaran proporsi yang berfluktuasi.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah berusaha untuk selalu meningkatkan alokasi Belanja Langsung (BL) pada pos Belanja Modal pada setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun besarnya masih sekitar 14,27%; atau kurang dari 15%. Kondisi yang demikian diharapkan tetap mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Karanganyar.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2013–2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib (BUW) baik dasar maupun non dasar, Belanja Urusan Pilihan (BUP), Belanja Urusan Penunjang, serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- b) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c) Belanja daerah disusun berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.
- d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap PD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga telah dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (2) Pencairan dana cadangan; (3) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) Pinjaman Daerah; dan (5) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas perihal Surplus/Defisit Anggaran, dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, di mana Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana cadangan; dan/atau (4) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk meningkatkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) dari

tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan Belanja Daerah.

- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk meningkatkan kinerja (*performance*) dari Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah.
- 3) Sumber utama penerimaan pembiayaan daerah masih didominasi oleh penerimaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2013-2017. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gambaran realisasi dan perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2013–2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	176.017.192.339	261.877.610.097	262.855.105.135	323.682.435.402	224.047.922.895
3.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	175.166.745.762	257.517.118.697	261.829.595.806	314.620.282.000	223.810.397.895
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	850.446.577	3.619.491.400	1.025.509.329,00	684.153.402,00	237.525.000
3.1.9	Penarikan dari AMU Bank Jateng	0	194.000.000	0	326.000.000	0
3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	0	547.000.000	0	6.924.000.000	0
3.1.12	Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng	0	0	0	1.128.000.000	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	388.136.134	6.991.000.000	6.500.000.000	25.899.426.000	14.050.423.800
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	6.741.000.000	6.500.000.000	24.935.000.000	14.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	388.136.134	0	0	0	0
3.2.5	Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	0	0	0	0	0
3.2.6	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	0	250.000.000	0	905.850.000	0
3.2.9	Pembayaran Hutang Belanja	0	0	0	58.576.000	0
3.2.10	Pembayaran Hutang Retensi	0	0	0	0	50.423.800
	PEMBIAYAAN NETTO	175.629.056.205	254.886.610.097	256.355.105.135	297.783.009.402	209.997.499.095

Sumber : BKD , 2018

Tabel III.8.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	PERTUMBUHAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.326.495.689	85.860.417.758	977.495.038	60.827.330.267	(99.634.512.507)	8,12
3.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.215.904.884	82.350.372.935	4.312.477.109	52.790.686.194	(90.809.884.105)	8,26
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	110.590.805	3.510.044.823	(2.593.982.071)	(341.355.927)	(446.628.402)	3,72
3.1.9	Penarikan dari AMU Bank Jateng	0	194.000.000	0	0	0	0
3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	0	547.000.000	0	0	0	0
3.1.12	Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	(2.605.561.714)	6.602.863.866	(491.000.000)	19.399.426.000	(11.849.002.200)	20,54
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	6.741.000.000	(241.000.000)	18.435.000.000	(10.935.000.000)	26,83
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	(2.605.561.714)	0	0	0	0	0
3.2.5	Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	0	250.000.000	0	0	(905.850.000)	0
3.2.9	Pembayaran Hutang Belanja	0	0	0	0	(58.576.000)	0
3.2.10	Pembayaran Hutang Retensi	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	55.932.057.403	79.257.553.892	1.468.495.038	41.427.904.267	87.785.510.307)	7,56

Sumber : BKD , 2018

Tabel III.9.
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2017

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Pembiayaan Netto	SiLPA
2013	1.369.051.826.396	1.287.163.763.904	81.888.062.492	175.629.056.205	257.517.118.697
2014	1.616.249.807.725	1.609.306.822.016	6.942.985.709	254.886.610.097	261.829.595.806
2015	1.834.209.380.841	1.775.944.203.663	58.265.177.178	256.355.105.135	314.620.282.313
2016	2.012.347.065.180	2.086.307.677.600	(73.960.612.420)	297.783.009.402	223.822.396.982
2017	2.041.166.220.284	2.066.494.748.105	(25.328.527.821)	209.997.499.095	184.668.971.274

Sumber : BKD , 2018

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, realisasi APBD Kabupaten Karanganyar di akhir tahun selalu berada dalam posisi surplus atau terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan, besarnya naik turun selama kurun waktu 2013-2017. Adanya SiLPA ini digunakan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (hutang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Penggambaran Neraca Daerah mempunyai manfaat, antara lain:

- 1) untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah;
- 2) untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan
- 3) untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan.

Kinerja Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2013–2017 yang sudah di audit, dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.10.

Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Pertumbuhan					Rata-rata Pertum- buhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	282.221.932.629,40	321.595.282.751,32	437.672.955.428,74	278.771.070.273,59	244.492.309.402,63	(3,52)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	251.859.544.088,00	244.745.154.909,00	296.745.612.643,00	202.491.542.282,00	161.148.328.375,00	(10,56)
	Kas di Bendahara Penerimaan	39.478.490,00	-	2.667.250,00	16.375.649,00	17.850.950,00	(18,00)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	13.658.590,00	381.006.539,00	87.555.137,00	129.422.575,00	67.307.995,00	48,99
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.657.574.609,00	13.824.324.069,00	10.196.891.646,00	9.631.523.806,00	14.049.881.954,00	25,53
	Kas Lainnya	-	2.949.902.000,00	7.672.716.482,00	11.670.946.676,00	9.975.976.543,00	-
	Kas di Bendahara Dana BOS Reguler	-	-	2.530.930.936,00	3.334.377.096,00	1.771.019.137,00	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Piutang Pajak	3.602.381.549,00	-	-	-	-	(100,00)
	Penyisihan Piutang	(291.363.393,00)	-	-	-	-	(100,00)
	Piutang Retribusi	1.094.175.784,00	-	-	-	-	100,00)
	Penyisihan Piutang	(225.419.876,00)	-	-	-	-	(100,00)
	Piutang Pendapatan	-	51.213.711.731,00	55.477.566.101,00	57.549.900.525,00	61.299.866.647,00	-
1.1.3	Piutang Lain-Lain	12.449.235.365,00	13.917.169.877,62	16.913.710.029,62	12.329.153.852,00	11.400.833.633,00	(2,18)
	Penyisihan Piutang	(1.980.514.889,60)	(41.522.014.030,30)	(42.825.098.051,27)	(44.137.120.409,78)	(45.449.970.916,49)	118,87
	Beban Dibayar Dimuka	-	25.790.333,00	30.690.333,00	28.847.000,00	1.377.163.333,33	-
1.1.4	Persediaan	10.003.182.313,00	36.060.237.323,00	90.839.712.922,39	25.726.101.222,37	28.834.051.751,79	30,30
	INVESTASI JANGKA PANJANG	126.093.225.902,93	115.566.978.932,50	128.630.790.711,23	160.938.614.652,08	180.520.026.330,00	9,39
	Investasi Non Permanen	5.960.425.000,00	-	-	160.938.614.652,08	180.520.026.330,00	134,59
	Investasi Permanen	120.132.800.902,93	115.566.978.932,50	128.630.790.711,23	-	-	(100,00)
1.2	ASET TETAP	2.089.506.867.379,00	1.936.421.912.500,48	2.060.412.934.043,48	2.307.974.401.623,50	2.469.480.796.159,75	4,27
1.2.1	Tanah	745.480.397.521,00	773.359.000.171,00	781.825.934.261,00	784.352.892.821,00	788.723.139.354,00	1,42

No.	Uraian	Pertumbuhan					Rata-rata Pertum- buhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	Peralatan dan mesin	291.180.816.034,00	340.270.427.321,54	388.691.498.054,54	346.630.707.164,54	379.781.695.641,82	6,87
1.2.3	Gedung dan bangunan	684.651.486.934,00	751.889.981.958,00	846.449.834.271,00	935.354.319.708,00	985.494.707.477,00	9,53
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	304.549.464.804,00	446.498.905.767,00	549.571.484.026,00	680.563.340.738,00	831.845.086.850,00	28,56
1.2.5	Aset tetap lainnya	61.303.496.539,00	168.842.666.689,94	188.823.695.243,94	221.679.261.973,94	245.886.067.511,93	41,52
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	2.341.205.547,00	1.850.214.900,00	148.139.900,00	9.968.420.902,00	2.474.124.291,00	1,39
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	-	(546.289.284.307,00)	(695.097.651.713,00)	(670.574.541.683,98)	(764.724.024.966,00)	-
1.3	ASET LAINNYA	18.658.410.465,00	12.802.518.652,00	12.497.564.221,00	38.275.569.544,50	21.955.313.818,85	4,15
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.159.717.769,00	-	-	-	-	(100,00)
1.3.3	Tagihan jangka panjang	-	1.159.717.769,00	1.159.717.769,00	1.159.717.769,00	1.159.717.769,00	-
1.3.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	6.457.500.000,00	6.457.500.000,00	6.457.500.000,00	6.457.500.000,00	6.457.500.000,00	-
1.3.5	Aset tak berwujud	777.670.000,00	289.010.625,00	259.998.750,00	848.808.937,50	1.279.950.797,00	13,27
1.3.6	Aset Lain-lain	10.263.522.696,00	4.896.290.258,00	4.620.347.702,00	29.809.542.838,00	13.058.145.252,85	6,21
	JUMLAH ASET DAERAH	2.516.480.436.376,33	2.386.386.692.836,30	2.639.214.244.404,45	2.785.959.656.093,67	2.916.448.445.711,23	3,76
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.662.822.890,00	5.055.181.080,00	8.303.407.607,00	8.359.049.461,67	10.354.656.976,33	0,43
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	13.658.590,00	70.791.711,00	85.161.045,00	179.836.893,00	67.307.995,00	48,99
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Bagian lancar utang jangka panjang	-	905.850.000,00	905.850.000,00	-	-	-
2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	-	-	1.431.854.668,00	1.450.454.327,67	2.076.158.951,83	-
2.1.5	Utang beban	-	-	3.599.650.152,00	3.580.113.924,00	7.566.376.779,50	-
2.1.6	Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Utang Pemerintah Provinsi	1.155.850.000,00	-	-	-	-	(100,00)
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.493.314.300,00	4.078.539.369,00	2.280.891.742,00	3.148.644.317,00	644.813.250,00	(18,94)
3	EKUITAS DANA	2.513.817.613.486,33	2.938.658.282.275,82	2.630.910.836.797,46	2.777.600.606.632,01	2.906.093.788.735,10	3,69

No.	Uraian	Pertumbuhan					Rata-rata Pertum- buhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	279.559.109.739,40	320.592.850.707,32	-	-	-	(100,00)
3.1.1	SILPA	257.517.118.697,00	261.829.595.806,00	-	-	-	(100,00)
3.1.2	Cadangan piutang	14.648.494.539,40	23.608.867.578,32	-	-	-	(100,00)
3.1.3	Cadangan persediaan	10.003.182.313,00	36.060.237.323,00	-	-	-	(100,00)
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	(2.649.164.300,00)	(905.850.000,00)	-	-	-	(100,00)
	Pendapatan yang Ditanggguhkan	39.478.490,00	-	-	-	-	(100,00)
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	2.234.258.503.746,93	2.618.065.431.568,50	-	-	-	(100,00)
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	126.093.225.902,93	115.566.978.932,50	-	-	-	(100,00)
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.089.506.867.379,00	2.482.716.196.808,00	-	-	-	(100,00)
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	18.658.410.465,00	23.860.795.197,00	-	-	-	(100,00)
3.2.4	dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	(4.078.539.369,00)				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.516.480.436.376,33	2.943.713.463.355,82	2.639.214.244.404,46	2.785.959.656.093,68	2.916.448.445.711,43	3,76

Sumber : BKD , 2018

Dari tabel tersebut dapat diuraikan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kondisi pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017, yaitu sebagai berikut:

a. Aset Daerah

Pos Aset dalam Neraca Daerah mencakup aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Masuk dalam klasifikasi ini adalah kas atau setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sementara aset non lancar adalah semua aset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan lagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Komposisi Aset Daerah dalam pos Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar, terdiri dari: (1) Aset Lancar; (2) Investasi Jangka Panjang; (3) Aset Tetap; (4) Dana Cadangan; dan (5) Aset Lain-lain, termasuk di dalamnya berupa aset tak berwujud dan aset kerjasama atau kemitraan.

Aset Daerah di Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, pada posisi 31 Desember 2013 menunjukkan angka sebesar Rp. 2,519 triliun. Sedang pada posisi hingga 31 Desember 2017 naik menjadi sebesar Rp. 2,916 triliun. Namun penurunan yang besar terjadi pada jumlah Aset Lancar yang berjumlah dari sekitar Rp. 282,221 miliar pada 2013; menurun menjadi sekitar Rp. 244,492 miliar tahun 2017. Untuk Aset Tetap di Kabupaten Karanganyar justru mengalami peningkatan, dari sekitar Rp 2,089 trilyun pada 2013, meningkat menjadi sekitar Rp. 2,469 trilyun pada tahun 2017. Begitu pula untuk Aset Lainnya, juga mengalami peningkatan, dari sekitar Rp. 18,658 miliar pada 2013; meningkat menjadi sekitar Rp 21,955 miliar pada tahun 2017.

b. Kewajiban Daerah

Kewajiban Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar atas sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau pada pemberi jasa lainnya.

Pos Kewajiban dalam Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar, mencakup: (1) Kewajiban Jangka Pendek; dan (2) Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 2,662 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi sekitar Rp. 10,354 miliar pada 31 Desember 2017. Secara keseluruhan Jumlah Kewajiban dalam pos Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar, mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 2,662 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi sekitar Rp. 10,354 miliar pada 31 Desember 2017.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Daerah adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah secara umum terdiri dari: (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan.

Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan dari sekitar Rp. 2,513 triliun pada 31 Desember 2013; menurun menjadi sekitar Rp. 2,906 triliun pada 31 Desember 2017.

Pada Tabel III.10 pos Ekuitas mengalami perubahan format penulisan, rincian akun ekuitas dana tahun 2013-2014 berbeda dengan akun ekuitas dana pada tahun 2015-2017 dikarenakan perbedaan pencatatan. Tahun 2013-2014 menggunakan metode basis kas menuju akrual sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan metode basis akrual sehingga berpengaruh pada pemetaan akun/rekening.

3.2. Analisis Keuangan Daerah

3.3.1. Analisis Fiskal

Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Per Kapita

Angka yang menunjukkan besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar pendapatan perkapita tidak mengalami penurunan, perlu diatasi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.11.

Pendapatan Per Kapita Penduduk Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita
2013	1.369.051.826.396	848.455	1.613.582
2014	1.616.249.807.725	848.326	1.905.223
2015	1.834.209.380.841	856.198	2.142.272
2016	2.012.347.065.180	864.021	2.329.049
2017	2.041.166.220.284	871.596	2.341.872

Sumber : Baperlitbang, 2018

b. Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2013 hingga 2017, dilihat adanya tren kemandirian keuangan daerah yang cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.12.

Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2017

Tahun	PAD dan DBH	Total belanja	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah
2013	232.689.556.479	1.287.163.763.904	5,53
2014	305.976.103.666	1.609.306.822.016	5,26
2015	369.712.948.270	1.775.944.203.663	4,80
2016	415.398.819.828	2.086.307.677.600	5,02
2017	435.389.316.956	2.066.494.748.105	4,75

Sumber : BKD, 2018

c. Ruang Fiskal Daerah

Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Tabel III.13.

Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Pendapatan	1.369.051.826.396	1.616.249.807.725	1.834.209.380.841	2.012.347.065.180	2.041.166.220.284
Pendapatan Hibah	309.331.750	731.418.615	6.231.557.955	1.638.105.985	10.407.571.931
Dana Alokasi Khusus	55.203.060.000	57.238.710.000	98.090.620.000	352.752.915.080	253.371.946.521
Dana Otonomi Khusus/dana darurat	215.823.145.000	273.624.235.000	350.325.837.000	108.686.344.000	187.907.233.000
Belanja Pegawai	857.463.349.997	930.884.271.707	984.870.265.996	1.013.231.889.532	905.928.746.932
selisih	240.252.939.649	353.771.172.403	394.691.099.890	536.037.810.583	683.550.721.900
ruang fiskal	17,55%	21,89%	21,52%	26,64%	33,49%

Sumber : BKD, 2018

d. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel III.14.

Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	1.369.051.826.396	1.616.249.807.725	1.834.209.380.841	2.012.347.065.180	2.041.166.220.284
Penerimaan Pembiayaan	176.017.192.339	261.877.610.097	262.855.105.135	323.682.435.402	224.047.922.895
Dana Tersedia	1.545.069.018.735	1.878.127.417.822	2.097.064.485.976	2.336.029.500.582	2.265.214.143.179
Belanja	1.287.163.763.904	1.609.306.822.016	1.775.944.203.663	2.086.307.677.600	2.066.494.748.105
Pengeluaran Pembiayaan	388.136.134	6.991.000.000	6.500.000.000	25.899.426.000	14.050.423.800
Jumlah Pengeluaran	1.287.551.900.038	1.616.297.822.016	1.782.444.203.663	2.112.207.103.600	2.080.545.171.905
Kemampuan Mendanai	1,20	1,16	1,18	1,11	1,09

Sumber : BKD, 2018

e. Belanja Modal

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan akan meningkatkan potensi penerimaan daerah. Belanja modal terutama terkait langsung dengan misi pembangunan infrastruktur menyeluruh, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Rasio belanja modal Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 masih di kisaran 0,12-0,18 tidak mengalami fluktuasi signifikan. Rincian rasio belanja modal Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.15.

Rasio Belanja Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Total Belanja	Belanja Modal	Rasio
2013	1.287.163.763.904	148.478.744.026	0,12
2014	1.609.306.822.016	223.287.900.900	0,14
2015	1.775.944.203.663	241.652.801.331	0,14
2016	2.086.307.677.600	382.070.380.920	0,18
2017	2.066.494.748.105	271.970.439.801	0,13

Sumber : BKD, 2018

f. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Persentase belanja pegawai (belanja tidak langsung) Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan dari 63,31% menjadi 43,98% (sebagaimana tabel III.16). Hal ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik, semakin efisien, sehingga diharapkan dapat dialokasikan ke belanja modal.

Tabel III.16.
Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Pegawai (Tidak Langsung)	Total Belanja	Persentase
2013	857.463.349.997	1.287.163.763.904	66,62%
2014	930.884.271.707	1.609.306.822.016	57,84%
2015	984.870.265.996	1.775.944.203.663	55,46%
2016	1.013.231.889.532	2.086.307.677.600	48,57%
2017	905.928.746.932	2.066.494.748.105	43,84%

Sumber : BKD, 2018

3.3.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas)

Dalam hal analisis Neraca Daerah, biasanya ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data Neraca Daerah sebagaimana yang dikehendaki dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas diukur dengan rumus Rasio Lancar dan *Rasio Quick*; dengan satuan perbandingan.
- 2) Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset dan Rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal/Ekuitas; dengan satuan persen.
- 3) Rasio Aktivitas, digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas diukur dengan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan; dengan satuan hari.

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang mencakup Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas; secara lengkap selama tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel III.17.

Tabel III.17.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rasio Likuiditas :						
1.1	Rasio Lancar (rasio)	105,99	63,62	52,71	33,35	23,61	(31,30)
1.2	Rasio Quick (rasio)	102,23	56,48	41,77	30,27	20,83	(32,82)
2	Solvabilitas:						
2.1	Rasio Total Hutang terhadap Total asset (%)	10,58	21,18	31,46	30,00	35,50	35,34
2.2	Rasio Hutang terhadap Modal (%)	0,11	0,17	0,32	0,30	0,36	35,43

Sumber : BKD, 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1) Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2013 adalah sebesar 105,99 : 1. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 105,99 kali dibanding dengan ketersediaan aktiva lancar yang dimilikinya. Namun Rasio ini semakin berkurang dengan sangat cepatnya dibanding kondisi tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2017 menjadi 23,61:1.

2) Rasio Quick

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio *Quick* pada tahun 2013 adalah sebesar 102,23:1, dan namun juga semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Karangnyar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya semakin beresiko, meskipun masih baik. Rasio *Quick* pada tahun 2017 turun jauh di atas besaran Rasio *Quick* yang terjadi pada tahun 2013.

Sedangkan Rasio Solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan

semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Besar Rasio Total Hutang terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 10,28%. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap Total Aktiva sangat besar. Besaran rasio ini paling kecil, dibanding kondisi tahun-tahun selanjutnya.

2) Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah di Kabupaten Karanganyar sebesar 0,11%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki di Kabupaten Karanganyar, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. Besaran rasio ini paling kecil, dibanding kondisi tahun-tahun selanjutnya.

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, sebagai berikut :

3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud di sini merupakan besaran atau rasio yang didapatkan dari besaran / total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (yang

merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran) yang dinyatakan dalam satuan persen.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung dari beberapa rincian yang ada dalam pos Belanja Tidak Langsung (BTL) dan pos Belanja Langsung (BL). Rincian pemenuhan yang masuk dalam pos Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas: (1) Belanja Gaji dan Tunjangan; (2) Belanja Tambahan Penghasilan; (3) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; (4) Belanja Pemungutan Pajak Daerah; dan (5) Belanja Penghasilan Lainnya
- b. Belanja Langsung, terdiri atas: (1) Belanja Honorarium PNS; (2) Belanja Uang Lembur; (3) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; (4) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS; (5) Belanja Premi Asuransi Kesehatan; (6) Belanja Makanan dan Minuman Pegawai; (7) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; (8) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; (9) Belanja Perjalanan Dinas; (10) Belanja Perjalanan Pindah Tugas; (11) Belanja Pemulangan Pegawai; dan (12) Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeler, Peralatan dan Perlengkapan dll).

Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (pegawai) selama tahun 2013–2017, dapat dilihat pada Tabel III.16. Tampak proporsi belanja aparatur (pegawai) dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan nominal seiring dengan kenaikan gaji setiap tahun, namun secara persentase dari total belanja mengalami penurunan. Penurunan proporsi ini diharapkan adanya pergeseran belanja dari belanja pegawai ke belanja modal dan atau belanja barang dan jasa, untuk peningkatan kualitas pelayanan aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Karanganyar semakin baik, atau semakin berpihak pada pemenuhan kebutuhan belanja pembangunan.

Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilihat pada Tabel III.18 berikut:

Tabel III.18.

Analisis Proporsi (%) Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2013	857.463.349.997	1.287.551.900.038	66,60%
2	2014	930.884.271.707	1.616.297.822.016	57,59%
3	2015	984.870.265.996	1.782.444.203.663	55,25%
4	2016	1.013.231.889.532	2.112.207.103.600	47,97%
5	2017	905.928.746.932	2.080.545.171.905	43,54%

Sumber : BKD , 2018

3.3.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp 0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD.

Gambaran kondisi defisit riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar (APBD) Tahun 2013–2017, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.19. Sementara untuk menutup defisit anggaran di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 digunakan 2 (dua) pos besar, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, dan (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel III.19.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (a)	Belanja Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Defisit riil (b)	Persentase (%) = $b/a \times 100\%$
2013	1.369.051.826.396	1.287.163.763.904	629.000.000	81.259.062.492	5,94%
2014	1.616.249.807.725	1.609.306.822.016	6.991.000.000	-48.014.291	0,00%
2015	1.834.209.380.841	1.775.944.203.663	6.500.000.000	51.765.177.178	2,82%
2016	2.012.347.065.180	2.086.307.677.600	25.889.426.000	-99.850.038.420	-4,96%
2017	2.041.166.220.284	2.066.494.748.105	14.050.423.800	-39.378.951.621	-1,93%

Sumber : BKD , 2018

Tabel III.20.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA						
1	2	3	4	3	4	3	4	5	6	7	8
	Jumlah SiLPA	175.166.745.762	100,00	257.517.118.697	100,00	261.829.595.806	100,00	314.620.282.813	100,00	223.810.397.895	100,00
1	Pelampauan penerimaan PAD	16.316.924.419	9,32	34.041.258.349	13,22	45.813.034.199	17,50	36.786.861.250	11,69	50.835.443.956	22,71
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	29.319.716.710	16,74	22.135.840.585	8,60	15.378.255.444	5,87	(3.439.404.384)	-1,09	(67.177.569.633)	-30,02
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	28.539.540.881	16,29	20.907.337.462	8,12	47.587.102.082	18,17	53.267.742.475	16,93	12.469.152.857	5,57
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	100.231.650.950	57,22	179.341.371.096	69,64	149.431.711.984	57,07	227.429.573.337	72,29	226.999.216.400	101,42
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	Kegiatan lanjutan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	0,00	-	0,00	3.619.492.097	1,38	575.510.135	0,18	684.154.315	0,31
8	Penerimaan Pembiayaan	(1.143.350)	0,00	850.447.339	0,33	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	Pengeluaran Pembiayaan	760.056.152	0,43	240.863.866	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Sumber : BKD , 2018

3.4. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

3.4.1. Proyeksi Pendapatan

Berdasar atas capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017, maka pendapatan sampai dengan tahun 2023 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Intensifikasi PAD, melalui:

- 1) Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
- 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- 4) Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- 7) Optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan koordinasi penghasil pendapatan OPD, BUMD, serta pihak swasta / masyarakat.
- 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:

- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan *tax bassed*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Gambaran proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2018 – 2023 secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.21. Terlihat bahwa proyeksi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun dari 2018–2023 akan mengalami peningkatan secara berarti, dengan rata-rata sebesar 5,52%, dimana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik sebesar 10,51% per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.21.

Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata	PROYEKSI TAHUN (Rp.000)					
		Pertumbuhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	5,52%	2.096.931.636	2.161.499.093	2.289.272.697	2.427.409.515	2.586.234.192	2.772.007.366
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,51%	327.100.643	342.844.624	391.590.092	441.556.988	498.583.214	562.202.431
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,80%	151.029.000	153.353.600	172.921.519	194.986.305	219.866.558	247.921.530
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,08%	19.585.541	14.984.582	17.384.709	19.602.998	22.787.894	25.695.629
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,07%	14.133.626	15.719.750	16.597.990	18.715.894	21.104.042	23.796.918
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,65%	142.352.476	158.786.692	184.685.874	208.251.791	234.824.720	264.788.354
1.2	DANA PERIMBANGAN	4,66%	1.355.473.462	1.415.347.379	1.485.556.354	1.559.834.171	1.637.825.879	1.719.717.173
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,97%	44.530.493	38.857.259	40.241.730	42.253.817	44.366.507	46.584.832
1.2.2	Dana Alokasi Umum	4,76%	978.664.650	1.027.597.885	1.078.977.777	1.132.926.665	1.189.572.999	1.249.051.649
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4,76%	332.278.319	348.892.235	366.336.847	384.653.689	403.886.373	424.080.692
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,47%	414.357.531	403.307.090	412.126.251	426.018.356	449.825.099	490.087.762
1.3.1	Pendapatan Hibah	4,97%	76.734.900	81.543.630	85.620.811	89.901.852	94.396.945	99.116.792
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,04%	130.533.194	130.533.194	132.275.165	137.802.681	151.582.949	166.741.244
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,69%	207.089.437	191.230.266	194.230.275	198.313.823	203.845.205	224.229.726
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0%	10.947.190	-	-	-	-	-

Sumber : BKD , 2018

3.4.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019–2023 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2019-2023;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkit melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja / pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja langsung daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2017, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional.

Proyeksi kebutuhan Belanja Daerah dari tahun 2019–2023, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.22. Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah yang pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,279 triliun; pada tahun 2023 telah mencapai sekitar Rp 2,985 triliun. Pos Belanja Tidak Langsung (BTL) masih mendominasi dalam pos Belanja Daerah secara keseluruhan, di mana besarnya mencapai sekitar Rp 1,736 triliun (atau sekitar 58,18%) pada akhir tahun 2023. Dalam kondisi yang demikian, maka besaran Belanja Langsung (BL) ke program dan kegiatan masih sekitar 41,82%.

Tabel III.22.

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata	TAHUN (Rp.000)					
		Pertumbuhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
2	BELANJA	5,24	2.279.841.882	2.421.244.794	2.430.350.935	2.577.551.736	2.742.128.160	2.968.683.805
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,9	1.428.577.435	1.460.803.008	1.500.921.109	1.554.482.920	1.629.464.485	1.735.728.837
2.1.1	Belanja Pegawai	2,8	991.088.189	1.022.579.441	1.033.905.235	1.054.583.340	1.086.220.840	1.140.531.882
2.1.2	Belanja Bunga	0	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	0,29	95.504.356	67.134.000	78.448.020	82.370.421	88.591.442	96.722.843
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24,51	4.825.000	15.295.000	16.059.750	23.170.237	28.178.750	33.237.687
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16,44	17.419.192	20.947.211	26.237.275	31.819.551	38.731.326	44.014.643
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	5,51	317.240.698	332.347.356	343.770.829	360.039.371	385.242.127	418.721.782
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	7,26	851.264.447	960.441.786	929.429.826	1.023.068.816	1.112.663.675	1.232.954.968
2.2.1	Belanja Pegawai	-34,82	32.171.292	8.462.743	8.685.242	10.530.864	12.313.157	13.535.075
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,97	515.283.535	547.157.138	526.362.196	540.957.645	543.357.034	597.200.194
2.2. 3	Belanja Modal	13	303.809.620	404.821.905	394.382.388	471.580.307	556.993.484	622.219.699

Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar, 2018, diolah

3.4.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah.

Dari sisi pengeluaran berupa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban serta membentuk dana cadangan. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel III.23.

Tabel III.23.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	TAHUN (Rp.000)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		186.963.056	269.745.701	185.078.238	194.142.221	199.893.968	206.676.439
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7,05%	186.725.531	179.745.701	185.078.238	194.142.221	199.893.968	206.676.439
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	90.000.000				
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		237.525					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00%	15.000.000	10.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	10.000.000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00%	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	0,00%		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah	0,00%		-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	-4,97%	171.963.056	259.745.701	141.078.238	150.142.221	155.893.968	196.676.439

Sumber : BKD , 2018

3.4.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran, kemudian dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat) dan Pengeluaran Pembiayaan.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2019–2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.24. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 telah mengalami kenaikan dari sekitar Rp 1.398.665.353.000,- pada tahun 2019 menjadi sekitar Rp 1.828.151.923.000,- pada akhir tahun 2023, sedangkan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.25.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (1) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (2) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (3) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Oleh karena terdapat keterbatasan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan; masih diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu dari sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Donor, *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta partisipasi masyarakat lainnya termasuk di dalamnya adalah kemungkinan penerbitan Obligasi Daerah atau surat utang kepada masyarakat.

Tabel III.24.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023 (dalam Ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun (Rp. 000,-)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	2.161.499.093	2.289.272.697	2.427.409.515	2.586.234.192	2.772.007.366
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	179.745.701	185.078.238	194.142.221	199.893.968	206.676.439
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000	0	0	0	0
	Total Penerimaan (Kemampuan Pendanaan)	2.431.244.794	2.474.350.935	2.621.551.736	2.786.128.160	2.978.683.805
	Dikurangi :	1.032.579.441	1.077.905.235	1.098.583.340	1.130.220.840	1.150.531.882
1	Gaji Pegawai	1.022.579.441	1.033.905.235	1.054.583.340	1.086.220.840	1.140.531.882
2	Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Pinjaman	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0
3	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.398.665.353	1.396.445.700	1.522.968.396	1.655.907.320	1.828.151.923

Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah

Tabel III.25.

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023

No.	Uraian	Tahun (Rp. 000,-)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.398.665.353	1.396.445.700	1.522.968.396	1.655.907.320	1.828.151.923
I	<i>PRIORITAS PERTAMA (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar)</i>	807.823.409	841.888.299	883.901.990	937.143.945	996.914.190
II	<i>PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)</i>	349.280.000	398.800.000	334.300.000	333.800.000	274.300.000
III	<i>PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)</i>	241.561.944	155.757.401	304.766.406	384.963.375	556.937.733
	Jumlah	1.398.665.353	1.396.445.700	1.522.968.396	1.655.907.320	1.828.151.923
	Surplus / Defisit	0	0	0	0	0

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, 2018 diolah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penyajian analisis isu strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 mengikuti alur yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.¹ Penentuan isu strategis adalah mengkaji permasalahan daerah dan tantangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Perumusan masalah pembangunan dikaji dari: Evaluasi kinerja RPJMD 2013-2018 sebagaimana diuraikan dalam Bab II, dikaitkan dengan sasaran pembangunan di RPJPD Kabupaten Karanganyar. Hasil identifikasi dikerangkakan dalam perspektif urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar lima tahun kedepan. Perumusan masalah menjadi bahan perumusan isu strategis, setelah dipersandingkan dengan: (1) penetapan Fungsi Wilayah Kabupaten Karanganyar dalam kerangka RTRW; (2) analisis lingkungan strategis nasional; dan (iii) tantangan/ancaan dari lingkungan internasional.

4.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal, baik nasional maupun internasional (global) yang berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinamika lingkungan strategis membawa implikasi baik positif maupun negatif yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

4.1.1. Tantangan *Sustainable Development Goals* dan Perubahan Iklim

Tantangan Global yang mutlak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki 17 tujuan (dengan 169 target/sasaran) untuk dicapai dalam 15 tahun mendatang (2030). Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola.

¹ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs memberikan tantangan untuk merespon kemajuan peradaban yang memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek *inequality* inilah yang sasaran SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan

pemihakan terhadap lingkungan. Dalam SDGs termuat hampir semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah relevan untuk menjawab isu-isu SDGs.

4.1.2. Tantangan Kemajuan Teknologi dan Revolusi 4.0

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Tantangan revolusi industri generasi 4.0 adalah menuntut kepekaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk adaptif.

Perubahan lingkungan secara teknologi maupun dari sisi ekonomis, berdampak pada kinerja keuangan dan kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dunia usaha berpotensi mengurangi beberapa aktivitas bisnis sehingga berdampak pada pengangguran.

Revolusi teknologi akan dapat memperbaiki kualitas hidup. Pada saat yang sama, revolusi ini juga distraktif termasuk terhadap pekerja. Contoh digital teknologi memberikan peluang bagi bisnis, masyarakat, dan bagi pemerintah, tapi juga ada ancaman kalau tidak bisa mengontrolnya, terutama yang terkait masalah kecakapan pekerja, karena potensial memperdalam kesenjangan dan penyalahgunaan informasi.

Era revolusi industri generasi 4.0 yang serba cepat menuntut pemerintah harus siap dengan perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Diperlukan komitmen pemerintah untuk cepat menyesuaikan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja, baik di sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang tidak relevan dengan sistem yang sekarang. Pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas peluang. Pemerintah daerah juga perlu melakukan rekonfigurasi untuk kebijakan yang relevan dengan kondisi sekarang.

Kemanfaatan kemajuan teknologi sudah dapat dinikmati masyarakat melalui inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun teknologi juga mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi.

Tantangan ini menjadi isu dari reformasi birokrasi untuk menyelenggarakan transparansi dan keterbukaan informasi, Peraturan peraturan daerah yang responsif, tata laksana organisasi yang *smart*, dan pengawasan yang lebih mendorong tumbuhnya integritas birokrasi dan

masyarakat.

4.1.3. Tantangan Globalisasi (Keterbukaan wilayah global)

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek aspek kebudayaan lainnya. Dampak globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar Negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar Negara (*cross-border capital flows*), pergerakan tenaga kerja (*human movement*), dan penyebaran teknologi informasi yang cepat merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja, dan kegiatan bisnis.

Tantangan globalisasi ekonomi, perlunya mendidik generasi muda dengan pelajaran wirausaha dan inovasi ke dalam kurikulum sekolah. Dampak positif di bidang ekonomi, yaitu: (1) Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor membuka peluang meningkatkan devisa negara, (2) kesempatan kerja lebih terbuka, (3) mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri, (4) mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia, (5) kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Namun demikian, globalisasi juga berisiko menimbulkan dampak negatif : (i) Masuknya tenaga kerja asing berpotensi meminggirkan tenaga kerja Indonesia yang tidak kompetitif, sehingga akan menambah pengangguran, (ii) hilangnya pasar produk Indonesia, jika kualitas produknya kalah bersaing dengan produk luar negeri, (iii) usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia jika masyarakat Indonesia tidak berkomitmen mencintai dan membeli produk dalam negeri. Dampak dari globalisasi berpengaruh pada migrasi penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan/ perkotaan sehingga berimplikasi pada permasalahan tata ruang, lingkungan, dan sosial. Implikasinya bagi daerah adalah kompetisi meningkatkan kualitas produk supaya tidak kalah bersaing tetapi semakin luas pemasarannya. Selain itu, tantangan lebih berat untuk penguatan jiwa nasionalisme mencintai produk dalam negeri di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Jika nasionalisme mencintai produk dalam negeri kuat, maka pasar dalam negeri akan dikuasai oleh produk lokal.

Tantangan Globalisasi pada aspek sosial budaya, dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya suatu bangsa dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus peluang bagi bangsa untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Perubahan-perubahan yang diprediksikan menguat di bidang sosial budaya antara lain: (1) Meningkatnya individualisme, pragmatisme, budaya instant, karena koneksitas individu bisa dilakukan tanpa tatap muka; (2) Pola Kerja yang mengarah ke era

perekonomian berbasis pengetahuan. Orang-orang sudah tidak mengandalkan kerja penuh waktu di kantor, tetapi dapat dilakukan dengan kerja paruh waktu yang dapat dilakukan di rumah; (3) dominasi Kebudayaan Populer : citra, gagasan, dan gaya hidup baru konsumerisme dan hedonisme; (4) Ancaman erosi budaya dan ancaman krisis identitas kultural nasional dan lokal.

Tantangan globalisasi pada aspek pemerintahan, menuntut pemerintahan bersikap terbuka, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Globalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mengkondisikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan.

Tantangan pada pemerintahan di era global adalah Big Data. Pada era digital ini, data telah menjadi bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia. Data adalah emas. Seperti halnya emas, data mesti digali, diproses dan dianalisa dengan serentetan teknologi tertentu demi mendapatkan nilai yang berharga dari lautan data pada era digital sekarang ini. Lautan data tersebut kemudian dikenal dengan istilah Big Data. Big data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur. Manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam pencapaian misi. Tantangan bagi pemerintah daerah meliputi pemerolehan data, akurasi data, penyimpanan, penelusuran, pembagian, pemindahan, analisis, dan visualisasi data. Beberapa tantangan dalam hal pengelolaan *big data* yaitu:

1. Menjaga akses dari data berkualitas yang terkait sektor pembangunan,
2. Menjaga Pemahaman stakeholder tentang makna data;
3. Sinergitas dan koordinasi pemanfaatannya bagi para pengambil kebijakan,
4. Pendayagunaan kemanfaatan data dalam kebijakan daerah.

4.1.4. Tantangan Nasional Bonus Demografi

Pada era bonus demografi (2020-2030) persaingan lapangan kerja akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan produktifitas tenaga kerja sangat perlu dipersiapkan agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dalam lapangan pekerjaan. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, khususnya tenaga kerja yang masuk dalam kategori generasi millennial.

4.1.5. Mandat Isu Strategis dari RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lingkungan Strategis Nasional

Mandat prioritas nasional provinsi dan rencana jangka panjang

kabupaten mutlak dipertimbangkan pengaruhnya pada tantangan dan peluang strategis pemangunan daerah.

Tabel IV.1
Mandat Isu Pembangunan RPJPN, RPJMN,
RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Karanganyar

RPJPN 2005-2025	RPJMN 2015-2019	RPJMD Prov. Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Karanganyar 2020-2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sumber daya manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; 2. Daya saing untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Tata kelola pemerintahan, Aparatur, birokrasi, demokrasi, hukum dan keadilan, masyarakat sipil; 4. Keamanan, perdamaian, bebas ancaman; 5. Pemerataan dan keadilan pembangunan; 6. Lingkungan yang asri dan lestari; 7. Kemandirian, kemajuan dan ketahanan negara sebagai negara kepulauan; 8. Peran Indonesia di kancah internasional.	1. Stabilitas politik dan keamanan; 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien; 3. Pemberantasan korupsi; 4. Pertumbuhan ekonomi; 5. Percepatan pemerataan dan keadilan; 6. Keberlanjutan pembangunan; 7. Peningkatan kualitas SDM; 8. Kesenjangan antar wilayah; 9. Percepatan pembangunan kelautan.	1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia; 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha; 4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam; 5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah;	1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat; 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berkembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi; 3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab serta Profesional Aparatur, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; 5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat dan Budaya yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender; 6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif.

Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah

Kesimpulan dari lingkungan strategis yang ada Kabupaten Karanganyar perlu memberikan perhatian pada tantangan:

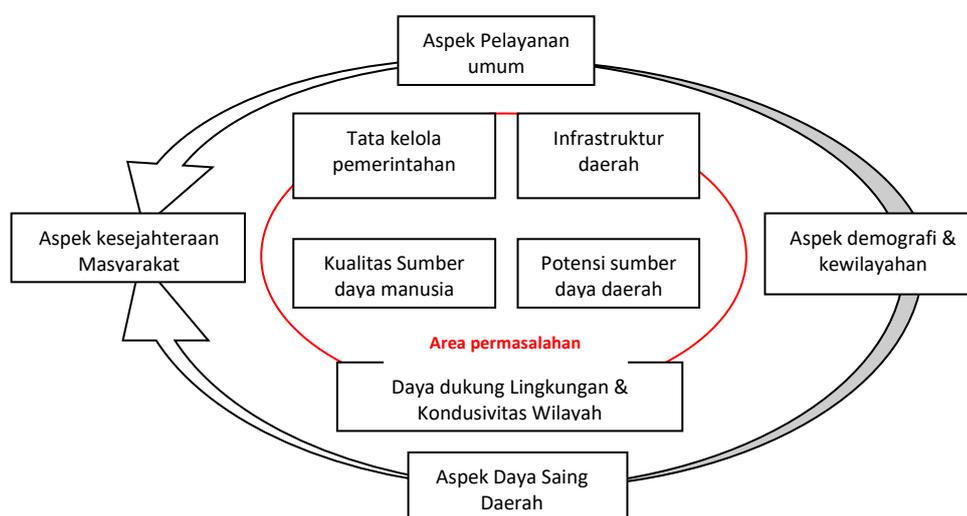
1. Tata kelola pemerintahan, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, pemanfaatan data dan informasi pembangunan, reformasi birokrasi;
2. Kualitas sumber daya manusia terkait bonus demografi;
3. Kesejahteraan yang adil dan merata materiil dan immateriil;
4. Sarana prasarana wilayah yang berkualitas, adil, tangguh;
5. Pengelolaan sumber daya ekonomi, budaya, dan sosial di daerah yang adil dan berkelanjutan;
6. Lingkungan hidup yang lestari;
7. Kewaspadaan bencana antisipasi perubahan iklim;

8. Pemanfaatan teknologi informasi di era pembangunan kota cerdas.

4.2. Permasalahan Pembangunan

Gambaran umum Kabupaten Karanganyar yang disajikan dalam Bab II dan hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Kategori perumusan masalah dan penyajian masalah mengikuti konsiderans Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Lebih lanjut dalam pasal 258 dan 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan aspek informasi pembangunan dilihat dari (i) aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) aspek pelayanan umum; (iii) aspek daya saing daerah. Selain itu juga dikaitkan dengan tema utama misi Bupati terpilih 2018-2023. Ketiga aspek ini saling terkait. Aspek kesejahteraan akan baik jika pelayanan publik terpenuhi secara baik. Pelayanan publik yang baik akan menjadi daya dukung untuk meningkatkan daya saing daerah, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daerah menyediakan layanan publik yang lebih baik lagi. Daya saing daerah juga memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumberdaya manusia berkualitas tinggi dapat muncul jika kondisi kesejahteraan masyarakat baik.

Jika digambarkan permasalahan pembangunan sebagaimana gambar IV.1 berikut.



Gambar IV.1

Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023

Merujuk pada pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketiga aspek pembangunan tersebut dipengaruhi oleh komponen: (1) tata kelola pemerintahan yang baik, (2) infrastruktur daerah yang baik; (3) Sumber daya manusia yang unggul, (4) kemampuan pengelolaan sumber daya daerah yang produktif, (5) daya dukung lingkungan dan kondusivitas wilayah. Lima komponen tersebut dirinci kedalam kelompok urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya rata-rata lama sekolah, tahun 2017 sebesar 8,5 tahun;
2. Capaian APK PAUD pada tahun 2017 masih sebesar 97,75 % belum sesuai target SPM yang ditetapkan yaitu sebesar 100%;
3. Masih rendahnya lembaga PAUD yang terakreditasi, sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 63,12%;
4. Belum optimalnya capaian APM SD/MI, sampai dengan tahun 2017 baru mencapai angka 98,61%;
5. Masih rendahnya APM SMP/ MTs, dimana pada tahun 2017 baru tercatat sebesar 85,27%;
6. Belum optimalnya APS SMP (tahun 2017 sebesar 93,37%);
7. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pada tahun 2017 ruang kelas SD/ MI sesuai standart nasional pendidikan baru 76,66% sedangkan ruang kelas SMP/ MTs baru 85,11%;
8. Belum semua SD/MI dan SMP/ MTs memiliki perpustakaan sesuai standart, SD/MI yang memiliki perpustakaan standart baru 85,3% sedangkan SMP/ MI baru sebesar 87,47%;
9. Masih ditemukannya anak putus sekolah, angka putus sekolah SD/ MI sebesar 0,02 sedangkan untuk SMP/ MTs sebesar 0,08 %;
10. Belum terpenuhinya pendidik berkualifikasi S1/D4, untuk pendidik PAUD (tahun 2017 sebesar 73,38%); pendidik SD/MI/SDLB (tahun 2017 sebesar 93,26%); dan pendidik SMP/MTs/SMPLB (tahun 2017 sebesar 94,21%).

b. Kesehatan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2017 angka kematian ibu sebesar 42,01 per 100.000 kelahiran hidup; Angka kematian bayi (sebesar 8,51 per 1.000 kelahiran hidup) dan angka kematian anak balita (sebesar 1,00 per 1.000 kelahiran hidup);

2. Masih tingginya prevalensi gizi buruk (tahun 2017 sebesar 0,03%), dan balita stunting (tahun 2017 sebesar 22,6%), karena gizi buruk ini bisa berlanjut sampai lansia yang kekurangan gizi.
3. Masih tingginya penyakit menular, angka penemuan kasus TB Paru (tahun 2017 sebanyak 74,50%); angka penemuan kasus HIV/ AIDS (tahun 2017 sebanyak 137 per 100.000 jiwa); Insiden rate DBD (tahun 2017 sebesar 8,3 per 100.000 penduduk); Angka penemuan kasus malaria (tahun 2017 sebanyak 1 per 1.000 penduduk).
4. Masih kurangnya tenaga pelayanan kesehatan yang sesuai standart, data pada tahun 2017 menunjukkan rasio dokter sebesar 24 per 100.000 penduduk (standartnya 30 per 100.000 penduduk); rasio dokter gigi sebanyak 4 per 100.000 penduduk (standartnya 11 per 100.000 penduduk); Rasio Dokter spesialis sebanyak 4 per 100.000 penduduk (standartnya 6 per 100.000); rasio tenaga keperawatan sebanyak 67 per 100.000 (standartnya 158 per 100.000 penduduk); ratio bidan sebanyak 68 per 100.000 penduduk (standarnya 75 per 100.000 penduduk).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan (tahun 2017 panjang jalan kondisi baik sebesar 65,76 % atau sepanjang 576,36 km dan jembatan kondisi baik sebesar 79,13 % atau sebanyak 163 unit);
2. Belum optimalnya jaringan irigasi sekunder kabupaten (pada tahun 2017 jaringan irigasi kondisi baik sebesar 51,9% atau sebesar 9.699 km);
3. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih, tahun 2017 capaian layanan air bersih sebesar 86,98% atau sebesar 267.479 Kepala Keluarga;
4. Belum optimalnya drainase saluran pembuang (capaian SPM drainase tahun 2017 sebesar 81,33%);
5. Belum optimalnya pemenuhan terhadap kebutuhan sanitasi masyarakat (tahun 2017 cakupan sanitasi dasar sebesar 91,28 % dan sanitasi layak 71,5%).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 masih sebesar 59,7 Ha;
2. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2017 masih 13.891 unit;

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan kriminalitas, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya kasus kriminalitas (tahun 2017, sebanyak 183 kasus kriminalitas yang ditangani);
2. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (jumlah petugas Limas sebanyak 6.204 tahun 2017);
3. Masih ditemukannya kasus pelanggaran peraturan daerah (tingkat pelanggaran Perda sebanyak 230 pada tahun 2017);
4. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan data bencana.

f. Urusan Sosial

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberian jaminan sosial kepada PMKS; Hal ini dapat dilihat dari persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial sebesar 4,98 % tahun 2017.

4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran, hal ini dapat dilihat jumlah pengangguran terbuka (TPT) (pada tahun 2017 dengan TPT sebesar ... %)
2. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus konflik industrial setiap tahun. Jumlah Kasus Konflik Industrial tahun 2016 sebesar 36 kasus.
3. Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan (cakupan tahun 2016 sebesar 97,08%);
4. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja, tahun 2017 TPAK sebesar 70,24 %.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya kesenjangan pembangunan responsif gender (diketahui dari nilai IPG tahun 2017 sebesar 69,68 lebih rendah dari nilai relatif IPG Provinsi Jawa Tengah);

2. Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan perempuan (rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2017 sebesar 24);
3. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, pada tahun 2017 sebesar 15,38%.

c. Pangan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan energi rata-rata pada tahun 2017 sebesar 2.045 kkal/kap/hari masih dibawah standar 2.200 kkal/kap/hari);
2. Belum optimalnya pembentukan desa mandiri pangan, pada tahun 2017 baru 4 desa yang terbentuk.

d. Pertanahan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Belum semua bidang tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersertifikat (capaian tanah yang belum bersertifikat tahun 2017 sebesar 49,19% atau sebesar 706 bidang).

e. Lingkungan Hidup

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya capaian IKLH, pada tahun 2017 sebesar 61,70;
2. Belum optimalnya penanganan persampahan, tahun 2017 sampah tertangani sebesar 66,67%;
3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tahun 2017 baru ada 64 TPS yang tersebar di 8 kecamatan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan baik (cakupan akte kelahiran tahun 2017 sebesar 89,2%; persentase kepemilikan KTP sebesar 97,25%; persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun sebesar 7,5%; persentase penerbitan akte kematian sebesar 29,6%).

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat, tahun 2017 lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi baik sebesar 45 %;
2. Masih rendahnya keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam membangun desa, tahun 2017 sebesar 20%;
3. Baru terdapat 58 desa dalam kategori desa yang cepat berkembang, dari 162 desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (tahun 2017 sebesar 7,76 %), persentase peserta KB baru sebesar 14.697 orang; penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 35,29 % pada tahun 2017;
2. Masih ditemukannya drop out KB, meskipun setiap tahun jumlahnya selalu menurun, pada tahun 2017 sebesar 13,76 %;
3. Cakupan KB pria belum terdapat data.

i. Perhubungan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit);
2. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;
3. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2017 rambu-rambu lalu lintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit;
4. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2017 angka pelanggaran/kecelakaan lalu lintas sebesar 1.181 kasus);
5. Banyaknya perlintasan sebidang dengan jalan dengan rel kereta api yang tidak berpaling pintu, sebanyak 24 lokasi.

j. Komunikasi dan Informatika

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah

Daerah, sampai dengan tahun 2017 masih pada peringkat ... dari 35 kab/kota;

2. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal, karena belum semua website PD updated (capaian tahun 2017 sebesar 23%).

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan perkoperasian, hal ini ditandai dengan koperasi aktif pada tahun 2017 sebesar 72,15%;
2. Masih banyak UMKM yang belum memiliki izin, sebagaimana diatur menurut Perda Nomor 7 tahun 2016.
3. Belum optimalnya peningkatan *One Village One Product (OVOP)*.

l. Penanaman Modal

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai investasi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, hal ini disebabkan penanaman modal banyak terdapat di sektor industri pengolahan dan industri besar yang padat teknologi, hal ini diketahui dari jumlah perusahaan yang masuk pada Tahun 2017 sebanyak 51 perusahaan/ investor, tapi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karanganyar masih tinggi yaitu ...
2. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan SDM;
3. Belum optimalnya koordinasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, terutama data realisasi investasi, promosi penanaman modal.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dengan jumlah organisasi sebanyak 18 organisasi;
2. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan, terlihat dari sedikitnya jumlah pemuda pelopor tahun 2017 sebanyak 25 orang.

n. Statistik

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.

2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem data dan statistik.

o. Persandian

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
3. Masih kurangnya kecukupan sarana prasarana dan sumberdaya manusia pengaman sistem persandian sehingga data-data rahasia pemerintah terjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*).
4. Baru terdapat 1 Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi.

p. Kebudayaan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah benda purbakala/ situs atau benda cagar budaya.
2. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival;
3. Perlindungan cagar budaya masih perlu ditingkatkan cakupannya.

q. Perpustakaan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya minat baca masyarakat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 sebanyak 38.248 orang per tahun.
2. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan hal ini dapat dilihat dari kepemilikan jumlah buku sebanyak 35.248 buku;
3. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah;
4. Perpustakaan digital belum dikembangkan secara optimal.

r. Kearsipan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya system duplikasi arsip ke dalam bentuk arsip elektronik;
2. Masih rendahnya kesadaran PD untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku;
3. Sedikitnya jumlah arsiparis/pengelola arsip;

4. Depo tempat penyimpanan arsip saat ini sudah penuh dan tidak memenuhi standar;
5. Belum ada peraturan bupati tentang kearsipan yang mengacu pada undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2014, sebagai pedoman pengelolaan arsip bagi Perangkat Daerah.

4.2.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Karanganyar sebesar 532,66 ton, dan perikanan budidaya sebesar 1.616,85 ton.
2. Rendahnya tingkat konsumsi ikan, tahun 2017 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 16,23 Kg, per kapita / tahun;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.

b. Pariwisata

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemasaran pariwisata, ditunjukkan pada tahun 2017 jumlah wisatawan berkunjung baru sebesar 746.543 orang untuk wisatawan nusantara dan 8.742 orang untuk wisatawan mancanegara.
2. PAD dari sektor pariwisata relatif kecil dibandingkan dengan potensi obyek wisata yang ada yaitu sebesar Rp. 1.527,93 juta

c. Pertanian

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai produksi padi yang menurun dari 337.925 ton menjadi 334.394 ton dan produksi jagung dari 36.567 ton menjadi 27.113 ton pada tahun 2017;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, hal ini dapat dilihat persentase Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 76 %;
3. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran petani;

4. Masih rendahnya kualitas SDM dan ketrampilan petani;
5. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan petani (tahun 2017 jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani terbina, mencapai 1.067 kelompok tani);
6. Masih rendahnya daya saing dan inovasi produk pertanian dan perkebunan.
7. Semakin berkurangnya tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda bekerja pada lapangan usaha pertanian/perkebunan dan peternakan.
8. Belum optimalnya lahan pertanian berkelanjutan, karena masih tingginya alih fungsi lahan sawah lestari.

d. Perdagangan

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya pasar milik pemerintah daerah yang saat ini sejumlah 18 unit membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar;
2. Belum optimalnya capaian pasar sehat, pada tahun 2017 baru 7 pasar sehat yang terbentuk dari total jumlah pasar sebanyak 18 unit.
3. Kontribusi PAD dari sektor perdagangan dalam PDRB masih rendah.

e. Perindustrian

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi memenuhi standar masih perlu ditingkatkan;
2. Keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya perlu ditingkatkan sinergitasnya.

f. Transmigrasi

Indikator yang menggambarkan permasalahan pada urusan transmigrasi adalah jumlah alokasi transmigran semakin menurun, pada tahun 2016 sebanyak 15 KK menurun menjadi hanya 3 KK ditahun 2017

4.2.4. Urusan Penunjang

Permasalahan ditemukan dari urusan penunjang: (1) administrasi pemerintahan, (2) perencanaan, (3) keuangan, (4) pengawasan, (5) kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan (diklat), (6) penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

a. Administrasi Pemerintahan:

1. Ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
2. Peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO 2013: 9001;
3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perlu ditingkatkan.

b. Perencanaan

1. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2017 belum terintegrasi *e-planning, e-budgeting, dan e-monitoring evaluasi*.
2. Sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja masih kurang;
3. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana dan peneliti sesuai kebutuhan Baperlitbang;
4. Belum semua perangkat daerah (PD) terfasilitasi dalam pengembangan inovasi daerah.

c. Keuangan

1. Pengelolaan aset yang belum semua aset terdokumentasi /tercatat secara pasti, serta kepastian hukum status kepemilikannya;
2. Pengalihan aset dari desa/kelurahan ke pemerintah kabupaten, seringkali menjadi kendala tersendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya;
3. Masih kurangnya kualitas pelaporan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel.

d. Pengawasan

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah (nilai SAKIP masih B/belum maksimal);
2. Masih ditemukannya temuan kasus hasil pemeriksaan;
3. Belum optimalnya fungsi dan kinerja pengawasan di bidang pemerintahan, kepegawaian, pembangunan, dan kemasyarakatan.;
4. Belum optimalnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017 nilai maturitas SPIP baru mencapai level rendah.

e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

1. Rekrutmen SDM belum sesuai dengan kebutuhan;
2. Belum semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan atau fungsional;
3. Penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
4. Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan ASN;

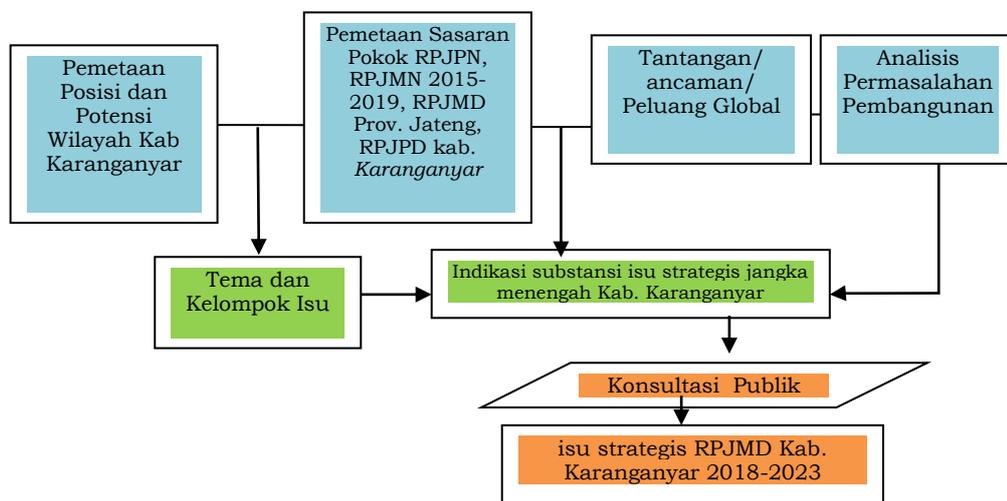
5. Masih kurangnya ASN untuk bidang pendidikan (guru dan tenaga kependidikan SD negeri dan tenaga ASN di bidang persandian serta kesehatan).

f. Penelitian dan Pengembangan

1. inovasi daerah masih kurang optimal.

4.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis dirumuskan berasal dari permasalahan pembangunan yang ada pada bab 2 dan hasil identifikasi permasalahan yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan. Selain itu juga memperhatikan isu atau amanat dari nasional, regional maupun internasional.



Gambar IV.2
Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kabupaten Karanganyar selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah sebagai berikut.

4.3.1. Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai

Infrastruktur yang kurang berkualitas dan memadai merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan dalam lingkungan wilayah yang sehat, aman, dan tangguh bencana. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing global dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan amanat dalam *Sustainable Development Goals*, yaitu memperhatikan kepentingan kelompok berkebutuhan khusus dan rentan. Infrastruktur di area publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan.

1. Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Isu infrastruktur meliputi kecukupan, pemerataan akses; dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Karanganyar. Kelompok infrastruktur yang perlu diprioritaskan, sesuai hasil analisis permasalahan kondisi eksisting dengan mempertimbangkan sebaran urusan OPD, maka pengelompokkan isu infrastruktur adalah Pembangunan infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah, yaitu Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi yang inklusif, ramah lingkun; Infrastruktur teknologi informasi menuju *Smart City* sebagai respon atas tantangan perkembangan revolusi industri 4.0.

Kondisi pada tahun 2017 jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 65,76 %; jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 79,13%. Transportasi inklusif merupakan transportasi yang ramah, melindungi dan menjangkau semua penyandang disabilitas agar dapat menikmati dan mengakses layanan transportasi umum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang ramah disabilitas seperti penyediaan halte bus dan bus umum seperti 1) penambahan *signage* dan pencahayaan pada halte bus; 2) penyediaan akses dari dan menuju bus dengan pemberian akses penyeberangan dan ramp halte; 3) penataan/konfigurasi bus dengan seating layout untuk kursi roda dan ramp di bus.

2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Sehat

Terkait dengan isu pembangunan infrastruktur menyeluruh, diprioritaskan pada isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.

Peran teknologi pengelolaan lingkungan dalam berbagai kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Upaya pendekatan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus secara maksimal diupayakan. Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi-inovasi secara terus-menerus dalam upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

Berdasar analisis diatas, isu strategis terkait Pembangunan Lingkungan Hidup yang Sehat dan Berkelanjutan ialah:

- a. Belum optimalnya pemeliharaan lingkungan (air, tanah, pencemaran udara rendah cemaran/polusi), hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2017 sebesar 61,98 dengan indeks kualitas air sebesar 53,15; indeks kualitas udara 80,11 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 55,00;
- b. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Karanganyar yang masih cukup tinggi, pada tahun 2017 sebesar 83,72%;
- c. Implementasi pembangunan harus peduli pada upaya mencegah kerusakan lingkungan.

3. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana

Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan *premapping* dan revisitator ruang.

Pengembangan sistem layanan bencana yang reponsif, cepat, dan tepat menjadi isu penting. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana penanganan bencana. Hal strategis lainnya adalah jaringan kerja sama di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani resiko bencana. Pengembangan masyarakat kelurahan tangguh bencana.

Berdasar analisis di atas, isu strategis terkait ketahanan bencana ialah:

- a. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah rawan bencana meliputi rawan bencana longsor, bencana banjir dan puting beliung;
- b. Masih tingginya jumlah korban bencana, pada tahun 2017 sebanyak 511 orang;
- c. Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tangguh, pada tahun 2017 baru mencapai 1,69%;
- d. Pengendalian pemanfaatan lahan supaya tidak mengganggu daya tahan masyarakat (bahan pangan, kerentanan penyakit menular);
- e. Pemerintah waspada bencana dan pengarusutamaan tangguh bencana (misal: standar bangunan tahan gempa);
- f. Masyarakat yang waspada dan tanggap bencana.

4.3.2. Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Rendahnya produktivitas di beberapa sektor dan masih tingginya tingkat pengangguran merupakan isu yang cukup besar bagi eksistensi suatu daerah. Dalam memajukan perekonomian suatu wilayah dibutuhkan peningkatan produktivitas, sebagai dasar utama agar laju perekonomian tidak bergerak stagnan. Suatu ekonomi tidak akan bertahan tanpa adanya peningkatan produktivitas karena merupakan *bottom line*.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, identifikasi terhadap sektor yang memberi kontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Karanganyar menjadi proksi dari sektor yang memberi peluang kerja bagi penduduk kabupaten Karanganyar. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan penduduk dapat dikurangi.

Pembangunan kabupaten yang berdaya saing memerlukan manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Tantangan revolusi industri 4.0 perlu direspon dengan pengembangan *Smart economy* atau ekonomi pintar yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang diperlukan yaitu: (1) Semangat berinovasi dan berkreasi, (2) Kewirausahaan, (3) Citra dan ciri khas kota, (4) Produktivitas, (5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel, (6) Keterkaitan dengan dunia internasional, (7) Kemampuan untuk bertransformasi. (Griffinger, 2007:10-14)

Daya saing ekonomi daerah tidak terlepas dari angkatan kerja di daerah tersebut. Kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan daya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial, dan kompetensi spritual. Kompetensi teknis artinya tenaga kerja memiliki kemampuan teknis atau substantif sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, bekerjasama dengan orang lain (*team work*), kompetensi spiritual yaitu kompetensi untuk bekerja dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya etos kerja, disiplin kerja, kejujuran, loyalitas, dedikasi, tanggung jawab.

Berdasar analisis tersebut di atas, isu Penguatan Produktivitas Ekonomi, daya saing daerah dan tingginya tingkat pengangguran terbuka meliputi:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar 5,52% menduduki peringkat ke-4 di kawasan Subosukawonosraten;
- b. PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar tahun 2017 berdasar ADHK PDRB per kapita sebesar Rp. 36.462.000,00. PDRB per kapita ADHK sebesar Rp.27.152.000,00;
- c. Tinglat Inflansi tahun 2017 sebesar 3,15%, berada dibawah rata-rata Jawa

Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%) ;

- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 3,17%, masih terdapatnya pengangguran, disebabkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja kurang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kewirausahaan;
- e. Menurunnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada PDRB pada tahun 2016 sebesar 22,39 menjadi 18,82 pada tahun 2017;
- f. Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, pada tahun 2017 sebesar 11,2%.

4.3.3. Masih Rendahnya Kualitas SDM

Isu strategis berikutnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2017 sebesar 75,22; usia harapan hidup sebesar 77,31 tahun; harapan lama sekolah sebesar 13,65 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,50 tahun. Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi :

- a. Belum optimalnya pemerataan, mutu dan akses pendidikan, hal ini dapat dilihat dari capaian urusan pendidikan tahun 2017 yaitu APM SD/MI baru mencapai angka 98,61%; APM SMP/ MTs tercatat sebesar 85,27%; APS SMP sebesar 93,37%; guru berkualifikasi S1/D4 PAUD sebesar 73,38%; guru SD/MI/SDLB sebesar 93,26%; dan guru SMP/MTs/SMPLB sebesar 94,21%; jumlah PAUD yang sudah terakreditasi baru sebesar 63,12%;
- b. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator 2017 yaitu kasus kematian ibu melahirkan sebesar 42,01 per 100.000 kelahiran hidup; Angka kematian bayi sebesar 8,51 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian anak balita (sebesar 1,00 per 1.000 kelahiran hidup; Masih tingginya prevalensi gizi buruk sebesar 0,03%, dan balita stunting sebesar 22,6%; masih tingginya penyakit menular, angka penemuan kasus TB Paru sebanyak 74,50%; angka penemuan kasus HIV/ AIDS sebanyak 137 per 100.000 jiwa; Insiden rate DBD sebesar 8,3 per 100.000 penduduk; Angka penemuan kasus malaria sebanyak 1 per 1.000 penduduk.

Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* yaitu sebesar 7,76 %; persentase peserta KB baru sebesar 14.697 orang; penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 35,29 % dan masih ditemukannya drop out KB sebesar 13,76 %.

4.3.4. Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa

Isu strategis dalam pertumbuhan antar desa adalah pembangunan desa yang belum merata sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Sebaiknya aspek pemerataan juga menjadi target pembangunan, sehingga tidak hanya melihat pada hasil pembangunan semata. Pembangunan desa yang merata harus dirancang sejak awal sehingga pembangunan tidak lagi hanya terpusat pada wilayah (desa) tertentu saja. Dengan adanya dana desa, diharapkan membawa banyak perubahan bagi desa karena memberikan wewenang sepenuhnya pada desa untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimiliki. Dengan menjadikan pemerataan sebagai prioritas dalam program pembangunan maka akan banyak desa-desa yang selama ini tertinggal bisa mengekspos potensi yang dimiliki untuk memajukan ekonomi lokal.

Isu pemerataan pembangunan Desa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya lembaga ekonomi yang berfungsi dengan baik, tahun 2017 sebesar 45%;
- b. Masih rendahnya keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, tahun 2017 sebesar 20%;
- c. Belum optimalnya desa Fasilitasi Kemandirian BUMDesa sebagai penggerak ekonomi desa;
- d. Jumlah desa yang cepat berkembang pada tahun 2017 baru 58 desa;
- e. Persentase belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa baru 13,91%
- f. Penambahan kecukupan air bersih di desa, karena baru mencapai 76% belum memenuhi 100% target nasional;
- g. Penambahan Desa Mandiri Pangan baru 4 desa di tahun 2017;

4.3.5. Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis yang terkait dengan hal ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok isu yaitu :

1. Isu Kesejahteraan sosial budaya

Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial.

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya pada ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut: (1) kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin, (2) ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga, dan (3) ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Berdasar analisis di atas, isu strategis terkait Kesejahteraan Masyarakat ialah:

- a. Belum optimalnya penanganan kemiskinan dilihat dari angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 10,01% yang sebagian besar terdapat di wilayah perdesaan;
- b. Masih terjadinya kejahatan dan pelanggaran, data yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2017 sebanyak 183 kasus kejahatan;
- c. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda, tahun 2017 sebanyak 230 pelanggaran;
- d. Rendahnya desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, tahun 2017 sebesar 1,69 %;
- e. Masih rendahnya klaster kewirausahaan pemuda yang terbentuk, tahun 2017 sebanyak 3 klaster;
- f. Masih terbatasnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2017 sebesar 2 kegiatan;
- g. Belum optimalnya pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan organisasi kepemudaan, tahun 2017 sebanyak 7 oraganisasi;
- h. Belum optimalnya capaian IPG dan IDG Kabupaten Karanganyar, tahun 2017 IPG sebesar 96,50; IDG sebesar 74,27;
- i. Belum optimalnya penanganan PMKS di Kabupaten Karanganyar.

2. Isu Tata Kelola Pemerintahan

Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu:

a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan

Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan *big data* sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi.

Pemanfaatan memanfaatkan *big data* akan berdampak meningkatkan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini.

b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart city*)

Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (*smart city*) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):

- 1) *Smart Governance* (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis *real time data*);
- 2) *Smart Economy* (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfaatan *e-commerce*);
- 3) *Smart Mobility* (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);
- 4) *Smart Environment* (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, *green building*);
- 5) *Smart Branding* (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);
- 6) *Smart People* (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan *skill* yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
- 7) *Smart Living* (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik).

c. Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/ DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah,

disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel.

d. Inovasi Daerah

Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. *Spirit* SDGs menempatkan pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan.

e. Pemerintah yang Kolaboratif

Kolaborasi pemerintah - dunia usaha - masyarakat/komunitas - Akademisi -Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan.

f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan.

Kehadiran pemerintah memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif sangat strategis di era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang hadir menjaga konsusivitas daerah diperlukan dalam kondisi yang demikian.

Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (*pro poor*), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal.

g. Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif. Pelayanan publik (pelayanan administratif dan pelayanan produk/jasa) yang berkualitas menjadikan keharusan dan kebutuhan yang mendesak.

h. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN

Pembangunan Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Hubungan antara pemerintah daerah (birokrasi) dengan dunia usaha (masyarakat ekonomi), (masyarakat sipil), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media dalam bingkai kepastian hukum regulasi daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang, (2) bersama, (3) memajukan, (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah, (2) Unsur DPRD, (3) Unsur dunia usaha dan *pers* (media), (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang

dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan wilayah yang lebih baik, pada semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotongroyong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa, peran pemerintah yang mengatur, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran, mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur, (2) Maju di bidang ekonomi, (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Maju di Pembangunan Desa, (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan partisipatif. MAJU dijadikan *tagline* sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;

- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan *stakeholder* lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya pemerintah daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

5.1.1. Implikasi Visi Daerah bagi Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Target “Memajukan Karanganyar” dari sisi fisik infrastruktur maupun aktivitas ekonomi dan sosial beresiko pada penurunan derajat kesehatan lingkungan, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Di era dampak perubahan iklim kerawanan bencana alam yang diakibatkan oleh kemajuan industri sangat besar.

Aspek utama kesejahteraan dibidik dari kemampuan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek non ekonomi. Upaya peningkatan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan percepatan industrialisasi. Industrialisasi memerlukan teknologi untuk mengeksplorasi alam dan pada gilirannya akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Pada proses industrialisasi dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran tanah, air, dan udara, efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan gangguan. Akumulasi dampak negatif berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan perubahan iklim, yang akhirnya berpengaruh pada keseimbangan ekosistem.

Kesimpulannya, pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dalam mengejar terwujudnya visi "Memajukan Karanganyar" perlu dikendalikan dengan seksama untuk: (a) mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; (b) menjaga keseimbangan lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan (c) mengurangi kerentanan bencana.

5.2. Misi

5.2.1. Penjelasan Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai

arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.

b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intanpari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, *modern* dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

c. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat. Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

d. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-goverment, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan selama 5

(lima) tahun mendatang. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Tabel V.1.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh													
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	1. Rasio konektivitas			rasio	<i>na</i>	29,16	29,33	30,00	30,33	30,67	31,33	31,33	Perhubungan
	1.1.1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1) Penurunan Angka Kecelakaan	rasio	1,013	0,73	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,65	Perhubungan
	1.1.2	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	2) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	<i>na</i>	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	KKUPM
	2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	61,98	62,28	62,31	62,41	62,49	62,53	62,66	62,66	Lingkungan Hidup
	1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,98	62,28	62,31	62,41	62,49	62,53	62,66	62,66	Lingkungan Hidup
			4) Persentase kawasan kumuh	%	1,09	0,95	0,76	0,57	0,41	0,24	0,15	0,15	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat													
2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	3. Tingkat Pertumbuhan ekonomi			%	5,52	5,48	5,69	5,8	5,9	6,01	6,12	6,12	Statistik
	4. Tingkat inflasi			%	3,15	3,15	3,10	3,10	3,05	3,00	2,95	2,95	Statistik
	5. PDRB Perkapita (Rp.000)			Rp.000	27.152	<i>na</i>	27.652	28.556	28.556	28.780	29.450	29.450	Statistik
	2.1.1.	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian,	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan	%	13,51	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,01	Pertanian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan perikanan	perikanan dalam PDRB										
			6) Skor Pola Pangan harapan	Score	85	86	86,8	88	89	90	91	91	Pangan
		2.1.2. Meningkatkan produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	3,33	3,33	4,24	4,75	5,1	5,25	5,5	5,5	Pariwisata
		2.1.3. Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,20	11,20	11,34	11,45	11,56	11,67	11,77	11,77	Perdagangan
		2.1.4. Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	45,89	45,89	46,47	46,59	47,14	47,25	47,36	47,36	Perindustrian
		2.1.5. Meningkatkan nilai investasi daerah	10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2,2	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
		6. Tingkat Pengangguran Terbuka		%	3,17	3,17	3,05	2,86	2,68	2,46	2,31	2,31	Tenaga Kerja
		2.1.6. Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11) TPAK	%	70,24	70,36	70,60	70,96	71,44	72,04	72,76	72,76	Tenaga Kerja
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis													
3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	75,42	75,54	75,64	75,74	75,84	75,94	76,04	76,04	Perencanaan
		3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,65	13,67	13,7	13,72	13,74	13,77	13,82	13,82	Pendidikan
			13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,55	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	9	Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,31	77,31	77,32	77,57	77,82	78,37	78,82	78,82	Kesehatan
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan													
Terwujudnya pemerataan antar desa	8. Indeks Desa Membangun (IDM)			indek	0,6406	0,6416	0,6426	0,6436	0,6446	0,6456	0,6463	0,6463	Permasdes
	4.1.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	15) Indeks Ketahanan Sosial		indek	0,644	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,650	0,650	Permasdes
		16) Indeks Ketahanan Ekonomi		Indek	0,594	0,595	0,596	0,597	0,598	0,599	0,599	0,599	Permasdes
		17) Indeks Ketahanan Lingkungan		indek	0,684	0,685	0,686	0,687	0,688	0,689	0,690	0,690	Permasdes
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga													
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.	9. Nilai Kabupaten Peduli HAM				79,25	79,41	79,41	79,41	79,41	79,41	79,51	79,51	Administrasi Pemerintahan
	5.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		Kasus	230	175	140	135	130	125	120	120	KKUPM
		19) Persentase Tertangannya kasus pelanggaran perda		%	85	85	86	87	88	90	92	92	KKUPM
		20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Indeks Pembangunan Kebudayaan				76	76	77	78	79	80	80	80	80

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5.1.		5.1.2. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	76	87,63	87,7	88,1	88,5	90	90	90	Kebudayaan		
			22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	12,85	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,75	kebudayaan		
	11. Prestasi Pemuda dan Olah Raga					10	10	20	20	30	40	50	50	Pemuda Olah Raga	
		5.1.3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga	23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Unit	10	10	20	20	30	40	50	50	50	Pemuda dan Olahraga	
			24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	10	10	20	20	30	40	50	50	50	Pemuda dan Olahraga	
	12. Angka kemiskinan				%	12,28	10,01	8,29 – 9,29	7,58- 8,58	6,87- 7,78	6,15- 7,15	5,44- 6,44	5,44- 6,44	Statistik	
		5.1.4. Meningkatkan kesejahteraan sosial	25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	10,93	11,32	11,98	12,46	13,35	14,12	15,45	15,45	Statistik		
			26) Persentase Penanganan PMKS	%	1,02	1,15	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,50	Sosial		
	13. IPG (Indeks Pembangunan Gender)				indeks	96,50	96,70	97,00	97,20	97,25	97,30	97,35	97,35	<i>PP dan PA</i>	
		5.1.5. Meningkatkan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,27	74,31	74,52	74,66	74,71	74,81	74,95	74,95	<i>PP dan PA</i>		
			28) Kabupaten Layak Anak	Score	370	732,11	742	752	762	770	780	780	<i>PP dan PA</i>		
	5.2. Terwujudnya,	14. Indeks Reformasi Birokrasi					na	na	63	65	70	75	80	80	Administrasi Pemerintahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
tata kelola pemerintahan yang baik		5.1.6. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	29) Indeks SPBE	Indeks	0	2,04	2,14	2,37	2,69	2,91	3,00	3,00	Kominfo	
			30) Nilai SAKIP	nilai	57,52	62,38	63	65	70	75	80	80	80	Administrasi Pemerintahan
			31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
			32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	74,67	76,67	78,67	80,67	82,67	84,67	86,67	86,67	86,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			33) IKM Kabupaten	%	na	na	76,67	78,23	80,43	81,26	81,67	81,67	81,67	Administrasi Pemerintahan
			34) Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pengawasan
			35) Indeks Arsip	Indeks	49	67	75	79	81	83	85	85	85	Kearsipan

Sumber : OPD, 2018

Keterangan :

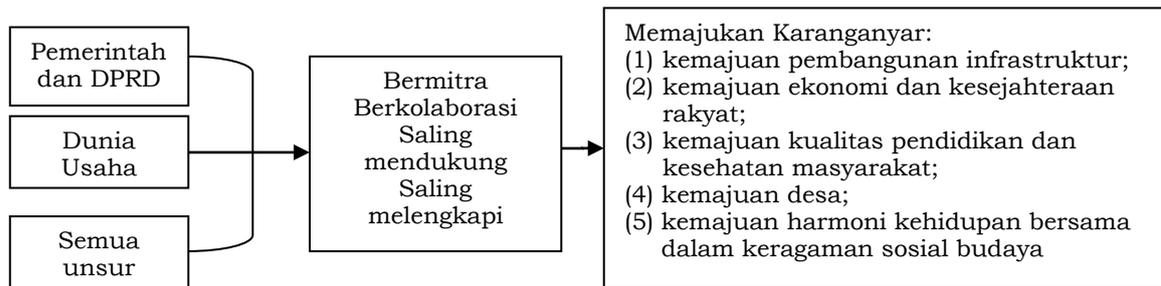
1. KKUPM = Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Permasdes = pemberdayaan masyarakat dan desa
3. PP dan PA = pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, Kabupaten Karanganyar merencanakan serangkaian strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**. Hubungan visi dan misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 digambarkan melalui gambar VI.1.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berjuang Bersama semua komponen pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memajukan Karanganyar. Kemajuan Karanganyar ditargetkan dalam hal : (1) kemajuan pembangunan infrastruktur; (2) kemajuan ekonomi kerakyatan; (3) kemajuan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; (4) kemajuan desa; (5) kemajuan harmoni kehidupan bersama dalam keragaman sosial budaya. Gambaran pencapaian visi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 sebagai berikut.



Gambar VI.1
Skema Pencapaian Visi

6.1. Strategi

Sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Sasaran 1.1. : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, dengan strategi :

6.1.1. Peningkatan konektivitas untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas melalui:

- 1) Pembangunan jalan mantap, pembangunan jembatan yang rusak berat yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
- 2) Peningkatan kualitas drainase perkotaan;
- 3) Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten;
- 4) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah

moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan strategi :

6.1.2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Infrastruktur ruang terbuka publik;
- 2) Pengawasan kualitas udara dan sungai;
- 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (*re use, re duce dan re cycle*);
- 4) Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir
- 5) Pengurangan kawasan kumuh dengan penguatan lingkungan permukiman dan fasilitas publik dengan peningkatkan rumah bersanitasi, peningkatan kepemilikan rumah layak huni.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana, dengan strategi :

6.1.3. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana melalui :

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan resiko bencana, melalui infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana, membentuk dan mewujudkan desa tangguh bencana.

Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Sasaran 2.1 : Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan, dengan strategi :

6.1.4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui :

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan hortikultura;
- 2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak;
- 3) Peningkatan produksi perikanan budidaya;
- 4) Peningkatan distribusi, pengendalian cadangan pangan, pemanfaatan pekarangan dan pembudayaan pola pangan harapan.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB, dengan strategi :

6.1.5. Peningkatan produktivitas sektor akomodasi dan makan minum melalui :

- 1) Peningkatkan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan pembuatan desa wisata sebagai obyek wisata baru;
- 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal.

Sasaran 2.3 : Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan, dengan strategi :

6.1.6. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas);
- 2) Peningkatan pengawasan produk perdagangan;
- 3) Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang

- 4) Peningkatan kapasitas pedagang.

Sasaran 2.4 : Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan, dengan strategi :

6.1.7. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui :

- 1) Peningkatan kapasitas industri kecil;
- 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri;
- 3) Pengembangan kawasan industri.

Sasaran 2.5 : Meningkatnya nilai investasi daerah, dengan strategi :

6.1.8. Peningkatan nilai investasi daerah melalui :

- 1) Peningkatan produktivitas LKM dan UMKM, dengan mendorong terciptanya *one village one product*, fasilitasi pengembangan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa;
- 2) Peningkatkan investasi daerah melalui peningkatan promosi, dan kemudahan investasi dengan mall pelayanan publik.

Sasaran 2.6 : Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dengan strategi :

6.1.9. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :

- 1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi;
- 2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja.

Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Sasaran 3.1 : Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan strategi :

6.1.10. Peningkatan kualitas pendidikan melalui :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan PAUD;
- 2) Pemerataan SDM pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan);
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan.

Sasaran 3.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi :

6.1.11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar;
- 2) Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan;
- 3) Perbaikan gizi masyarakat;
- 4) Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK.

Misi 4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Sasaran 4.1 : Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa, dengan strategi :

6.1.12. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui :

- 1) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ketahanan

- sosial dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keamanan dan toleransi;
- 2) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas aparatur desa dan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, peningkatkan kerjasama antar desa serta pembangunan desa yang maju dan inovatif;
 - 3) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan pengurangan potensi bencana.

Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman, dengan strategi :

6.1.13. Peningkatan kualitas keagamaan dalam keberagaman melalui :

- 1) Penguatan perlindungan kemandirian, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat, peningkatan peran FKUB dalam mencegah konflik antar agama, suku dan ras;
- 2) Penegakan peraturan daerah dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, peningkatan sarana prasarana keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (KKUPM); dan
- 3) Peningkatan perlindungan masyarakat dengan pencegahan dan penanganan kebakaran.

Sasaran 5.2 : Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, dengan strategi :

6.1.14. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, yang akan dilaksanakan melalui :

- 1) Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang *tangible* maupun *intangible*.

Sasaran 5.3 Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, dengan strategi :

6.1.15. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga, yang akan dilaksanakan adalah melalui :

- 1) Peningkatan prestasi dan penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan olah raga melalui pelatihan atlet, pencarian bibit atlet, peningkatan sarana prasarana olah raga (revitalisasi stadion 45 dan GOR), sarana olah raga pedesaan .

Sasaran 5.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan strategi :

6.1.16. Peningkatan kesejahteraan sosial, yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan program keluarga harapan;
- 2) Peningkatan ketrampilan bagi penduduk miskin;
- 3) Penanganan PMKS di luar panti.

Sasaran 5.6 Meningkatnya kualitas pembangunan *gender*, dan perlindungan anak, dengan strategi :

6.1.17. Peningkatan kualitas pembangunan *gender*, dan perlindungan anak, yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Penguatan pembangunan *gender* dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan.

Sasaran 5.7 Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan strategi :

6.1.18. Peningkatan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif meliputi : perangkat kebijakan, pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah, juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dalam mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Tabel VI.1.

Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1.1.1. Peningkatan konektivitas , melalui : 1) Pembangunan jalan mantap, pembangunan jembatan yang rusak berat yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; 2) Peningkatan kualitas drainase perkotaan; 3) Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; 4) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan	Arah kebijakan 1: Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah 2) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi 3) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; 4) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 5) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu: 6) Infrastruktur konektivitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi) 7) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik sarana prasarana kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana	1) Program Peningkatan konektivitas	(1) Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; (2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas; (3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
1.2. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	1.3.1. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana melalui : Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan resiko bencana, melalui infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana, membentuk dan mewujudkan desa tangguh bencana		2) Program Peningkatan Mitigasi Dan Penanganan Bencana	(5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup , meliputi : 1) Infrastruktur ruang terbuka publik; 2) Pengawasan kualitas udara dan sungai; 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (<i>re use, re duce dan re cycle</i>); 4) Peningkatan pengelolaan sampah di Tempat pengolahan akhir 5) Pengurangan kawasan kumuh dengan penguatan lingkungan permukiman dan fasilitas publik dengan meningkatkan rumah bersanitasi, peningkatan kepemilikan rumah layak huni.		3) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup :	(6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; (7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Permukiman; (8) Program Pengembangan Perumahan;
2.1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan	2.1.1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui : 1) Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan hortikultura, 2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak, 3) Peningkatan produksi perikanan budidaya	Arah Kebijakan 2: Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengembangan industry pertanian/ peternakan/ perikanan <i>modern</i> ramah lingkungan dan cerdas (<i>Smart agriculture</i>) untuk meningkatkan produksi dan	4) Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perikanan;	(9) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian; (10) Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian; (11) Program pengembangan budidaya perikanan; (12) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
	4) Peningkatan distribusi, pengendalian cadangan pangan, pemanfaatan pekarangan dan pembudayaan pola pangan harapan	mempertahankan swasembada 2) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multi sektor (<i>smart tourism & sustainable tourism</i>) 3) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju <i>smart economy</i> 4) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan <i>e-commerce</i> , termasuk di seluruh desa 5) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan) 6) Peningkatan sarana perdagangan dengan fokus rehabilitasi pasar menjadi pasar sehat		rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
2.2 Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	2.2.1. Peningkatan produktivitas sektor akomodasi dan makan minum melalui : 1) Peningkatkan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan pembuatan desa wisata sebagai obyek wisata baru 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal		5) Program Peningkatan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB;	(13) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (14) Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
2.3 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	2.3.1 Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui : 1) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas) 2) Peningkatan pengawasan produk perdagangan 3) Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang 4) Peningkatan kapasitas pedagang		6) Program Peningkatan Produktivitas SektorPerdagangan;	(15) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; (16) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.4 Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	2.4.1. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan , melalui : 1) Peningkatan kapasitas industri kecil 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri 3) Pengembangan kawasan industri		7) Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	(17) Program pengembangan industri kecil dan menengah;
2.5 Meningkatnya nilai investasi daerah	2.5.1. Peningkatan nilai investasi daerah melalui : 1) Peningkatan produktivitas LKM dan UMKM, dengan mendorong terciptanya <i>one village</i>		8) Program Peningkatan Nilai Investasi Daerah	(18) Program perencanaan Tata Ruang; (19) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
	<p><i>one product</i>, fasilitasi pengembangan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa;</p> <p>2) Peningkatkan investasi daerah melalui peningkatan promosi, dan kemudahan investasi dengan <i>mall</i> pelayanan publik.</p>			
2.6 Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	<p>2.6.1. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :</p> <p>1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi</p> <p>2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja</p>		9) Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	(20) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	<p>3.1.1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui :</p> <p>1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan PAUD</p> <p>2) pemerataan SDM pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan),</p> <p>3) Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan</p> <p>4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Arah Kebijakan 3: Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <p>1) Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas</p> <p>2) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan</p> <p>3) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat</p> <p>4) Penyelenggaraan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas</p> <p>5) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan</p> <p>Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (<i>universal Health Coverage</i>)</p>	10) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	(21) Program Pendidikan Anak Usia Dini (22) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (23) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<p>3.2.1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui :</p> <p>1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar</p> <p>2) Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan</p> <p>3) Perbaikan gizi masyarakat</p> <p>4) Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK</p>		11) Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	(24) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (25) Program Kesehatan Masyarakat; (26) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;
4.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	<p>4.1.1. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui :</p> <p>1) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ketahanan sosial dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keamanan dan toleransi</p> <p>2) Peningkatan kemajuan dan kemandirian</p>	<p>Arah kebijakan 4: Fasilitasi desa mandiri dan berkembang</p> <p>Dengan rangkaian kebijakan:</p> <p>1) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa</p> <p>2) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis</p>	12) Program Peningkatan Kemajuan dan Kemandirian Desa :	(27) Program pembangunan infrastruktur pedesaan; (28) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; (29) Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah; (30) Program peningkatan partisipasi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
	desa bidang ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas aparatur desa dan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, peningkatan kerjasama antar desa serta pembangunan desa yang maju dan inovatif 3) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan pengurangan potensi bencana	internet di semua desa 3) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata; desa industri; desa lumbung pangan; desa seni,; desa sayur dan buah; kampung ternak, dan sebagainya Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan		masyarakat dalam membangun desa.
5.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	5.1.1. Peningkatan kualitas keagamaan dalam keberagaman melalui : 1) Penguatan perlindungan kemandirian, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat, peningkatan peran FKUB dalam mencegah konflik antar agama, suku dan ras; 2) Peningkatan peraturan daerah dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, peningkatan sarana prasarana keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (KKUPM); dan 3) Peningkatan perlindungan masyarakat dengan pencegahan dan penanganan kebakaran	Arah Kebijakan 5: Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif Dengan rangkaian kebijakan: 1) fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan 2) Pemasyarakat nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan	13) Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Dalam Keberagaman	(31) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
5.2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	5.2.1. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan , melalui : Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i>	Arah Kebijakan 7: Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait 2) Pengembangan seni budaya 3) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan 4) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di lingkungan generasi muda 5) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi	14) Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan;	(32) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; (33) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
		pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif		
5.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	5.3.1. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga , melalui : Peningkatan prestasi dan penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan olah raga melalui pelatihan atlet, pencarian bibit atlet, peningkatan sarana prasarana olah raga (revitalisasi stadion dan GOR), sarana olah raga perdesaan.	Arah kebijakan 6: Pengembangan inovasi dan prestasi daerah Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi 2) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/ insentif meningkatnya olahraga berprestasi	15) Program Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olah Raga ;	(34) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; (35) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
5.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial	5.4.1. Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi melalui : 1) pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan program keluarga harapan, 2) peningkatan ketrampilan bagi penduduk miskin, 3) penanganan PMKS di luar panti	Arah kebijakan 8: Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif Dengan rincian kebijakan: 4) Implementasi kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran 5) Penguatan ketrampilan kerja dan budaya produktif di kalangan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan 6) Fasilitasi jejaring penyerapan lapangan kerja bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan	16) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial •	(36) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (37) Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial
5.5. Meningkatnya kualitas pembangunan <i>gender</i> , dan perlindungan anak	5.5.1. Peningkatan kualitas pembangunan <i>gender</i>, dan perlindungan anak , melalui : Penguatan pembangunan <i>gender</i> dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan	Arah kebijakan 9: Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak Dengan rincian kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan <i>gender</i> 2) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak	17) Program Peningkatan Kualitas Pembangunan <i>Gender</i> dan Perlindungan Anak.	(38) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan; (39) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan <i>Gender</i> dan Anak.
5.6. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, <i>efisien</i> dan efektif serta	5.6.1. Peningkatan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas , melalui Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif meliputi	Arah kebijakan 10 : Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penguatan kebijakan reformasi	18) Program Peningkatan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektifserta Pelayanan yang Berkualitas;	(40) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (41) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; (42) Program peningkatan sistem

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Program Daerah	Prioritas Program Perangkat Daerah
<p>elayanan yang berkualitas</p>	<p>: perangkat kebijakan, pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya</p>	<p>birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh</p> <p>2) Penguatan <i>e-government</i> difokuskan pada perwujudan <i>e-planning, e-budgeting, e-SAKIP</i></p> <p>3) Pembangunan Kabupaten Pintar</p>		<p>pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;</p> <p>(43) Program perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>(44) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>(45) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</p>

Sumber: Baperlitbang, 2018

6.2.1. Tema dan Fokus Tahunan

Berdasar analisis rangkaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 untuk menjawab isu strategis pembangunan, serta mewujudkan visi daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun. Pentahapan prioritas dimaksudkan untuk memberi fokus arah kebijakan yang menjadi payung program dan kegiatan unggulan tahunan, tanpa mengabaikan keberlanjutan atau pematapan kebijakan lainnya. Fokus tahapan pembangunan akan mendasari kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD).

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) **Perencanaan Strategik** yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) **Perencanaan Operasional** yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Berdasarkan uraian disusun arah kebijakan tahunan sebagai berikut:

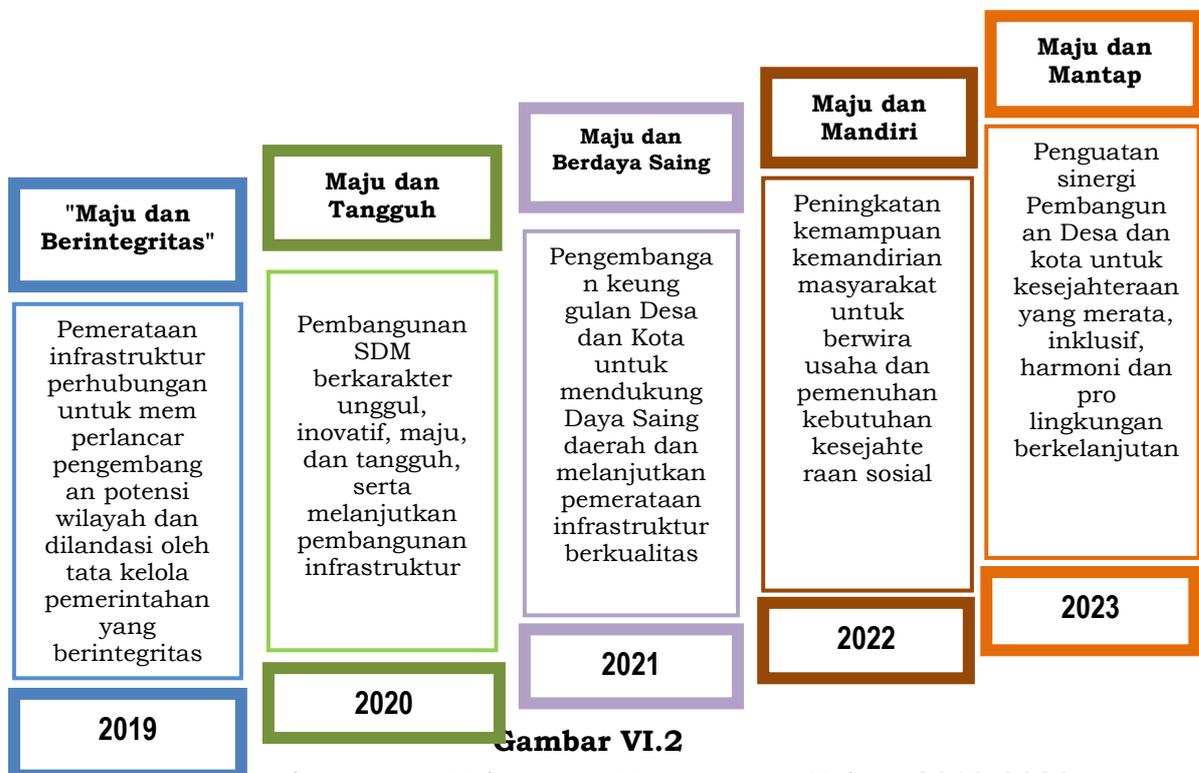
Tabel VI.2.
Tema, Fokus, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Karanganyar 2019-2023

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
<p>Tema: Maju dan Berintegritas:</p> <p>Fokus: Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas</p>	<p>Tema: Maju dan Tangguh:</p> <p>Fokus: Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur</p>	<p>Tema: Maju dan Berdaya saing:</p> <p>Fokus: Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur</p>	<p>Tema: Maju dan Mandiri</p> <p>Fokus: Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial</p>	<p>Tema: Maju dan Mantap</p> <p>Fokus: Penguatan sinergi pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan</p>
<p>Arah Kebijakan: 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif</p>	<p>Arah kebijakan: 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah 3) Penguatan</p>	<p>Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2) Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan</p>	<p>Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara</p>	<p>Arah Kebijakan: 1) Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 2) masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif. 3) Pengembangan kebijakan daerah</p>

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
dengan seluruh pemangku kepentingan. 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah 3) Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif	Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.	partisipatif 3) Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif	berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah 5) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 6) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah 7) Pembangunan produktivitas ekonomi yang ber kualitas.

Sumber: Baperlitbang, 2018

Keterkaitan antar arah kebijakan beserta rangkaian kebijakan umum dan tema pembangunan tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar VI.2
Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Penentuan tema setiap tahun secara umum menterjemahkan isu dan kebijakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Manifestasi SDGs dalam tema tahunan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 tercermin dari terminologi berikut:

- 1) Tema tahun 1, Infrastruktur berkualitas, berarti ramah lingkungan dan tangguh bencana, sesuai dengan Tujuan SDGs ke 6 yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh,

meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; Tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

- 2) Tema tahun 1, Pemerintahan yang berintegritas sesuai dengan SDGs tujuan 17, yaitu kemitraan pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- 3) Tema tahun 2, SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, sesuai dengan tujuan SDGs tujuan 1, 2, 3, 4, yaitu kualitas kesejahteraan (menurunkan kemiskinan), kualitas pangan, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan;
- 4) Tema 3, Daya saing daerah desa dan kota mendukung tujuan SDGs ke 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 5) Tema tahun ke 4, kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial mendukung tujuan SDG ke 8 seperti diatas dan tujuan ke 5 keadilan *gender*
- 6) Tema tahun ke 5, Pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan mendukung tujuan SDGs:
 - a) Tujuan 12: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - b) Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
 - c) Tujuan 14: melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
 - d) Tujuan 15: melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
 - e) Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

Penjelasan Tema dari tiap tahapan pembangunan sebagai berikut:

a. Tahun 2019: "Maju dan Berintegritas".

RKPD tahun 2019 memiliki fokus pembangunan pada ***"Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas"***.

Strategi yang diprioritaskan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana.
infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas meliputi: Jalan, jembatan, transportasi, jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi & internet
- 2) Peningkatan kualitas infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana.

Infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik meliputi: pembangunan gedung kantor, perangkat teknologi informasi untuk pemerintahan dan pelayanan publik, perangkat kebijakan pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan **Arah Kebijakan** tahun 2019 yaitu:

- 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan rangkaian kebijakan umum:

- a) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah
 - b) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh
 - c) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi
 - d) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - e) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
 - f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi, telekomunikasi)
 - (2) Infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik
- 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan kebijakan umum:
 - a) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.

b. Tahun 2020 : “Maju dan Tangguh“

Asumsi prioritas tahun 2020 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan 2019, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2020 yaitu: **”Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur”**.

Strategi prioritas tahun 2020 yaitu:

- 1) Pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas dan inklusif, melalui: (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan kualitas SDM pendidikan; (3) pengembangan sistem kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (iv) jaminan sosial bantuan pendidikan

- 2) Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan inklusif, melalui: (1) pemerataan sarana prasarana, (2) pemerataan rasio SDM kesehatan, (3) pengembangan sistem kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan (4) jaminan sosial bantuan kesehatan

Arah kebijakan prioritas tahun 2020 yaitu:

- 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul;
Dengan rangkaian kebijakan:
 - a) Perluasan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas
 - b) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat
 - c) Perluasan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas
 - d) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal Health Coverage*)
- 2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah
dengan rangkaian kebijakan:
 - a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;
 - b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olah raga berprestasi.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan rangkaian kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik
 - (2) infrastruktur pendidikan
 - (3) infrastruktur kesehatan
 - (4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan)
 - (5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
 - (6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.
- 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak; Dengan rincian kebijakan:
 - a) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan *gender*;
 - b) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c) Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

c. Tahun 2021 : “Maju dan Berdaya Saing”

Fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2021 yaitu: **"Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur"**.

Strategi prioritasnya adalah :

- 1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
- 2) Penguatan UMKM;
- 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
- 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan *modern* ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);
 - c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*;
 - d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
 - e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).
- 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan:
 - a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
 - 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - d) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;

- e) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
 - (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olah raga; panti sosial, fasilitas keagamaan).

d. Tahun 2022 : “Maju dan Mandiri”

Asumsi prioritas tahun 2022 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan RKPD 2021, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2022 yaitu: **”Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial ”**.

Strategi prioritasnya adalah :

- 1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
- 2) Penguatan UMKM;
- 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
- 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan;
- 5) Penguatan kapasitas aparat desa;
- 6) Pembangunan infrastruktur antar desa, termasuk jaringan internet di semua desa;
- 7) Pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa;
- 8) Penguatan Desa untuk fasilitasi pembangunan lingkungan desa yang sehat dan tangguh.

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan *modern* ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada
- b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*)
- c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*
- d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa

- e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan)
- 2) Penguatan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- Dengan rangkaian kebijakan:
- a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata; desa industri; desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya
 - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
- 3) Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif
- Dengan rincian kebijakan:
- a) Implementasi kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran
 - b) Penguatan ketrampilan kerja dan budaya produktif di kalangan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan
 - c) Fasilitasi jejaring penyerapan lapangan kerja bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan
- 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa
- Dengan rangkaian kebijakan:
- a) Pengembangan seni budaya
 - b) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan
 - c) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di lingkungan generasi muda
 - d) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.

e. Tahun 2023 : “Maju dan Mantap”

Asumsi prioritas tahun 2023 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan 2022, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2023 yaitu: ***”Penguatan sinergi Pembangunan Desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan”***.

Strategi prioritasnya adalah :

- 1) Penguatan kapasitas aparatur desa;
- 2) Penguatan kapasitas aparatur desa pembangunan infrastruktur antar desa, termasuk jaringan internet di semua desa pemasyarakatan nilai

- budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa
Penguatan pembangunan lingkungan desa yang sehat dan tangguh;
- 3) Penguatan perlindungan keamanan, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat;
 - 4) Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang *tangible* maupun *intangible*;
 - 5) Penguatan pembangunan keadilan *gender*, perlindungan perempuan dan anak;
 - 6) Penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan masyarakat olah raga;
 - 7) Peningkatan kualitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
 - 8) Penguatan perlindungan keamanan, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat;
 - 9) Penguatan pembangunan keadilan *gender*, perlindungan perempuan dan anak;
 - 10) Penguatan Kemitraan Desa dengan pemerintah Daerah untuk fasilitasi pembangunan lingkungan desa yang sehat dan Tangguh.

Arah Kebijakan tahun 2023 yaitu:

- 1) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif
Dengan rangkaian kebijakan:
 - a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan Jaringan Teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana;
- 2) Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif.
Dengan rangkaian kebijakan:
 - a) fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan;
 - b) Pemasyarakatan nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan;
- 3) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak
Dengan rincian kebijakan:
 - a) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan *gender*;
 - b) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c) Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

- 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan seni budaya.
- b) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan.
- c) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda.
- d) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.

- 5) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Penyelenggaraan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas;
- b) Pemerataan SDM pendidikan berkualitas;
- c) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
- d) Penyelenggaraan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
- e) Pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas;
- f) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal Health Coverage*).

- 6) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;
- b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.

- 7) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
- b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);
- c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*;
- d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
- e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa program daerah yang menjadi prioritas.

6.3.1. Program Daerah

Penetapan program daerah yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Misi 1 Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

1. Program Peningkatan Konektivitas;
2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana;

Misi 2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

4. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
5. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB;
6. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan;
7. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan;
8. Program Peningkatan Nilai Investasi Daerah;
9. Program Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja.

Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

10. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Misi 4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

12. Program Peningkatan Kemajuan dan Kemandirian Desa

Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

13. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman;
14. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan;
15. Program Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olah Raga;
16. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
17. Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak;
18. Program Peningkatan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.

Dari 18 Program Daerah tersebut menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menimplementasikan dalam program-program pembangunan oleh Perangkat Daerah, sesuai tugas fungsinya.

Tabel VI.3.

Prioritas Program Daerah dan Prioritas Program Perangkat Daerah Pencapaian Visi dan Misi

URAIAN	Program Unggulan Tiap Tahun					Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	
	2019	2020	2021	2022	2023				
	Tema :	Tema :	Tema :	Tema :	Tema :				
	Maju dan Berintegritas	Maju dan Tangguh	Maju dan Berdaya saing	Maju dan Mandiri	Maju dan Mantap				
	Fokus :	Fokus :	Fokus :	Fokus :	Fokus :				
	Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur	Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur	Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial	Penguatan sinergi Pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan				
ALOKASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN					
Misi 1	Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh	92.500.000.000	116.000.000.000	108.000.000.000	123.000.000.000	63.000.000.000	Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Pelebaran dan peningkatan jalan kabupaten	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	120.000.000.000	60.000.000.000	1. Program Peningkatan Konektivitas; 2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 3. Program Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana;	1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6. Program Pemeliharaan	1) DPUPR 2) DISHUBPKP 3) DISKOMINFO 4) DLH 5) BPBD
2	Konservasi Gunung Lawu (penanaman bambu)	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
3	Pembuatan Tangga Puncak Lawu (Non APBD/CSR)	-	20.000.000.000	-	-	-			
4	Waduk Jlantah Tlobo Jatiyoso (APBN)	-	-	-	-	-			
5	Pembangunan sarpras perhubungan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			

URAIAN	Program Unggulan Tiap Tahun					Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	2019	2020	2021	2022	2023			
6	Pembangunan sarpras cyber city	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman; 7. Program Pengembangan Perumahan; 8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;	
7	Penataan Simpang Siwaluh	-	2.000.000.000	15.000.000.000	-	-		
8	Pengelolaan sampah tuntas di desa	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
Misi 2	Pemberdayaan Perekonomian Rakyat	3.650.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000		
1	Kampung Kelinci/OVOP (Bantuan bibit) (Twmg)	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan; 2. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB; 3. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan; 4. Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan; 5. Program Peningkatan Nilai Invetasi Daerah; 6. Program Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja.	1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian; 2. Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian; 3. Program pengembangan budidaya perikanan; 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 6. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif; 7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 8. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 9. Program pengembangan industri kecil dan
2	Kampung Kopi (Twmg, Krpd, Jtys, Jnw, Ngys)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
3	Pembangunan dan Pengembangan kawasan kuliner	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
4	Bantuan Modal usaha	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		
5	Pembangunan Kawasan Wisata (CSR)	50.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		
6	Program pengembangan kawasan buah-buahan	100.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
7	Pemberdayaan BUMDes	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
8	Pemberdayaan Pemuda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
9	Pengembangan Tahura	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
10	Pengembangan BLK sesuai kebutuhan	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		

URAIAN	Program Unggulan Tiap Tahun					Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	2019	2020	2021	2022	2023			
11 Pembangunan sarpras perdagangan	1.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000		menengah; 10. Program perencanaan Tata Ruang; 11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 12. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	
12 Pemasaran produk unggulan daerah (toko-toko modern)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000			
Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis	94.00.000.000	95.00.000.000	95.500.000.000	96.000.000.000	96.500.000.000			
1 Pendidikan Gratis SD/SMP	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 5. Program Kesehatan Masyarakat; 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;	1) DISDIKBUD 2) DINKES
2 Pemberian Beasiswa (Siswa berprestasi/tidak mampu, masuk PTN/Mahasiswa tidak mampu, S2-S3)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000			
3 Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000			
4 Kesejahteraan Pendidik Non PNS	27.500.000.000	28.000.000.000	28.500.000.000	29.000.000.000	29.500.000.000			
5 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000			
6 Pembinaan kader posyandu	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000			
7 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000			
8 Pendidikan Karakter (Bela Negara)	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
Misi 4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan	50.100.000.000	50.100.000.000	50.100.000.000	50.100.000.000	50.100.000.000			
1 Pengembangan pelayanan desa berbasis teknologi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1. Program Peningkatan Kemajuan dan	1. Program pembangunan infrastruktur pedesaan;	1) SETDA 2) DISPERMAS

URAIAN	Program Unggulan Tiap Tahun					Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	2019	2020	2021	2022	2023			
2 Bantuan keuangan sarpras desa	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	Kemandirian Desa	2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 3. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah; 4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.;	DES 3) KECAMATAN 4) DPUPR
Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	109.000.000.000	120.500.000.000	63.500.000.000	47.500.000.000	47.500.000.000			
1 pembangunan Tempat ibadah yang representatif	40.000.000.000	50.000.000.000	21.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman; 2. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan; 3. Program Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olah Raga; 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 5. Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender, dan	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. ; 4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; 5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	1) BKESBANG POL 2) SATPOL 3) DISDIKBUD 4) DISPARPOR 5) DINSOS 6) DP3APPKB 7) DISDUKCAP IL 8) SETDA 9) BAPERLITBANG 10) BKD 11) INSPEKTORAT 12) BKPSDM
2 Pemberdayaan kebudayaan pembangunan / Gedung theatre Bhineka Tunggal Ika	7.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000			
3 Pembangunan Inovasi berbasis Teknologi Aplikasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
4 Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Integritas ASN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000			
5 Bantuan Kesejahteraan Sosial	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000			

URAIAN	Program Unggulan Tiap Tahun					Program Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	2019	2020	2021	2022	2023			
6 Peningkatan dan Pemberdayaan Prestasi Olah Raga dan Pembangunan Sarpras OR	13.000.000.000	35.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6. Perlindungan Anak; Program Peningkatan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.	7. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial 8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan; 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 12. Program perencanaan pembangunan daerah; 13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 15. Gender dan Anak.	
7 Pembangunan Gedung Kantor	38.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000			
Jumlah	349.280.000.000	398.800.000.000	334.300.000.000	333.800.000.000	274.300.000.000			

Sumber: Baperlitbang, 2018

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dengan indikator dan target capaiannya selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel VI.4).

Tabel VI.4.

Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) /Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan	
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Jumlah Dana							0,00		1.398.665,19		1.396.445,37		1.522.968,49		1.655.907,73		1.828.151,94
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh							0,00	470,21	402.374,05	470,41	407.448,30	470,58	431.085,09	470,72	455.894,63	470,84	512.875,44
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	1. Rasio Konektivitas	na	29,16		29,33		30,00		30,33		30,67		31,33		31,33	Perhubungan dan KKUPM	
	2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup	66,33	66,61		66,69		66,87		67,02		67,14		67,26		67,26	Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1) Penurunan angka kecelakaan (<i>rasio</i>)	1,013	0,73	0	0,70	35.057,46	0,69	38.164,12	0,68	51.295,13	0,66	63.819,36	0,65	69.073,86	0,65	Perhubungan	
Program Peningkatan Konektivitas	(1) Rasio penurunan angka kecelakaan (<i>rasio</i>)	1,013	0,73	0	0,70	35.057,46	0,69	38.164,12	0,68	51.295,13	0,66	63.819,36	0,65	69.073,86	0,65	Perhubungan	
Sasaran 1.1.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	2) Indeks kualitas lingkungan hidup	66,33	66,51	0,00	66,69	300.343,31	66,87	301.321,09	67,02	304.387,88	67,14	309.882,37	67,26	325.168,84	67,26	Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	3) Persentase kawasan kumuh (%)	1,09	0,95	0	0,76	0	0,57	0	0,41	0	0,24	0	0,15	0	0,15	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	(2) Indeks kualitas lingkungan hidup	66,33	66,51	0,00	66,69	300.343,31	66,87	301.321,09	67,02	304.387,88	67,14	309.882,37	67,26	325.168,84	67,26	Lingkungan Hidup	
	(3) Persentase kawasan kumuh (%)	1,09	0,95	0	0,76	0	0,57	0	0,41	0	0,24	0	0,15	0	0,15	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.1.3. Meningkatkan Mitigasi dan Penanganan Bencana	4) Persentase berkurangnya korban bencana alam (%)	na	0,08	0	0,07	15057,456	0,06	18164,12	0,06	21295,13	0,05	23819,36	0,05	39073,86	0,05	KKUPM	

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) /Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)	Kinerja	Rp. (000.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana	(4) Persentase pengurangan korban bencana alam (%)	na	0,08		0,07	15.057,46	0,06	18.164,12	0,06	21.295,13	0,05	23.819,36	0,05	39.073,86	0,05	KKUPM
Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat				0		98.012,79		102.175,39		109.021,74		110.942,44		105.821,14		
Tujuan 2.1. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah	3. Tingkat Pertumbuhan ekonomi	5,52	5,48		5,69		5,8		5,9		6,01		6,12		6,12	Perencanaan
	4. Tingkat inflasi	3,15	3,15		3,10		3,10		3,05		3,00		2,95		2,95	Statistik
	5. PDRB Perkapita	27.152	na		27.652		28.556		28.556		28.780		29.450		29.450	Statistik
	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,17	3,17		3,05		2,86		2,86		2,46		2,31		2,31	Tenaga Kerja
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian dan perikanan	5) Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	13,51	13,51		14,01		14,51		15,01		15,51		16,01		16,01	Pertanian
	6) Skor pola pangan harapan	85	86	0	86,8	30.756,39	88	29.794,39	89	31.870,39	90	31.308,39	91	31.308,39	91	Pangan
Program peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan						40.824,40		45.261,00		50.781,35		50.776,05		46.022,75		
	(5) Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	13,51	13,51		14,01		14,51		15,01		15,51		16,01		16,01	Pertanian
	(6) Skor pola pangan harapan	85	86	0	86,8	30.756,39	88	29.794,39	89	31.870,39	90	31.308,39	91	31.308,39	91	Pangan
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB	3,33	3,33		4,24		4,75		5,1		5,25		5,5		5,5	Pariwisata
Program Peningkatan produktivitas sketor akomodasi dan makan minum dalam PDRB	(7) Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB	3,33	3,33		4,24		4,75		5,1		5,25		5,5		5,5	Pariwisata

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) / Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	11,20	11,20		11,34		11,45		11,56		11,67		11,77		11,77	Perdagangan
Program Peningkatan produktivitas sektor perdagangan	(8) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	11,20	11,20		11,34		11,45		11,56		11,67		11,77		11,77	Perdagangan
Sasaran 2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	45,89	45,89	0	46,47	40.824,40	46,59	45.261,00	47,14	50.781,35	47,25	50.776,05	47,36	46.022,75	47,36	Perindustrian
Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	(9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	45,89	45,89	0	46,47	40.824,40	46,59	45.261,00	47,14	50.781,35	47,25	50.776,05	47,36	46.022,75	47,36	Perindustrian
Sasaran 2.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	10) Persentase pertumbuhan nilai investasi/investor (%)	1,5	1,5	0	1,5	5.725,00	1,7	5.780,00	1,8	5.830,00	1,9	5.880,00	2	5.930,00	2,2	Penanaman Modal, Koperasi, UMKM
Program Peningkatan Nilai Investasi Daerah	(10) Persentase pertumbuhan nilai investasi/investor (%)	1,5	1,5	0	1,5	5.725,00	1,7	5.780,00	1,8	5.830,00	1,9	5.880,00	2	5.930,00	2,2	Penanaman Modal, Koperasi, UMKM
Sasaran 2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11) TPAK	70,24	70,36		70,60		70,96		71,44		72,04		72,76		72,76	Tenaga Kerja
Program Peningkatan kualitas angkatan kerja	(11) TPAK	70,24	70,36		70,60		70,96		71,44		72,04		72,76		72,76	Tenaga Kerja
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis				0		465.350,89		485.272,83		538.533,95		583.883,82		637.776,48		
Tujuan 3.1 Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	7. IPM	75,42	75,54		75,64		75,74		75,84		75,94		76,04		76,04	Perencanaan

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) / Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target											Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	12) Harapan lama Sekolah	13,65	13,67	0	13,7	259.696,18	13,72	263.751,74	13,74	284.378,71	13,77	305.250,03	13,82	317.480,56	13,82	Pendidikan	
	13) Rata-rata Lama Sekolah	8,5	8,55		8,6		8,65		8,7		8,75		8,8		9	Pendidikan	
Program peningkatan kualitas Pendidikan						259.696,18		263.751,74		284.378,71		305.250,03		317.480,56			
	(12) Harapan lama Sekolah	13,65	13,67		13,7		13,72		13,74		13,77		13,82		13,82	Pendidikan	
	(13) Rata-rata Lama Sekolah	8,5	8,55		8,6		8,65		8,7		8,75		8,8		9	Pendidikan	
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14) Usia harapan Hidup	77,31	77,31	-	77,32	205.654,71	77,57	221.521,09	77,82	254.155,24	77,37	278.633,79	78,82	320.295,92	78,82	Kesehatan	
Program peningkatan derajat kesehatan	(14) Usia harapan Hidup	77,31	77,31		77,32	205.654,71	77,57	221.521,09	77,82	254.155,24	77,37	278.633,79	78,82	320.295,92	78,82	Kesehatan	
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan				-		244.154,11		258.928,00		262.448,55		288.554,05		311.390,03			
4.1. Mewujudkan pemerataan antar desa	8. Indeks Desa Mandiri	0,6406	0,6416		0,6426		0,6436		0,6446		0,6456		0,6463		0,6463	Permasdes	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	15) Indeks ketahanan sosial	0,644	0,645		0,646		0,647		0,648		0,649		0,650		0,650	Permasdes	
	16) Indeks ketahanan ekonomi	0,594	0,595		0,596		0,597		0,598		0,599		0,599		0,599	Permasdes	
	17) Indeks ketahanan lingkungan	0,684	0,685		0,686		0,687		0,688		0,689		0,690		0,690	Permasdes	
Program peningkatan kemajuan dan kemandirian desa	(15) Persentase desa tertib administrasi	0,644	0,645		0,646		0,647		0,648		0,649		0,650		0,650	Permasdes	
	(16) Persentase desa tertib administrasi	0,594	0,595		0,596		0,597		0,598		0,599		0,599		0,599	Permasdes	
	(17) Persentase desa tertib administrasi	0,684	0,685		0,686		0,687		0,688		0,689		0,690		0,690	Permasdes	
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga				-		188.773,35		142.620,85		181.879,16		216.632,79		260.288,85			

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) / Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.	9. Nilai kabupaten peduli HAM	79,25	79,41		79,41		79,41		79,41		79,41		79,51		79,51	Administrasi Pemerintahan
	10. Indeks Pembangunan Kebudayaan	76	76		77		78		79		80		80		80	Pariwisata
	11. Prestasi Pemuda dan Olahraga	20	20		40		40		60		80		100		100	Pemuda Olahraga
	12. Angka Kemiskinan	12,28	10,01		8,29-9,29		7,58-8,58		6,87-7,78		6,15-7,15		5,44-6,44		5,44-6,44	Statistik
	13. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	96,50	96,70		97,00		97,20		97,25		97,30		97,35		97,35	PP dan PA
	14. Indeks Reformasi Birokrasi	na	na		60		65		70		75		80		80	Administrasi Pemerintahan
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	230	175	0	140	52.905,00	135	3.067,45	130	14.160,00	125	14.250,00	120	14.500,00	120	KKUPM
	19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	85	85		86		87		88		90		92		92	KKUPM
	20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (100% = tidak ada kasus)	0	0		0		0		0		0		0		0	KKUPM
Program peningkatan kualitas keagamaan dalam keberagaman						52.905,00		3.067,45		14.160,00		14.250,00		14.500,00		
	(18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	230	175		140		135		130		125		120		120	KKUPM
	(19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	85	85		86		87		88		90		92		92	KKUPM
	(20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (100% = tidak ada kasus)	0	0		0		0		0		0		0		0	KKUPM

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) /Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	21) Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	76	87,63	0	87,7	14.102,50	88,1	15.507,75	88,5	17.053,53	90	18.753,89	90	19.624,27	90	Kebudayaan
	22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif (%)	12,85	13,00		13,15		13,30		13,45		13,60		13,75		13,75	Kebudayaan
Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan	(21) Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	76	87,63	0	87,7	14.102,50	88,1	15.507,75	88,5	17.053,53	90	18.753,89	90	19.624,27	90	Kebudayaan
	(22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif (%)	12,85	13,00		13,15		13,30		13,45		13,60		13,75		13,75	Kebudayaan
SASARAN 5.1.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	23) Jumlah prestasi pemuda di regional/ nasional/ internasional	10	10	0	20	12.169,23	20	3.375,00	30	3.435,58	40	3.495,99	50	4.560,00	50	Pemuda dan Olahraga
	24) Jumlah Prestasi Olahraga di regional/ nasional/ internasional	10	10		20		20		30		40		50		50	Pemuda dan Olahraga
						12.169,23		3.375,00		3.435,58		3.495,99		4.560,00		
Program peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	(23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/nasional /internasional	10	10		20		20		30		40		50		50	Pemuda dan Olahraga
	(24) Jumlah Prestasi Olahraga di regional/ nasional/ internasional	10	10		20		20		30		40		50		50	Pemuda dan Olahraga
Sasaran 5.1.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial	25) Pengeluaran Perkapita	10,93	11,32		11,98		12,46		13,35		14,12		15,45		15,45	Statistik
	26) Persentase penanganan PMKS	1,02	1,15		1,50		1,75		2,00		2,25		2,50		2,50	Sosial

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impak) /Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan kesejahteraan sosial	(25) Pengeluaran Perkapita	10,93	11,32		11,98		12,46		13,35		14,12		15,45		15,45	Statistik
	(26) Persentase penanganan PMKS	1,02	1,15		1,50		1,75		2,00		2,25		2,50		2,50	Sosial
SASARAN 5.1.5. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	27) IPG (Indeks Pembangunan Gender)	74,27	74,31	0	74,52	15.060,00	74,66	15.340,00	74,71	15.108,00	74,81	15.250,00	74,95	15.435,00	74,95	PP dan PA
	28) Kabupaten Layak Anak (skor)	370	732,11		742		752		762		770		780		780	PP dan PA
						15.060,00		15.340,00		15.108,00		15.250,00		15.435,00		
Program peningkatan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	(27) IPG (Indeks Pembangunan Gender)	74,27	74,31	0	74,52	15.060,00	74,66	15.340,00	74,71	15.108,00	74,81	15.250,00	74,95	15.435,00	74,95	PP dan PA
	(28) Kabupaten Layak Anak	370	732,11		742		752		762		770		780		780	PP dan PA
5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	15. Indeks Reformasi Birokrasi	na	na		63		65		70		75		80		80	
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas				0		80.060,89		90.450,18		116.962,00		149.776,81		190.310,08		
	29) Indeks SPBE	0	2,04		2,14		2,37		2,69		2,91		3		3	Kominfo
	30) Nilai SAKIP	57,52	62,38		63		65		70		75		80		80	Administrasi Pemerintahan
	31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	Keuangan
	32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	74,67	76,67		78,67		80,67		82,67		84,67		86,67		86,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	na	na		76,67		78,23		80,43		81,26		81,67		81,67	Administrasi Pemerintahan
	34) Maturitas SPIP	3	3		3		3		3		3		3		3	Pengawasan
	35) Indeks Arsip	49	67		75		79		81		83		85		85	Kearsipan

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan (impact) / Indikator Sasaran (impact) /Indikator Program Daerah (outcome)	Kondisi Awal			Target										Kon disi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab urusan
		2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
		Kinerja	Kinerja	Rp. (000.000).	Kinerja	Rp. (000.000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						80.060,89		90.450,18		116.962,00		149.776,81		190.310,08		
	(29) Indeks SPBE	0	2,04		2,14		2,37		2,69		2,91		3		3	Kominfo
	(30) Nilai SAKIP	CC	B		B		BB		BB		A		A		A	Administrasi Pemerintahan
	(31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	Keuangan
	(32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	74,67	76,67		78,67		80,67		82,67		84,67		86,67		86,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	(33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	na	na		76,67		78,23		80,43		81,26		81,67		81,67	Administrasi Pemerintahan
	(34) Maturitas SPIP	3	3		3		3		3		3		3		3	Pengawasan
	(35) Indeks Arsip	49	67		75		79		81		83		85		85	Kearsipan

Sumber : Baperlitbang, 2018

Keterangan :

KKUPM : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PP dan PA : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasdes : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Spasial)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Karanganyar merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Karanganyar akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

6.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Karanganyar Sesuai dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Kabupaten Karanganyar sebagai sentra/basis pengembangan industri pengolahan baik industri besar maupun mikro, kecil dan menengah, sentra/basis produk unggulan pertanian dan sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

RTRW Kabupaten Karanganyar direvisi pada tahun 2018, dengan tujuan umum penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tabel berikut merupakan data penggunaan lahan di Kabupaten Karanganyar :

Tabel VI.5.

Penggunaan Lahan pada Kabupaten Karanganyar

POLA RUANG	RTRW PERDA NO 1 TH 2013
	Luas (dalam peta) (Ha)
KAWASAN LINDUNG	
Kawasan yang Memberikan Perlindungan thdp Kawasan Bawahnya	
Hutan Lindung	6.704,54
Kawasan Resapan Air	3.132,29
Kawasan Perlindungan Setempat	
Sempadan Sungai	5.563,28

POLA RUANG	RTRW PERDA NO 1 TH 2013
	Luas (dalam peta) (Ha)
Kawasan Sekitar Danau/Waduk	86,93
Kawasan Konservasi	
Taman Wisata Alam	44,41
TAHURA	269,32
Kawasan Lindung Geologi	
Kawasan Sempadan Mata Air	336,49
Kawasan Cagar Budaya	472,43
KAWASAN BUDIDAYA	
Kawasan Hutan Produksi	
Hutan Produksi Tetap	139,71
Hutan Rakyat	5211,1
Kawasan Pertanian	
Kawasan pertanian lahan basah (didalamnya termasuk Kawasan Hortikultura)	20.341,38
Kawasan pertanian lahan kering (didalamnya termasuk Kawasan Peternakan)	8.292,55
Kawasan Perkebunan	5.261,76
Kawasan Peruntukan Industri	
Kawasan peruntukan industri	1.669,67
Kawasan Permukiman (didalamnya termasuk Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan)	
-Kawasan Permukiman Perkotaan	4.959,59
-Kawasan Permukiman Perdesaan	17.994,28
Waduk	227,65
Total	80.707,38

Sumber: RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013

Selanjutnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel VI.6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berfungsinya pusat-pusat perkotaan yang terintegrasi dan sinergis	Terbangunnya pusat-pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. mempercepat perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pelayanan perdesaan; b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan; c. mengarahkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, dan perdagangan pada kecamatan berkembang yang berada di jalur-jalur utama transportasi; d. mengarahkan pengembangan kegiatan pertanian dengan implementasi konsep agropolitan; dan e. mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya yang berbasis konservasi pada bagian Timur wilayah 	1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan
Kelancaran Aksesibilitas dan koneksi antar wilayah	Terbangunnya jaringan jalan dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan prasarana transportasi darat secara terpadu; b. mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan 	2. pembangunan prasarana utama serta mewujudkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dalam kabupaten Karanganyar maupun dengan daerah di luar Karanganyar	transportasi	<p>Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah bagian Barat;</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Kertosono;</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan kolektor sebagai jalan penghubung antar wilayah Wonogiri-Sragen;</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan sebagai jalur alternatif pariwisata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas jalan;</p> <p>f. mengembangkan sarana dan prasarana terminal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap peningkatan pergerakan manusia;</p> <p>g. mengembangkan sarana stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan mobilitas secara cepat dan murah;</p> <p>h. memaduserasikan arahan pola ruang daerah dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan</p> <p>i. mengembangkan jaringan jalan dan rel untuk angkutan barang yang terpadu guna menunjang kawasan industri dan pertambangan.</p>	keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
Pelestarian fungsi hutan lindung sebagai upaya mengurangi resiko bencana	Penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung	<p>a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air</p> <p>b. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;</p> <p>c. merehabilitasi kawasan lindung berupa pelestarian hutan lindung dan kawasan resapan air;</p> <p>d. mengendalikan pembangunan (eksisting) pada kawasan yang memiliki kerawanan bencana alam banjir dan gerakan tanah tinggi dan menengah;</p> <p>e. merehabilitasi kawasan lindung yang telah rusak dalam rangka mengembalikan ekosistem baik kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan kawasan lindung;</p> <p>f. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan kawasan lindung;</p> <p>g. mengembangkan ekowisata dan <i>agroforestri</i>;</p> <p>h. membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;</p> <p>i. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung konservasi kawasan lindung</p>	3. pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan
Produksi pertanian mantap berkelanjutan	kawasan pertanian terpadu mantap	<p>a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;</p> <p>b. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian;</p> <p>c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;</p> <p>d. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;</p> <p>e. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan</p> <p>f. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan</p>	4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pertanian pangan berkelanjutan.	
Berkembangnya kawasan wisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal	Berkembangnya potensi wisata budaya, alam, dan cara hidup masyarakat desa berbasis partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan objek wisata alam pegunungan sebagai daya tarik wisata yang utama; b. mengembangkan budaya masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya; c. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa wisata; d. mengembangkan, melestarikan dan memelihara peninggalan budaya, sejarah dan benda-benda purbakala maupun benda-benda bersejarah sebagai daya tarik wisata; e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; f. mengembangkan jalur penghubung satu kawasan wisata dengan kawasan lain, serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain 	5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; b. mengembangkan industri menengah dan besar yang berwawasan lingkungan; c. menempatkan kawasan peruntukan industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; d. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan industri agar tidak mengganggu kawasan peruntukkan pertanian; e. memanfaatkan dan mengembangkan ruang budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan lahan tanaman pangan berkelanjutan; dan f. mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. 	6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
Terwujudnya Kabupaten Karanganyar tanpa kesenjangan wilayah (Selatan dan Timur vs Barat)	Terbangunnya agropolitan di wilayah Timur dan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan prasarana transportasi darat berupa jaringan jalan dan rute pengangkutan barang hasil produksi agropolitan serta angkutan umum b. mengembangkan sarana transportasi darat berupa terminal dan angkutan umum bagi pengembangan kegiatan agrobisnis dan kegiatan pariwisata; c. mengembangkan sarana perekonomian yang mendukung pemasaran dan distribusi barang hasil produksi agropolitan berupa pasar dan/atau pertokoan; mengembangkan prasarana sumber daya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian. 	7. pengurangan kesenjangan wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan
Terpenuhinya kebutuhan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana wilayah permukiman yang berkelanjutan	Ketersediaan sarana prasarana penghasil layanan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, drainase, sistem persampahan, dan sistem air	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan prasarana energi alternatif dan jaringannya yang dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan domestik; b. mengembangkan prasarana jaringan telepon untuk mendukung keterbukaan aksesibilitas dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional; c. mengembangkan prasarana sumber daya air terutama pada jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas 	8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	limbah	<p>pertanian dan jaringan air bersih perkotaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perkotaan;</p> <p>d. mengembangkan prasarana wilayah terutama jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem air limbah untuk mendukung kelestarian lingkungan perkotaan; dan</p> <p>e. rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di bagian Timur.</p>	
Berkembangnya kegiatan industri, pertanian dan pariwisata di kawasan strategis	Tersedianya ruang strategis untuk kegiatan industri, pertanian dan pariwisata.	<p>a. menetapkan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri;</p> <p>b. menetapkan kawasan agropolitan wilayah untuk dapat melayani kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya; dan</p> <p>c. menetapkan objek-objek wisata strategis di wilayah bagian Timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian Barat wilayah.</p>	9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut

Sumber : Baperlitbang, 2018

Implikasi kajian RTRW pada RPJMD adalah untuk menentukan fokus sasaran kewilayahan yang akan diprioritaskan pada tahap pembangunan tahunan. Kabupaten Karanganyar memiliki irisan wilayah pengembangan dengan kabupaten/kota sekitar, sehingga berdampak pada rencana kerjasama antar daerah yang baik yaitu:

1. KSP Kawasan Perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKAWASANONOSRATEN);
2. Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung Kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah bagian Barat;
3. Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Kertosono;
4. Mengembangkan jaringan jalan kolektor sebagai jalan penghubung antar wilayah Wonogiri-Sragen;
5. Pengangkutan orang :
 - a. Tawangmangu – Magetan;
 - b. Sragen – Karanganyar – Wonogiri;
 - c. Surakarta – Klodran (Colomadu) – Tuban (Gondangrejo);
 - d. Tuban – Wonosari – Mojosongo – Surakarta;
6. Instalasi Pengolahan Air, Air baku Regional Solo Raya dengan memanfaatkan Bendungan Serba Guna Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri;
7. Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa pengendalian pendayagunaan pada CAT Karanganyar-Boyolali;

8. Jaringan jalan arteri primer yang ada dalam wilayah kabupaten meliputi :
 - a. ruas Jalan batas kota Surakarta-Palur;
 - b. ruas Jalan Palur-batas Kabupaten Sragen; dan
 - c. ruas Jalan Adi Sucipto – Bandara Adi Soemarmo;
9. Jaringan jalan tol yang ada dalam wilayah kabupaten meliputi : ruas Jalan tol Solo-Ngawi; pintu tol di Kecamatan Colomadu; pintu tol di Kecamatan Gondangrejo; dan pintu tol di Kecamatan Kebakkramat.
10. Jaringan jalan kolektor meliputi :
 - a. ruas jalan Palur - Papahan;
 - b. ruas jalan Basuki Rachmat;
 - c. ruas jalan Jendral Sudirman;
 - d. ruas jalan Urip Sumoharjo;
 - e. ruas jalan Bejen – batas Kabupaten Magetan;
 - f. ruas jalan Ngaliyan – batas Kabupaten Wonogiri;
 - g. ruas jalan Bejen – batas Kabupaten Sragen;
 - h. ruas jalan Kapten Mulyadi Karanganyar – Papahan
 - i. jalan lingkar utara Surakarta yang melewati di Kecamatan Gondangrejo, di Kecamatan Colomadu, di Kecamatan Jaten; dan
 - j. jalan Lingkar timur selatan Surakarta yang melewati di Kecamatan Kebakkramat dan di Kecamatan Jaten.

Berikut indikasi kewilayahan untuk mendukung program prioritas daerah RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023.

Tabel VI.7.

Indikasi Kewilayahan Program Prioritas Daerah RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yang masuk RPJMD 2018-2023

No.	Prioritas RPJMD	Indikasi Kewilayahan
1	2	3
1.	Pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan, dengan pembentukan desa wisata dan kawasan perdesaan berbasis pariwisata	Mendorong pengembangan kota-kota pariwisata di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Karanganyar, Tasikmadu dan Gondangrejo
2.	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Pengembangan pembangunan kota-kota sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah
2.	Pengembangan konektivitas yang mendukung pengembangan jalan tol Solo – Kertosono	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan pada kawasan-kawasan strategis
3.	Peningkatkan konektivitas di kawasan perbatasan	Pemeliharaan dan peningkatan jalan pada daerah terpencil
4.	Pengembangan sarana prasarana terminal	- Pemantapan terminal eksisting, yaitu Terminal Matesih, Terminal Tawangmangu, Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Jenawi, dan Terminal

No.	Prioritas RPJMD	Indikasi Kewilayahan
1	2	3
		Kemuning - Peningkatan terminal tipe C ke tipe B di Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Gondangrejo.
5.	Pengembangan elektrifikasi	Penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun
6.	Pengembangan rumah layak huni	Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana permukiman di perdesaan dan perkotaan
7.	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	- Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kabupaten bidang pertumbuhan ekonomi, - Penyusunan RTBL Kawasan Pertumbuhan Ekonomi, seperti Kota Colomadu, Jaten, Karanganyar, dan Tawangmangu
8.	Pengembangan irigasi	- Fasilitasi Pembangunan Waduk Gondang, Waduk Jlantah, dan embung. - Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada - Pembangunan irigasi dari air bawah tanah - Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk mensuplai kebutuhan irigasi
9	Pengembangan air baku	- Permbangunan jaringan air bersih dengan sistem perpipaan di perkotaan - Pembangunan jaringan perpipaan mandiri dari sumber air tanah dan air permukaan. - Pengembangan SPAM di seluruh kecamatan
10.	Pengembangan kualitas lingkungan hidup	- Pelestarian, pemulihan, dan pengkayaan kawasan lindung - Pemanjapan fungsi TPA Sukosari, peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah, dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. - Pengembangan sumur resapan pada setiap bangunan, - Peningkatan IPLT di Kaliboto
11.	Pengembangan industri	Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan industri
12.	Pengembangan pariwisata	Peningkatan jalur penghubung kawasan wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian
13.	Pengembangan peternakan	Pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.
14.	Pengembangan kawasan pertanian	Pelestarian pertanian lahan sawah terutama yang sudah ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan.

Sumber : RTRW Kab. Karanganyar 2013.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus memperhatikan kemampuan pendanaan dan indikasi rencana program Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 -2023 indikasi program terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan

Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karanganyar diterjemahkan / dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: **Sustainable Development Goals**), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambaran alokasi / penggunaan kapasitas *riil* kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, sedangkan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1.

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata	TAHUN (Rp.000)					
		Pertumbuhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
2	BELANJA	5,24	2.268.894.692	2.421.244.794	2.430.350.935	2.577.551.736	2.742.128.160	2.968.683.805
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,9	1.428.577.435	1.460.803.008	1.500.921.109	1.554.482.920	1.629.464.485	1.735.728.837
2.1.1	Belanja Pegawai	2,8	991.088.189	1.022.579.441	1.033.905.235	1.054.583.340	1.086.220.840	1.140.531.882
2.1.2	Belanja Bunga	0	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	0,29	95.504.356	67.134.000	78.448.020	82.370.421	88.591.442	96.722.843
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24,51	4.825.000	15.295.000	16.059.750	23.170.237	28.178.750	33.237.687
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16,44	17.419.192	20.947.211	26.237.275	31.819.551	38.731.326	44.014.643
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	5,51	317.240.698	332.347.356	343.770.829	360.039.371	385.242.127	418.721.782
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	7,26	851.264.447	960.441.786	929.429.826	1.023.068.816	1.112.663.675	1.232.954.968
2.2.1	Belanja Pegawai	-34,82	32.171.292	8.462.743	8.685.242	10.530.864	12.313.157	13.535.075
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,97	515.283.535	547.157.138	526.362.196	540.957.645	543.357.034	597.200.194
2.2.3	Belanja Modal	13	303.809.620	404.821.905	394.382.388	471.580.307	556.993.484	622.219.699

Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar, 2018 diolah

Tabel VII.2.

Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (dalam juta Rupiah)

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	Jumlah Pagu					1.398.665,35		1.396.445,70		1.522.968,39		1.655.907,32		1.828.151,92		1.828.151,92	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					913.690,50		751.401,48		831.819,12		930.431,33		1.079.073,24		1.079.073,24	
1.01.	Pendidikan					204.864,31		232.963,88		273.704,06		327.940,44		397.813,76		397.813,76	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.961,60	100	2.157,76	100	2.373,53	100	2.610,89	100	2.871,98	100	2.871,98	Disdikbud
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	8.161,77	100	8.977,95	100	9.875,75	100	10.863,32	100	11.949,66	100	11.949,66	Disdikbud
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	60	65	200,00	75	220,00	85	242,00	95	266,20	100	292,82	100	292,82	Disdikbud
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	770,00	100	847,00	100	931,70	100	1.024,87	100	1.127,36	100	1.127,36	Disdikbud
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%		100	62.880,50	100	69.168,55	100	76.085,41	100	83.693,95	100	92.063,35	100	92.063,35	Disdikbud
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini					11.183,83		12.092,18		13.080,87		14.157,40		15.330,00		15.330,00	Disdikbud
		APK PAUD	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini	%	78	79		80		81		82		83		83		
7	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF	%	100	100	2.569,80	100	2.826,78	100	3.109,46	100	3.420,40	100	3.762,44	100	3.762,44	Disdikbud
8	Program Wajib Belajar					83.536,81		96.713,66		120.049,34		153.551,80		177.229,40		177.229,40	Disdikbud

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan dasar	%	77	78		80		82		84		86		86		
		APK SD sederajat	%	100	100		100		100		100		100		100		
		APM SD sederajat	%	99,75	99,75		99,8		100		100		100		100		
		APK SMP sederajat	%	100	100		100		100		100		100		100		
		APM SMP sederajat	%	71,5	73		74		75		76		77		77		
		Angka Putus Sekolah SD	%	0,04	0,03		0,03		0,02		0,02		0,02		0,02		
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,8	0,14		0,8		0,7		0,6		0,5		0,5		
		Persentase sekolah SD kondisi ramah lingkungan baik	%	77	78		79		79,5		80		80		80		
Persentase sekolah SMP kondisi ramah lingkungan baik	%	77,5	79		80		81		82		82		82				
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat	%		75	33.600,00	80	39.960,00	83	47.956,00	86	58.351,60	88	93.186,76	88	93.186,76	Disdikbud
1.02	Kesehatan					402.635,20		286.340,03		310.972,41		314.319,49		376.504,46		376.504,46	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	879,00	100	1.671,24	100	1.810,48	100	1.951,22	100	2.091,96	100	2.091,96	Dinkes
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	2.175,00	100	3.242,80	100	2.802,00	100	1.930,00	100	2.113,00	100	2.113,00	Dinkes
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	50,00	100	790,50	100	886,00	100	981,5	100	1.077,00	100	1.077,00	Dinkes
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	547,00	100	905,00	100	1.010,00	100	1.115,00	100	1.220,00	100	1.220,00	Dinkes

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
5	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	10	0	0,00	14	175.481,37	19	186.144,59	24	184.555,65	28	202.079,68	28	202.079,68	Dinkes
6	Program Kesehatan Masyarakat					0,00		30.006,50		31.741,05		33.632,25		35.018,05		35.018,05	Dinkes
		Nilai IKS Kabupaten	nilai	0	0		0,3		0,4		0,6		0,8		0,8		
		Cakupan ibu risiko tinggi kebidanan	%	20	0		21		22		23		24		24		
		Cakupan komplikasi kebidanan	%	20	0		21		22		23		24		24		
		Cakupan komplikasi pada neonatus	%	15	0		15		15		15		15		15		
		Angka kesakitan bayi	%	73	0		65		60		50		50		50		
		Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0		<0,5		<0,4		<0,3		<0,2		<0,2		
		Persentase kadarzi	%	81	0		83		84		85		85		85		
		Persentase stunting	%	13,8	0		<24		<23		<22		<21		<21		
Persentase Desa STBM	%	30	0		100		100		100		100		100				
7	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	10	0	0,00	25	69.642,63	30	80.703,29	35	83.985,37	40	123.929,78	40	123.929,78	Dinkes
8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					0,00		4.600,00		5.875,00		7.150,00		8.975,00		8.975,00	Dinkes
		Prevalensi HIV	per 1000 pddk	< 0,5	0		1		1		1		1		1		
		(succes rate/SR) TBC	%	0	0		90		90		90		90		90		
		API malaria	per 1000 pddk	0,03	0		1		1		1		1		1		
		AFP rate	per 100 rb pddk < 15 th	3,5	0		2		2		2		2		2		
		Dsicarded campak	per 100 rb pddk	2,33	0		2		2		2		2		2		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Insidensi Hipertensi	kasus	9682	0		90000		100000		125000		150000		150000			
		Insidensi ODGJ	kasus	333	0		1250		1500		1750		2000		2000			
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat dasar di puskesmas	%	90	90	154.355,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai IKS Kabupaten	nilai	0,201	0,205	183.058,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	terjaminnya mutu dan keamanan sediaan farmasi di fasyankes	%	0	5	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	berfungsinya P4TO	%	20	50	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					650,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinkes	
		Persentase rumah tangga sehat	%	90,23	90		0		0		0		0		0			
		Cakupan desa siaga aktif	%	0	100		0		0		0		0		0			
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					5.741,00		0		0		0		0		0	Dinkes, Tawangmangu, Karanganyar	
		Cakupan keluarga sadar gizi	%	95	82		0		0		0		0		0			
		Prevalensi gizi buruk	%	0,03	0,5		0		0		0		0		0			
		Prevalensi balita stunting	%	11,77	25		0		0		0		0		0			
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100		0		0		0		0		0			
15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	persentase desa STBM	%	30	50	2.856,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					13.617,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinkes, setda, Karanganyar	
		Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani	%		100		0		0		0		0		0			
		Cakupan universal child immunization (UCI Desa)	%	98,3	98,3		0		0		0		0		0			

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Cakupan pelayanan P2PTM (HT, DM, ODGJ) sesuai standar		100	100		0		0		0		0		0			
		Cakupan pelayanan P2PM (DBD, TB, HIV, IMS, Malaria, Kusta, Ispa, Diare, Leptospirosis, Filariasis) sesuai standar		100	100		0		0		0		0		0			
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	%		100		0		0		0		0		0			
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		100		0		0		0		0		0			
17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu pelayanan	%	32	41	1.275,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
						16.554,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan	%	100	100		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes, setda	
		Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	%		100		0		0		0		0		0			
19	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah faskes primer puskesmas dengan kondisi standar	%	7	11	19.697,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
20	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	0	50	626,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes	
21	Program peningkatan					140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinkes	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	pelayanan kesehatan anak	Cakupan pelayanan anak balita sesuai standar	%	95	90		0		0		0		0		0		
		Cakupan penjarangan siswa kelas 1, 7	%	100	100		0		0		0		0		0		
22	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	91	91	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinkes
23	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan					100,00											Dinkes
		Cakupan PIRT yang mendapatkan pelayanan rekomendasi ijin edar	%		100		0		0		0		0		0		
24	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan rumah makan dan restoran yang mendapatkan pelayanan sertifikat laik sehat	%		100		0		0		0		0		0		Dinkes
						256,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Cakupan pelayanan ibu hamil K4 sesuai standar	%	95	95		0		0		0		0		0		
		Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100		0		0		0		0		0		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100		0		0		0		0		0		
		Persentase komplikasi neonatal ditangani	%	99	100		0		0		0		0		0		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					250.093,52		182.408,05		196.520,05		232.062,05		247.569,05		247.569,05	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	2.062,65	100	2.600,00	100	2.600,00	100	2.600,00	100	2.600,00	100	2.600,00	DPUPR
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	90.910,73	100	101.089,00	100	101.089,00	100	101.089,00	100	101.089,00	100	101.089,00	DPUPR
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		80	109,70	80	150,00	80	150,00	80	150,00	80	150,00	80	150,00	DPUPR

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	220,00	100	915,00	100	965,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	DPUPR
5	Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	%		0	0,00	72	159,05	73	166,05	74	173,05	75	180,05	75	180,05	DPUPR
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan penataan lingkungan	Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah	%		0	0,00	83	43.595,00	85	57.750,00	86	88.250,00	88	98.750,00	88	98.750,00	DPUPR
7	Program tata ruang, jasa konstruksi, dan pengendalian mutu	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%		0	0,00	80	7.400,00	81	2.300,00	82	2.300,00	83	2.300,00	83	2.300,00	DPUPR
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66	67	13.473,73	70	26.500,00	73	31.500,00	75	36.500,00	77	41.500,00	77	41.500,00	DPUPR
9	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	69	71	85.188,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
10	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	20	21	13.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
11	Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	18	19	5.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
12	Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	60	61	2.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
13	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase meningkatnya pelayanan pembangunan	%	80	80	355,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
14	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	80	80	1.926,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
15	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak	%	80	81	18.136,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
16	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	60	61	9.095,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
17	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku	%	80	80	4.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
18	Program perencanaan Tata Ruang					1.859,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	dpupr, baperitbang
		Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	78	79			0		0		0		0		0	
		Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%		100			0		0		0		0		0	
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					1.464,61		1.708,70		1.803,57		1.589,43		1.600,05		1.600,05	
1	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,12	0,11	349,88	0,1	1.450,00	0,09	1.545,00	0,08	1.320,00	0,07	1.365,00	0,07	1.365,00	DISHUB PKP
2	Program pengelolaan areal pemukiman	Rasio Tempat Pemukiman Umum Per Satuan Penduduk.	rasio	859,3	860	89,73	861	258,70	862	258,57	863	269,43	864	235,05	864	235,05	DISHUB PKP

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase meningkatnya Lingkungan Sehat	%	80	80	1.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPUPR
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					43.972,68		34.477,69		34.959,37		39.917,22		40.140,37		40.140,37	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	713,50	100	784,85	100	863,34	100	949,90	100	1.044,89	100	1.044,89	satpol PP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	106,00	100	441,00	100	2.105,10	100	4.049,30	100	79,20	100	79,20	satpol PP
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%	100	100	195,00	100	214,50	100	236,00	100	260,00	100	286,00	100	286,00	satpol PP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	215,00	100	536,50	100	560,15	100	586,00	100	614,60	100	614,60	satpol PP
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	40,00	0	0,00	100	25,00	0	0,00	100	30,00	100	30,00	satpol PP
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	9.554,30	100	8.749,73	100	9.642,00	100	10.605,80	100	11.644,90	100	11.644,90	satpol PP
7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio linmas terhadap jumlah penduduk	%	0,68	0,65	125,00	0,65	4.563,30	0,65	6.014,20	0,67	7.508,80	0,68	8.052,72	0,68	8.052,72	satpol PP
8	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda	%	80	81	565,00	82	678,50	82	636,35	84	850,02	85	769,97	85	769,97	satpol PP
9	Program peningkatan					453,53		793,39		2.761,67		1.275,36		1.417,40		1.417,40	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	2,5	2,5		2,5		2,5		3,2		3,2		3,2		satpol PP
		Jumlah SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran)/ BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk	%	0	0		0		40		40		41		41		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	401,00	100	491,65	100	535,67	100	583,45	100	637,90	100	637,90	kesbangpol
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	150,44	100	7.464,65	100	966,90	100	993,80	100	1.026,00	100	1.026,00	kesbangpol
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%	0	0	0,00	0	10,00	97	10,00	98	10,00	98	10,00	98	10,00	kesbangpol
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0,00	0	250,00	97	250,00	98	250,00	98	250,00	98	250,00	kesbangpol
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	14,56	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	kesbangpol
6	Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%		0	0,00	90	1.419,63	90	1.704,74	95	1.942,34	95	2.209,70	95	2.209,70	kesbangpol
7	Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%		0	0,00	90	1.530,00	90	1.836,00	95	2.203,00	95	2.645,00	95	2.645,00	kesbangpol
8	Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%		0	0,00	90	1.275,00	90	1.335,00	95	1.810,00	95	2.845,00	95	2.845,00	kesbangpol
9	Program peningkatan					2.661,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	kesbangpol,

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)			
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%		100		0		0		0		0		0		jatipuro, jatiyoso, jumantono, matesih, tawangmangu, ngargoyoso, karanganyar, karangpandan, tasikmadu, jaten, colomadu, gondangrejo, kebakkramat, mojogedang, kerjo, jenawi		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100		0		0		0		0		0				
10	Program pengembangan wawasan kebangsaan					6.097,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	kesbangpol, setda, jatipuro, jatiyoso, jumantono, matesih, tawangmangu, ngargoyoso, karanganyar, karangpandan, tasikmadu, jaten, colomadu, gondangrejo, kebakkramat, mojogedang, kerjo, jenawi		
		Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	90		0		0		0		0		0				
		Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%		100		0		0		0		0		0				
		Persentase wilayah tertib Perda	%		100		0		0		0		0		0				
11	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					1.925,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	kesbangpol, setda		
		Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	90	350,00		0		0		0		0		0			
		Cakupan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%		100	1.575,00		0		0		0		0		0			
12	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	78	79	475,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	kesbangpol

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	824,90	100	945,00	100	1.043,00	100	1.150,95	100	1.259,59	100	1.259,59	BPBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.552,78	100	445,00	100	487,00	100	620,50	100	630,00	100	630,00	BPBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		100	30,00	100	60,00	100	75,00	100	75,00	100	100,00	100	100,00	BPBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	75,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	BPBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	40,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	BPBD
6	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam					2.298,33		3.690,00		3.737,25		4.058,00		4.452,50		4.452,50	BPBD, jaten, gondangrejo
		Prosentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	50	52		54		56		58		60		60		
		Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	55	60		65		70		75		80		80		
		Jumlah Relawan Bencana	%	0,2	0,25		0,3		0,35		0,4		0,45		0,45		
		Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	1,27	2		2		2		2		2		2			
		Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	91	92		93		94		95		95		95			
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		100		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		100	10.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Tawangmangu
1	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	1,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Jaten
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Jenawi
1.06.	Sosial					10.660,18		13.503,12		13.859,66		14.602,71		15.445,55		15.445,55		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	534,00	100	616,50	100	672,50	100	723,00	100	777,50	100	777,50		Dinsos
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	5.390,00	100	825,00	100	460,00	100	480,00	100	485,00	100	485,00		Dinsos
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	115,00	100	125,00	100	135,00	100	145,00	100	155,00	100	155,00		Dinsos
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	225,00	100	195,00	100	202,50	100	210,00	100	217,50	100	217,50		Dinsos

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
5	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial					0,00		4.881,78		5.217,24		5.664,24		6.020,95		6.020,95	Dinsos	
		Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	0	0	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			0,5
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	-	0	0,00	100		100		100		100		100			100
		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%		0	0,00	94,64		95,76		96,88		98		98		98	
6	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial					0,00		6.859,84		7.172,42		7.380,47		7.789,60		7.789,60	Dinsos	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	0	0	100		100		100		100		100			100
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	0	0,00	100		100		100		100		100			100
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	0	0,00	100		100		100		100		100			100
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	0	0,00	100		100		100		100		100			100
		Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	-	0	0,00	100		100		100		100		100			100
		Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%		0	0,00	100		100		100		100		100			100

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,5	0,5	1.019,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				2.182,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinsos, setda
		Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
10	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
11	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	100	663,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					309.795,22		378.684,87		392.862,05		408.131,34		464.527,80		464.527,80		
2.01.	Tenaga Kerja					4.757,50		9.722,84		10.293,06		8.115,66		9.214,00		9.214,00		
1	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja					0,00		9.167,34		9.694,01		7.469,30		8.516,24		8.516,24		Disdagnakerkop
		Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	78,56	0		79,82		80,46		81,1		81,75		81,75			
		Prosentase tenaga kerja yang diterima kerja	%	84,71	0		85,98		86,63		87,28		87,93		87,93			
2	Pogram Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					535,00		555,50		599,05		646,36		697,76		697,76		Disdagnakerkop
		Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	65	67,5		70		72..5		75		77,5		77,5			
		Persentase kenaikan Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)	%		8		8		8		8		8		8			
		Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100		100		100		100		100		100			
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	78,56	79,19	3.502,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Disdagnakerkop
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang diterima kerja	%	84,71	85,34	620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Disdagnakerkop
5	Program transmigrasi regional	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Disdagnakerkop
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1.016,92		2.160,00		2.370,50		2.598,00		2.813,00		2.813,00		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	367,89	100	524,00	100	637,00	100	727,00	100	827,00	100	827,00		DP3APPKB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	81,11	100	265,00	100	272,50	100	320,00	100	360,00	100	360,00		DP3APPKB

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	60,00	100	95,00	100	125,00	100	155,00	100	170,00	100	170,00	DP3APPKB
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%				70	150,00	75	210,00	80	270,00	85	330,00		330,00	DP3APPKB
5	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan KDRT	%				70	470,00	75	470,00	80	470,00	85	470,00	85	470,00	DP3APPKB
6	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	tahun				70	656,00	75	656,00	80	656,00	85	656,00		656,00	DP3APPKB
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan					40,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DP3APPKB, Mojogedang
		Pengembangan kabupaten layak anak			0		0		0		0		0		0		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatkannya lembaga PUG aktif	%		0	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DP3APPKB
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					306,61											DP3APPKB, jatipuro, jatiyoso, jumantono, jumapolo, matesih, ngargoyoso, karanganyar, karangpandan, tasikmadu, jaten, colomadu, gondangrejo.
		APBD yang responsif gender	%		0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab			
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)				
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
						131,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		mojogedang, jenawi		
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kompetensi perempuan diberbagai sektor	%		0	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		DP3APPKB, tawangmangu, karanganyar		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	4,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
2.03.	Pangan					891,24		1.504,00		690,80		708,80		725,80		725,80				
1	Program Peningkatan Ketahanan pangan					891,24		1.504,00		690,80		708,80		725,80		725,80		Dispartan		
		Ketersediaan energi per kapita	kal/kapita	1809,9	1.810	1.859		1.907		1.956		2.004		2.004						
		Ketersediaan protein per kapita	kal/kapita	57,59	58	59		59		59		59		59						
		Pangan segar tersertifikasi	produk		2		4		5		6		7		7					
2.04.	Pertanahan					2.970,80		0,00		30.300,00		0,00		350,00		0,00		8.132,57	0,00	8.132,57
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					2.970,80		30.300,00		350,00		400,00		8.132,57		8.132,57		setda, dishub pkp, tasikmadu, jenawi, dinkes, dpupr		
		Cakupan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%		100	100		100		100		100		100		100				
		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		5	0		0		0		0		0		0				
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	0		0		0		0		0		0				
		Persentase meningkatnya fasilitas umum	%	80	80	0		0		0		0		0		0				
2.05.	Lingkungan Hidup					13.795,39		36.307,14		36.749,14		41.526,14		37.788,14		37.788,14				
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	495,53	100	553,14	100	553,14	100	553,14	100	553,14	100	553,14		DLH		
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	36,75	100	13.065,00	100	13.065,00	100	13.065,00	100	13.065,00	100	13.065,00		DLH		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		75	75,00	80	100,00	85	150,00	90	200,00	90	200,00	90	200,00		DLH		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	239,90	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	DLH
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%		62	832,90	64	4.482,00	64	6.040,00	65	4.650,00	70	4.700,00	70	4.700,00	DLH
6	Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter		12	274,65	14	607,00	16	2.021,00	18	1.643,00	20	1.785,00	20	1.785,00	DLH
7	Program penataan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%		0	0,00	75	495,00	80	510,00	85	725,00	90	540,00	90	540,00	DLH
8	Program pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%		0	0,00	53	12.925,00	59	11.750,00	71	16.700,00	76	14.150,00	76	14.150,00	DLH
9	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Prosentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%		80	272,33	80	350,00	80	375,00	80	300,00	80	350,00	80	350,00	DLH
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					6.773,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DLH, Disdagnakerkop ukm
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	47	53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	75	80	555,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DLH

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
12	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam					375,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DLH, setda
		Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	75	80	0		0		0		0		0		0	
		Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	%		100	0		0		0		0		0		0	
13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					1.536,05		3.430,00		1.985,00		3.390,00		2.145,00		2.145,00	DLH, Dishub pkp
		Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter		12	0		0		0		0		0		0	
		Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota)	%	32,44	33,44	34,44		35,44		37		39		39		39	
14	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%		70	2.309,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dishup PKP
15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					3.508,04		6.391,40		11.563,71		11.585,81		9.850,85		9.850,85	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	826,83	100	1.401,89	100	1.616,66	100	1.872,97	100	2.192,24	100	2.192,24	Dukcapil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	297,22	100	396,20	100	4.852,14	100	4.022,23	100	1.209,33	100	1.209,33	Dukcapil

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	255,00	100	306,45	100	367,78	100	441,28	100	441,28	Dukcapil
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	79,00	100	63,00	100	77,50	100	85,50	100	139,00	100	139,00	Dukcapil
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan		%			2.304,99		4.275,30		4.710,95		5.237,34		5.869,00		5.869,00	Dukcapil, Karanganyar
		cakupan penerbitan kartu keluarga	%	95,5	95,6	96,00	96,50	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
		cakupan penerbitan ktp el	%	97,5	97,5	98,00	98,50	99,00	99,00	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	
		cakupan penerbitan akte kelahiran penduduk usia anak	%	84,94	91	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		cakupan penerbitan akte kematian	%	50	50	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
		cakupan penerbitan kia	%	17,5	17,5	20,00	22,50	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
		cakupan validasi database kependudukan	%	87,5	87,5	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
		Pesentase wilayah tertib Perda	%		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					244.730,77		235.640,84		262.082,45		272.433,39		322.250,47		322.250,47	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	181,80	100	288,80	100	338,30	100	374,30	100	408,30	100	408,30	dispermades
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	1.129,20	100	5.279,00	100	2.413,50	100	709,50	100	3.164,00	100	3.164,00	dispermades
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0,00	100	205,00	100	213,00	100	220,00	100	227,50	100	227,50	dispermades

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	50,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	dispermades	
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					226.866,62		228.293,04		257.302,65		269.117,59		316.180,67		316.180,67	Dispermades, Kecamatan	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	100		0		0		0		0		0			0
		Persentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%		66		69		72		75		78		78			78
6	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase kehadiran musrenbang	%	100	100		0		0		0		0		0		dispermades	
						0,00		880,00		985,00		1.067,00		1.180,00		1.180,00		
		Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%		0		100		100		100		100		100			100
7	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%		0		3		3		3		3		3		dispermades	
						0,00		685,00		820,00		935,00		1.080,00		1.080,00		
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%		0		62		64		65		67		67			
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%		85		0		0		0		0		0		dispermades, jatipuro, tawangmangu, karanganyar	
						2.080,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	10,00	0		0		0		0		0		
9	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%		60	140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	dispermades
						12.697,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	dispermades, setda, jatipuro, jatiyoso, jumantono, jumapolo, matesih, tawangmangu, ngargoyoso, karanganyar, karangpandan, tasikmadu, jaten, colomadu, gondangrejo, mojongedang, kebakkramat, kerjo, jenawi
10	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%		100		0		0		0		0		0		
		Cakupan peningkatan kapasitas apaaratur pemerintah desa	%		100		0		0		0		0		0		
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		100		0		0		0		0		0		
						1.316,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendes/ Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%		3		0		0		0		0		0		dispermades, setda, jatipuro, ngargoyoso, karanganyar, bkd
		cakupan peningkatan penyelenggaraan pendes/ kelurahan	%		100		0		0		0		0		0		
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		100		0		0		0		0		0		
		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%		100		0		0		0		0		0		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
12	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	183,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Tawangmangu, Karanganyar, Karangpandan, Jaten, Kebakkramat, Kerjo
13	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		100	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Karangpandan
14	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Kebakkramat
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					5.702,15		2.557,00		8.213,59		8.213,59		8.373,59		8.373,59	
1	Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi peserta KB/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%		0	0,00	67	1.112,00	69	6.768,59	72	6.768,59	74	6.768,59	74	6.768,59	DP3APPKB
2	Program Pengendalian Penduduk	Rasio akseptor KB	%		0	0,00	67	1.445,00	69	1.445,00	72	1.445,00	74	1.445,00	74	1.445,00	DP3APPKB
3	Program Keluarga Berencana	persentase peserta KB Baru dan KB Aktif	%		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DP3APPKB
4	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase KB MKJP dan KB Pria	%		0	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DP3APPKB
5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Un meet need dan angka Drop out	%		0		0		0		0		0		0		DP3APPKB, Tawangmangu, Karanganyar
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Berkembangnya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	%		0	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	160,00	0	160,00	DP3APPKB
7	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Melembaganya Tribina	%		0	660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DP3APPKB
8	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Prosentase Tribina dan UPPKS Aktif	%		0	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DP3APPKB
9	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	3.909,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Tawangmangu
2.09.	Perhubungan					3.873,02		11.861,41		12.465,39		14.050,67		14.738,21		14.738,21	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	288,29	100	384,00	100	479,50	100	578,00	100	573,00	100	573,00	DISHUB PKP
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	252,20	100	1.301,40	100	2.337,28	100	2.558,54	100	1.446,24	100	1.446,24	DISHUB PKP
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	DISHUB PKP
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	159,16	100	270,00	100	270,00	100	270,00	100	270,00	100	270,00	DISHUB PKP
5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar	%	10	10	684,24	20	6.792,44	30	6.209,33	40	7.232,39	50	8.444,27	50	8.444,27	DISHUB PKP
		Persentase pemasangan rambu-rambu	%	55	65		71		77		83		89		89		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	125	134		141		148		156		163		163			
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%		50	321,53	52	375,00	53	390,00	55	410,00	60	440,00	60	440,00		DISHUB PKP
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang melalui terminal pertahun	orang	2.050.000	2.060.000	702,98	2.080.000	843,57	2.100.000	1.012,28	2.120.000	1.214,74	2.150.000	1.457,69	2.150.000	1.457,69		DISHUB PKP
8	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		59	758,50	62	800,00	64	796,00	67	801,00	70	1.106,00	70	1.106,00		DISHUB PKP
9	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%		1	413,00	1	995,00	2	871,00	2	886,00	3	901,00	3	901,00		DISHUB PKP
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase pemasangan rambu-rambu	%		65	293,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Dishub PKP
2.10.	Komunikasi dan Informatika					1.657,10		6.649,96		8.261,96		9.360,96		10.483,96		10.483,96		
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	220,60	100	449,00	100	449,00	100	449,00	100	449,00	100	449,00		Diskominfo
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	134,60	100	515,50	100	515,50	100	515,50	100	515,50	100	515,50		Diskominfo
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	88,00	100	240,00	100	240,00	100	240,00	100	240,00	100	240,00		Diskominfo
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	101,00	100	110,00	100	110,00	100	110,00	100	110,00	100	110,00		Diskominfo
5	Program Pengembangan					306,70		797,00		944,00		986,00		1.038,00		1.038,00		Diskominfo

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)			
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase website daerah yang terupdate (DIP)	%	61,9	69,05		78,57		85,71		92,86		100		100				
		Persentase KIM aktif	%	35,29	47,06		58,82		76,47		88,24		100		100				
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase media massa yang bekerjasama dengan PEMKAB	%	55	55	806,20	55	1.439,00	60	1.449,00	60	1.465,00	60	1.495,00	60	1.495,00		Diskominfo	
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					0,00		3.099,46		4.554,46		5.595,46		6.636,46		6.636,46		Diskominfo	
		Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	0	0		50,00		60,00		70,00		85,00		85,00		85,00		
		Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	0	0		35,00		40,00		45,00		50,00		50,00		50,00		
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					255,00		705,50		776,05		853,66		939,02		939,02			
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM					0,00		705,50		776,05		853,66		939,02		939,02		Disdagnakerkop	
		Jumlah koperasi mengikuti pameran	%	21,44	0		21,88		22,28		22,51		22,69		22,69		22,69		
		Prosentase Koperasi yang Melaksanakan ART	%	5,06	0		9,21		11,22		13,21		15,18		15,18		15,18		
		Prosentase pertumbuhan usaha baru	%	12,01	0		14,4		15,12		15,88		16,67		16,67		16,67		
		Prosentase usaha mikro yang dibina	%	4,13	0		4,55		4,78		5,02		5,27		5,27		5,27		
2	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif					210,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Disdagnakerkop	
		Prosentase pertumbuhan Usaha baru	%	12,01	13,17		0		0		0		0		0		0		
		Prosentase usaha mikro yang dibina	%	4,13	0		0		0		0		0		0		0		
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Disdagnakerkop	
		Prosentase Koperasi Sehat	%	21,44	21,6		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Koperasi yang melaksanakan ART	%	5,06	7,14		0		0		0		0		0		0		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	%			110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	%			485,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
2.12.	Penanaman Modal					2.486,47		2.570,00		2.851,00		3.059,10		3.326,00		3.326,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	750,00	100	825,00	100	910,00	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.100,00	DPMPTSP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	122,50	100	135,00	100	148,00	100	162,60	100	181,00	100	181,00	DPMPTSP
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	75,00	100	82,50	100	90,00	100	102,50	100	110,00	100	110,00	DPMPTSP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%	100	100	40,00	100	95,00	100	110,00	100	120,00	100	130,00	100	130,00	DPMPTSP
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100,00	100	62,50	100	68,00	100	74,00	100	155,00	100	155,00	DPMPTSP
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentasi Peningkatan jumlah investor	%	9	10	1.019,00	11	1.115,00	12	1.200,00	13	1.265,00	14	1.285,00	14	1.285,00	DPMPTSP
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	100	379,97	100	255,00	100	325,00	100	335,00	100	365,00	100	365,00	DPMPTSP, setda, jatipuro, jatiyoso, jumantono, jumapolo,

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)			
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	matesih, karanganyar, tasikmadu, colomadu, gondangrejo, mojongedang, kerjo, jenawi	
		Cakupan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	%		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		100		0		0		0		0		0		0		
8	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Jatipuro
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga					12.108,55	120,00	15.605,00	180,00	16.555,00	240,00	17.475,00	300,00	16.485,00	300,00	16.485,00			
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					1.058,46		2.660,00		2.800,00		2.940,00		3.080,00		3.080,00	Disparpora, setda, jatipuro, ngargoyoso, tawangmangu, karanganyar, jaten, gondangrejo, jenawi		
		Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%		20		40		60		80		100		100				
		Cakupan peran serta kepemudaan	%		100		0		0		0		0		0			0	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		0		
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					1.672,89		4.570,00		5.120,00		5.630,00		5.260,00		5.260,00	Disparpora, setda, jumantono, jumapolo, karanganyar, jaten, kerjo		
		Persentase cabang olahraga yang terbina	%		20		40		60		80		100		100				
		Cakupan pembinaan dan pemasarakatan olahraga	%		100		0		0		0		0		0			0	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		0		
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga					9.377,20		8.375,00		8.635,00		8.905,00		8.145,00		8.145,00	Disparpora, dpupr		
		Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%		20		40		60		80		100		100				
		Persentase meningkatnya sarana prasarana olahraga	%		80	80		0		0		0		0		0			

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
2.14.	Statistik					110,00		160,00		200,00		250,00		312,50		312,50	
1	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100	110,00	100	160,00	100	200,00	100	250,00	100	312,50	100	312,50	Diskominfo
2.15.	Persandian					85,00		545,00		1.050,00		555,00		560,00		560,00	
1	Program Persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%			85,00		545,00		1.050,00		555,00		560,00		560,00	Diskominfo
2.16.	Kebudayaan					8.813,00	159,00	7.199,93	162,00	9.191,00	164,00	9.759,85	166,00	11.082,09	166,00	11.082,09	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya					1.054,67		2.057,43		3.534,25		3.537,43		4.237,43		4.237,43	Disdikbud, tawangmangu
		Persentase pelestarian seni dan budaya	%	83	83		84		85		86		87		87		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					4.723,33		5.142,50		5.656,75		6.222,43		6.844,67		6.844,67	Disdikbud, jumapolo
		Persentase ragam budaya yang dikelola	%		70		75		77		78		79		79		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					2.635,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Disdikbud, karanganyar
		Persentase ragam budaya yang dikelola	%		70		0		0		0		0		0		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian seni dan budaya	%	78	79	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disdikbud
2.17.	Perpustakaan					2.254,88		8.053,85		5.962,40		6.083,72		6.244,60		6.244,60	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	395,53	100	636,00	100	674,80	100	711,12	100	752,00	100	752,00	Disarpus
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	344,00	100	1.450,25	100	455,00	100	480,00	100	510,00	100	510,00	Disarpus

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	0	0,00	100	102,00	100	105,00	100	110,00	100	120,00	100	120,00	Disarpus
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	51,60	100	11,60	100	11,60	100	11,60	100	11,60	100	11,60	Disarpus
5	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase perpustakaan aktif	%		100	471,11	100	1.785,00	100	1.840,00	100	1.895,00	100	1.950,00	100	1.950,00	Disarpus
6	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan					492,64		2.676,00		2.736,00		2.736,00		2.801,00		2.801,00	Disarpus
		Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0	0		20		20		20		20		20		
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standard	%	100	100	500,00	100	1.393,00	100	140,00	100	140,00	100	100,00	100	100,00	Disarpus
2.18.	Kearsipan					779,40		751,00		3.236,00		1.102,00		1.208,00		1.208,00	
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%		100	295,00	100	231,00	100	2.517,00	100	323,00	100	324,00	100	324,00	Disarpus
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	70	75	394,40	79	520,00	80,00	719,00	90,00	779,00	100	884,00	100	884,00	Disarpus
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	70	75	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Disarpus
3	URUSAN PILIHAN					29.354,02		109.862,07		108.861,87		107.842,01		85.353,61		85.353,61	
3.01.	Kelautan dan Perikanan					1.408,30		6.912,45		7.150,00		7.505,30		7.921,97		7.921,97	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	302,08	100	565,10	100	447,00	100	536,40	100	643,60	100	643,60	Disnakan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	150,01	100	4.779,40	100	4.834,00	100	4.899,80	100	4.979,60	100	4.979,60	Disnakan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		5	11,97	10	114,30	15	137,00	20	164,40	25	197,20	25	197,20	Disnakan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	91,00	100	50,00	100	55,00	100	60,00	100	65,00	100	65,00	Disnakan
5	Program Pengembangan Usaha Perikanan					0,00		1.403,65		1.677,00		1.844,70		2.036,57		2.036,57	Disnakan
		Produksi benih ikan	Ekor		0		39.577.463		40.369.012		41.176.392		41.999.920		41.999.920		
		Prosentase pembudidaya yang dbina	Ekor		0		30		45		60		75		75		
		Cakupan perairan umum yang direstocking	%		0		5		5		5		5		5		
		Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%		0		62		75		87		100		100		
6	Program pengembangan budidaya perikanan					753,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Disnakan
		Produksi benih ikan	Ekor	38040622	38801434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prosentase pembudidaya yang dbina	%	15,65	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program pengembangan perikanan tangkap	Cakupan perairan umum yang direstocking	%		5	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disnakan
8	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%		50	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disnakan
3.02.	Pariwisata					6.806,40		32.863,60		31.357,70		33.484,70		35.991,70		35.991,70	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	591,07	100	790,00	100	846,00	100	902,00	100	958,00	100	958,00	Disparpora
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	384,58	100	6.214,90	100	2.825,00	100	2.930,00	100	3.035,00	100	3.035,00	Disparpora
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		20	18,20	40	33,00	60	36,00	80	42,00	100	48,00	100	48,00	Disparpora
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	20	20	174,60	40	290,00	60	295,00	80	350,00	100	415,00	100	415,00	Disparpora
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	97,35	100	80,00	100	90,00	100	100,00	100	110,00	100	110,00	Disparpora
6	Program Pengembangan Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	10	0	0,00	40	4.035,00	60	4.930,00	80	6.045,00	100	7.180,00	100	7.180,00	Disparpora
7	Program Destinasi Wisata	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	10	0	0,00	40	21.420,70	60	22.335,70	80	23.115,70	100	24.245,70	100	24.245,70	Disparpora
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	10	20	816,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disparpora
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	10	20	4.356,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disparpora
10	Program pengembangan Kemitraan	Persentase jumlah lembaga mitra pariwisata	%		20	368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disparpora
3.03.	Pertanian					10.243,35		29.707,83		21.635,08		21.856,26		22.949,99		22.949,99	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	702,59	100	844,08	100	887,00	100	941,50	100	1.001,50	100	1.001,50	Dispartan

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	326,50	100	8.808,00	100	491,75	100	564,00	100	571,00	100	571,00	Dispertan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		1	2,00	5	245,00	10	155,00	20	160,00	25	165,00	25	165,00	Dispertan	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	58,00	100	1.275,00	100	865,00	100	240,00	100	325,00	100	325,00	Dispertan	
5	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	Produksi Tanaman Pangan :				100,00		3.580,00		3.638,00		3.686,00		3.734,00		3.734,00	Dispertan	
		Padi	ton	342.558,00	342.901,00		343.072,00		343.244		343.449		343.724		343.724			
		Jagung	ton	21.611,00	21.870,00		22.133,00		22.398		22.667		22.939		22.939			
		Kedelai	ton	1.586,00	1.602,00		1.618,00		1.634		1.650		1.667		1.667			
		Kacang Tanah	ton	2.077,00	2.119,00		2.161,00		2.204		2.248		2.293		2.293			
		Ubi Kayu	ton	76.639,00	76.792,00		76.946,00		77.100		77.254		77.408		77.408			
		Ubi Jalar	ton	28.370,00	28.654,00		28.940,00		29.230		29.522		29.817		29.817			
		Produksi Tanaman Hortikultura :																
		Bawang Putih	ton	16.799,00	16.947,00		17.116,00		17.287		17.460		17.635		17.635			17.635
		Cabai Besar	ton	27.229,00	27.501,00		27.776,00		28.054		28.335		28.618		28.618			28.618
Cabai Rawit	ton	8.465,00	8.550,00		8.635,00		8.721		8.809		8.897		8.897		8.897			
6	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan :				100,00		2.660,00		2.700,00		2.740,00		2.780,00		2.780,00	Dispertan	
		Kopi	ton	6.220,00	6.449,00		6.728,00		6.929,00		7.068,00		7.139,00		7.139,00			
		Cengkeh	ton	118.462,00	119.647,00		120.604,00		121.327,00		121.813,00		122.056,00		122.056,00			
		Kakao	ton	21.440,00	22.512,00		23.412,00		24.115,00		24.597,00		24.843,00		24.843,00			
		Kelapa dalam	ton	927,26	973,63		1.012,57		1.042,95		1.063,81		1.074,45		1.074,45			
		Kelapa Hibrida	ton		0,00		0,00		0,00		40.050,00		41.011,00		41.011,00			41.011,00

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Tembakau	ton	562,02	584,50		596,19		614,00		618,99		625,18		625,18			
		Tebu	ton	5.059,04	5.109,63		5.150,51		5.181,00		5.202,14		5.207,34		5.207,34			
7	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian					0,00		7.197,65		6.997,16		7.130,01		7.464,01		7.464,01	Dispertan	
		Persentase sarana prasarana pertanian sesuai kebutuhan	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Lahan Pertanian Terdampak Bencana yang ditangani	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase UPJA berkembang	%		40		45		55		60		70		70			
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan					0,00		702,38		625,88		650,00		650,00		650,00	Dispertan	
		Cakupan Binaan Kelompok Tani	%		50		55		60		70		80		80			
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%		40		60		70		80		90		90			
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					490,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dispertan, setda, karanganyar	
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%		40		438,20		0		0		0		0			
		Cakupan peningkatan kesejahteraan petani	%		100		50,00		0		0		0		0			
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		2,50		0		0		0		0			
10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%		40		100,00		0		0,00		0		0,00		0,00	Dispertan
11	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Prosentase UPJA yang berkembang	%		100		164,60		0		0,00		0		0,00		0,00	Dispertan
12	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tanaman Pangan Padi	ton	329.885	307.533		6.632,83		0		0,00		0		0,00		0,00	Dispertan

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
13	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%		50	165,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dispartan
15	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					96,10		2.050,00		2.755,00		3.030,50		3.333,55		3.333,55	Disnakan
		Angka kesakitan ternak besar	%	12,8	12	11	10	9	8	8							
		Angka kesakitan ternak kecil	%	21,4	20,4	19,4	18,4	17,4	16,4	16,4							
		Angka kesakitan unggas	%	25	23	21	19	17	15	15							
		Angka kesakitan anaka ternak	%	25	23	21	19	17	15	15							
	Prosentase produk peternakan ASUH	%	92,5	92,5	93,2	93,5	93,8	94,1	94,1								
16	Program peningkatan produksi hasil peternakan					814,24		2.345,72		2.520,30		2.714,25		2.925,94		2.925,94	Disnakan
		Capaian kelompok peternak yang dibina	%	65	70	75	80	85	90	90							
		Cakupan pengusaha ternak yang dibina	%	60	65	70	75	80	85	85							
		Ketersediaan bibit ternak besar	dosis	8.800	9.900	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000							
		Prosentase produk peternakan yang dipromosikan	%	50	50	63	75	87	100	100							
3.04.	Kehutanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral					675,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	%		100	675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
3.06.	Perdagangan					9.325,97		39.340,94		47.612,41		43.817,16		17.237,31		17.237,31	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	1.719,16	100	1.836,08	0	2.019,69	0	2.221,66	0	2.443,82	0	2.443,82	Disdagnakerkop

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	309,84	100	77,00	0	84,70	0	93,17	0	102,49	0	102,49	Disdagnakerkop
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	100,00	0	110,00	0	121,00	0	133,10	0	146,41	0	146,41	Disdagnakerkop
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	117,60	100	57,86	0	63,65	0	70,01	0	77,01	0	77,01	Disdagnakerkop
5	Program pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar					0,00		37.260,00		45.323,38		41.392,39		14.467,58		14.467,58	Disdagnakerkop
		Prosentase pemilik UTTP yang tertib niaga	%		0		0		25		26		27		27		
		Prosentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%		0		5,56		11,11		16,67		22,22		22,22		
		Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	38,89	0		42,87		45,02		47,27		49,63		49,63		
	PKL yang dibina dan di tata	%		0		36,58		37,31		38,06		38,82		38,82			
6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan					1.459,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Disdagnakerkop
		Persentase Pemilik UTTP yang Tertib Niaga		0	0		0		0		0		0		0		
		Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan		0	0		0		0		0		0		0		
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	38,89	40,83	5.234,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disdagnakerkop
8	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	PKL yang dibina dan di tata	%	36,93	35,86	385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disdagnakerkop
3.07.	Perindustrian					845,00		887,25		931,68		978,60		1.027,64		1.027,64	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	%	4,99	6,47	845,00	7,97	887,25	9,47	931,68	10,97	978,60	12,97	1.027,64	12,97	1.027,64	DPMPTSP
3.08.	Transmigrasi					50,00		150,00		175,00		200,00		225,00		225,00	
1	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Presentase Penempatan Transmigrasi	%		0	0,00	100,00	150,00	100,00	175,00	100,00	200,00	100,00	225,00	100,00	225,00	Disdagnakerkop
2	Program Transmigrasi Regional	Presentase Penempatan Transmigrasi	%		25	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Disdagnakerkop
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					145.825,61		156.497,28		189.425,35		209.502,64		199.197,27		199.197,27	
4.01.	Administrasi Pemerintahan					78.814,78		90.386,30		115.763,06		127.215,59		108.975,74		108.975,74	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	2.078,10	100	2.229,50	100	2.392,93	100	2.546,72	100	2.734,89	100	2.734,89	setda
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	1.760,89	100	2.930,53	100	3.223,58	100	3.545,94	100	3.900,54	100	3.900,54	setda
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		100	210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	715,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	475,40	100	210,00	100	228,70	100	251,57	100	276,73	100	276,73	setda
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%		0	0,00	100	1.237,50	100	1.361,25	100	1.497,38	100	1.647,11	100	1.647,11	setda

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	cakupan penataan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi permasalahan hukum	%		0	0,00	100	2.375,00	100	2.675,00	100	3.075,00	100	3.325,00	100	3.325,00	setda
8	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	cakupan penyelenggaraan pemerintah desa	%		0	0,00	100	2.870,18	100	1.645,00	100	2.585,00	100	1.505,00	100	1.505,00	setda
9	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%		0	0,00	100	1.157,86	100	1.273,65	100	1.401,01	100	1.541,11	100	1.541,11	setda
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Cakupan pelayanan kedinasan	%		0	0,00	100	5.797,89	100	6.374,90	100	6.948,23	100	7.590,55	100	7.590,55	setda
11	Program Penataan dan Penguatan Organisasi					0,00		1.520,00		1.725,00		1.926,50		2.134,65		2.134,65	setda
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya baik	%		0		65		70		75		80		80		
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya Baik	%		0		65		70		75		80		80		
		Persentase OPD yang Nilai IKM-nya baik	%		0		65		70		75		80		80		
		Indeks Kematangan Organisasi Daerah	indeks		0		30		32		34		36		36		
12	Program Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa	%		100	2.030,00	100	2.270,00	100	2.760,00	100	2.760,00	100	2.860,00	100	2.860,00	setda
13	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat	%		0	0,00	100	5.236,00	100	5.759,60	100	6.335,56	100	6.969,12	100	6.969,12	setda

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
14	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang pemuda olahraga	%		0	0,00	100	786,50	100	865,15	100	951,67	100	1.046,83	100	1.046,83	setda
15	Program Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	Cakupan perumusan kebijakan dan pengendalian sumber daya alam			0	0,00	100	505,00	100	562,50	100	620,00	100	677,50	100	677,50	setda
16	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Predikat Nilai EKPPD	nilai		0	0,00	100	3.200,00	100	31.140,00	100	3.300,00	100	4.430,20	100	4.430,20	setda
17	Program Koordinasi Perekonomian Daerah	cakupan koordinasi perekonomian daerah	%		0	0,00	100	2.580,00	100	2.700,00	100	2.920,00	100	9.140,00	100	9.140,00	setda
18	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%		100	911,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%		100	6.276,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
20	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	%			221,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Capaian penataan daerah otonomi baru	%		100	170,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur	%		100	34,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	setda
23	Program Penataan					1.858,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	dishub pkp,

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		5	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	diskominfo, setda, dinkes, disdikbud, disarpus
		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	46,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Cakupan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	%		100	1.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%		100	130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					1.469,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Diskominfo, bpbd, setda, tasikmadu, disdagnakerkop ukm
		Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	40	45		0		0		0		0		0		
		Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	25	30		0		0		0		0		0		
		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100		0		0		0		0		0		
		Cakupan pemanfaatan teknologi informasi			100		0		0		0		0		0		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100		0		0		0		0		0		
25	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					428,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	setda, ngargoyoso
		Cakupan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	%		100		0		0		0		0		0		
		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100		0		0		0		0		0		
26	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Dasa					33,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Tasikmadu, jumapolo, matesih
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100		0		0		0		0		0		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		100		0		0		0		0		0		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		100		0		0		0		0		0		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	3.491,00	100	3.831,85	100	4.145,50	100	4.497,25	100	5.094,10	100	5.094,10	setwan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	2.204,75	100	2.305,01	100	2.425,10	100	2.530,85	100	2.787,05	100	2.787,05	setwan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		100	247,08	100	284,27	100	329,50	100	375,65	100	475,70	100	475,70	setwan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	105,95	100	116,75	100	127,85	100	813,75	100	149,75	100	149,75	setwan
5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan	%		100	18.508,32	100	21.826,52	100	22.900,83	100	23.987,63	100	25.815,38	100	25.815,38	setwan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	260,85	100	297,47	100	326,20	100	355,09	100	384,21	100	384,21	Jatipuro
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	33,60	100	1.400,00	100	1.607,00	100	1.630,00	100	1.788,00	100	1.788,00	Jatipuro
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	10,00	100	15,00	100	20,00	100	25,00	100	25,00	Jatipuro
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	25,00	100	55,00	100	70,00	100	90,00	100	140,00	100	140,00	Jatipuro

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					380,60		437,50		492,50		32.000,00		549,25		549,25	Jatipuro	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		99		100		100		100		100			100
Persentase kehadiran musrenbang	%		0		98		99		99		99		99		99			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	163,89	100	183,86	100	193,76	100	197,16	100	201,86	100	201,86	Jatiyoso	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.189,00	100	2.113,60	100	65,10	100	70,10	100	70,10	100	70,10	Jatiyoso	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	3,50	100	3,50	100	3,50	Jatiyoso	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	19,69	100	15,00	100	16,00	100	17,50	100	38,50	100	38,50	Jatiyoso	
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		223,94		227,44		235,40		247,50		247,50	Jatiyoso	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		85		90		95		97		97		97	
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		85		90		95		97		97		97	
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		80		85		90		95		95		95	
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		80		85		90		95		95		95	Jatiyoso	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	99	0		99,2		99,5		99,6		99,7		99,7			
		Persentase kehadiran musrenbang	%	98	0		98,3		98,7		99,1		99,2		99,2			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	124,63	100	124,63	100	124,63	100	124,63	100	124,63	100	124,63	Jumantono	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.204,37	100	1.686,37	100	142,37	100	138,37	100	142,37	100	142,37	Jumantono	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	2,50	100	2,50	100	2,50	Jumantono	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	20,56	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	Jumantono	
						0,00		243,50		243,50		243,50		243,50		243,50		
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		90		90		90		90		90		Jumantono	
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		80		80		80		80		80		Jumantono	
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		80		80		80		80		80		Jumantono	
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		90		90		90		90		90		Jumantono	
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		90		90		90		90		90		Jumantono	
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		90		90		90		90		90		Jumantono	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	214,28	100	214,28	100	223,28	100	223,28	100	223,28	100	223,28	Jumapolo	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	140,15	100	140,15	100	146,00	100	146,00	100	146,00	100	146,00	Jumapolo	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	0,00	25	2,50	50	3,00	75	3,50	100	3,50	100	3,50	Jumapolo
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	55,00	100	35,00	100	37,00	100	38,00	100	40,00	100	40,00	Jumapolo
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		223,94		227,44		235,40		247,50		247,50	Jumapolo
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		91		92		93		94		94		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	200,12	100	220,13	100	242,15	100	266,36	100	293,00	100	293,00	Matesih
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.198,88	100	535,23	100	104,75	100	115,23	100	126,75	100	126,75	Matesih
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	33,00	100	29,30	100	31,73	100	34,80	100	57,53	100	57,53	Matesih
4	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		229,94		233,44		241,90		254,00		254,00	Matesih
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		91		92		93		94		94			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	571,21	100	202,04	100	208,64	100	214,24	100	220,84	100	220,84		Tawangmangu
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	62,20	100	26,48	100	27,48	100	28,48	100	29,48	100	29,48		Tawangmangu
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		100	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Tawangmangu
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	3,50	100	3,50	100	3,50		Tawangmangu
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	44,45	100	7,50	100	7,50	100	9,00	100	29,50	100	29,50		Tawangmangu
						0,00		391,00		406,00		418,00		492,50		492,50		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		100		100		100		100		100			
6	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah																	Tawangmangu

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	179,26	100	183,86	100	193,76	100	197,16	100	201,86	100	201,86	Ngargoyoso	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	33,60	100	33,60	100	35,10	100	35,10	100	35,10	100	35,10	Ngargoyoso	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	3,50	100	3,50	100	3,50	Ngargoyoso	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	25,00	100	17,50	100	18,50	100	20,00	100	41,00	100	41,00	Ngargoyoso	
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		229,94		233,44		241,90		254,00		254,00	Ngargoyoso	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100			100
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		91		92		93		94		94			94
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	1.819,47	100	2.002,70	100	2.141,52	100	2.350,33	100	2.640,95	100	2.640,95	Karanganyar	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	6.206,52	100	5.766,30	100	4.985,69	100	5.576,51	100	6.098,62	100	6.098,62	Karanganyar	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%		100	11,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Karanganyar	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	34,00	100	100,00	100	120,00	100	150,00	100	200,00	100	200,00	Karanganyar	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	30,00	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	25,00	Karanganyar
6	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		1.194,52		1.202,87		1.411,76		1.545,73		1.545,73	Karanganyar
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		91		92		94		94		94		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	211,44	100	218,04	100	225,64	100	232,24	100	239,84	100	239,84	Karangpandan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	28,48	100	320,48	100	106,48	100	107,48	100	110,48	100	110,48	Karangpandan
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	3,50	100	3,50	100	3,50	Karangpandan
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	15,50	100	17,50	100	21,00	100	21,00	100	22,00	100	22,00	Karangpandan
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		305,50		319,00		330,00		336,50		336,50	Karangpandan
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		100		100		100		100		100			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	208,63	100	231,00	100	254,10	100	233,72	100	255,35	100	255,35	Tasikmadu	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.100,42	100	831,06	100	150,86	100	178,90	100	174,79	100	174,79	Tasikmadu	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	25	30,00	50	33,00	75	36,30	100	39,93	100	39,93	Tasikmadu	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	42,00	100	27,60	100	30,36	100	33,40	100	36,74	100	36,74	Tasikmadu	
						0,00		273,86		295,75		330,32		364,56		364,56		
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	0		100		100		100		100		100		Tasikmadu	
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	0		100		100		100		100		100		Tasikmadu	
		Persentase wilayah tertib Perda	%	100	0		100		100		100		100		100		Tasikmadu	
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	0		100		100		100		100		100		Tasikmadu	
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	98	0		99,2		99,5		99,6		99,7		99,7		Tasikmadu	
		Persentase kehadiran musrenbang	%	97	0		98,3		98,7		99,1		99,2		99,2		Tasikmadu	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	171,00	100	176,30	100	183,50	100	186,00	100	194,25	100	194,25	Jaten	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	4.078,11	100	1.116,00	100	86,83	100	89,00	100	97,00	100	97,00	Jaten	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	3,00	100	3,50	100	4,00	100	4,00	Jaten
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	20,70	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	Jaten
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		219,40		227,90		232,40		238,50		238,50	Jaten
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		90		90		90		90		90		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		80		80		80		80		80		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		80		80		80		80		80		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		90		90		90		90		90		
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		90		90		90		90		90		
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		90		90		90		90		90		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	244,73	100	255,36	100	280,90	100	308,99	100	339,89	100	339,89	Colomadu
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	70,15	100	77,80	100	84,50	100	92,50	100	105,00	100	105,00	Colomadu
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	23,10	100	25,10	100	27,10	100	29,10	100	31,10	100	31,10	Colomadu
4	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		394,50		431,49		472,17		516,92		516,92	Colomadu
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		99		100		100		100		100			
		Pesentase kehadiran musrenbang	%		0		98		99		99		99		99			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	111,70	100	281,74	100	270,31	100	297,35	100	327,08	100	327,08	Gondangrejo	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	31,80	100	369,96	100	76,96	100	84,65	100	93,12	100	93,12	Gondangrejo	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	20,00	100	22,50	100	22,50	100	22,50	100	22,50	100	22,50	Gondangrejo	
						0,00		591,80		650,98		716,08		787,69		787,69		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100			
		Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		99,5		99,6		99,7		99,7		99,7			
		Pesentase kehadiran musrenbang	%		0		98,7		99,1		99,2		99,2		99,2			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	333,55	100	351,95	100	362,31	100	375,00	100	369,07	100	369,07	Mojogedang	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	123,00	100	127,00	100	129,00	100	130,00	100	135,00	100	135,00	Mojogedang	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	2,00	100	2,50	100	3,00	100	3,50	100	4,00	100	4,00	Mojogedang
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	15,50	100	13,50	100	14,00	100	145,00	100	39,00	100	39,00	Mojogedang
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		151,55		159,50		165,50		171,50		171,50	Mojogedang
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		99		100		100		100		100		
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		98		99		99		99		99		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	191,94	100	229,13	100	252,05	100	277,25	100	304,97	100	304,97	Kebakkramat
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	17,60	100	44,36	100	46,80	100	51,48	100	56,62	100	56,62	Kebakkramat
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	18,00	100	15,00	100	16,50	100	18,15	100	19,97	100	19,97	Kebakkramat
4	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		317,57		349,32		384,26		422,68		422,68	Kebakkramat
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100		
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		99		100		100		100		100			
		Pesentase kehadiran musrenbang	%		0		98		99		99		99		99			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	144,12	100	167,96	100	203,19	100	223,51	100	245,86	100	245,86	Kerjo	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	58,78	100	519,30	100	632,50	100	555,55	100	658,61	100	658,61	Kerjo	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	20,85	100	5,00	100	5,00	100	6,50	100	26,50	100	26,50	Kerjo	
						0,00		221,14		230,64		239,10		248,95		248,95		
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		100		100		100		100		100			
		Pesentase wilayah tertib Perda	%		0		100		100		100		100		100			
		Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		100		100		100		100		100			
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		100		100		100		100		100			
		Pesentase kehadiran musrenbang	%		0		91		92		93		94		94			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	196,77	100	209,86	100	222,85	100	238,83	100	254,32	100	254,32	Jenawi	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	66,05	100	88,40	100	86,00	100	101,60	100	98,20	100	98,20	Jenawi	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0,00	100	2,50	100	2,50	100	3,50	100	3,50	100	3,50	Jenawi	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	7,20	100	15,00	100	16,00	100	17,50	100	38,50	100	38,50	Jenawi	
5	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah					0,00		221,94		233,44		241,90		252,50		252,50	Jenawi	
		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%		0		85		85		85		85		85			85
		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%		0		85		85		85		85		85			85
		Persentase wilayah tertib Perda	%		0		85		85		85		85		85			85
		Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%		0		85		85		85		85		85			85
		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%		0		85		85		85		85		85			85
		Persentase kehadiran musrenbang	%		0		81		82		83		84		84			84
4.02.	Pengawasan					4.770,45		6.548,79		8.605,00		9.880,50		11.808,00		11.808,00		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	95	646,36	100	775,50	100	810,00	100	810,00	100	810,00	100	810,00	inspektorat	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	65,38	100	76,00	100	92,00	100	97,00	100	97,00	100	97,00	inspektorat	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	90	35,80	100	49,50	100	52,00	100	54,00	100	56,00	100	56,00	inspektorat	
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan					3.847,28		5.502,79		7.503,00		8.769,50		10.689,00		10.689,00	Inspektorat, diskominfo	
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil	%	12	10		8		7		6		5		5			

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	KDH	pemeriksaan																
		Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30	25		20		15		10		10				
		Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	94,75	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	40	48	60		76		80		100		100		100		
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	92	93		94		95		96		96		96		
		Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Hasil audit BPK	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	0		0		0		0		0		0		
5	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	40	43	79,27	45	133,00	48	133,00	51	133,00	51	136,00	51	136,00	Inspektorat	
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	9,91	100	12,00	100	15,00	100	17,00	100	20,00	100	20,00	Inspektorat	
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30	75,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Inspektorat	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	10,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Inspektorat
4.03.	Perencanaan					12.586,57		4.843,00		3.246,00		3.162,00		3.598,50		3.598,50	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	337,62	100	403,00	100	413,50	100	419,50	100	451,50	100	451,50	Baperlitbang
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	8.235,00	100	2.040,00	100	372,50	100	377,50	100	397,00	100	397,00	Baperlitbang
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	30,00	100	35,00	100	35,00	100	40,00	100	40,00	100	40,00	Baperlitbang
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	102,00	100	65,00	100	65,00	100	70,00	100	70,00	100	70,00	Baperlitbang
5	Program perencanaan pembangunan daerah					2.118,14		590,00		820,00		645,00		975,00		975,00	Baperlitbang, dispertan, jenawi, bkd
		Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	%		100		100		100		100		100		100		
		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100		0		0		0		0		0		
		Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah	%		100		0		0		0		0		0		
6	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	%		100	140,00	100	425,00	100	330,00	100	290,00	100	300,00	100	300,00	Baperlitbang
7	Program perencanaan sosial dan budaya	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	%		100	407,00	100	460,00	100	470,00	100	495,00	100	520,00	100	520,00	Baperlitbang
8	Program perencanaan					655,00		525,00		530,00		555,00		565,00		565,00	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
	prasarana wilayah dan sumber daya alam	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%		100		100		100		100		100		100		Baperlitbang, kesbangpol, dlh, dispertan, setda, disparpora	
		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	0		0		0		0		0		0		
		Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%		100	0		0		0		0		0		0		
		Cakupan perencanaan prasarana wilayah		100	0		0		0		0		0		0			
9	Program perencanaan pengembangan wilayah	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%		100	311,80	100	250,00	100	150,00	100	210,00	100	210,00	100	210,00	Baperlitbang	
10	Program pengembangan data/informasi					250,00		50,00		60,00		60,00		70,00		70,00	Baperlitbang, dpupr	
		Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi	%		100		100		100		100		100		100			100
		Persentase meningkatnya pengembangan data informasi	%	80	80	0		0		0		0		0		0		
4.04.	Keuangan					41.791,41		46.920,86		51.906,17		57.084,15		62.764,77		62.764,77		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	31.335,12	100	34.468,63	100	37.915,49	100	41.707,04	100	45.877,75	100	45.877,75	BKD	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	1.345,20	100	1.479,72	100	1.627,69	100	1.790,46	100	1.969,51	100	1.969,51	BKD	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	410,00	100	451,00	100	496,10	100	545,71	100	600,28	100	600,28	BKD	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	300,97	100	398,72	100	586,09	100	724,70	100	864,67	100	864,67	BKD	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)		
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					7.092,14		7.598,00		8.516,04		9.291,10		10.145,52		10.145,52	BKD, setda, dpupr	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%		100		100		100		100		100		100			100
		Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%		100		0		0		0		0		0			0
		Persentase meningkatnya pengembangan data keuangan	%	80	80		0		0		0		0		0		0	
6	Program Perencanaan Anggaran	Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah	%		0	350,00	100	1.275,85	100	1.390,94	100	1.515,03	100	1.649,03	100	1.649,03	BKD	
7	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%		0	0,00	100	1.248,94	100	1.373,82	100	1.510,10	100	1.658,01	100	1.658,01	BKD	
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%		100	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	BKD	
9	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota					947,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	BKD, setda	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%		100		0		0		0		0		0			0
		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	%		100		0		0		0		0		0			0
4.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					7.634,40		7.558,34		9.655,13		11.895,40		11.775,27		11.775,27		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	365,47	100,00	385,00	100	395,80	100	412,80	100	430,30	100	430,30	BKPSDM	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100	179,80	100,00	594,00	100	391,50	100	443,50	100	282,00	100	282,00	BKPSDM	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		100	4.988,57	100	150,00	100	180,00	100	180,00	100	180,00	100	180,00	BKPSDM, setda
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	95,58	100	76,00	100	80,00	100	83,50	100	88,50	100	88,50	BKPSDM
5	Program Peningkatan Informasi dan Pengembangan SDM					0,00		4.643,32		6.863,28		8.983,20		9.035,92		9.035,92	BKPSDM
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%		0		46,5		48,8		51,3		53,8		53,8		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%		0		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		
		Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD	%		0		25		50		75		100		100		100
6	Program Pengangkatan dan mutasi aparatur					0,00		1.264		1.246		1.405		1.339		1.339	BKPSDM
		Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%		0		90		94		97		98		98		
		Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat	%		0		100		100		100		100		100		100
7	Program Pembinaan Aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%		0	0,00	100	446,00	100	499,00	100	387,00	100	420,00	100	420,00	BKPSDM
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%		90	1.476,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	BKPSDM
9	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	42,20	44	528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	BKPSDM
4.06.	Penelitian dan Pengembangan					228,00		240,00		250,00		265,00		275,00		275,00	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		PD Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000.000)	
					Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	Pengembangan data dan informasi	%		100	228,00	100	240,00	100	250,00	100	265,00	100	275,00	100	275,00	Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang 2018, diolah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
 1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi : tingkat pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, PDRB ADHK dan PDRB ADHB.
 2. Fokus kesejahteraan sosial analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator indeks pembangunan manusia, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka.
- II. Aspek pelayanan umum terdiri dari:
 1. Fokus layanan urusan pemerintahan wajib analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.
 2. Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah.
- III. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama dalam bidang
 1. Fokus kemampuan ekonomi daerah analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.
 2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur.

3. Fokus iklim berinvestasi analisis kinerja atas iklim berinvestasi.

Pembagian indikator kunci yang menjadi indikator kinerja dalam mensukseskan keberhasilan visi - misi tertuang pada Tabel VIII.1 dan Tabel VIII.2. berikut.

Tabel VIII.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah

Indikator Utama Pemkab	Indikator Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Rasio konektivitas		rasio	29,16	29,33	30,00	30,33	30,67	31,33	31,33
	1) Penurunan Angka Kecelakaan	rasio	0,73	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,65
	2) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	62,28	62,31	62,41	62,49	62,53	62,66	62,66
	3) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	67,26
	4) Persentase kawasan kumuh	%	0,95	0,76	0,57	0,41	0,24	0,15	0,15
3. Tingkat Pertumbuhan ekonomi		%	5,48	5,69	5,8	5,9	6,01	6,12	6,12
4. Tingkat inflasi		%	3,15	3,10	3,10	3,05	3,00	2,95	2,95
5. PDRB Perkapita (Rp.000)		Rp.000	na	27.652	28.556	28.556	28.780	29.450	29.450
	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,01
	6) Skor Pola Pangan harapan	Skor	86	86,8	88	89	90	91	91
	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	3,33	4,24	4,75	5,1	5,25	5,5	5,5
	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,20	11,34	11,45	11,56	11,67	11,77	11,77
	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	45,89	46,47	46,59	47,14	47,25	47,36	47,36
	10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2,2
6. Tingkat Pengangguran Terbuka		%	3,17	3,05	2,86	2,68	2,46	2,31	2,31
	11) TPAK	%	70,36	70,60	70,96	71,44	72,04	72,76	72,76
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	75,54	75,64	75,74	75,84	75,94	76,04	76,04
	12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,67	13,7	13,72	13,74	13,77	13,82	13,82

Indikator Utama Pemkab	Indikator Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,55	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	9
	14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,31	77,32	77,57	77,82	78,37	78,82	78,82
8.	Indeks Desa Membangun (IDM)	indek	0,6416	0,6426	0,6436	0,6446	0,6456	0,6463	0,6463
	15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,650	0,650
	16) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,595	0,596	0,597	0,598	0,599	0,599	0,599
	17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,685	0,686	0,687	0,688	0,689	0,690	0,690
9.	Nilai Kabupaten Peduli HAM		79,41	79,41	79,41	79,41	79,41	79,51	79,51
	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	175	140	135	130	125	120	120
	19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	85	86	87	88	90	92	92
	20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	0	0	0	0	0	0	0
10.	Indeks Pembangunan Kebudayaan		76	77	78	79	80	80	80
	21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	87,63	87,7	88,1	88,5	90	90	90
	22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,00	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,75
11.	Prestasi Pemuda dan Olah Raga		10	20	20	30	40	50	50
	23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Medali	10	20	20	30	40	50	50
	24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Medali	10	20	20	30	40	50	50
12.	Angka kemiskinan	%	10,01	8,29 – 9,29	7,58-8,58	6,87-7,78	6,15-7,15	5,44-6,44	5,44-6,44
	25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	11,32	11,98	12,46	13,35	14,12	15,45	15,45
	26) Persentase Penanganan PMKS	%	1,15	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,50
13.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	indeks	96,70	97,00	97,20	97,25	97,30	97,35	97,35
	27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31	74,52	74,66	74,71	74,81	74,95	74,95

Indikator Utama Pemkab	Indikator Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28) Kabupaten Layak Anak	SKOR	732,11	742	752	762	770	780	780
14. Indeks Reformasi Birokrasi			na	60	65	70	75	80	80
	29) Indeks SPBE	Indeks	2,04	2,14	2,37	2,69	2,91	3,00	3,00
	30) Nilai SAKIP	nilai	62,38	63	65	70	75	80	80
	31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	76,67	78,67	80,67	82,67	84,67	86,67	86,67
	33) IKM Kabupaten	%	na	76,67	78,23	80,43	81,26	81,67	81,67
	34) Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
	35) Indeks Arsip	Indeks	67	75	79	81	83	85	85

Sumber : OPD, 2018

Sedangkan Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel VIII.2.

Tabel VIII.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,95	76,47	76,99	77,52	78,04	78,56	Baperlitbang
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	13,67	13,7	13,72	13,74	13,77	13,82	Baperlitbang
3.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,55	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	Baperlitbang
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,31	77,32	77,32	77,32	77,32	77,33	Baperlitbang
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,48	5,69	5,8	5,9	6,01	6,12	Baperlitbang
6.	PDRB per kapita	Juta/th/org	na	27.652	28.556	28.556	28.780	29.450	Baperlitbang

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Angka kemiskinan	%	10,01	9,51-9,65	9,01-9,28	8,51-8,92	8,01-8,56	7,51-8,19	Baperlitbang
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,00-3,10	3,00-3,10	2,90-3,10	2,90-3,10	2,80-3,00	Baperlitbang
9.	PDRB ADHK	Rp. 000	25.150.317,63	26.365.952	28.650.323	29.465.952	30.150.317	31.350.315	Baperlitbang
10.	PDRB ADHB	Rp. 000	34.287.872,56	37.180.396	38.687.872	39.380.396	40.587.670	41.987.850	Baperlitbang
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.I.	Layanan Urusan Wajib Dasar								
B.I.1	Pendidikan								
1.	Persentase Pemenuhan sarana prasarana PNF	%	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
2.	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	%	80	83	86	88	90	90	DISDIKBUD
3.	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%	80	83	86	88	90	90	DISDIKBUD
4.	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan	%	79	80	81	82	83	83	DISDIKBUD
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	115	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	102,25	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95	DISDIKBUD
8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	71,5	73	74	75	76	77	DISDIKBUD
9.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	DISDIKBUD
10.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	DISDIKBUD
11.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	77	78	79	79,5	80	80	DISDIKBUD
12.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	77,5	79	80	81	82	82	DISDIKBUD
B.I.2	Kesehatan								
1.	Cakupan Fasilitas pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	15	25	30	35	40	40	DINKES
2.	Cakupan Fasilitas pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	15	25	30	35	40	40	DINKES
3.	Nilai IKS Kabupaten	%	0,25	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8	DINKES
4.	Cakupan Ibu resiko tinggi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
5.	Persentase komplikasi kebidanan	%	90	91	92	93	94	94	DINKES
6.	Angka kesakitan bayi	%	70	69	68	67	65	65	DINKES

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Angka kesakitan lansia	%	50	49	48	47	46	46	DINKES
8	Angka kesakitan anak balita	%	50	49	48	47	46	46	DINKES
9	Persentase kadarzi	%	83	84	85	85	85	85	DINKES
10	Persentase stunting	%	<25	<24	<23	<22	<21	85	DINKES
11	Persentase Desa STBM	%	50	55	56	57	58	58	DINKES
12	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	90	90	90	90	90	90	DINKES
13	Persentase Desa siaga aktif mandiri	desa	21	25	29	30	30	30	DINKES
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	25	30	35	40	40	40	DINKES
15	Prevalensi HIV	<0,5 per 1000 pddk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	DINKES
16	Persentase Success rate (SR) TBC	%	90	90	90	90	90	90	DINKES
17	AFP Rate	3,5 per 100.000 pddk	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	DINKES
17	Discarded Campak	2,33 per 100.000 pddk	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	DINKES
B.I.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.	Persentase panjang jalan kabupatendalam kondisi baik	%	72	73	74	75	75	75	DPUPR
2.	Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	22	25	35	45	50	53	DPUPR
3.	Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	22	25	35	45	50	53	DPUPR
4.	Persentase Meningkatnya pelayanan pembangunan	%	80						DPUPR
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67	70	73	75	77	77	DPUPR
6.	Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah	%	80	83	85	86	88	88	DPUPR
7.	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	-	80	81	82	83	83	DPUPR
B.I.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1.	Persentase penanganan lingkungan pemukiman kumuh	%	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	DISHUBPKP
2.	Rasio tempat pemakan umum per satuan penduduk	rasio	859,30	860,00	861,00	862,00	863,00	864,00	DISHUBPKP
3.	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	%	na	5	6	7	8	9	DISHUBPKP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Persentase PJU dalam kondisi baik	%	na	70	-	-	-	-	DISHUBPKP
B.I.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
2.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
4.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	-	91	92	93	94	95	BPBD
5.	Persentase penyelesaian masalah Konflik di Masyarakat	%	90	90	-	-	-	-	KESBANGPOL
6.	Persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara	%	90	55	-	-	-	-	KESBANGPOL
7.	Persentase cakupan wilayah kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	90	55	-	-	-	-	KESBANGPOL, KECAMATAN
8.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	78	59	-	-	-	-	KESBANGPOL
9.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	-	-	55	55	60	60	KESBANGPOL
10.	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%	-	-	55	55	60	60	KESBANGPOL
11.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan bedemokrasi	%	-	-	55	55	60	60	KESBANGPOL
12.	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	-	-	-	-	KECAMATAN
13.	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakkan perda	%	80	81	82	83	84	85	SATPOL PP
14.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
15.	Rasio Linmas terhadap jumlah penduduk	%	4	4	4	4	4	4	SATPOL PP
16.	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	1	1	1	1	1	1	SATPOL PP
17.	Jumlah Satlakar (Satuan relawan kebakaran / Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk	%	-	-	40	40	40	40	SATPOL PP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.6	Sosial								
1.	Persentase KK Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	DINSOS
2.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
3	Meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
4.	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
5.	Persentase pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial, panti asuhan, organisasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
6.	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
7.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	93,52	94,64	95,76	96,88	98,00	98,00	DINSOS
6.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	DINSOS
7.	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami kesejahteraan sosial	%	-	-	100	100	100	100	DINSOS
B.II	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
B.II.1	Tenaga Kerja								
1.	Persentase cslon tenaga kerja yang dilatih	%	78,86	79,18	79,82	80,46	81,10	81,75	DISDAGNA KERKOPUKM
2.	Persentase Calon tenaga kerja yang diterima kerja	%	84,71	85,34	85,98	86,63	87,28	87,93	DISDAGNA KERKOPUKM
3.	Persentase perselisihan hubungan industrial mediasi	%	100	100	100	100	100	100	DISDAGNA KERKOPUKM
B.II.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10	10	10	10	10	10	DP3PPKB, BKPSDM
2.	Persentase kursi yang diduduki perempuan di	Orang	9	9	9	9	9	9	DP3PPKB,

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DPR								SETWAN
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Per 100.000 org	8,44	8,37	8,29	8,22	8,15	8,07	DP3PPKB
4.	Persentase peningkatan kualitas perlindungan perempuan	%	100	100	-	-	-	-	KECAMATAN
B.II.3	Pangan								
1.	Ketersediaan pangan utama	ton	489.260,24	535.974,98	533.004,58	529.440,69	526.356,33	524.924,45	DISPERTAN
2.	Ketersediaan energi perkapita	Kal/kapita	1.809,0	1.810	1.859	1.907	1.956	2.004	DISPERTAN
3.	Ketersediaan protein perkapita	Kal/kapita	57,59	58	59	59	59	59	DISPERTAN
B.II.4	Pertanahan								BKD, SETDA
1.	Persentase luas lahan pemerintah bersertifikat	%	5	5	6	7	8	9	
B.II.5	Lingkungan Hidup								
1.	Persentase penanganan sampah	%	47	53	59	71	76	76	DLH
2.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	61	62	-	-	-	-	DLH
3.	Persentase cakupan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan	%	32,44	33,44	34,44	35,44	37	39	DISHUBPKP
4.	Persentase terjaganya kelestarian sumberdaya alam	%	75	80	-	-	-	39	DLH
5.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	parameter	12	14	16	18	20	20	DLH
6.	Persentase peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	%	60	60	-	-	-	-	DLH
7.	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	-	75	80	85	90	90	DLH
8.	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	-	80	80	80	80	80	DLH
B.II.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1.	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	71,33	74,25	75,83	77,50	79,50	81,33	DISDUKCAPIL
2.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	77	80	81	82	83	83	DISDUKCAPIL
3.	Cakupan penerbitan KTP elektronik	%	95	95,5	96	96,5	97	98	DISDUKCAPIL
4.	Cakupan penerbitan Akte kelahiran penduduk usia anak	%	90,1	91	92	93	94	95	DISDUKCAPIL
5.	Cakupan penerbitan Akte Kematian	%	38,5	50	55	60	65	70	DISDUKCAPIL

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Cakupan penerbitan KIA	%	13,3	17,5	20	22,5	27	30	DISDUKCAPIL
7.	Cakupan penerbitan Validasi Data base penduduk	%	87	87,5	88	89	90	91	DISDUKCAPIL
B.II.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
1	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	DISPERMAS DES
2	Persentase Desa dan Kelurahan dalam kategori berkembang	%	3	3	3	3	3	3	DISPERMAS DES
3	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat (LEM) aktif	%	58,78	60	62	64	65	66	DISPERMAS DES
4	Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	35	35	65	80	90	100	DISPERMAS DES
5	Tingkat pembentukan kawasan perdesaan	%	10	10	40	40	80	100	DISPERMAS DES
6	Persentase keswadayaan masyarakat untuk pembangunan tingkat desa	%	-	10	10,5	11	11,5	12	DISPERMAS DES
7	Persentase Aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	-	-	-	-	KECAMATAN
B.II.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera								
1.	Persentase peningkatan peserta KB MKJP	%	6	6,5	7	7,5	8	9	DP3PPKB
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	73,60	75,0	75,10	75,25	75,50	76,00	DP3APPKB
2.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera)	%	22,14	21,64	21,14	20,64	20,14	19,64	DP3APPKB
B.II.9	Perhubungan								
1.	Persentase terminal Tipe C sesuai standar	%	10	10	20	30	40	50	DISHUBPKP
2.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	55	65	71	77	83	85	DISHUBPKP
3.	Persentase capaian PAD dari parkir tepi jalan kab	%	125	134	141	148	156	163	DISHUBPKP
4.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	2.050.000	2.060.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000	2.150.000	DISHUBPKP
5.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40	59	62	64	67	70	DISHUBPKP
6.	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	na	1	1	2	2	3	DISHUBPKP
B.II.10	Komunikasi dan Informatika								
1.	Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	-	78,4	78,5	78,6	78,7	78,8	DISKOMINFO
2.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate	%	61,9	69,08	78,57	85,71	92,86	100	DISKOMINFO
3.	Persentase KIM Aktif	%	38,29	47,06	58,82	76,47	88,24	100	DISKOMINFO
4.	Persentase Media Massa yang bekerjasama dengan pemkab	%	55	55	60	60	60	60	DISKOMINFO
5.	Persentase Layanan Pemerintah yang berbasis	%	40	45	50	60	70	85	DISKOMINFO

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	elektronik								
6.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	25	30	35	40	45	50	DISKOMINFO
7.	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	-	99	-	-	-	-	BPBD
B.II.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1.	Persentase Koperasi Aktif								
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	unit	14.338	15.266	16.483	18.044	20.023	22.511	
B.II.12	Penanaman Modal								
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	9	10	11	12	13	14	DPMPPTSP
2.	Persentase nilai investasi	Rp. (trilyun)	17,22	19,285	21,213	23,163	25,203	27,034	DPMPPTSP
3.	Persentase pelayanan perijinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	100	DPMPPTSP
4.	Persentase pelayanan perijinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	100	DPMPPTSP
5.	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	%	4,99	6,47	7,97	9,47	10,97	12,97	DPMPPTSP
6.	Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi di wilayah	%	100	100	-	-	-	-	KECAMATAN
B.II.13	Kepemudaan dan Olah Raga								
1.	Persentase Meningkatnya Prestasi Pemuda	%	20	20	40	60	80	100	DISPARPORA
2.	Persentase cabang Olah Raga Yang Terbina	%	20	20	40	60	80	100	DISPARPORA
2.	Persentase Sarana Olah Raga Yang Memadai	%	20	20	40	60	80	100	DISPARPORA
B.II.14	Statistik								
1	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	%	82	85	87	87,5	88	88,5	
B.II.15	Persandian								
1.	Persentase perangkat daerah yang sudah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	10	15	20	25	30	30	
B.II.16	Kebudayaan								
1.	Persentase pelestarian seni dan budaya	%	83	84	85	86	87	87	DISDIKBUD
2.	Persentase pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	%	80	81	82	83	84	84	DISDIKBUD
3.	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	75	77	78	79	82	82	DISDIKBUD
4.	Persentase kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	%	80	81	82	83	84	84	DISDIKBUD
B.II.17	Perpustakaan								
1.	Persentase perpustakaan aktif	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS
2.	Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebutuhan								
3.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS
3.	Persentase sarana prasarana perpustakaan sesuai stndar	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS
B.II.18	Kearsipan								
1.	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS
2.	Cakupan arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	100	100	100	100	100	100	DISARPUS
B.III	Layanan Urusan Pilihan								
B.III.1	Kelautan dan Perikanan								
1.	Produksi Benih Ikan	Ekor	38.040.623	38.801.434	39.577.463	40.369.012	41.176.392	41.999.920-	DISNAKAN
2.	Persentase produksi perikanan yang dipromosikan	%	50	50	62,25	75	87,25	100	DISNAKAN
3.	Persentase pembudidaya yang dibina	%	-	-	30	45	60	75	DISNAKAN
4.	Cakupan perairan umum yang direstocking	%	5	5	10	15	20	25	DISNAKAN
5.	Angka Kesakitan ternak besar	%	12,80	12	11	10	9	8	DISNAKAN
6.	Angka Kesakitan ternak kecil	%	21,40	20,40	19,40	18,40	17,40	16,40	DISNAKAN
7.	Angka Kesakitan Unggas	%	25	23	21	19	17	15	DISNAKAN
8.	Angka Kesakitan Aneka Ternak	%	25	23	21	19	17	15	DISNAKAN
9.	Persentase produksi peternakan ASUH	%	92,50	92,90	93,20	93,50	93,80	94,10	DISNAKAN
10.	Cakupan kelompok peternak yang dibina	%	65	70	75	80	85	90	DISNAKAN
11.	Cakupan pengusaha ternak yang dibina	%	60	65	70	75	80	85	DISNAKAN
12.	Ketersediaan bibit ternak besar	dosis	8.800	9.900	11.000	12.000	13.000	14.000	DISNAKAN
B.III.2	Pariwisata								
1.	Peresentase kenaikan Kunjungan wisatawan	%	20	40	60	80	100	100	DISPARPOR
2.	Peresentase jumlah lembaga mitra pariwisata	%	20	-	-	-	-	-	DISPARPOR
3.	Peresentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	20	40	60	80	100	100	DISPARPOR
3.	Peresentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	20	40	60	80	100	100	DISPARPOR
B.III.3	Pertanian								
1.	Produksi tanaman pangan								
	• Padi	ton	342.558	342.901	343.072	343.244	343.449	343.724	DISPERTAN
	• Jagung	ton	21.611	21.870	22.133	22.398	22.667	22.939	DISPERTAN
	• Kedelai	ton	1.586	1.602	1.618	1.634	1.650	1.667	DISPERTAN
	• Kacang tanah	ton	2.077	2.119	2.161	2.204	2.248	2.293	DISPERTAN

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• Ubi kayu	ton	76.639	76.792	76.946	77.100	77.254	77.408	DISPERTAN
	• Ubi Jalar	ton	28.370	28.654	28.940	29.230	29.522	29.817	DISPERTAN
	• Bawang putih	ton	16.799	16.947	17.116	17.287	17.460	17.635	DISPERTAN
	• Cabai besar	ton	27.229	27.501	27.776	28.054	28.335	28.618	DISPERTAN
	• Cabai rawit	ton	8.465	8.550	8.635	8.721	8.809	8.897	DISPERTAN
2.	Produksi tanaman perkebunan								
	• Kopi	ton	6,220	6,429	6,728	6,929	7,068	7,139	DISPERTAN
	• Cengkeh	ton	118,462	119,647	120,604	121,327	121,813	122,056	DISPERTAN
	• Kakao	ton	21,440	22,512	23,412	24,115	24,597	24,843	DISPERTAN
	• Kelapa Dalam	ton	927,264	973,627	1.012,572	1.042,949	1.063,808	1.074,447	DISPERTAN
	• Kelapa Hibrida	ton	-	-	-	-	40,050	41,011	DISPERTAN
	• Tembakau	ton	562,050	584,501	596,191	614,077	618,989	625,179	DISPERTAN
	• Tebu	ton	5.059,040	5.109,630	5.150,507	5.181,410	5.202,136	5.207,338	DISPERTAN
3.	Persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	DISPERTAN
4.	Persentase lahan pertanian terdampak bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	DISPERTAN
5.	Persentase UPJA berkembang	%	na	40	45	50	60	70	DISPERTAN
6.	Cakupan binaan kelompok tani	%	na	50	55	60	70	80	DISPERTAN
7.	Persentase lembaga keuangan mikro yang berkembang	%	30	40	60	70	80	90	DISPERTAN
8.	Persentase sertifikasi pangan segar	%	na	2	4	5	6	7	DISPERTAN
B.III.4	Kehutanan								
	-								
B.III.5	Energi dan Sumber Daya Mineral								
1.	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	%	100	100	-	-	-	-	SETDA
B.III.6	Perdagangan								
1.	Persentase Pemilik UTTP yang tertib siaga	%	-	50	-	-	-	-	DISDAGNA KERKOP UKM
2.	Persentase Sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	-	5,0	5,56	11,11	16,67	22,22	DISDAGNA KERKOP UKM
3.	Persentase pasar rakyat memenuhi kriteria pasar sehat	%	38,89	40,83	42,87	45,02	47,27	49,63	DISDAGNA KERKOP UKM
4.	Persentase PKL yang dibina dan ditata	%	36,93	36,58	36,93	37,31	38,06	38,82	DISDAGNA KERKOP UKM
5.	Persentase PKL yang dibina dan ditata	%	36,93	35,86	-	-	-	-	DISDAGNA KERKOP UKM

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.III.7	Perindustrian								
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	50	50	55	60	70	80	DPMPSTSP
B.III.8	Transmigrasi								
1.	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	DISDAGNA KERKOP UKM
B.IV.	Penunjang Urusan								
B.IV.1	Administrasi Pemerintahan								
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantora	%	90	92	92	93	95	95	Semua OPD
2.	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	%	90	92	92	93	95	95	Semua OPD
3.	Cakupan pelayanan peningkatan disiplin aparaturnya	%	94	96	97	98	98	98	Semua OPD
4.	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturnya	%	94	96	97	98	98	98	Semua OPD
5.	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	91	92	93	94	94	94	Semua OPD
6.	Cakupan Persentase OPD yang nilai PMPRB-nya baik	%	-	60	65	70	75	80	SETDA
7.	Cakupan Persentase OPD yang nilai SAKIP-nya baik	%	-	63	65	70	75	80	SETDA
8.	Cakupan Persentase OPD yang nilai IKM-nya baik	%	-	60	65	70	75	80	SETDA
9.	Indeks Kematangan organisasi daerah	%	-	30	32	34	36	38	SETDA
10.	Predikat nilai EKPPD	klas	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	SETDA
11.	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
12.	Cakupan penataan peranturan perundang-undangan dan fasilitasi permasalahan hukum	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
13.	Cakupan koordinasi perekonomian daerah	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
14.	Cakupan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
15.	Cakupan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang pemuda olah raga	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
16.	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
17.	Cakupan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
18.	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa	%	-	100	100	100	100	100	SETDA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Cakupan pelayanan kedinasan	%	-	100	100	100	100	100	SETDA
20.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
21.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
22.	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
23.	Persentase sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
24.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
25.	Persentase kehadiran dalam Musrenbang	%	-	91	92	93	94	94	Kecamatan
26.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	SETWAN
27.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	SETWAN
28.	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	SETWAN
B.IV.2	Pengawasan								
1.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	12	10	8	7	6	5	INSPEKTORAT
2.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30	25	20	15	10	INSPEKTORAT
3.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	94,75	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
4.	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	40	48	60	76	80	100	INSPEKTORAT
5.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	92	93	94	95	95	INSPEKTORAT
6.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
7.	Hasil audit BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTORAT
8.	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	40	43	45	48	51	51	INSPEKTORAT
9.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
B.IV.3	Perencanaan Pembangunan								
1.	Capaian program perencanaan pembangunan daerah	%	90	90,5	91	91,5	92	92	BAPERLITBANG
2.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang ekonomi	%	90	90,5	91	91,5	92	92	BAPERLITBANG
3.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang sosial budaya	%	90	90,5	91	91,5	92	92	BAPERLITBANG
4.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang prasarana wilayah	%	90	90,5	91	91,5	92	92	BAPERLITBANG
5.	Capaian program yang memenuhi target	%	90	90,5	91	91,5	92	92	BAPERLITBANG

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Tahun Ke-					OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	indikator bidang pengembangan wilayah								
6.	Cakupan pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	BAPERLITBANG
B.IV.4	Keuangan								
1.	Persentase Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah (OPD)	%	100	100	100	100	100	100	BKD
2.	Persentase Asset Daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	BKD
3.	Persentase ketepatan penyusunan anggaran	%	100	100	100	100	100	100	BKD
B.IV.5	Kepegawaian								
1.	Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD	%	-	-	25	50	75	100	BKPSDM
2.	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur	%	-	90	-	-	-	-	BKPSDM
3.	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	-	-	90	94	97	98	BKPSDM
4.	Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat	%	-	-	100	100	100	100	BKPSDM
5.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	-	-	100	100	100	100	BKPSDM
B.IV.6	Pendidikan dan Pelatihan								
1.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	42,2	44,3	46,5	48,8	51,3	53,8	BKPSDM
2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	BKPSDM
B.IV.7	Penelitian dan Pengembangan								
1.	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	100	100	BAPERLITBANG
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Pengeluaran Perkapita	Juta/th/org	11,32	11,98	12,46	13,35	14,12	15,45	BAPERLITBANG
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	na	60	62	65	67	70	INSPEKTORAT, SETDA
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,04	2,14	2,37	2,69	2,91	3,00	SETDA
4.	Angka kriminalitas	%	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	SATPOL
5.	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi	%	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2	DPMPSTP
6.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	100	100	100	100	100	100	DPUPR
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	DLH
8.	Indeks Ketahanan Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai	na	3,52	3,54	3,56	3,58	3,58	BPBD

Sumber : OPD, 2018

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, RPJMD disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional (RPJM Nasional) maupun daerah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023) dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan rencana tahunan melalui penyusunan dokumen RKPD untuk setiap tahun anggaran. Selain itu dokumen RPJMD dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian target / indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memerlukan kerja keras dan dukungan seluruh para pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, semangat gotong royong dan berjuang, harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan cita-cita ***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”***.

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO